Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai

pesona mentawai 2024

#bangga melayani bangsa



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN 2025

Kabupaten Kepulauan Mentawai



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2025.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimksud pada ayat (1) merupakan pedoman:
   a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
   b. penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS; dan
   c. penyusunan Rencana APBD Tahun 2025.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika meliputi:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
   f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemeritahan Daerah; dan
   g. bab VII memuat penutup.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025; dan
    c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 setiap triwulan tahun berkenaan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati.

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2025; dan/atau
    b. keadaaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2025.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah ditetapkan.
(3) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
    a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    b. target sasaran pembangunan Daerah;
    c. prioritas pembangunan Daerah;

d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(4) Tata cara penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024 NOMOR 9

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan pertolongan-Nya penyusunan RKPD Tahun 2025 dapat disusun.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai tindaklanjut pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 ini sangat penting, mengingat:

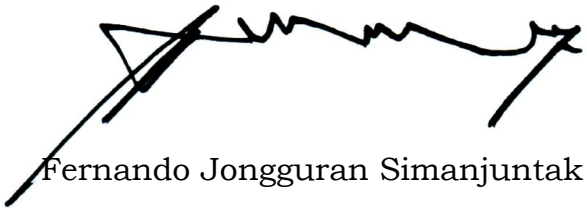
1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan nasional sejak tahun 2023 dan diakselerasi pada tahun 2024/2025. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebijakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Selaras dengan itu, perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 tumbuh positif pada angka 4,04 persen meskipun lebih rendah dari tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebijakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, seiring dengan itu Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Mentawai pada tahun 2025 fokus pada pembangunan ekonomi daerah yang terintegrasi berbasis maritim untuk meningkatkan nilai tambah yang didukung dengan Pembangunan

sumber daya ekonomi baik infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia *re-skilling/up-skilling*, kelembagaan, penguatan pasar, manajemen rantai pasok, dan penguatan investasi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Instansi Vertikal, jajaran perangkat OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, masyarakat dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Mentawai.

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai



Fernando Jongguran Simanjuntak

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 09 TAHUN 2024
TANGGAL 08 JULI 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar xiii

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang.....I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.5
1.3 Hubungan Antar Dokumen I.7
1.4 Maksud dan Tujuan.....I.9
1.4.1 Maksud I.9
1.4.2 Tujuan I.9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I.10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....II.1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis.....II.1
2.1.1.1 Aspek Geografis.....II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....II.8
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana II.22
2.1.1.4 Aspek Demografi II.28
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.34
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..II.35
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....II.45
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....II.53
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II.54
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.55
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.92
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.....II.119
2.1.3.4 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan II.130
2.1.3.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II.139
2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum II.140

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II.142
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.142
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II.144
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II.147
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia..... II.148
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II.150
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah..... II.327
2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II.327
2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.327
2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.332
2.3.1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan II.341
2.3.1.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Penunjang II.344
2.3.2 Evaluasi terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs 2023 ..... II.346
2.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II.367
2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah II.374
2.4.1 Pembangunan Manusia yang Holistik..... II.375
2.4.2 Hilirisasi Komoditi Sektor Primer II.378
2.4.3 Pengembangan Pariwisata Mentawai II.378
2.4.4 Aksesibilitas..... II.379
2.4.5 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik II.380

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..... III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.2
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025 ..... III.2
3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional III.2
3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat III.11
3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah III.16
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 ..... III.20
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III.21
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah III.23
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah..... III.29

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah.....III.36

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV.1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025. .....IV.2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025..IV.4
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025.IV.10
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 .....IV.14
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025. .....IV.14
4.2.2. Prioritas Pembangunan Propvinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....IV.71
4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025. .....IV.83

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V.1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025.....V.1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....VI.1

BAB VII PENUTUP..... VII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023 ..... II.3
Tabel 2.2 Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023..... II.4
Tabel 2.3 Luasan Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai II.4
Tabel 2.4 Kontribusi PDRB ADHB (%) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023..... II.9
Tabel 2.5 Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023..... II.10
Tabel 2.6 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai II.23
Tabel 2.7 Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023 ..... II.29
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023 ..... II.30
Tabel 2.9 Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023 ..... II.34
Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.39
Tabel 2.11 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023..... II.43
Tabel 2.12 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.53
Tabel 2.13 Perkembangan Kepemudaaan dan Keolahragaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.54
Tabel 2.14 Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2023 ..... II.58
Tabel 2.15 Angka Kesakitan Menurut Karakteristik (Persen), 2023 ..... II.65
Tabel 2.16 Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Karakteristik, 2023 ..... II.66
Tabel 2.17 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi (Persen), 2023 ..... II.68
Tabel 2.18 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Merokok dan Rata-Rata Batang Rokok yang dihisap per Minggu (Persen), 2023 ..... II.69
Tabel 2.19 Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022..... II.70
Tabel 2.20 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023..... II.74

Tabel 2.21 Jumlah Layanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.75
Tabel 2.22 Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.77
Tabel 2.23 Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2023 ..... II.78
Tabel 2.24 Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.81
Tabel 2.25 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023 ..... II.86
Tabel 2.26 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.87
Tabel 2.27 Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.89
Tabel 2.28 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.92
Tabel 2.29 Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.93
Tabel 2.30 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.94
Tabel 2.31 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 20198-2023 ..... II.96
Tabel 2.32 Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2022 ..... II.98
Tabel 2.33 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.99
Tabel 2.34 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.100
Tabel 2.35 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019-2023 .. II.102
Tabel 2.36 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.103
Tabel 2.37 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.104
Tabel 2.38 Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyebrangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023 ..... II.105
Tabel 2.39 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.107
Tabel 2.40 Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 .. II.109
Tabel 2.41 Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.110

Tabel 2.42 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.111
Tabel 2.43 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.113
Tabel 2.44 Perkembangan Indikator Urusan Persandian, 2019-2023 .. II.114
Tabel 2.45 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.116
Tabel 2.46 Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.117
Tabel 2.47 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.119
Tabel 2.48 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.120
Tabel 2.49 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.122
Tabel 2.50 Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.125
Tabel 2.51 Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.127
Tabel 2.52 Perkembangan Kontribusi Perindustrian Terhadp PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.128
Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Urusan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.129
Tabel 2.54 Perkembangan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.130
Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.131
Tabel 2.56 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 .. II.135
Tabel 2.57 Perkembangan Indikator Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.137
Tabel 2.58 Perkembangan Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.139
Tabel 2.59 Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah),2019-2023 II.140
Tabel 2.60 Angka Konsumsi RT Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2019-2023..... ..... II.142
Tabel 2.61 Rasio Angka Konsumsi RT non Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2018-2022 ..... II.144
Tabel 2.62 Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.147
Tabel 2.63 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.150
Tabel 2.64 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan II.151
Tabel 2.65 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS) Dengan Tahun Berjalan II.349
Tabel 2.66 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (SS) Dengan Tahun Berjalan II.356

Tabel 2.67 Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (SS) Dengan Tahun Berjalan II.364
Tabel 2.68 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 .... II.368
Tabel 2.69 Realisasi Capaian SPM Bidang KesehatanTahun 2023 ..... II.369
Tabel 2.70 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 ..... II.370
Tabel 2.71 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 ..... II.371
Tabel 2.72 Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023..... II.372
Tabel 2.73 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023 ..... II.373
Tabel 3.1 Indikator sasaran Pembangunan Nasional, 2025..... III.6
Tabel 3.2 Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, 2022-2024 ..... III.14
Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2025* III.18
Tabel 3.4 Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2019-2023 ..... III.22
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2026 ..... III.26
Tabel 3.6 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025..... III.29
Tabel 3.7 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025..... III.31
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2026..... III.34
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2026 ..... III.38
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV.4
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Provinsi Sumatera Barat, 2021-2026 ..... IV.5
Tabel 4.3 Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat 2025 ..... IV.9
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 ..... IV.10
Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025..... IV.13
Tabel 4.6 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2025..... IV.13
Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai 2025..... IV.14
Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Nasional 1 ..... IV.15
Tabel 4.9 Sasaran Pembangunan Nasional 2 ..... IV.17
Tabel 4.10 Sasaran Pembangunan Nasional 3 ..... IV.35
Tabel 4.11 Sasaran Pembangunan Nasional 4 ..... IV.41
Tabel 4.12 Sasaran Pembangunan Nasional 5 ..... IV.51
Tabel 4.13 Sasaran Pembangunan Nasional 6 ..... IV.55
Tabel 4.14 Sasaran Pembangunan Nasional 7 ..... IV.61
Tabel 4.15 Sasaran Pembangunan Nasional 8 ..... IV.67

Tabel 4.16 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2025 .IV.87
Tabel 4.17 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2025 .....IV.88
Tabel 4.18 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2025 ....IV.91
Tabel 4.19 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2024 .....IV.93
Tabel 4.20 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan, Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025.....IV.96
Tabel 4.21 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan, Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025.....IV.98
Tabel 4.22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2025.....IV.101
Tabel 4.23 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2025.....IV.102

Tabel 4.24 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Pertanian Terpadu, ketahanan Pangan dan sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025 .....IV.105
Tabel 4.26 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Pertanian Terpadu, ketahanan Pangan dan sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai berdaya Saing) Tahun 2025 .....IV.106
Tabel 4.27 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 ..IV.110
Tabel 4.28 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 ..IV.110
Tabel 4.29 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025.....IV.114
Tabel 4.30 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025.....IV.115
Tabel 4.31 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025.....IV.116

Tabel 4.32 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradap) Tahun 2025 ..... IV.117
Tabel 4.33 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradap) Tahun 2025 ..... IV.118
Tabel 4.34 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025 ..... IV.121
Tabel 4.35 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025 ..... IV.122
Tabel 4.36 Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Pendanaanya, 2025 ..... IV.125
Tabel 4.37 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... IV.129
Tabel 4.38 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 ..... IV.131
Tabel 4.39 Dukungan RKPD Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2025 Terhadap kegiatan Prioritas Terhadap Prioritas Nasional IV.145
Tabel 4.40 Dukungan Program Prioritas Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Prov. Sumatera Barat Tahun 2025 ..... IV.271
Tabel 4.41 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi IV.350
Tabel 4.42 Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial/Belanja Hibah Sanitasi Individual Tahun 2025 ..... IV.382
Tabel 4.43 Daftar Calon Penerima Hibah Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 ..... IV.387
Tabel 4.44 Daftar Calon Penerima Hibah Organisasi dan Lembaga Keagamaan Tahun 2025 ..... IV.401
Tabel 4.45 Daftar Calon Penerima Hibah Alat Tangkap dan Budidaya Tahun 2025 ..... IV.403
Tabel 5.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 ..... V.2
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama VI.1
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai , 2025 ..... VI.4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I.8
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai II.2
Gambar 2.2 Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai II.5
Gambar 2.3 Peta Fungsi Kawasan Hutan II.7
Gambar 2.4 Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023 ..... II.24
Gambar 2.5 Perkembangan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.25
Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana II.27
Gambar 2.7 Diagram Generasi Kelompok Usia Tahun 2023 ..... II.31
Gambar 2.8 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023 ..... II.32
Gambar 2.9 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentang 14 Tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023 ..... II.33
Gambar 2.10 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.36
Gambar 2.11 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023 ..... II.37
Gambar 2.12 Tingkat Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023 ..... II.40
Gambar 2.13 Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.44
Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.46
Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.48
Gambar 2.16 Indeks Ketimpangan Gender (IPG) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.49
Gambar 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.50
Gambar 2.18 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.52
Gambar 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.59
Gambar 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.61
Gambar 2.21 Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023 ..... II.62
Gambar 2.22 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023 ..... II.64
Gambar 2.23 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.79

Gambar 2.24 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023 ..... II.80
Gambar 2.25 Jalur pelayaran Padang -Kep Mentawai II.106
Gambar 2.26 Layanan Perpustakaan untuk Masyarakat dan Anak Sekolah..... II.118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan nasional sejak tahun 2023 dan diakselerasi pada tahun 2024/2025. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebijakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Selaras dengan itu, perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 tumbuh positif pada angka 4,04 persen meskipun lebih rendah dari tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2025 yang menjadi perhatian penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk respon terhadap perubahan ekonomi global. Begitu juga dengan RKPD Tahun 2025 menjadi tahun pertama implementasi perwujudan visi jangka panjang daerah menuju Mentawai Emas Tahun 2045 sebagai fondasi transformasi pada RPJMD Tahun 2025-2029 kepala daerah terpilih. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya mengacu Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJMD.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 sebagaimana amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD ini berpedoman pada Permendagri terkait pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025, RKP Tahun 2025, RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RKPD ini sangat penting, mengingat:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.
2. Menjadi dasar peletakan fondasi pembangunan menuju visi pembangunan jangka panjang daerah menuju Mentawai Emas 2045.
3. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

4. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.
5. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

Sebagai sebuah sistem perencanaan yang selaras dan berkelanjutan, Pengembangan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan produktivitas masyarakat berbasis sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada setiap komoditas yang dikembangkan sehingga pada setiap usaha ekonomi yang sedang dan terus diupayakan menuju transformasi ekonomi daerah. Hal ini juga sejalan dengan tema pembangunan nasional tahun 2025 sebagai estafet pembangunan berkelanjutan dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk menggerakkan sumber daya berkualitas, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan

rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2025, antara lain:

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

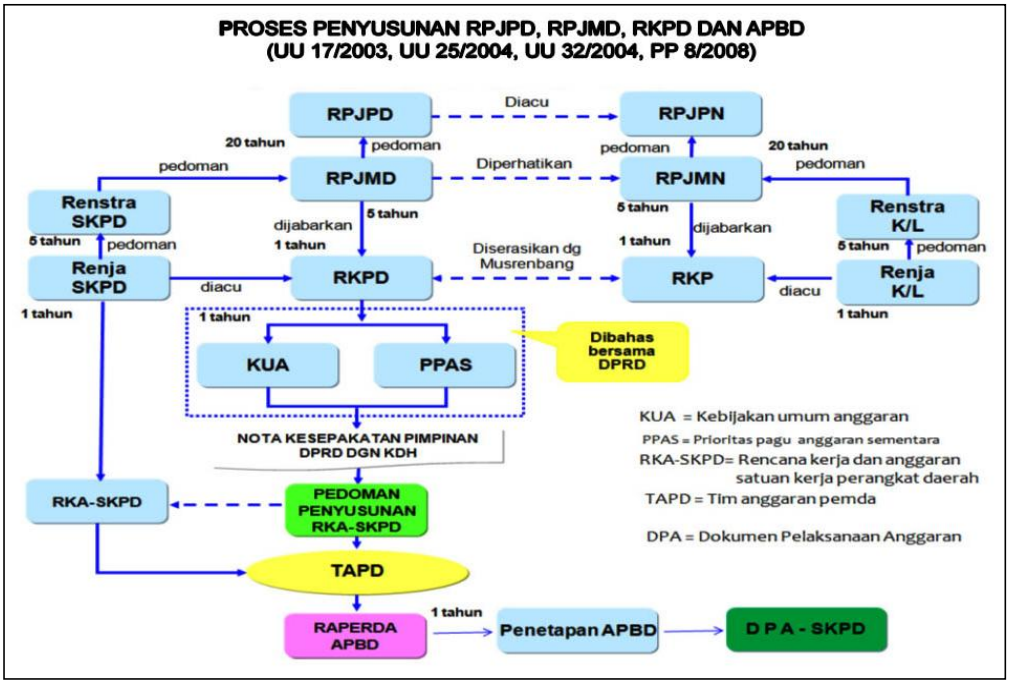
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 8).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan dalam menjalankan agenda

pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.



Gambar 1.1
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan antara RKPD Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2025 memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
2. RKPD Tahun 2025 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.

3. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. RKPD Tahun 2025 pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2025 antara lain:

1. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah.
2. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
3. Menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**;

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD;

BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**;

terdiri atas Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Permasalahan Pembangunan Daerah. Kondisi Umum Kondisi Daerah menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu yang mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPD. Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III **Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**;

terdiri atas Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam

dokumen RPJMD provinsi yang secara nyata memiliki keterkaitan dan pengaruh pada kondisi ekonomi daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran strategi yang disusun untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**; mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja sebagai evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional.

BAB V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**; mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

berisi Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun perencanaan.

BAB VII Penutup;

berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografis

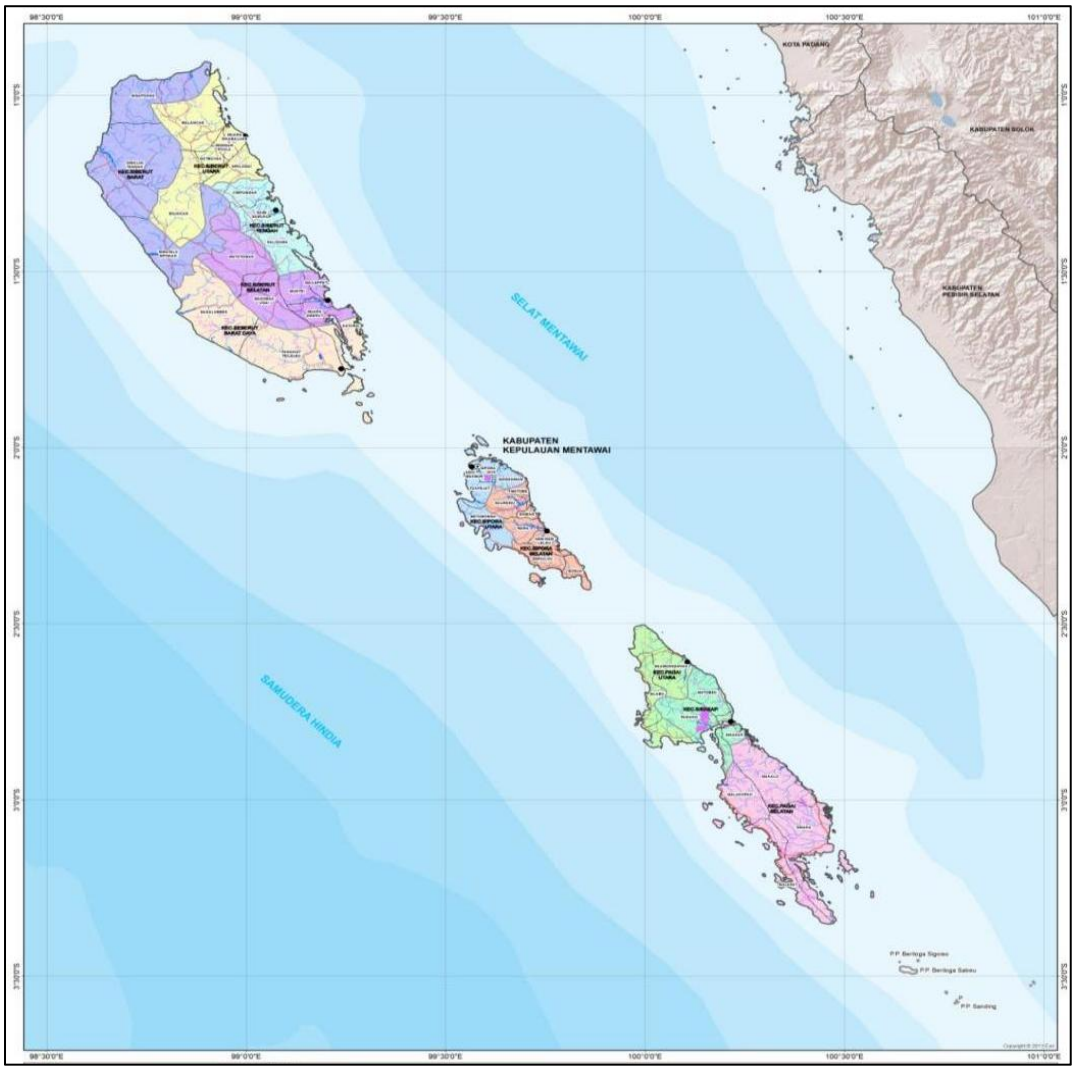
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada posisi $0^0$55'00"–$3^0$21'00" Lintang Selatan dan $98^0$35'00"-$100^0$32'00" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara geografis berbatasan dengan:

- sebelah Utara adalah Selat Siberut;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai;
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang wilayah administrasinya terpisah oleh laut dengan Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 5.983,22 km^2 dan panjang garis pantai 1.402,66 km, sebagaimana Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 yang terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 341 dusun, dengan Kecamatan Siberut Barat memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1.124,86 km^2 dan Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah terkecil yaitu 278,45 km^2.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai



Adapun keadaan geografis dan administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap kecamatannya disajikan dalam bentuk tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km^2)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	901,08	$2^0$49'04"-$3^0$21'00"	$100^0$07'01"-$100^0$32'00"
2	Sikakap	Taikako	278,45	$2^0$37'12"-$3^0$55'04"	$100^0$00'00"-$100^0$16'12"
3	Pagai Utara	Saumanganya'	342,02	$2^0$30'00"-$2^0$51'36"	$99^0$57'00"-$100^0$09'36"
4	Sipora Selatan	Sioban	268,47	$2^0$06'00"-$2^0$24'36"	$99^0$36'00"-$99^0$52'12"
5	Sipora Utara	Sido Makmur	383,08	$1^0$57'00"-$2^0$18'00"	$98^0$30'00"-$99^0$42'00"
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	508,33	$1^0$19'48"-$1^0$42'00"	$98^0$48'00"-$99^0$18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	649,08	$1^0$27'36"-$1^0$57'00"	$98^0$45'00"-$99^0$19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	739,87	$1^0$15'00"-$1^0$33'00"	$98^0$54'00"-$99^0$12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	816,11	$0^0$54'00"-$1^0$27'00"	$98^0$40'48"-$99^0$06'00"
10	Siberut Barat	Betaet	1.124,86	$0^0$55'00"-$1^0$34'12"	$98^0$35'00"-$98^0$59'24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Jumlah desa dan dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditunjukkan tabel 2.2 dengan jumlah desa sebanyak 43 desa dan dusun sebanyak 341 dusun. Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah dusun paling banyak yaitu dengan 49 dusun dan Kecamatan Siberut Barat Daya dengan jumlah dusun paling sedikit yaitu dengan 25 dusun.

Tabel 2.2
Jumlah Desa dan Dusun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Pagai Selatan	Bulasat	4	49
2	Sikakap	Taikako	3	44
3	Pagai Utara	Saumanganya'	3	30
4	Sipora Selatan	Sioban	7	43
5	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	34
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	3	25
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	32
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	6	26
10	Siberut Barat	Betaet	3	29
Jumlah			43	341

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Luasan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi kedalam 5 kawasan penggunaan lahan, antara lain hutan lindung, kawasan suaka dan pelestarian alam, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi dan areal penggunaan lainnya.

Tabel 2.3
Luasan Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

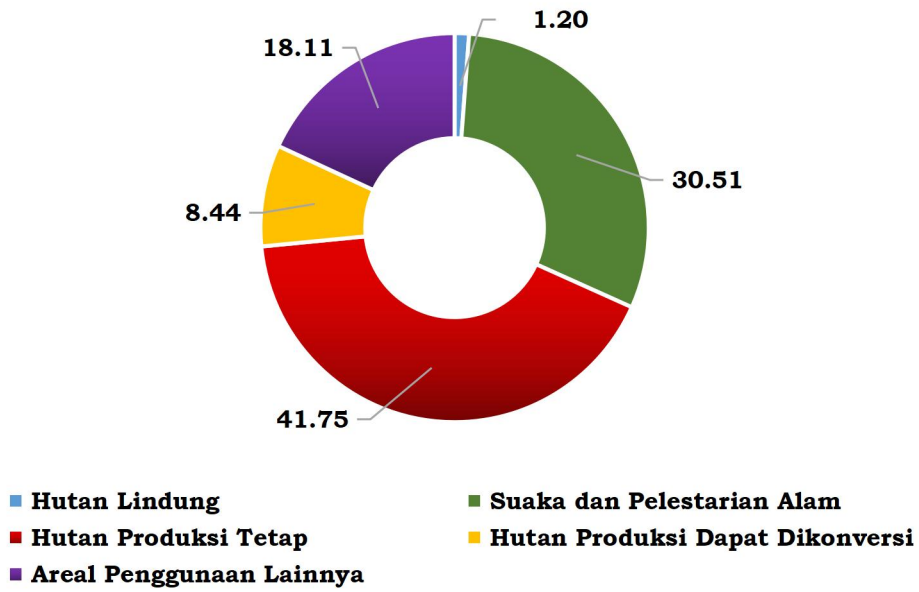
	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan didominasi oleh kawasan hutan dengan persentase sekitar 81,89

persen dan areal penggunaan lainnya sekitar 18,11 persen. Untuk luasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan dengan persentase sebesar 41,75 persen atau seluas 250.971,2 ha dan kawasan suaka dan pelestarian alam sebesar 30,51 persen atau seluas 183.378,9 ha, kawasan hutan lindung sebesar 7.217,28 ha atau sekitar 1,20 persen dari luas wilayah. Untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 50.727 ha atau sekitar 8,44 persen dari total luas wilayah dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Areal penggunaan lainnya sebagai areal penopang kehidupan masyarakat sebesar 108.840,62 ha atau sekitar 18,11 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

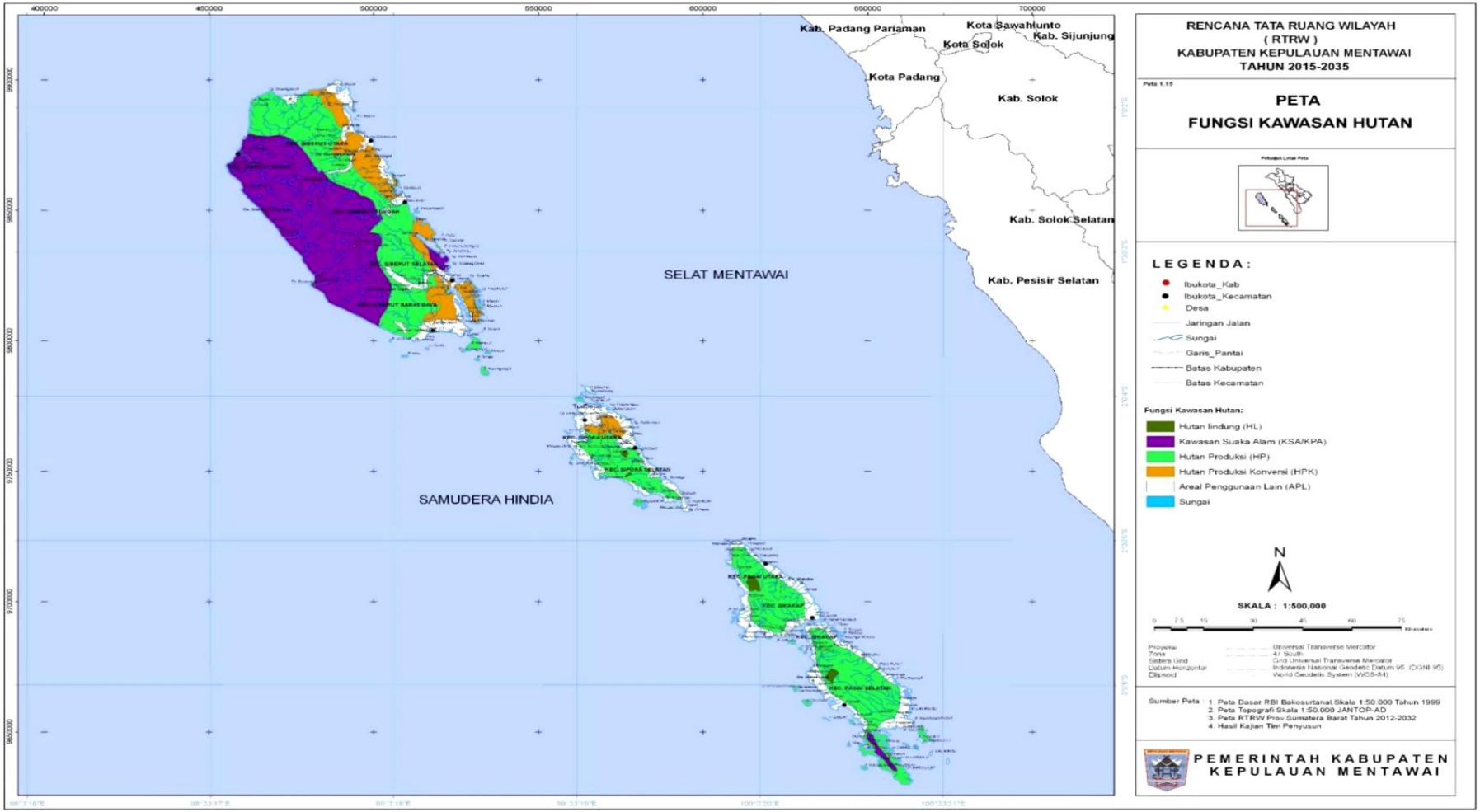
Gambar 2.2
Persentase Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Peruntukan dan Penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah, yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas ± 183.397 Ha termasuk Kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) di Pulau Siberut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk IUPHHK-HA oleh PT. Salaki Summa Sejahtera seluas ± 48.420 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dicadangkan seluas ± 79.795 ha di Pulau Siberut (eks IUPHHK-HA Koperasi Andalas Madani) untuk IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada PT. Global Green melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.769/Menhut-VI/2009 tanggal 28 September 2009.

Gambar 2.3
Peta Fungsi Kawasan Hutan



2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kepulauan Mentawai sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan wilayah daerah.

Tabel 2.4 menunjukkan struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi pada PDRB sebesar 48,01 persen, artinya sektor primer masih menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat Mentawai. Jika dilihat tren transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor manufaktur/ industri dan sektor jasa belum menunjukkan perubahan (kenaikan) yang signifikan.

Kontribusi Sektor kontruksi terhadap PDRB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang positif yaitu dari 13,04 persen tahun 2019 meningkat menjadi 14,17 persen pada tahun 2023 dengan rata-rata capaian sebesar 13,45 persen.

Tabel 2.4
Kontribusi PDRB ADHB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	46,48	48,65	48,87	48,01	48,45	48,01
B	Pertambangan dan Penggalian	1,62	1,63	1,65	1,61	1,62	1,65
C	Industri Pengolahan	2,33	2,43	2,57	2,48	2,45	2,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
F	Konstruksi	13,04	13,2	13,66	14,03	14,17	13,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran	12,75	12,75	12,72	13,43	13,72	12,99
H	Transportasi dan Pergudangan	11,74	8,56	7,48	7,79	7,05	8,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,8	0,76	0,81	0,84	0,87	0,81
J	Informasi dan Komunikasi	0,9	0,98	1,04	1,06	1,07	0,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12
L	Real Astate	0,9	0,92	0,91	0,89	0,92	0,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan	6,61	7,18	7,25	6,84	6,64	6,83
P	Jasa Pendidikan	1,14	1,22	1,23	1,18	1,14	1,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,69	0,74	0,72	0,75	0,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,89	0,83	0,88	0,92	0,96	0,89

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Analisis potensi pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan PDRB dapat diketahui bahwa sektor lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan sektor maju dan tumbuh pesat dan juga sudah menjadi sektor basis ekonomi masyarakat Mentawai secara umum, kedepan sektor ini juga sangat potensial untuk dikembangkan dengan tingkat pertumbuhan sektor yang

tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif untuk wilayah Sumatera Barat.

Tabel 2.5
Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Lapangan Usaha		Tipologi Klassen	Analisis LQ	Analisis DLQ	Pertumbuhan Proporsional	Keunggulan Kompetitif	Pergeseran Bersih
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
B	Pertambangan dan Penggalian	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
C	Industri Pengolahan	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
F	Konstruksi	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
G	Perdagangan Besar dan Eceran	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
H	Transportasi dan Pergudangan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
J	Informasi dan Komunikasi	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
L	Real Astate	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
M,N	Jasa Perusahaan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
O	Administrasi Pemerintahan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
P	Jasa Pendidikan	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
R,S,T,U	Jasa Lainnya	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif

Sumber :BPS (data diolah)

Sektor lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan merupakan sektor yang dikategorikan sebagai Sektor Maju dan Tumbuh Pesat yang merupakan sektor basis dan memiliki potensi yang sangat baik, memiliki keunggulan kompetitif dan perkembangannya progresif. Begitu juga dengan sektor lapangan usaha konstruksi menjadi sektor yang dikategorikan sebagai Sektor Maju dan Tumbuh Pesat juga menjadi sektor basis, hal ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang cukup masif dan menjadi prioritas pembangunan daerah dan memiliki potensi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Hal yang menarik ada pada sektor lapangan usaha industri pengolahan dengan kategori sektor potensial / masih dapat berkembang dengan pesat, walaupun bukan merupakan sektor basis namun memiliki potensi untuk dikembangkan dan diintervensi karena keunggulan kompetitifnya ada dan perkembangannya ke depan progresif sehingga dapat dijadikan sebagai basis transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor industri/ manufaktur. Begitu juga dengan perkembangan sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang menjadi basisi sektor jasa dikategorikan sebagai sektor potensial / masih dapat berkembang dengan pesat, sektor ini menjadi penyokong kemajuan pariwisata daerah, walaupun bukan menjadi sektor basis karena kontribusi terhadap PDRB masih relatif kecil, namun memiliki keunggulan kompetitif

dan progresif dalam perkembangannya. Sektor ini cukup rentan pada gejolak sosial politik dan kesehatan yang terjadi, khususnya yang terjadi pada saat pandemi COVID-19.

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 601.135 ha terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 492.294,38 ha sekitar 81,90 persen dari luas wilayah, sedangkan 108.840,62 ha atau sekitar 18,10 persen adalah kawasan Area Penggunaan Lain (APL), memiliki potensi pengembangan wilayah Kepulauan Mentawai yang dapat dikembangkan melalui pengembangan kawasan budi daya yang telah ditetapkan antara lain.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi.

   Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi tetap yang merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun cara tebang habis. Kawasan ini terdapat di seluruh kecamatan, dengan luasan 246.011,41 hektar. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang dapat dicadangkan atau diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan diluar sektor kehutanan seperti perkebunan, pertanian, permukiman, industri. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Selatan dengan luasan kurang lebih 54.856,28 hektar.

2) Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi sawah dan komoditas tanaman pangan lainnya dengan total luas adalah 24.934,03 ha. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan komoditi sayuran dan buah-buahan dengan total luas adalah 3.740,17 ha. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas lahan adalah 90.818 ha dengan komoditas perkebunan skala kecil atau perkebunan rakyat khas Mentawai yaitu coklat, karet, cengkeh, pala, kelapa, nilam, manau. Kawasan perkebunan rakyat tidak merusak alam dan lingkungan sekitar hutan. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di seluruh wilayah daerah dengan memanfaatkan areal pertanian dan perkebunan.

3) Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap di seluruh perairan wilayah daerah dengan pusat perikanan tangkap di Kecamatan Siberut Utara, Tuapejat, Pagai Utara dan Sikakap. Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri dari budi daya perikanan laut meliputi: Muara Sigep, Malancan, Sirilogui, Saibi Samukop, Saliguma, Malilimok, Katurei (Pulau Siberut), Teraet, Teluk Beriulou, Teluk Pukarajat, Tuapejat (Pulau Sipora), Sikakap dan Betumonga (Pulau Pagai Utara), Pulau

Tanopo, Makalo dan Sinaka (Pulau Pagai Selatan). budi daya perikanan darat meliputi: Bosua, Saureinu, Nemnemleleu, (Sipora Selatan), Malancan, Sirilogui, Bojakan, Sotboyak, Muara Sikabaluan, Monganpoula (Siberut Utara), Muara Siberut, Salappak, Maileppet, Muntei, Madobag, Matotonan (Siberut Selatan), Saibi Samukop, Cimpungan (Siberut Tengah), Saumanganya, Betumonga, Silabu (Pagai Utara), Matobe, Taikako (Sikakap), Desa Malakopa dan Desa Bulasat (Pagai Selatan). Kawasan Minapolitan adalah Sikakap dan Muara Siberut (Siberut Selatan). Kawasan pengolahan hasil perikanan memiliki prasarana pendukung, meliputi bagian wilayah Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara dan bagian wilayah Muara Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara, Sikakap. Prasarana pendukung kawasan pengolahan hasil perikanan terdiri atas rencana pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Tuapejat dan Sikakap, rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut dan Muara Sikabaluan, dan rencana pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Sikakap.

4) Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga yang dapat dikembangkan di setiap kecamatan

dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

5) Kawasan peruntukkan pertambangan.

   Kawasan peruntukkan pertambangan diperuntukkan untuk wilayah pertambangan terdapat di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang memiliki potensi bahan tambang jenis bebatuan (galian C).

6) Kawasan peruntukan pariwisata.

   Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah terdapat di Pulau Siberut yang meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Siberut Selatan), Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sagulubbek (Siberut Barat Daya), benteng peninggalan Jepang di Sioban (Sipora Selatan). Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat dipulau Siberut yang meliputi kawasan Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sibudda Oinan (Siberut Tengah), Matotonan dan Madobag (Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Siberut Barat Daya). Kawasan peruntukan pariwisata bahari terdapat di Silabu (Pagai Utara), Sikakap, Malakopa dan Sinakak (Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobi dan Pulau Siruamata (Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat, Taraet dan Matuptuman (Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu (Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan

Saliguma (Siberut Tengah), Sirilogui (Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi dan Bosua 100 ha, Teluk Katurei 300 ha, Taraet 50 ha, Matutuman Buggei Siata 50 ha. Kawasan peruntukan konservasi budaya terdapat di Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan Sakudei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu Kecamatan Siberut Barat.

7) Kawasan peruntukan permukiman.

   Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu Muara Siberut (PKW), Tuapejat (PKL), Sikakap (PKLp), Muara Sikabaluan, Saibi Samukop, Pasakiat Taileleu, Saumanganyak, Bulasat, Sido Makmur dan Sioban. Kawasan peruntukan perdesaan yaitu pusat lingkungan pemukiman disetiap dusun diluar kawasan perkotaan dan kawasan hunian tetap (huntap) korban tsunami.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

   Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, seperti kawasan bandara, kawasan militer AD, AL, kepolisian dan satuan keamanan dan pertahanan lainnya.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelompokkan berdasarkan potensi komoditas/ sumber

daya alam dan karakteristik wilayahnya. Beberapa Kawasan pengembangan wilayah, antara lain:

1. Kawasan pertanian, perkebunan/ mandiri pangan

   Masyarakat Mentawai dengan mayoritas sumber ekonominya berasal dari sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan memiliki berbagai komoditas unggulan sebagai sumber mata pencarian utama antara lain pisang, keladi, sagu, cengkeh, pala, kelapa. Komoditas unggulan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan sangat potensial dilakukan dalam memberikan nilai tambah di setiap produk komoditas unggulan sektor pertanian/ perkebunan. kawasan pengembangan pertanian tanaman pisang pada Desa Monganpoula, Desa Bulasat, Pengembangan Sagu di Desa Muntei, Desa Madobag. Kawasan pengembangan holtikultura pada Desa Goisoionan, Desa Bukit Pamewa, Desa Sikakap, Desa Matobe. Kawasan pertanian sawah pada Desa Saureinu, Desa Nemnemleleu, Desa Matobe, Desa Saumanganya, Desa Sotboyak. Pembangunan ekonomi pedesaan dengan konsep agribisnis juga dapat dikembangkan dalam pembangunan desa seperti pada kawasan perkebunan cengkeh di Desa Sirilogui, kawasan perkebunan kelapa di Taraet Desa Betumonga dan Desa Sagulubbeg.



Melalui pengembangan pertanian berbasis kawasan tentunya akan memberikan kemudahan dalam hal integrasi dalam hal keterkaitan input dan output (*backward dan forward linkage*), efektifitas dan efisiensi skala ekonomi tentunya dalam jengka Panjang akan memberi dampak pada pengembangan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta membentuk kemandirian desa dan masyarakat.

2. Kawasan perikanan/kelautan

   Pembangunan sektor perikanan, kelautan diharapkan dapat dipercepat dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh. Kemudahan atau peluang yang biasanya ada perlu dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi, yang didukung sarana prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan dan sumber daya manusia yang memadai.

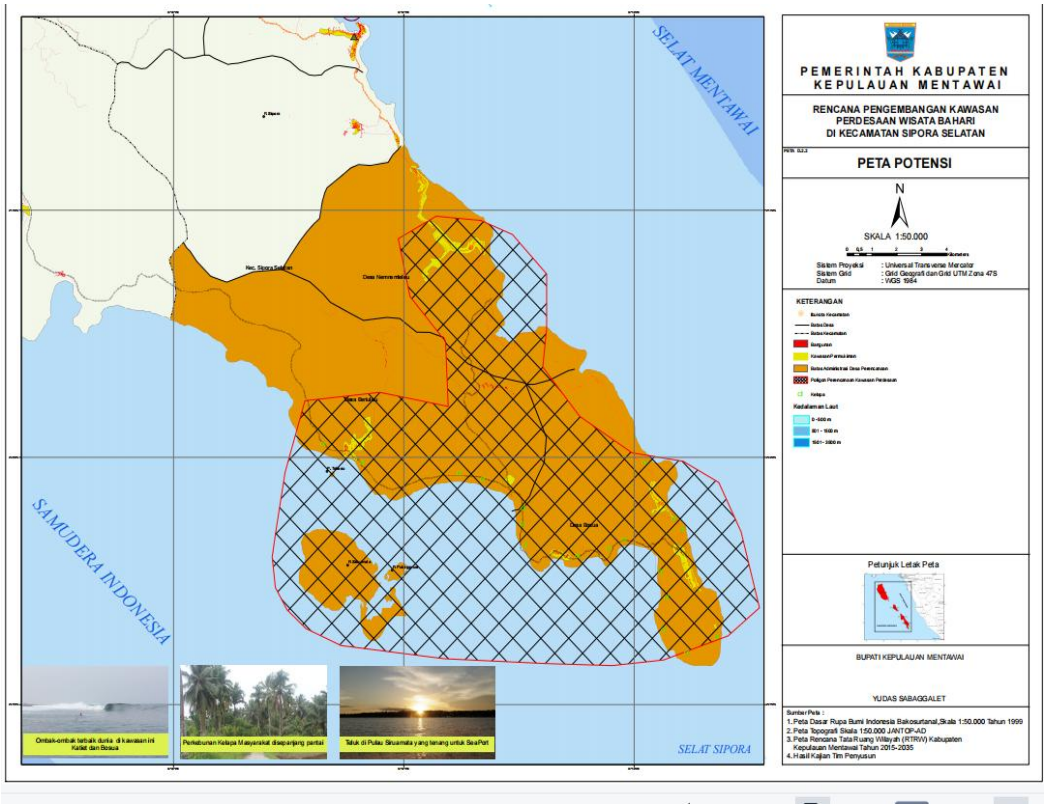
Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut sangat potensial dikembangkan di kawasan perikanan di Desa Sikakap, Desa Sinaka, Desa Matobe, Desa Sikabaluan, Desa Tuapejat, Desa Muara Siberut. Selain itu juga dengan pembandan kawasan budi daya kepiting bakau, lobster dan udang di kawasan Desa Katurei, Desa Sikakap, Desa Pasakiat Taileleu. Produksi ikan yang melimpah juga potensial untuk pengembangan industri pengolahan ikan asin, ikan asap dan pengalengan ikan di kawasan Desa Sikabaluan Dusun Bose, Desa Sigapokna. Begitu juga dengan potensi pengembangan kawasan budi daya perikanan darat sangat memungkinkan dikembangan pada kawasan di Desa Saureinu, Desa Sido Makmur, Desa Sikakap.



3. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai daerah kepulauan tentunya panorama alam dan lautnya sangat memukau dan potensial untuk dikembangkan. Sektor pariwisata menjadi

unggulan antara lain wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Wisata bahari yang menjadi sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Mentawai hampir pada seluruh kawasan pesisir, Namun beberapa lokasi yang menjadi prioritas pengembangan seperti Desa Bosua pada kawasan Katiet, Desa Nemnemleleu, Desa Beriulou.



Arah pengembangan produk dan pariwisata bahari selain surfing, snorkling, diving juga dikembangkan wisata ekowisata, budaya, kano dan pengembangan kuliner serta akomodasi yang ramah lingkungan, memadai dengan kualitas standar internasional.

Zona Wilayah	Aktivitas Pariwisata Bahari
Desa Katurei	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan daiving, surfing dan snorkling - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Taileleu	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan daiving, surfing dan snorkling - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Bosua/ Katiet	- Surfing - Diving, snorkling - Sewa peralatan dan perlengkapan diving, surfing dan snorkling

Wisata Alam dan Wisata Budaya menjadi bagian yang saling melengkapi yang ada di Kepulauan Mentawai. Potensi pengembangannya ada dibeberapa titik di wilayah Pulau Siberut seperti di Desa Matotonan, Desa Madobag, Desa Muntei, dimana kelestarian alam dan budaya masyarakat yang masih terjaga dan tetap eksis hingga saat ini.

Zona Wilayah	Aktivitas pariwisata
Desa Matotonan	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai

Zona Wilayah	Aktivitas pariwisata
Desa Madobag	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Muntei	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Maileppet	- Pemandangan alam/bahari - atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan

bencana terhadap bahaya tsunami. Pada tahun 2023 telah terjadi gempa tektonik di wilayah Kepulauan Mentawai sebanyak 4 kali.

Dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar.

Tabel 2.6
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Kekeringan	Sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

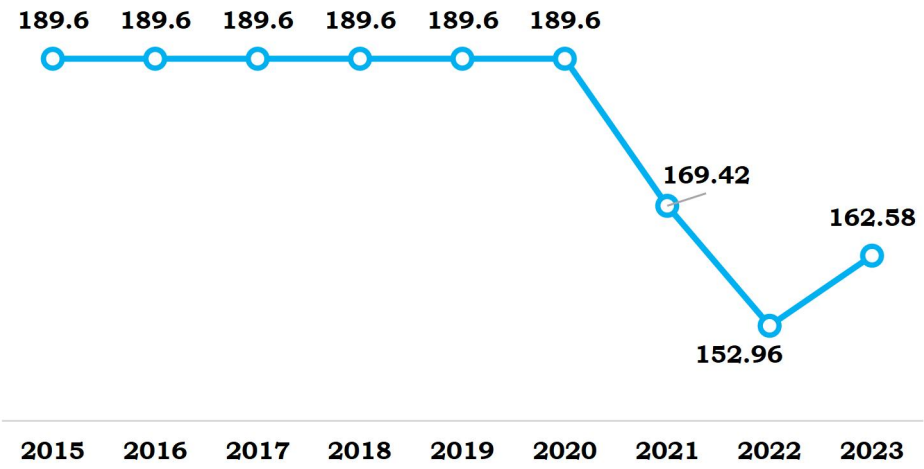
Sumber: Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2024

Tabel 2.6 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang Ekstrem dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, bencana gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya sedang terhadap bencana kekeringan. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sebagai daerah dengan potensi bencana yang besar, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya melakukan usaha-usaha mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif

dari setiap bencana yang terjadi. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu informasi/kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

Gambar 2.4
Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

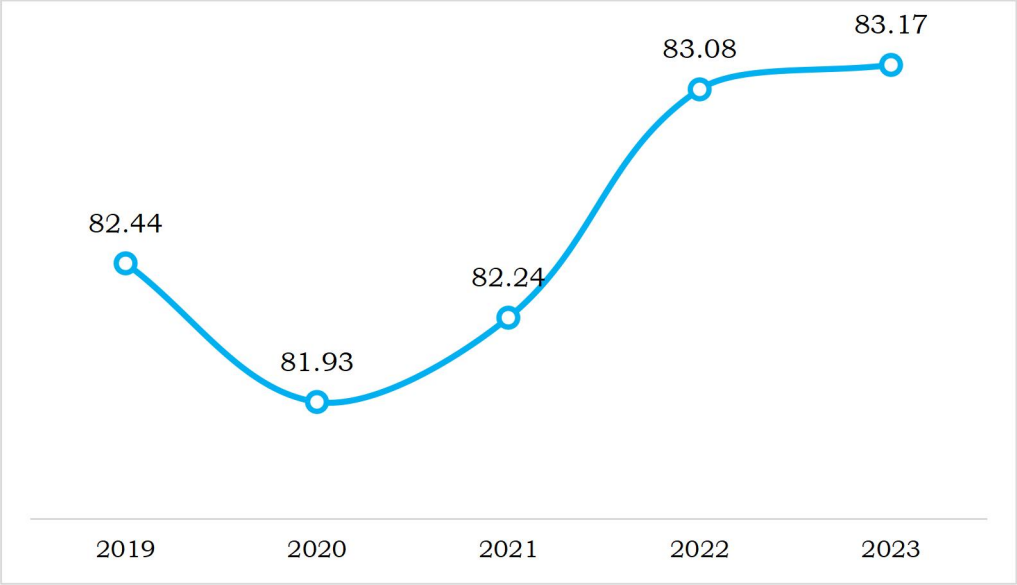


Sumber : IRBI (diolah)

Gambar 2.4 perkembangan indikator Indeks Risiko Bencana kurun waktu 2015-2023 menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 189,6 pada tahun 2015 turun menjadi 162,58 pada tahun 2023. penurunan angka ini menjadi indikasi ada upaya dan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi bencana yang besar melalui penguatan kapasitas, kepedulian dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana.

Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestisasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup perkembangannya mengalami perbaikan dari tahun 2019 dengan predikat cukup baik meningkat hingga pada tahun 2023 pada predikat baik.

Gambar 2.5
Perkembangan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

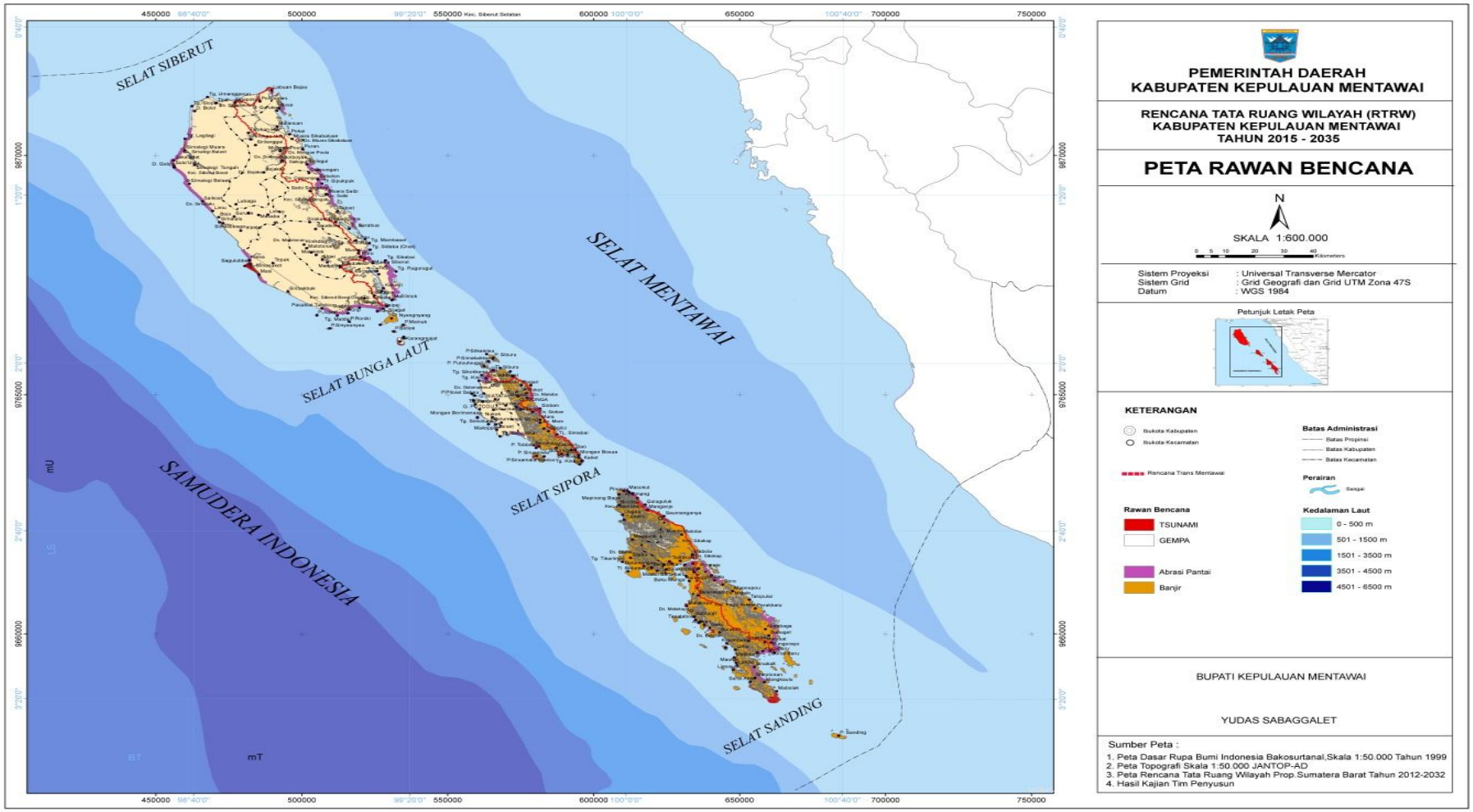


Sumber: Dinas LH Propinsi Sumatera Barat

Gambar 2.5 menunjukkan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin baik dan mengalami perbaikan. Pada tahun 2019, pengelolaan lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai yang dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 82,44 mengalami

penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 81,93. Namun sejak tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yaitu dari 82,24 pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 83,17. Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh stakeholder, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik.

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana



2.1.1.4 Aspek Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Secara umum keadaan kependudukan di Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara teori (BPS), penduduk diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk menjadi aset dan modal besar dalam pembangunan, sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan. Integrasi perencanaan dengan kependudukan menjadi hal penting bagi daerah dalam mengarahkan esensi pembangunan daerah, bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Disisi lain, tantangan pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan tersendiri di daerah baik itu dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi, tingkat ketergantungan, kepadatan penduduk yang akan dikaitkan dengan daya dukung lingkungan/alam. Jumlah penduduk per kecamatan, luas daerah dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

No	Kecamatan	Luas Daerah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/km^2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Pagai Selatan	901,08	9.562	10,46	11,22	0,73
2	Sikakap	278,45	10.439	11,42	33,39	0,78
3	Pagai Utara	342,02	6.299	6,81	19,89	1,59
4	Sipora Selatan	268,47	10.254	11,22	29,44	1,62
5	Sipora Utara	383,08	12.974	14,19	47,63	2,98
6	Siberut Selatan	508,33	10.423	11,40	31,78	1,77
7	Siberut Barat Daya	649,08	7.382	8,07	7,28	1,65
8	Siberut Tengah	739,87	7.424	8,12	12,59	1,69
9	Siberut Utara	816,11	8.517	9,32	10,88	0,78
10	Siberut Barat	1.124,86	8.153	8,92	7,01	1,61
2023		6.011,35	91.427		15,29	1,56
2022		6.011,35	89.401		14,82	1,15
2021		6.011,35	88.389		19,96	0,84
2020		6.011,35	87.623		14,52	1,41

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 tercatat sebanyak 91.427 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,56 persen. Laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sipora Utara yaitu sebesar 2,98 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan sebagai ibukota kabupaten dengan tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang cukup intens. Tingkat kepadatan penduduk di Kepulauan Mentawai dikategorikan masih sangat jarang yaitu 7,28 orang/km^2, artinya setiap km^2 terdapat sekitar 7-8 orang penduduk. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sipora Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 47,63 orang/km^2, kemudian Kecamatan Sikakap dengan kepadatan penduduk 33,39

orang/km^2 dan Kecamatan Siberut Selatan dengan kepadatan penduduk 31,78 orang/km^2.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

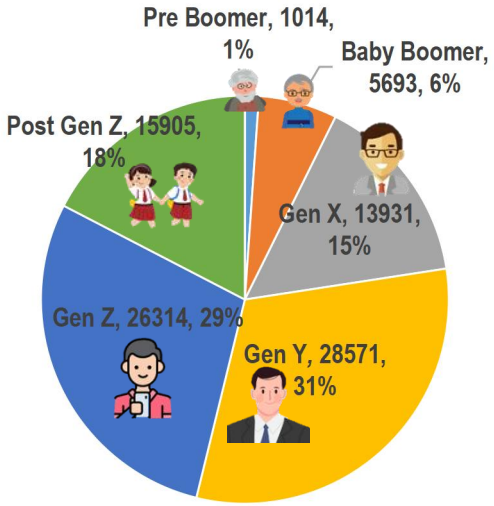
Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
0 - 4	4.288	4.107	104,4
5 - 9	3.828	3.682	104,0
10 - 14	4.481	4.294	104,4
15 - 19	4.944	4.495	110,0
20 - 24	4.278	3.822	111,9
25 - 29	3.867	3.717	104,0
30 - 34	3.833	3.774	101,6
35 - 39	3.753	3.475	108,0
40 - 44	3.263	2.889	112,9
45 - 49	2.835	2.628	107,9
50 - 54	2.477	2.179	113,7
55 - 59	2.033	1.779	114,3
60 - 64	1.428	1.322	108,0
65 - 69	970	925	104,9
70 - 74	545	503	108,3
75+	499	515	96,9
Total	47.321	44.106	107,2

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan atau dengan rasio 107,2 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 orang penduduk laki-laki di Kepulauan Mentawai. Untuk kelompok umur usia non produktif lansia (65+ tahun), rasionya cukup besar yaitu 108,03. Artinya setiap 100 orang penduduk lansia perempuan terdapat 108 orang lansia laki-laki. Kondisi ini menggambarkan penduduk lansia laki-laki lebih banyak daripada penduduk lansia perempuan, apakah

data ini disebabkan oleh kematian, perpindahan atau migrasi penduduk lansia perempuan cukup sering tentunya perlu analisis lebih lanjut lagi.

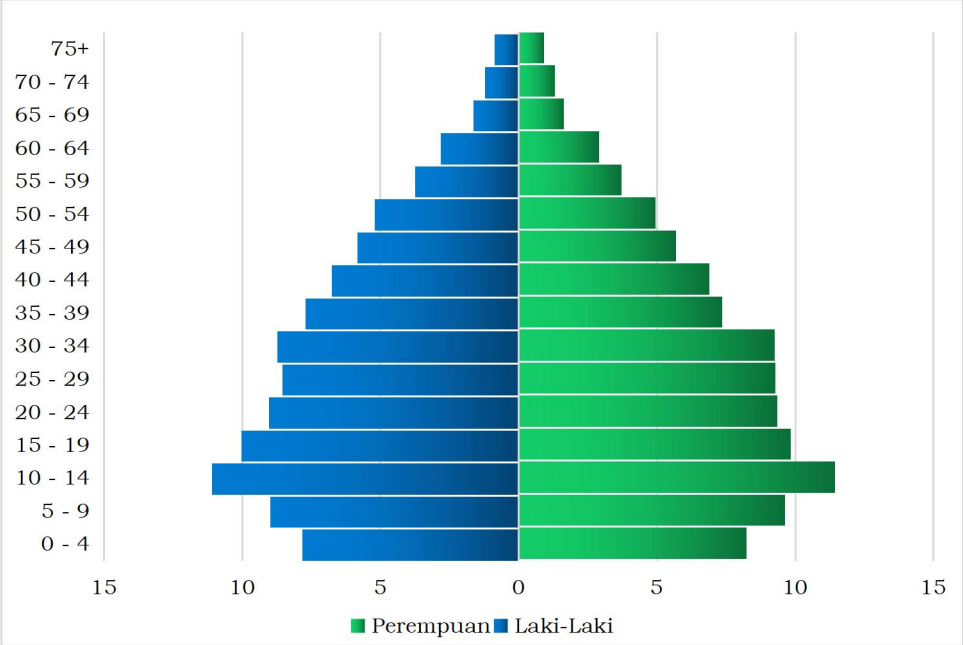
Gambar 2.7
Diagram Generasi Kelompok Usia Tahun 2023



Berdasarkan pada generasi kelompok usia yang sering disebut *Pre Boomer* (lahir sebelum tahun 1945), *Baby Boomer* (lahir tahun 1946-1964), Gen X (lahir tahun 1965-1980), Gen Y/Milenial (lahir tahun 1981-1996), Gen Z (lahir tahun 1997-2012), *Post Gen Z/Gen Alpha* (lahir tahun 2013-sekarang) didapat bahwa generasi Y atau milenial merupakan kelompok usia terbesar yaitu 28.571 jiwa atau sekitar 31 persen, selanjutnya adalah generasi Z sebesar 26.314 jiwa atau 29 persen, generasi *post gen Z*/generasi *aplha* sebanyak 15.905 jiwa atau sekitar 18 persen, generasi X sebanyak 13.931 jiwa atau 15 persen generasi *baby boomer* sebanyak 5.693 jiwa atau 6 persen dan generasi *pre boomer* sebanyak 1.014 jiwa atau 1 persen.

Tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk menjadi indikator cukup tingginya komposisi penduduk usia 0-9 tahun, namun di sisi lain masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat berdampak pada penurunan jumlah penduduk kelompok usia produktif hingga penduduk pada kelompok usia lansia. Komposisi penduduk Kepulauan Mentawai jika dilihat dari piramida penduduk seperti pada Gambar 2.8 menunjukkan bahwa kelompok usia 10-14 tahun memiliki komposisi paling besar dari struktur usia penduduk di Kepulauan Mentawai, namun menurun tajam pada komposisi kelompok usia 55+ tahun.

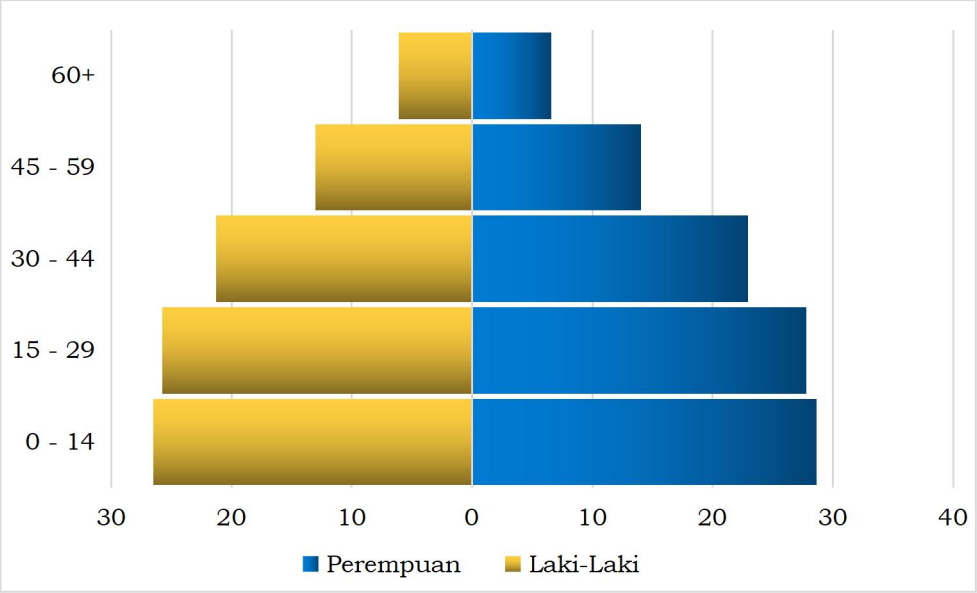
Gambar 2.8
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Jika dilihat komposisi penduduk dari kelompok usia dengan rentang usia 14 tahun seperti pada Gambar 2.9 piramida penduduk usia rentang 14 tahun, menunjukkan bahwa kelompok usia 0-14 tahun dan 15-29 tahun dengan komposisi terbesar. Kelompok usia produktif 30-44 tahun, 45-59 tahun mengalami penurunan.

Gambar 2.9
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentang 14 Tahun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023



Hal ini mengindikasikan terjadinya pengurangan jumlah penduduk baik pria dan wanita kelompok usia produktif, apakah itu akibat adanya kematian atau karena perpindahan. Penduduk pada usia produktif yang menjadi tulang punggung pembangunan perlu menjadi perhatian, agar dapat ambil bagian dalam proses pembangunan, tentunya intervensinya dimulai dari menjadi embrio kehidupan, lahir dan balita, baik itu dari segi kesehatan individu, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungannya.

Tabel 2.9
Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio
Penduduk Usia 0 - 14	12.597	12.083	24.680	104
Penduduk Usia 15 - 64	32.711	30.080	62.791	109
Penduduk Usia 65 +	2.014	1.943	3.957	104
Rasio Ketergantungan	44,67	46,63	45,61	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2024

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan rasio 109, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif perempuan terdapat 109 penduduk usia produktif laki-laki. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, rasio ketergantungan Kepulauan Mentawai tahun 2023 sudah dibawah 50 persen yaitu sebesar 45,61 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 46 penduduk usia tidak produktif. Jika rasio ketergantungan ini ditahun berikutnya mengalami penurunan maka Kepulauan Mentawai akan mendapatkan bonus demografi yang tentunya sangat berguna dalam pembangunan di daerah terkhususnya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki daya saing dan kompetitif.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan pembangunan yang sebesarnya adalah menyejahterakan masyarakatnya. Sejatinya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menghilangkan ketimpangan

pembangunan baik dari sisi pendapatan, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan ekonomi. Pembangunan manusia menjadi pembangunan yang senyata-nyatanya benar dan realitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh positif tidak serta merta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi merata dan setidaknya menjadi t*rickle-down effect* yang diharapkan menetes ke bawah membantu ekonomi masyarakat dengan tetap membutuhkan intervensi pemerintah daerah sebagai katalisator pembangunan sehingga masyarakat benar-benar merasakan arti pembangunan.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan ekonomi suatu daerah, semakin membaiknya distribusi ekonomi/ pendapatan masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

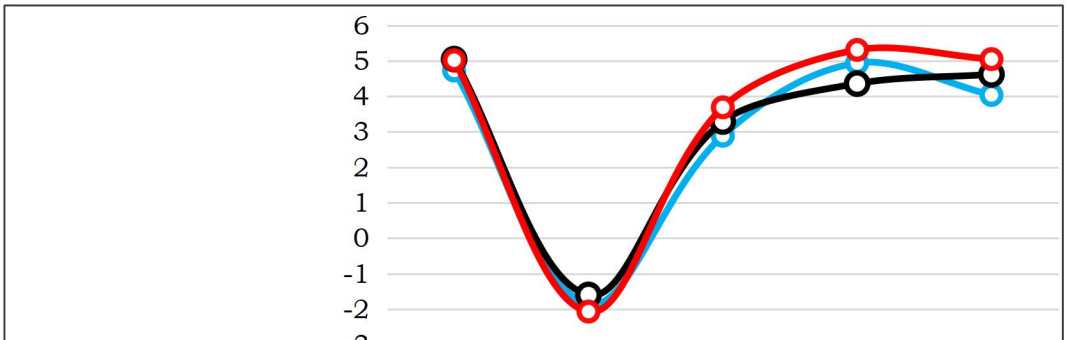
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa suatu daerah ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi

suatu wilayah dapat diukur melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah pandemi COVID-19 menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 2.10 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 saat COVID melanda dunia yang berimbas pada kondisi ekonomi daerah dengan tingkat pertumbuhan nasional pada angka minus 2,07 persen begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga terdampak dengan pertumbuhan ekonomi minus 1,6 persen dan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar minus 1,85 persen.

Gambar 2.10
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



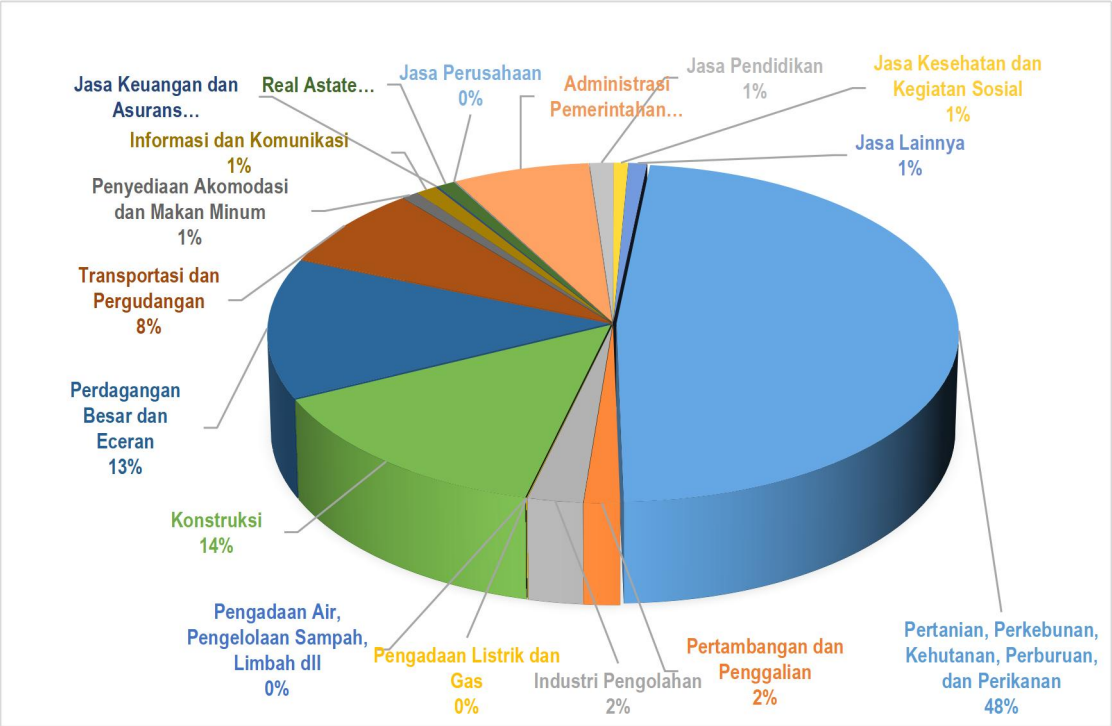
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kep. Mentawai	4.73	-1.85	2.89	4.94	4.04
Prop. Sumatera Barat	5.05	-1.6	3.29	4.36	4.62
Indonesia	5.02	-2.07	3.69	5.31	5.05

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2024

Program perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga pada tahun 2021 dan 2022 kondisi ekonomi

secara nasional regional dan daerah mengalami pertumbuhan yang positif. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2,89 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 4,04 persen. Hal ini selaras dengan tren pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat (2021 = 3,29 persen, 2023 = 4,62 persen) dan Nasional yang juga bertumbuh positif (2021 = 3,69 persen, 2023 = 5,05 persen).

Gambar 2.11
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023



Gambar 2.11 menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen penyusun PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 didominasi oleh 3 sektor utama antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 48,45 persen, konstruksi 14,17 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda

motor sebesar 13,72 persen. Hal ini menjadi potensi bagi pemerintah daerah pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah yang memberikan nilai tambah (*value added*) dan produktivitas serta memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat.

Tabel 2.10 menunjukkan perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2019-2023 yang mengalami kenaikan. Untuk PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dari 4,64 triliun rupiah tahun 2019 meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,91 triliun rupiah.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per kapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
ADHK	3.011.724	2.956.010	3.041.550	3.191.300	3.320.150
ADHB	4.641.481	4.647.100	4.843.810	5.445.470	5.915.000
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB	50,12	53,18	54,80	60,91	64,69

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2024

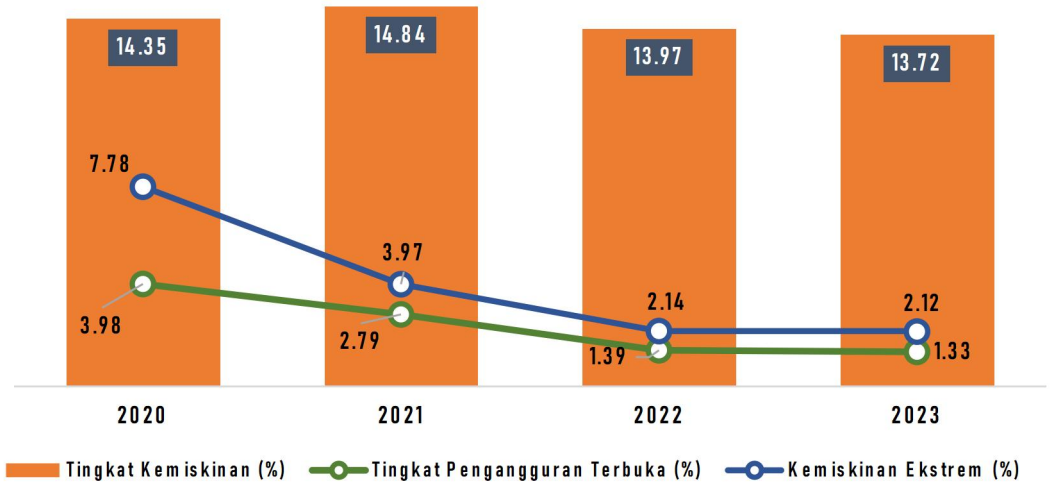
Begitu juga dengan PDRB per kapita yang dapat dilihat dengan membaginya dengan total jumlah penduduk, didapat bahwa pada tahun 2019 PDRB per kapita sebesar 50,12 juta rupiah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 PDRB per kapita menjadi sebesar 64,69 juta rupiah.

3. Tingkat Kemiskinan Daerah, Kemiskinan Ekstrem dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam

perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Gambar 2.12
Tingkat Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem
dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023



Sumber : BPS (diolah)

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2023 mengalami tren penurunan walaupun secara agregat tidak signifikan. Gambar 2.12 tingkat kemiskinan daerah dari sisi persentase mengalami penurunan yaitu 14,35 persen tahun 2020 turun menjadi 13,72 persen pada tahun 2023. Dampak pandemi terlihat dari meningkatnya tingkat

kemiskinan yang dapat dilihat dari kenaikan, yaitu dari 14,35 persen ditahun 2020 menjadi 14,84 persen ditahun 2021.

Tingkat kemiskinan ekstrem dihitung dari penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari 7,78 persen atau sebanyak 7.254 orang pada tahun 2020 turun menjadi 2,14 atau sebanyak 2.104 orang pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi sebesar 2,12 persen atau sebanyak 2.100 orang. Berbagai upaya dilakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan pencapaian target SDG's yaitu tanpa kemiskinan dan untuk mencapai target Nasional pada 0 persen di tahun 2024 antara lain integrasi program, pemutakhiran pensasaran data kemiskinan daerah (P3KE) dan kolaborasi pemangku kepentingan dan dunia usaha.

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumber daya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan trend penurunan. Dari 3,98 persen (tahun 2020) turun menjadi 1,33 persen (tahun 2023).

Tabel 2.11 menunjukkan perkembangan berbagai indikator kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren penurunan, pada tahun 2019 capaiannya sebesar 0,42 dan mengalami kenaikan menjadi 0,77 pada tahun 2020 lalu turun pada tahun 2021 menjadi 0,63 sebagai dampak COVID-19 lalu kembali turun menjadi 0,16 di tahun 2022 namun mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,48. Capaian indeks keparahan kemiskinan dalam kurun waktu 2019-2023 mengindikasikan bahwa semakin rendahnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepulauan Mentawai.

Begitu juga dengan indikator indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2019-2023 menunjukkan tren kenaikan yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,87 naik pada tahun 2020 menjadi 2,84, walaupun mengalami penurunan sedikit pada tahun 2021 menjadi sebesar 2,43 lalu turun pada tahun 2023 menjadi 1,98. Tren kenaikan indeks kedalaman kemiskinan kurun waktu 2019-2023 menunjukkan kecenderungan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil.

Tabel 2.11
Indikator Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,87	2,84	2,43	1,76	1,98
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,42	0,77	0,63	0,16	0,48
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	310.033	340.191	356.403	386.152	421.113
Tingkat Kemiskinan (persen)	14,43	14,35	14,84	13,97	13,72
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	13.200	13.370	14.310	13.740	13.760

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2023

Kondisi ini menggambarkan tentu masih perlunya penanganan melalui program pembangunan yang terintegrasi dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Mentawai.

4. Rasio Gini

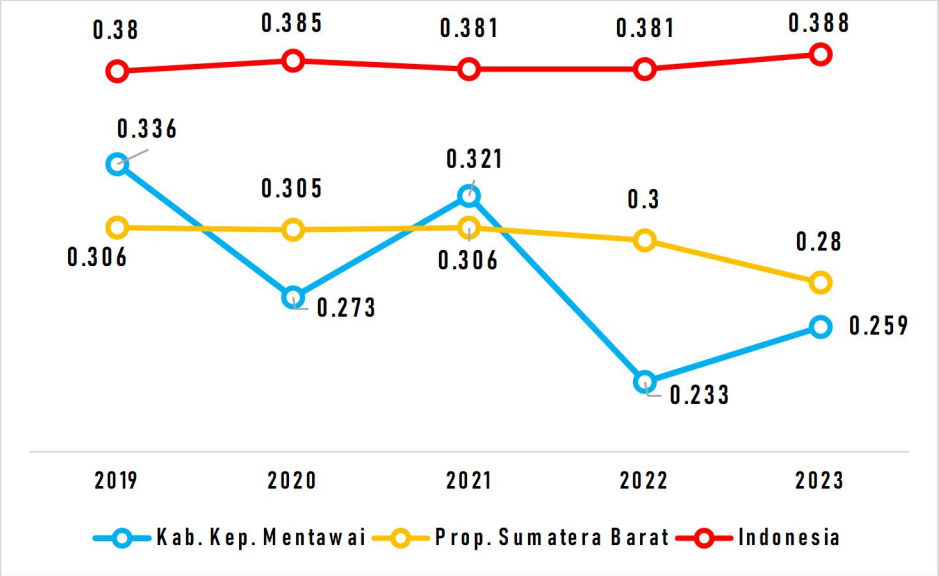
Rasio gini menjadi salah satu ukuran untuk melihat sejauh mana pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka dikatakan pemerataan pendapatan sempurna, namun jika rasio gini bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 - 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Gambar 2.13 menunjukkan perkembangan rasio gini Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dikatakan cukup baik. Walaupun pencapaiannya selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Namun, secara tren perkembangannya berada pada

posisi 0,2-0,3. Perbandingan pencapaian Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional menunjukkan perkembangan yang baik, bahwa pencapaian Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 tahun terakhir berada di bawah rata-rata pencapaian Rasio Gini Nasional dan hanya terpaut 0,03 dari pencapaian rata-rata Rasio Gini Propinsi Sumatera Barat (0,31).

Gambar 2.13
Rasio Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



Sumber : BPS (diolah)

Capaian Rasio Gini Kepulauan Mentawai pada tahun 2019 sebesar 0,336 mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 0,273 lalu kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,321 lalu tahun 2022 turun lagi pada kisaran 0,233 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,259 Artinya kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kepulauan Mentawai berkurang. Secara umum

pencapaian rasio gini Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 tahun terakhir masih dikategorikan pada tingkat ketimpangan rendah (0<rasio gini<0,4).

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

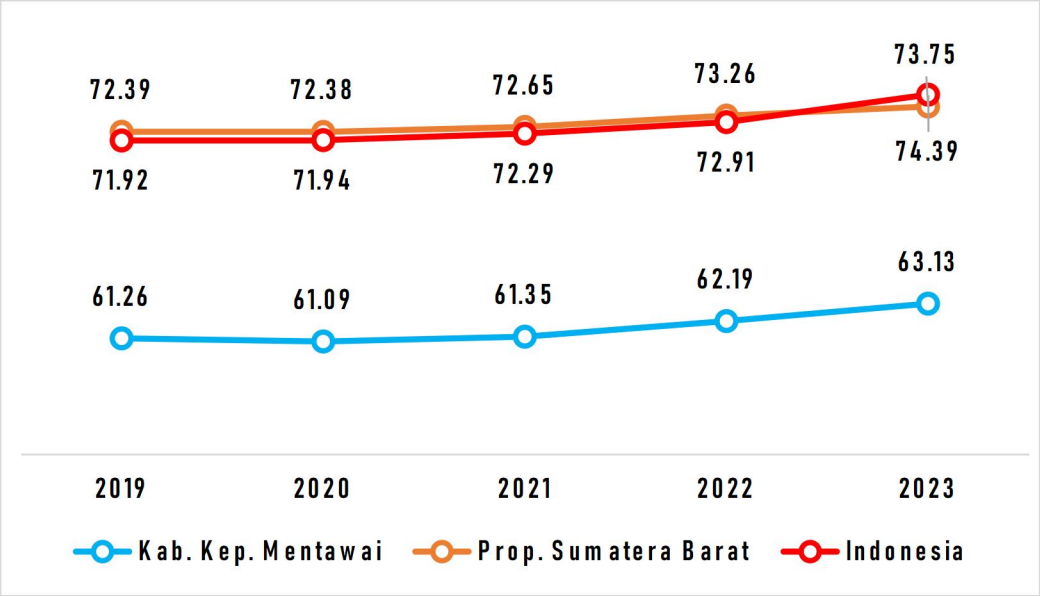
Indikator ukuran keberhasilan pembangunan dalam menyejahterahkan masyarakat dapat dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia setiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019-2023 seperti terlihat dalam Gambar 2.14 jika dilihat dari perbandingan capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Propinsi Sumatera Barat dan nasional, tampak pada Gambar 2.14 bahwa capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2019-2023 berada jauh dibawah capaian rata-rata IPM Propinsi Sumatera Barat dan Nasional.

IPM ini merupakan angka komposit dari capaian angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Capaian IPM Kabupaten Kepulauan

Mentawai yang masih di bawah pencapaian IPM menunjukkan belum baiknya kinerja elemen/ indikator yang membangun IPM itu sendiri, antara lain harapan lama sekolah, rata lama sekolah, pendapatan per kapita dan angka harapan hidup masih rendah.

Gambar 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



Sumber : BPS (diolah)

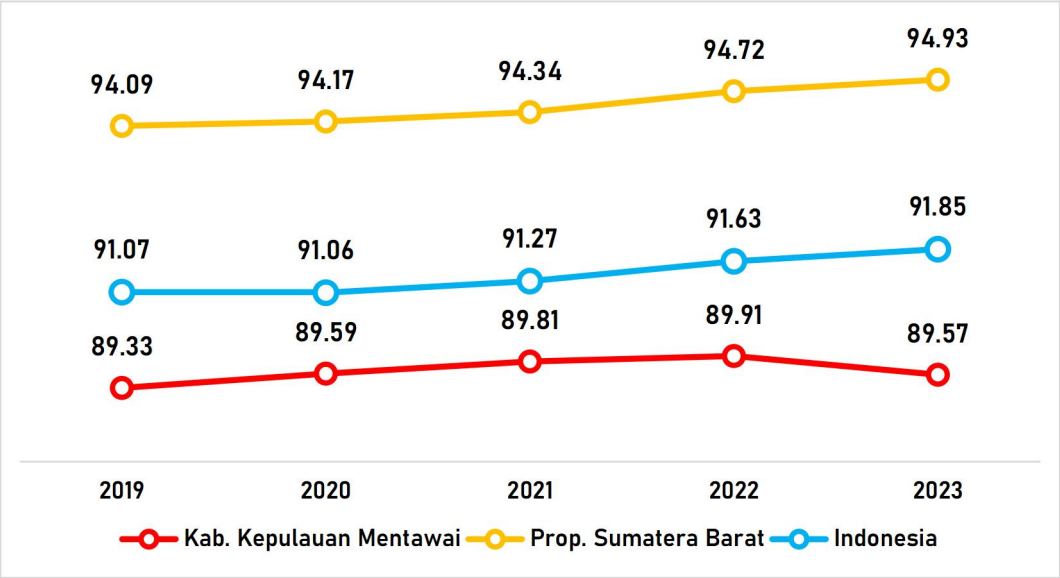
Pada tahun 2019, capaian IPM Kepulauan Mentawai sebesar 61,26 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 61,09. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 61,35 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 62,19 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 63,13. penurunan IPM pada Tahun 2020 terjadi penurunan pada sisi pengeluaran per kapita masyarakat selama pandemi yang dikarenakan akibat pembatasan aktifitas masyarakat sehingga membatasi atau menahan belanja/ pengeluaran masyarakat.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Indeks pembangunan gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Pembangunan gender menjadi hal penting dalam melihat bagaimana kesetaraan gender yang lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada di bawah capaian IPG Propinsi Sumatera Barat dan Nasional. Gambar 2.15 menunjukkan perkembangan IPG Kepulauan Mentawai Tahun 2019 sebesar 89,33 mengalami peningkatan pencapaian hingga

tahun 2023 IPG Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 89,57 artinya semakin membaiknya kesetaraan peran antara perempuan dengan laki-laki (menuju 100).

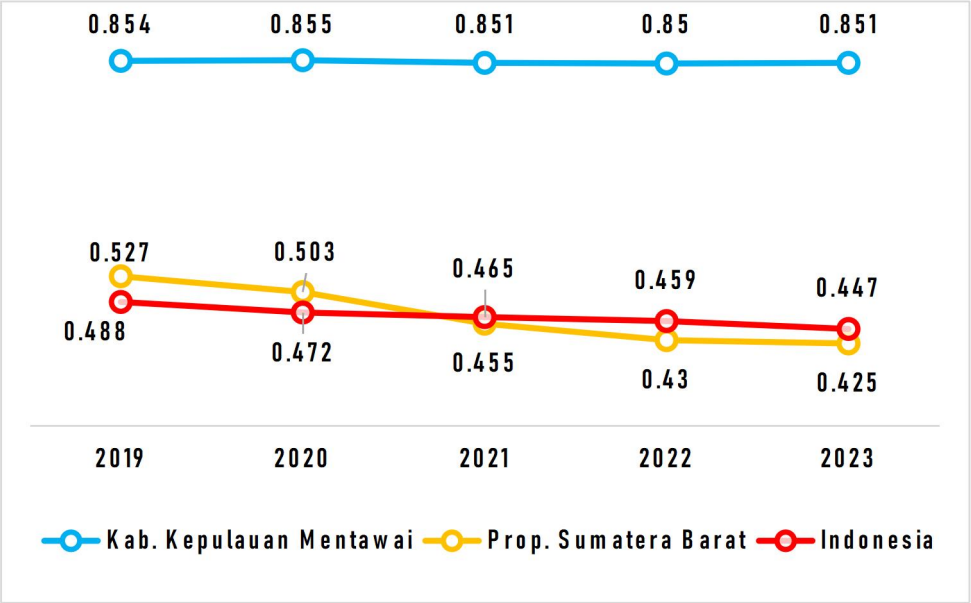
Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



Sumber : BPS (diolah)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Gambar 2.16 menunjukkan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang relatif masih tinggi yaitu pada kisaran 0,8 (mendekati 1), artinya masih tingginya ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan dalam pembangunan. Ketimpangan gender dapat berdampak negatif pada perekonomian daerah. Ketimpangan gender dapat mengakibatkan marjinalisasi dan pengucilan perempuan. Akibatnya, kondisi psikologis dan ekonomi bagi perempuan.

Gambar 2.16
Indeks Ketimpangan Gender (IPG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



Sumber : BPS (diolah)

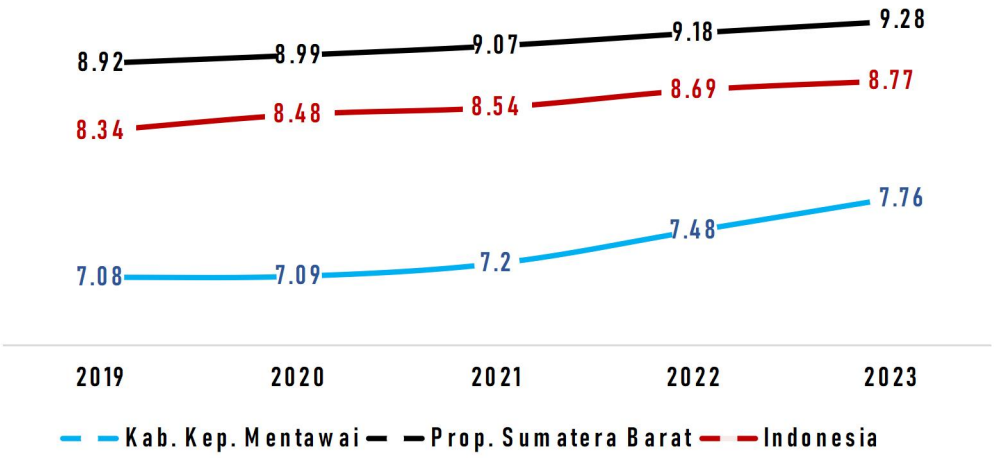
3. Rata-Rata Lama Sekolah

Mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana pasal 21 huruf e menyatakan bahwa salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan antara lain penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar. Pendidikan akan membantu mengembangkan kapital manusia, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang meningkatkan produktivitas. Pendidikan memperluas akses kesempatan bagi anak-anak usia sekolah. Ini memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai potensi, sehingga siap mengikuti pendidikan pada setiap jenjang. Dengan pendidikan

yang berkualitas, semua lapisan masyarakat memiliki peluang yang setara dan menjadi dasar kuat menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan manusia seutuhnya. Hakikatnya pembangunan daerah yang maju atau yang mengalami peningkatan haruslah berbanding lurus pembangunan manusianya, melalui pendidikan maka mata rantai kesenjangan sosial, kemiskinan dapat diputus dengan munculnya generasi yang berpendidikan dan memiliki daya saing.

Gambar 2.17 menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2019 rata-rata lama sekolah di Kepulauan Mentawai sebesar 7,08 tahun naik setiap tahunnya hingga tahun 2023 menjadi sebesar 7,76 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/sederajat.

Gambar 2.17
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



Sumber : BPS (diolah)

Jika dibandingkan dengan capaian Propinsi Sumatera Barat (9,28 tahun atau setara dengan kelas 8-9 SMP/sederajat pada tahun 2023) dan secara Nasional (8,77 tahun atau setara dengan kelas 8 SMP/sederajat pada tahun 2023) tentunya capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh di bawah capaian Propinsi Sumatera Barat dan Nasional (tampak seperti Gambar 2.17).

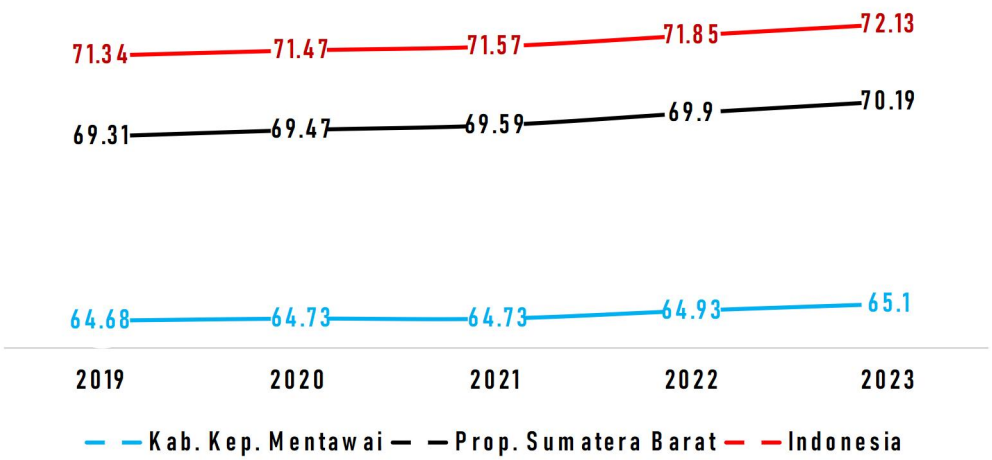
4. Angka Harapan Hidup

Kebijakan pembangunan kesehatan di daerah diarahkan pada upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan daerah tertinggal yaitu dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator kesehatan dapat tercapai dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Gambar 2.18 menunjukkan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan pencapaian, ini terlihat pada tahun 2019

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 64,68 tahun meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 65,1 tahun.

Gambar 2.18
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



Sumber : BPS (diolah)

Jika dibandingkan capaian AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian AHH Propinsi Sumatera Barat dan secara Nasional, tentunya capaian AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian AHH Propinsi Sumatera Barat dan Nasional. Upaya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) sangat erat kaitannya angka kematian anak lahir, gizi yang cukup bagi ibu hamil dan bayi lahir, nutrisi dan gizi bagi anak, pola hidup sehat dan produktivitas, kualitas lingkungan, kualitas hidup bagi lanjut usia.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa dilakukan dalam upaya pelestarian tata cara/ norma kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan kepedulian dan minat masyarakat menjadi hal penting dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya pada masyarakat terutama kaum muda agar nilai tersebut berkelanjutan dan lestari kegenerasi berikutnya.

Tabel 2.12
Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	8	0	0	0	2
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	2	2	4
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	12

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Melalui berbagai even/ festival yang dilakukan juga berbagai pembangunan sarana, pelestarian objek dan warisan budaya diharapkan mampu memajukan kebudayaan daerah sehingga menjadi lestari dan dikenal dengan baik.

Tabel 2.13
Perkembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah organisasi pemuda	9	9	12	10	13
2	Jumlah organisasi olahraga	20	10	15	12	14
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	6	8	10	6
4	Jumlah kegiatan olahraga	10	3	0	5	10
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	30	25	20	20	18
6	Lapangan olahraga	267	205	145	150	120

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan keolahragaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat identik dengan kehidupan bermasyarakat Mentawai, tahun 2020 kegiatan even olahraga dan kepemudaan tidak terselenggara yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Beberapa sarana keolahragaan dimasing-masing desa juga beberapa dalam kondisi tidak terawat dan tidak difungsikan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan pelayanan yang secara umum dibutuhkan dan menjadi prasyarat kehidupan masyarakat yang bermartabat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga atas

suatu barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisa kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; (6) sosial.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan tersebut antara lain kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah. Membuka akses

pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan prioritas dalam membangun dunia pendidikan. Pembangunan unit sekolah baru maupun rehabilitasi sekolah selalu diupayakan dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Letak geografis Kepulauan Mentawai menjadi tantangan tersendiri dalam membuka akses sekolah bagi masyarakat, selain terkait alokasi anggaran peran lintas sektoral juga ikut dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Keunggulan suatu bangsa tak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyatakan bahwa fungsi Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan

berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Secara rasional dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kualitas hidup manusia akan semakin baik, karena dengan ilmu pengetahuannya ia dapat mengelola dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh para ahli aliran klasik yang menganggap manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusianya (Smith, 1790). Pembangunan pendidikan merupakan untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Tabel 2.14 menunjukkan penduduk Mentawai yang berumur 5 tahun keatas dengan status pendidikan tidak bersekolah lagi sebesar 65,79 persen dan dengan status pendidikan tidak/belum pernah bersekolah sebesar 7,14 persen.

Tabel 2.14
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2023

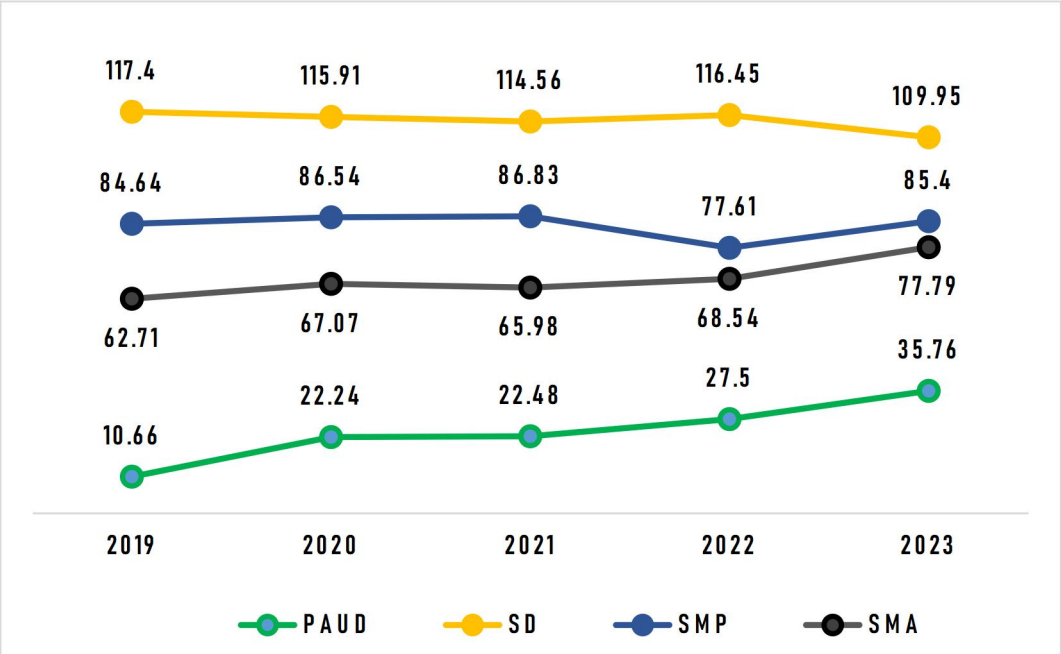
Karateristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	
JENIS KELAMIN					
Laki-Laki	6,30	13,51	5,73	6,75	62,72
Perempuan	8,04	17,04	6,08	5,12	63,72
KELOMPOK PENGELUARAN					
40 Persen Terbawah	9,63	19,55	7,32	6,43	57,07
40 Persen Tengah	5,84	14,06	4,91	6,27	68,91
20 Persen Atas	4,77	8,86	NA	4,44	76,91
Kabupaten Kepulauan Mentawai	7,14	15,21	5,90	5,96	65,79

Sumber: SATKESRA KKM 2023

Artinya ada sekitar 72,93 persen masyarakat Mentawai yang belum pernah dan belum menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu, sehingga selain memastikan akses layanan pendidikan formal bagi masyarakat juga memfasilitasi masyarakat yang akan mengikuti pendidikan kesetaraan sehingga secara formal jenjang pendidikannya telah terpenuhi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai gambaran tingkat partisipasi sekolah di suatu daerah. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Perhitungan APK dilakukan dengan membandingkan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu tanpa melihat ketepatan usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.

Gambar 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



Sumber : BPS (diolah)

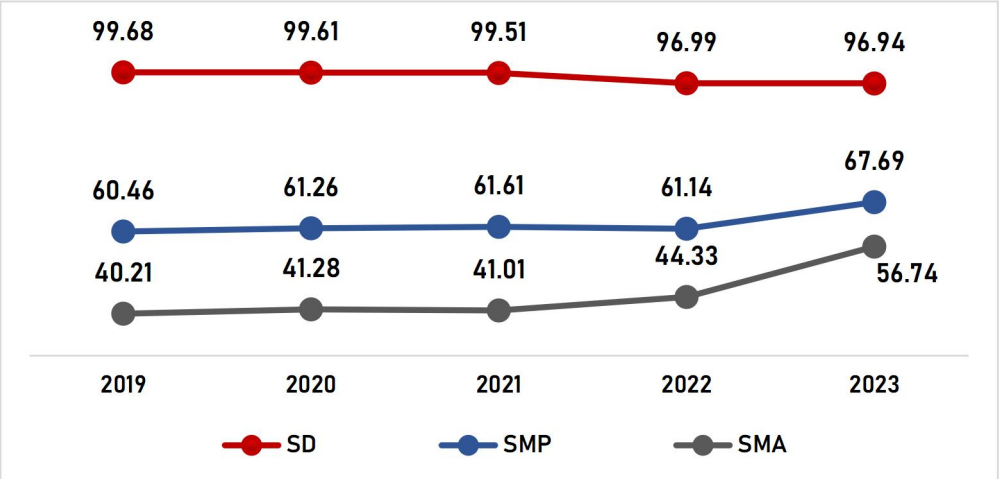
Gambar 2.19 menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2019-2023 dengan tren peningkatan. Untuk APK PAUD mengalami peningkatan jika dilihat perkembangan capaian mulai dari tahun 2019 sebesar 10,66 persen menjadi 35,76 persen di tahun 2023.

Untuk jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan SD/sederajat sesuai dengan kelompok umur usia sekolah SD/sederajat hingga Tahun 2023 (APK) kurun waktu 2019-2023 sudah melebihi 100 persen, artinya bahwa jumlah peserta didik SD/sederajat sudah melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang seharusnya. Jika dilihat dari tren perkembangan APK

SD/sederajat mengalami penurunan capaian, tentunya ini menjadi perhatian bagi masyarakat juga pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat terutama yang masyarakat yang tidak berusia sekolah jenjang SD/sederajat karena terdapat 11.753 jiwa atau 24,17 persen angkatan kerja belum pernah bersekolah atau tidak menamatkan SD/sederajat. Untuk capaian APK SMP/sederajat sedikit mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Capaian APK SMP/sederajat tahun 2019 sebesar 84,64 persen capaiannya meningkat hingga tahun 2023 menjadi sebesar 85,4 persen. Hal ini menjadi perhatian serius terkait kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada produktivitas. Begitu juga dengan capaian APK SMA/sederajat, dengan tren peningkatan dari 62,71 persen pada tahun 2019 menjadi 77,79 persen tahun 2023 tentu menjadi perhatian serius bagaimana meningkatkan minimal penduduk usia produktif jenjang pendidikannya tamatan SMA/sederajat, agar dari sisi kapasitas dan produktifitas dapat memadai.

Gambar 2.20 menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan tepat waktu dan pada rentang umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Untuk setiap jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat capaian APM belum mencapai 100 persen, artinya masih terdapat masyarakat pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu belum mendapatkan layanan pendidikan.

Gambar 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

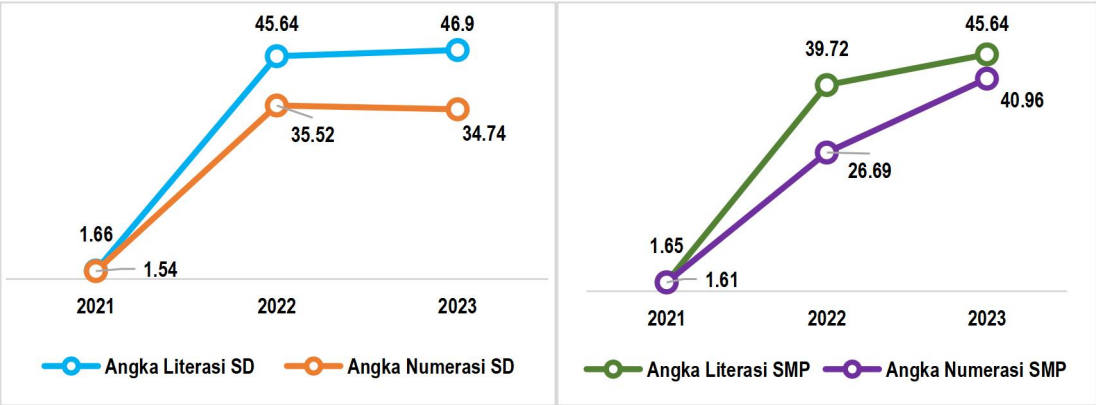


Sumber : BPS (diolah)

Untuk APM SMP/sederajat pencapaiannya masih sangat rendah yaitu pada tahun 2023 sebesar 67,69 persen (belum mendekati 100 persen), artinya masih ada sekitar 32,31 persen anak usia sekolah 13-15 tahun tidak sedang mengikuti pembelajaran tingkat SMP/sederajat, sedangkan untuk jenjang SD/sederajat mengalami tren penurunan dari 99,68 persen di tahun 2019 turun menjadi sebesar 96,94 persen tahun 2023. Untuk capaian APM untuk jenjang sekolah SMA/sederajat, jika dilihat dari tren capaiannya menunjukkan peningkatan yaitu tahun 2019 APM SMA/sederajat sebesar 40,21 persen hingga tahun 2023 menjadi 56,74 persen. Pencapaian APM ini menjadi gambaran tingkat partisipasi sekolah sesuai dengan kelompok usia sekolah atau kondisi partisipasi sekolah untuk tingkat kelompok usia yang sebenarnya.

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, literasi dan numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang, terutama anak-anak di usia sekolah.

Gambar 2.21
Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023



Sumber: Rapor Pendidikan Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

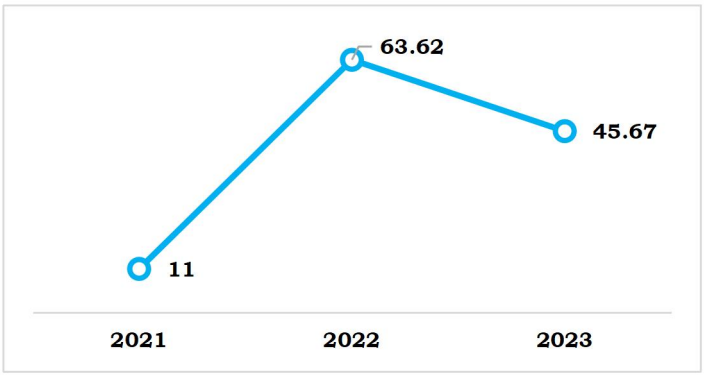
Gambar 2.21 menunjukkan bahwa perkembangan capaian angka literasi baik jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami peningkatan. Untuk jenjang pendidikan SD, angka literasi meningkat dari 1,66 pada tahun 2021 menjadi 46,9 pada tahun

2023. Begitu juga dengan angka literasi pada jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan dari 1,65 pada tahun 2021 meningkat menjadi 45,64 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbaikan yang signifikan atas kemampuan literasi peserta didik jenjang pendidikan SD dan SMP sehingga mampu lebih memaknai suatu narasi atau teks yang dibaca/tertulis.

Perkembangan angka numerasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya kurun waktu 2021-2023. Pada jenjang pendidikan SD, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,54 pada tahun 2021 menjadi 34,74 pada tahun 2023. begitu juga pada jenjang pendidikan SMP, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,61 pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 40,96 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan terhadap kemampuan numerasi peserta didik baik pada jenjang pendidikan SD maupun SMP sehingga lebih mampu memaknai dan memahami bilangan atau angka yang disajikan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Gambar 2.22
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023



Sumber: Perpustakaan Nasional RI

Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan peningkatan sebagaimana Gambar 2.22. Pada tahun 2021 nilai IPLM sebesar 11 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 63,62 namun sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 45,67. Penurunan nilai IPLM di tahun 2023 terletak pada komponen ketercukupan koleksi perpustakaan dari 2,3757 poin menjadi 0,1773 poin dan komponen perpustakaan yang dibina seusai SNP dari 1,0738 poin menjadi 0,3045 poin.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraannya, masyarakat yang yang sakit, akan terkendala untuk melakukan kegiatan yang produktif, penurunan penghasilan dan pendapatan, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan non fisik. Secara langsung kondisi fisik seseorang akan ditentukan oleh tingkat

kesehatannya, sedangkan kondisi non fisik seperti tingkat intelektual, pengendalian emosional juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan seseorang.

Kesehatan yang buruk secara langsung menurunkan potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan sekolah. Penyakit dapat membuat miskin keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya angka harapan hidup, dan menurunnya kesejahteraan psikologis. Ketimpangan dan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan serta ketidaksiapan negara/ daerah dalam menanggulangi ancaman wabah/penyakit akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, kesiapan negara dalam mengelola dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya akan berbanding lurus pada pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Tabel 2.15
Angka Kesakitan Menurut Karakteristik (Persen), 2023

Karakteristik Penduduk	2022	2023
Laki-laki	13,09	15,92
Perempuan	11,89	17,45
40% Terbawah	11,67	14,88
40% Tengah	9,95	14,05
20% Teratas	19,28	25,54
Kepulauan Mentawai	12,51	16,67

Sumber : SATKESRA KKM, 2023

Angka kesakitan atau morbiditas adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan disini diartikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik

maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi.

Angka kesakitan masyarakat Kepulauan Mentawai Tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 16,67 persen. Artinya ada sekitar 16,67 persen dari total penduduk mengalami keluhan kesehatan. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan angka kesakitan tahun 2022 yang sebesar 12,51 persen. Pola hidup sehat, perbaikan kualitas lingkungan dan penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan menjadi hal penting dalam upaya pengurangan tingkat kesakitan yang dialami oleh masyarakat. Jika dilihat lagi berdasarkan jenis kelamin, bahwa tingkat kesehatan atau keluhan kesehatan lebih banyak dialami oleh perempuan yaitu sebesar 17,45 persen, sedangkan laki-laki sebesar 15,92 persen.

Tabel 2.16
Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik Penduduk	2022	2023
Laki-laki	42,14	61,79
Perempuan	51,25	63,52
40% Terbawah	33,31	70,84
40% Tengah	53,34	63,21
20% Teratas	52,66	46,98
Kepulauan Mentawai	46,63	62,60

Sumber : SATKESRA KKM 2022

Masyarakat Kepulauan Mentawai yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 62,60 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 46,63 persen. Capaian ini tentu masih sangat rendah untuk layanan kesehatan yang diterima masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin yang berada pada rentang 40 persen pendapatan terendah yang pada angka 70,84 persen, artinya sekitar 30 persen masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan tidak menggunakan jaminan kesehatan dalam melakukan layanan kesehatannya.

Berbagai persoalan kemungkinan penyebab tidak maksimalnya penggunakan jaminan kesehatan daerah untuk melayani masyarakat terkhususnya masyarakat miskin dan rentan miskin di Kepulauan Mentawai seperti administrasi yang rumit, belum memahami fungsi jaminan kesehatan dan berbagai permasalahan lainnya. Fakta ini sangat bertolak belakang dengan kucuran iuran yang disalurkan ke BPJS kesehatan untuk memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin. Balita yang telah mendapatkan imunisasi lengkap pada tahun 2023 masih pada angka 35,87 persen, hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pasangan atau ibu yang memiliki kartu imunisasi yang sudah pada angka 91,11 persen.

Tabel 2.17
Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita)
yang Pernah Mendapat Imunisasi (Persen), 2023

Karakteristik Penduduk	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapat Imunisasi Lengkap
Laki-laki	91,54	33,43
Perempuan	90,61	38,12
40% Terbawah	88,68	41,12
40% Tengah	92,26	29,14
20% Teratas	98,59	32,02
Pendidikan Tertinggi KRT (SD kebawah)	97,77	33,71
Pendidikan Tertinggi KRT (SMP keatas)	88,60	37,59
Kepulauan Mentawai	91,11	35,87

Sumber : SATKESRA KKM 2023

Begitu juga dengan keluarga yang mendapatkan imunisasi dengan pendidikan tertinggi kepala keluarga SD kebawah hanya sebesar 33,71 persen. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan advokasi, himbauan bagi masyarakat yang memiliki balita (0-59 bulan) untuk melakukan imunisasi lengkap agar anak terpenuhi imun/daya tahan dan kekebalan tubuh anak. Kualitas kesehatan masyarakat juga sangat dipengaruhi dengan perilaku konsumsinya.

Tabel 2.18 menunjukkan tingkat konsumsi rokok masyarakat Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebesar 32,89 persen sebagaimana rata-rata konsumsi nasional sebesar 30-32 persen. Untuk persentase perokok penduduk dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah sebesar 32,28 persen dan penduduk perokok dengan tingkat pendidikan SMP keatas yaitu sebesar 33,45 persen. Rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi setiap minggu adalah

sebanyak 122 batang, artinya dalam seminggu pengeluaran untuk kebutuhan rokok sebesar Rp.327.500.

Tabel 2.18
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu (Persen), 2023

Karakteristik Penduduk	2023	
	Perokok	Rata-rata Batang Rokok per Minggu
40% Terbawah	30,88	123
40% Tengah	31,32	126
20% Teratas	38,75	112
Pendidikan Tertinggi SD ke bawah	32,28	136
Pendidikan Tertinggi SMP ke atas	33,45	109
Kepulauan Mentawai	32,89	122

Sumber : SATKESRA KKM 2023

Selain menguras pendapatan dan menambah pengeluaran, tentu dengan mengkonsumsi rokok akan memberi dampak kesehatan baik si pengguna rokok (perokok) dan orang disekitar perokok (perokok pasif) terutama bagi orang tua perokok yang memiliki balita ataupun anak-anak yang rentan terhadap penyakit pernafasan dan pemicu penyakit lainnya.

Persentase pengeluaran penduduk pengkonsumsi rokok, bahwa mayoritas pengkonsumsi rokok terbesar adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran 20 persen teratas yaitu dengan persentase 38,75 persen dan penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi SD ke bawah 32,28 persen.

Tabel 2.19
Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Indikator Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (tahun)	64,49	64,73	64,73	64,93	65,1
Prevalensi Stunting	25,2	19,3*	27,3	32	33,7
Angka Kematian Bayi (kematian/1.000 kelahiran hidup)	24,8	20,2	23	20,4	18
Angka Kematian Balita (1.000 balita)	28,1	3,6	3,2	13,8	12
Angka Kematian Ibu (kematian/100.000 kelahiran hidup)	191,3	356,3	207	191	304
Cakupan Desa UCI (%)	27,91	61,36	59,52	51,2	35,87
Kunjungan ibu hamil)%)	43,86	43,9	53,1	75,71	81,4
Rasio Daya Tampung RS Rujukan (TT/100.000 penduduk)	48	59	71	71	85
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	50,97	50,99	66,50	70,18	76,42
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin (%)	40,04	61,76	55,14	75,71	81,4
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	32,58	65,33	59,07	60,00	68,26
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	35,18	27,24	58,01	49,13	56,28
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	8,61	12,74	17,74	21,43	24,05
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	37	31,71	32,71	54,60	56,24
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	0,9	8,79	84,61	75,20	78,31
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	17,23	15,54	48,83	35,44	47,82
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	31,5	14,36	10,88	67,25	70,05
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0,81	36,04	38,91	90,15	92,46
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan standar pelayanan TBC sesuai standar (%)	53,96	30,04	18,52	60,74	65,62
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Angka kesakitan Malaria	2,55	0,77	0,5	1,31	1,43
Angka kesembuhan TB	85	85	85	85	90

sumber: data (diolah)

Perkembangan indikator kinerja kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2019-2023 secara umum menunjukkan capaian yang variatif, ada beberapa indikator yang pencapaiannya sudah baik namun juga terdapat indikator lainnya yang masih perlu upaya lebih lagi untuk pencapaian target kinerjanya salah satunya indikator kesehatan prevalensi stunting. Pada Tabel 2.19 menunjukkan beberapa capaian indikator kesehatan daerah selama 5 tahun terakhir. Capaian angka prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren selama lima tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yaitu dari 25,2 persen di tahun 2019 menjadi 32,0 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 33,7 persen, peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat begitu juga pemenuhan asupan gizi kepada pasangan atau ibu hamil/ 1.000 hari pertama kehidupan ketika sudah diketahui ada janin, begitu juga dengan pemantauan gizi ibu hamil yang senantiasa dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Begitu juga perbaikan sarana dan prasarana lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan toilet RT, pengelolaan limbah, drainase dan berbagai intervensi yang terpadu. Akselerasi penanganan stunting telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti Stunting dan Gizi Buruk Peduli Anak (Masgibur Dua) dengan sasaran intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Indikator angka kematian bayi yang diukur dari jumlah kelahiran per 1.000 kelahiran hidup capaiannya juga mengalami perbaikan. Jumlah angka kematian bayi yang dilahirkan meninggal hingga berumur 1 tahun pada tahun 2019 sebanyak 24,8 kasus kematian lalu kasus ini meningkat dan pada tahun 2021 tercatat ada 23 kasus kejadian kematian bayi dari 1.000 kelahiran bayi hidup dan pada tahun 2023 kasusnya berkurang menjadi 18 kasus. Selain itu, indikator kesehatan lain yang sangat penting adalah angka kematian ibu yang capaiannya atau kasusnya masih cukup tinggi. Pada tahun 2019 angka kematian ibu melahirkan tercatat 191,3 kasus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 tercatat sebanyak 304 kasus. Angka ini masih tergolong cukup tinggi karena 1 (satu) nyawapun ibu pada saat bersalin/melahirkan harus tertolong. Begitu juga dalam upaya penanggulangan stunting dan pemberian asupan vitamin melalui imunisasi kepada balita, capaian indikator cakupan desa UCI mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 cakupan desa UCI mencapai 27,91 persen dan capaian relatif konstan hingga tahun 2023 cakupannya menjadi sebesar 35,87 persen. Upaya peningkatan cakupan desa UCI terus dilakukan selain secara konvensional melalui posyandu yang telah terjadwal setiap bulannya, juga dilakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan ataupun melalui kunjungan langsung ke rumah tangga.

Persentase kunjungan ibu hamil dalam kurun 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan dari 43,86 persen tahun 2019 meningkat menjadi 81,4 persen di tahun 2023 dengan harapan menurunnya risiko atau kasus kematian ibu melahirkan dan anak lahir. Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2019 sebesar 50,97 persen meningkat pada tahun 2023 menjadi 76,42 persen. Begitu juga dengan persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan persalinan pada tahun 2023 sudah mencapai 81,4 persen, dan persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2023 sebesar 68,26 persen.

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sebesar 24,05 persen. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2023 sebesar 56,24 persen. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sudah mencapai 78,31 persen pada tahun 2023 tentu ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat usia lanjut dan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Cakupan layanan kesehatan bagi penderita hipertensi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 17,23 persen meningkat menjadi 47,82 persen pada tahun 2023.

Cakupan layanan penderita diabetes melitus (DM) juga mengalami peningkatan yaitu dari 31,5 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,05 persen pada tahun 2023. Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yaitu 65,62 persen pada tahun 2023. Untuk rasio daya tampung RS rujukan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu sebesar 85 TT per 100.000 penduduk, artinya telah tersedia sebanyak sekitar 85 tempat tidur untuk melayani rujukan dan rawatan di RS, angka ini juga sebagai syarat untuk peningkatan akreditasi layanan RS dimana hingga pada tahun 2023 masih dengan tipe D.

Pembangunan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki atau yang tersedia pada daerah tersebut. Tentunya tenaga kesehatan yang tersedia sudah seharusnya memiliki standar keahlian dimasing-masing disiplin ilmunya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga kesehatan melalui beberapa saluran, antara lain penerimaan CPNS, tenaga medis kontrak, tenaga penyuluh, kemitraan dengan perdesaan/dusun, tenaga kesehatan PTT dan melalui saluran lainnya.

Tabel 2.20
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Tenaga Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter	17	48	38	43	42
Perawat	160	297	137	353	346
Bidan	82	250	79	263	265

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Jumlah tenaga kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan jumlah yaitu untuk tenaga kesehatan perawat dan bidan. Untuk penyediaan tenaga kesehatan dokter masih menjadi tugas berat dalam menyediakan jasa layanan kesehatannya terkhusus di desa dan dusun.

Pembangunan kesehatan adalah bentuk pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat. Tentunya akses terhadap layanan kesehatan harus menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana kesehatan untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan sebagai sarana bagi masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan permasalahan kesehatan baik itu preventif, kuratif dan promotif kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 2.21
Jumlah Layanan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Sarana Layanan Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	RSUD/RS Pratama	1	1	1	2	2
2	Puskesmas	14	15	15	15	15
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	39	38	27	39	40
4	Poskesdes	82	82	128	90	90
5	Posyandu	255	279	279	289	289
6	Polindes	52	33	33	90	90

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Ketersediaan layanan kesehatan berupa sarana dan prasarana kesehatan adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses layanan kesehatan. Pusat layanan kesehatan masyarakat harus menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak bersusah payah pergi ke daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.21 menunjukkan perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami perkembangan dalam hal jumlah sarana, terutama di daerah terpencil yaitu di dusun-dusun. Tentunya tidak sekedar penyediaan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, yang lebih esensial lagi adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan promosi pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat dalam memperlancarkan aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas serta daya saing.

Pembangunan jalan menjadi hal utama dan pertama yang harus disediakan pemerintah. Ketersediaan jalan menjadi

prasayarat awal dalam pembangunan yang berkelanjutan. Jalan memegang peranan penting dalam kegiatan transportasi dan mobilitas penduduk. Sebagai penopang sistem sosial dan ekonomi masyarakat, jalan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, terutama dalam peningkatan sektor ekonomi riil masyarakat. Tabel 2.22 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kondisi baik menunjukkan tren penurunan. Panjang jalan hingga tahun 2023 dengan kondisi baik hanya 45,50 km dari total panjang jalan yang ada 1.130 km atau 4,02 persen, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak sedang tahun 2023 sekitar 33,80 km atau 2,99 persen dari total panjang jalan dan panjang jalan dalam kondisi rusak berat sekitar 971,4 km atau sekitar 85,96 persen. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, mengingat peran strategis pembangunan jalan dalam memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.22
Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Tahun	Kondisi Jalan (km)				Panjang Jalan (km)
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2019	64,6	268,1	619,9	177,6	1.130,2
2020	53,89	293,54	388,93	393,82	1.130,2
2021	88,52	60,54	210,18	770,94	1.130,2
2022	111,92	41,54	35,71	941,01	1.130,2
2023	45,50	33,80	79,50	971,40	1.130,2

Sumber: BPS (diolah)

Perkembangan jalan trans Mentawai yang telah dilaksanakan untuk mendukung kasawan strategis daerah hingga tahun 2023

menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2023, panjang jalan yang telah dibangun adalah sepanjang 359,3 km dengan rincian struktur beton sepanjang 93,92 km, dengan perkerasan sepanjang 9,9 km, dengan pembukaan/ tanah sepanjang 255,48 km.

Tabel 2.23
Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2023

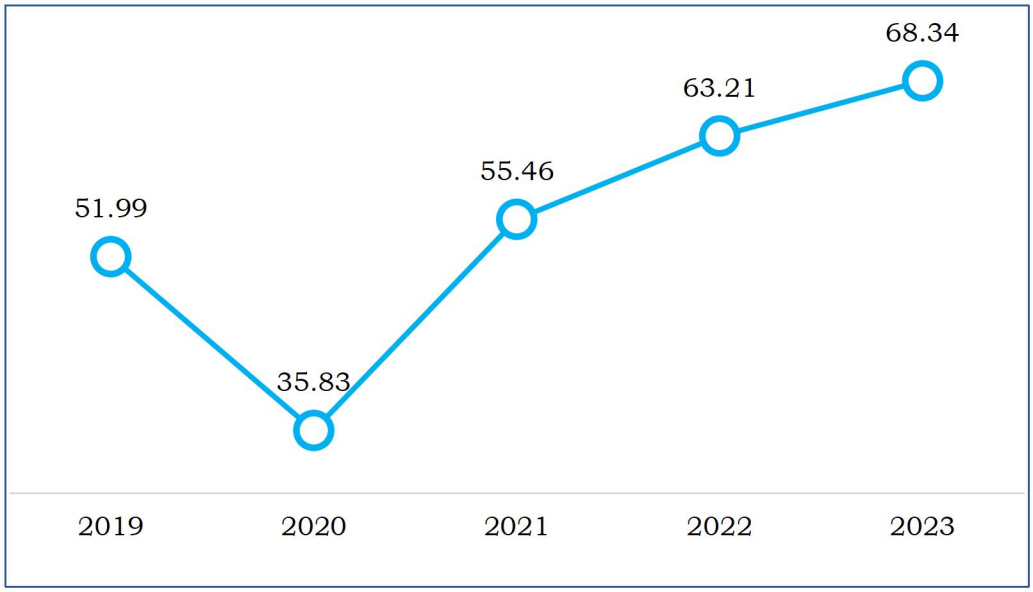
Rencana Jalan TRANS MENTAWAI (405,69 km)	Beton (km)	Perkerasan (km)	Pembukaan/ Tanah (km)	Belum Terbuka (km)
Trans Sipora (89,49 km)	60,10	0	14,0	15,39
Trans Pagai Utara (63 km)	15,0	0	25,0	23,0
Trans Pagai Selatan (66 km)	3,28	0	54,72	8
Trans Siberut (187,2 km)	15,54	9,9	161,76	0
Total	93,92	9,9	255,48	46,39

Sumber : Dinas PUPR Kab.Kepulauan Mentawai

Secara total, panjang trans Mentawai yang belum terbangun/ belum terbuka adalah sepanjang 46,39 km. ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan pembukaan jalan trans Mentawai agar wilayah mulai dari ujung utara hingga selatan Pulau Siberut sudah terhubung, begitu juga di 3 pulau lainnya.

Gambar 2.23 menunjukkan perkembangan rumah tangga dengan akses air minum layak, selama kurun waktu 2019-2023 tren pencapaiannya menurun, yaitu pada tahun 2019 persentase RT dengan akses air bersih layak sebesar 51,99 persen dan capaiannya setiap tahun menurun hingga pada tahun 2023 capaiannya menjadi sebesar 68,34 persen.

Gambar 2.23
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Bersih Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



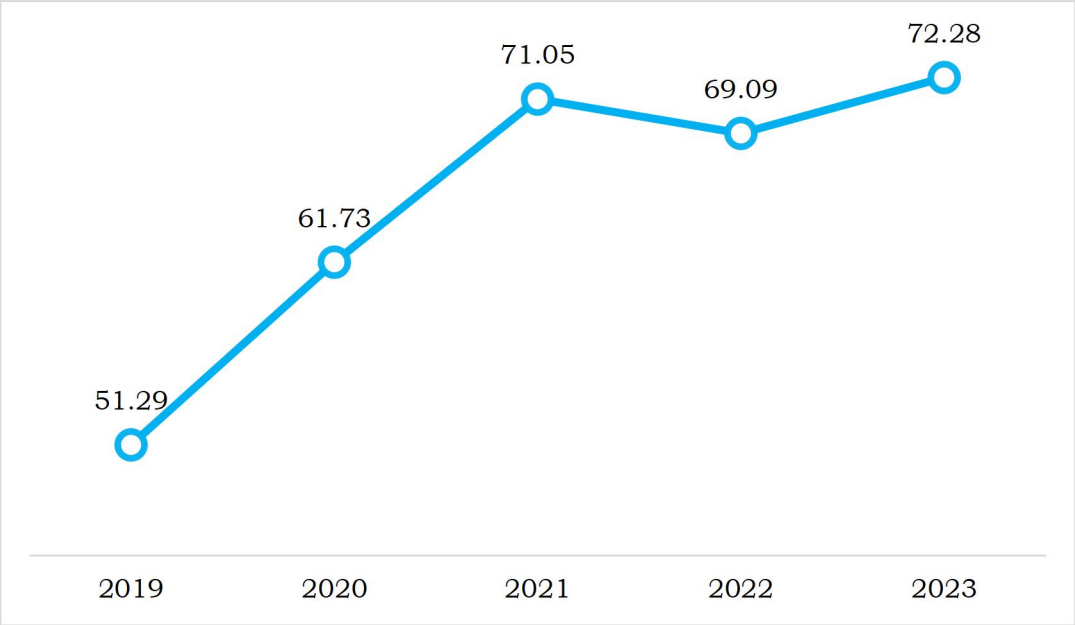
Sumber : BPS (diolah)

Angka ini tentunya sangat kecil jika dilihat kebutuhan masyarakat akan layanan dasar air bersih dan juga bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harusnya sudah ada dan dinikmati oleh masyarakat. Capaian ini tentunya menjadi perhatian pemerintah karena intervensi capaiannya dapat didorong dari investasi atau belanja pemerintah pada pengadaan sistem penyediaan air minum.

Perkembangan capaian rumah tangga dengan sanitasi layak di Kepulauan Mentawai Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan pencapaian. Pada Gambar 2.24, tahun 2019 rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 51,29 persen meningkat pada tahun 2023 menjadi 72,28 persen. Capaian ini tentunya didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat

secara mandiri untuk menyediakan dan mengelola sanitasi layak skala rumah tangga.

Gambar 2.24
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



Sumber : BPS (diolah)

Perkembangan capaian indikator pekerjaan umum dan penataan ruang pada tabel 2.24 secara umum mengalami peningkatan capaian walaupun tidak signifikan. untuk rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir setiap tahun perkembangannya semakin membaik, yaitu dari 3,16 persen tahun 2019 meningkat menjadi 4,5 persen pada tahun 2023, masih rendahnya capaian ini disebankan oleh alokasi anggaran yang cukup besar pada penanganan dan pembangunan pada sepanjang kawasan permukiman yang berpotensi dan terdampak banjir.

Begitu juga dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum berbasis SPAM perpipaan dan non perpipaan mengalami peningkatan pencapaian yaitu pada tahun 2019 sebesar 46,12 persen meningkat pada tahun 2023 menjadi 61,71 persen. Upaya pemenuhan air minum kepada setiap rumah tangga menjadi target pembangunan setiap tahunnya terutama delam mendukung pengentasan kemiskinan, pengentasan stunting dan sebagai komitmen dalam penerapan SPM dan pelayanan dasar.

Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan walaupun belum signifikan. pada tahun 2019 tingkat kemantapan jalan kebupaten sebesar 6,34 persen dari total sepanjang 1.130 km dan kemantapan jalan kabupaten mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 telah mencapai 14,7 persen.

Tabel 2.24
Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2022
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	3,5%	3,5%	4,2%	4,5%	4,84%
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	3,82%	3,82%	4,20%	4,58%	4,62%
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	20 ha	20 ha	21 ha	22 ha	48 ha
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	49,80%	54,58%	56,65%	61,71%	64,10%

Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2022
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	24,25%	25,63%	26,2%	30,56%	36,60%
Rasio kepatuhan IMB kab/kota					
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	14,54%	14,89%	13,19%	13,63%	14,7%
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1,8%	1,8%	2%	2,6%	2,8%
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	98%	100%	96%	98%	98,4%

sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kep.Mentawai

Penataan ruang dan wilayah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 menjadi acuan hukum dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Rencana kawasan tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 20 tahun di bagi dalam 2 kawasan antar lain kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung terdiri:

1) Kawasan hutan lindung.

   Kawasan hutan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung darat dan kawasan hutan lindung manggrove dengan luas 13.533,86 ha.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain adalah kawasan resapan air. Kawasan ini tersebar di setiap kecamatan di Kepulauan Mentawai.

3) Kawasan perlindungan setempat.

   Kawasan ini meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar danau, kawasan hutan mangrove dengan ketentuan daratan sepanjang tepian dengan jarak minimal 100 meter dari titik ke arah daratan, sedangkan kawasan hutan mangrove dengan luas 13.353 ha.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

   Kawasan ini terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan suaka alam perairan, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

   Kawasan suaka terdiri atas kawasan suaka alam dengan luas 6.019,99 ha. Kawasan suaka alam perairan terdiri atas kawasan suaka alam perairan atau dpl dengan luas 160 ha. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Siberut seluas 190.500 hektar. Kawasan wisata alam laut yaitu Taman Wisata Laut Teluk Sarabua Saibi terdapat di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah seluas 21.200 hektar. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu kawasan komunitas adat/budaya Mentawai terdapat di Dusun Terekan

Hulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Dusun Sirisurak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Desa Madobag, Dusun Ongah dan Kinikdog Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Dusun Bolotok dan Boboakenen Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, dan benteng Peninggalan Jepang di Sioban Kecamatan Sipora Selatan.

5) Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor di wilayah perbukitan Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan gempa dan tsunami tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan banjir tersebar di sekitar aliran dan muara Sungai Talopulai dan Sungai Makalo di Kecamatan Pagai Selatan, Sungai Silabu dan Sungai Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara, Sungai Taikako dan Sungai Matobe di Kecamatan Sikakap, Sungai Saureinu di Kecamatan Sipora Selatan, Sungai Pogari, Sungai Berimanua dan Sungai Betumonga di Kecamatan Sipora Utara, Sungai Sagulubbek dan Sungai Taileleu di Kecamatan Siberut Barat Daya, Sungai Saibi di Kecamatan siberut tengah, Sungai Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Sungai Sikabaluan, Sungai Monganpoula, Sungai Sotboyak, Sungai Bojakan, Sungai Sirilanggai di Kecamatan Siberut Utara, Sungai

Simalegi, Sungai Simatalu, Sungai Berisigep, dan Sungai Policoman di Kecamatan Siberut Barat.

Kawasan rawan abrasi terdapat di Pantai Muara Sikabaluan (Kecamatan Siberut Utara), Pantai Muara Siberut (Kecamatan Siberut Selatan), Pantai Mapaddegat dan Pantai Tuapejat (Kecamatan Sipora Utara), Pantai Sioban, Pantai Beriulou, Pantai Desa Bosua, Pantai Bandara Rokot Matobe (Kecamatan Sipora Selatan), dan di Pantai Sikakap (Kecamatan Sikakap).

6) Kawasan lindung geologi.

Kawasan lindung geologi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan rawan gempa bumi terdapat di terdapat di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh wilayah pesisir seluruh wilayah daerah.

7) Kawasan konservasi perairan.

Kawasan konservasi perairan di Kepulauan Mentawai terdapat pada Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut dengan luas total 123.746,94 hektar.

8) Kawasan lindung lainnya.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas kawasan terumbu karang di Pulau Siberut seluas kurang lebih 5.410,7 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Sipora seluas kurang lebih 5.988 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Utara seluas

kurang lebih 733 hektar dan kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Selatan seluas kurang lebih 1.099 hektar.

Kawasan budi daya di Kepulauan Mentawai terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 246.011,41 ha, kawasan peruntukan pertanian dengan luas 119.492,20 ha. Kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi bandar udara (bandara), pertahanan dan keamanan.

Tabel 2.25
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135
Persentase	1,20	30,51	41,75	8,44	18,11	

Peruntukan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mayoritas merupakan kawasan hutan atau suaka pelestarian alam dengan luas sebesar 492.294,38 ha atau sekitar 81,89 persen dari total wilayah, sedangkan untuk areal penggunaan lainnya sebesar 108.804,62 ha atau sebesar 18,11 persen.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu

pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis di Kepulauan Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Sebuah rumah harus memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

Perkembangan rasio rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 rasio rumah layak huni telah mencapai 25 persen lalu, tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sekitar 41,46 persen dengan jumlah rumah tidak layak huni sekitar sebesar 5.787 unit.

Tabel 2.26
Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio rumah layak huni (%)	25	30.98	38,02	43,05	41,46
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	7,3	7,5	8	10	12,2
3	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah/ kota (%)	1,45	1,5	1,73	1,85	2,12
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	4,25	4,25	5	5,3	5,5

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7.180	6.800	6.500	5.840	5.787
6	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	0	1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Begitu juga dengan cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meningkat dari 7,3 persen di tahun 2019 menjadi 12,2 persen pada tahun 2023. Untuk persentase fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 1,45 persen pada tahun 2019 menjadi 2,12 persen tahun 2023. Begitu juga dengan jumlah rumah tidak layak huni yang selalu diintervensi melalui program pemerintah daerah yaitu pembangunan rumah layak huni baik itu yang menjadi relokasi kawasan bencana atau berpotensi bencana juga sebagai program pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, yaitu dari 7.180 unit RTLH pada tahun 2019 berkurang menjadi 5.787 unit pada tahun 2023.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, selama periode waktu 2019-2023, berdasarkan data

yang ada pada Tabel 2.27 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan, sesuai dengan tabel 2.27 di bawah ini:

Tabel 2.27
Perkembangan Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	72	85	88	90	92
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (persen)	30	35	38	60	80
Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	80	30	25	25	20
Persentase Penegakan PERDA (persen)	80	70	65	65	70
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.814	15.568	2.536	3.217	4.428
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.814	15.568	2.536	3.217	4.428
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	167	12.560	856	592	672
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Perkembangan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum kondusif dan masih dalam situasi yang terkendali. Beberapa indikator terkait kebencanaan yang menjadi bagian dari urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dirangkum dalam tabel 2.27. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat pluralis/ majemuk secara prinsip memiliki potensi pada gesekan antar golongan, suku ataupun agama,

namun penguatan koordinasi antar pimpinan lembaga pemerintahan dan para pemuka agama, pemuka adat dan masyarakat yang sudah terjalin dan terjaga dengan baik menjadikan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak terjadi atau tidak ada kasus yang serius. Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dim Kepulauan Mentawai dengan tingkat kesulitan geografis mampu diselesaikan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 92 persen. Namun pada cakupan layanan bencana kebakaran masih pada angka 60 persen di tahun 2023. Sepanjang tahun 2023 telah terjadi 12 kejadian kebakaran diantaranya dapat 10 ditangani sedangkan 2 kejadian kebakaran tidak dapat ditangani segera melalui unit pemadam kebakaran, hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana antisipasi kebakaran di setiap kecamatan belum ada (yang ada di Sikakap, Muara Siberut, Tuapejat, Sioban) sehingga tidak dapat mencakup seluruh wilayah di Kepulauan Mentawai. Untuk *respon time* kejadian kebakaran sudah semakin membaik yaitu 20 menit di tahun 2023. Untuk penegakan perda senantiasa dilakukan dengan mengutamakan sosialisasi dan ajakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan tindakan-tindakan yang mengarah pada preventif dalam upaya menjaga kondusifitas dan kenyamanan masyarakat, seperti pada penertiban lapak atau kios pedaganag yang tidak pada peruntukannnya telah dilakukan tindakan penertiban langsung. Begitu juga dengan personel

penegakan peraturan daerah yang masih sangat terbatas yaitu dengan PPNS sebanyak 2 orang, sehingga untuk capaian penegakan Perda pada tahun 2023 hanya mencapai 70 persen.

Untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib sosial, selama periode waktu 2019-2023, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.28 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan pada sarana sosial yang direhabilitasi serta indikator lain.

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah sangat baik, dalam artian setiap kejadian dan kebutuhan PPKS selalu difasilitasi dan dibantu. Untuk jumlah PPKS dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 24.413 orang dan meningkat pada tahun 2023 menjadi sebanyak 25.241 orang.

Tabel 2.28
Perkembangan Indikator Sosial
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PPKS yang memperoleh bantuan (persen)	100	100	100	100	100
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial (persen)	100	100	100	100	100
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penanganan PPKS (persen)	100	100	100	100	100
Jumlah PPKS	24.413	30.286	24.636	24.797	25.241
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk capaian cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti serta cakupan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota telah mencapai 100 persen, artinya untuk setiap kasus yang ada telah ditangani/difasilitasi oleh dinas terkait.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumber daya manusia menjadi penting dalam

menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indikator tenaga kerja lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.29 dibawah ini.

Tabel 2.29
Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	98,04	83,10	81,65	78,25	80,07
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	2,92	3,98	2,79	1,39	1,33
Jumlah pengangguran (orang)	1.420	2.063	1.485	716	711
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1,2	5	10	20	25
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	32,6	35	35,4	38	41,2
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	77,8	80	83,6	85	88
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	0	0	0	0	1

Sumber : BPS Kepulauan Mentawai dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif konstan pada kisaran 1-2 persen. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,39 mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 1,33 persen. Tingkat partisipasi angkatan sebagai bentuk gambaran ketersediaan angkatan kerja pada kelompok penduduk usia kerja yang

produktif menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 2022 yaitu sebesar 78,25 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 80,07 persen. Untuk jumlah pengangguran di Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2023 sebanyak 711 orang berkurang jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada tahun 2022 yaitu sebanyak 716 orang.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada periode tahun yang sama menunjukkan persentase yang semakin bertambah, hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Pembangunan gender di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, untuk tahun 2019 capaian IPG sebesar 89,45 persen dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2023 menjadi 89,57 persen.

Tabel 2.30
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pemenuhan hak anak (persen)	100	100	100	100	100
Pencanangan kecamatan layak Anak (kec)	0	4 kec	4 kec	4 kec	3 Kec
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait (persen)	100	100	100	100	100
Persentase Kepala Keluarga perempuan yang sejahtera (persen)	8,6	8,75	9	7	7,4

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	89,33	89,59	89,81	89,91	89,57
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)	100	100	100	100	100
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	11,22	51,03	52	50	53,95
Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	65,12	42,40	42,93	42,17	72,50
Persentase PNS perempuan dibanding total PNS (persen)	49,55	51,03	51,25	52,37	53,95
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,16	0,13	0,11	0,12	0,13
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk pencapaian kabupaten layak anak di Kepulauan Mentawai masih pada predikat pratama dan perlu peningkatan, hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk membangun komitmen dan mengintegrasikan program-program pembangunan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kepulauan Mentawai. Dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, setiap kasus yang ada selalu ditangani dengan baik, koordinasi dengan Forkopimda dan muspika di kecamatan sangat baik begitu juga dengan peranan pokja P2TP2A sebagai perpanjangan tangan dan mitra pemerintah daerah melalui unit UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang telah terbentuk sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat baik serta dalam upaya pencegahan dan penanganan kejadian tanggap dan melibatkan berbagai pihak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pada urusan wajib pangan berbagai indikator yang terlihat pada Tabel 2.31 mengambarkan perkembangan yang cukup baik dan mengalami peningkatan pencapaian dalam kurun waktu 2019-2023, begitu juga dengan pengawasan dan pembinaan pangan. Perkembangan capaian ketahanan pangan secara nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah yang dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Tahun 2019 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 38,86 dan capaian ini terus menurun hingga tahun 2021 capaian indeks ketahanan pangan menjadi sebesar 37,67 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 52,48 dan pada tahun 2023 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 50,9.

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan pangan utama	67	67	68	68	70
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	48,81	48,81	52,07	52,07	65,27
lndeks Ketahanan Pangan	38,86	46,67	37,67	52,48	50,91
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	78	80	82	84	85

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam kaitan ketersediaan pangan utama

sebagai konsumsi pangan lokal yang tersedia, capaiannya cukup stabil, tahun 2019 sebesar 78 persen dan hingga tahun 2023 capaiannya sebesar 85 persen. Angka ini masih dikatakan sangat kecil mengingat potensi sumber daya alam Kepulauan Mentawai yang sangat besar untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dan juga sebagai upaya ketahanan pangan untuk antisipasi keadaan mendesak atau terjadinya bencana.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Legalisasi aset berupa tanah sangat penting bagi pemerintah khususnya masyarakat dalam menopang tumbuh kembangnya sosial ekonomi masyarakat. Sengketa pertahanan/ lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu menjadi konflik sosial ditengah masyarakat. Tanah hak ulayat (adat) dan sengketa tanah masyarakat menjadi persoalan khususnya menyangkut hak masyarakat miskin selalu dimediasi baik melalui pemerintahan desa, di kecamatan dan bahan tingkat kabupaten melalui koordinasi pemangku kepentingan agar hak-hak kepemilikan pertanahan masyarakat terjamin. Untuk persentase luas lahan yang telah memiliki sertifikat di Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 baru mencapai 22,05 persen atau seluas 81.572.246,39 m^2.

Begitu juga dengan pengakuan hak wilayah adat oleh pemerintah melalui Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejak tahun 2019 yaitu Uma Goisooinan seluas 971 ha, Uma Rokot seluas 114

ha, Uma Usut Ngaik seluas 83 ha dan Uma Saureinu seluas 5.739 ha.

Tabel 2.32
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2022

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penanganan sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi (persen)	100	100	100	100	100
Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	13,8	11,05	11,4	20,42	22,05
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	30	35	38	40	62,36
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	0	0	0
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	1.200 ha	1.200 ha	800 ha	800 ha
Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	0	0	0
Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.33 kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestisasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup perkembangannya mengalami

perbaikan dari tahun 2019 dengan predikat cukup baik meningkat hingga pada tahun 2023 pada predikat baik.

Tabel 2.33
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penetapan hak MHA	Tidak ada	4	4	0	2
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota (persen)	6,2	6,84	7,38	14,35	26,47
Penanganan kasus lingkungan hidup	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,44	81,93	82,24	83,08	83,17
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota (%)	30	45	50	53,4	55,04

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh stakeholder, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik. Untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun, intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten (Kecamatan Sipora Utara/Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih

rendahnya persentase penanganan sampah atau pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 26,47 persen pada tahun 2023.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data yang terlihat pada Tabel 2.34 menunjukkan berbagai indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2019-2023. Capaian indikator perkembangan kemajuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pada tabel 2.34 menunjukkan perkembangan yang baik.

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (persen)	44.96	45.51	64,90	67,77	73,55
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	60,25	61,44	64,25	66,28	68,44
Persentase kepemilikan akte kelahiran (persen)	70,16	63,36	77,34	77,24	79,03
Persentase pasangan berakte nikah (persen)	19,76	20,23	49,79	42,08	44,15
Rasio kepemilikan KK	68,25	74,38	89,82	85,18	86,08
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	19,76	20,23	49,79	42,08	55,56

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari sisi rasio penduduk berKTP per satuan penduduk tahun 2023 telah mencapai 73,55 persen. Begitu juga dengan kepemilikan akte kelahiran telah mencapai 79,03 persen. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2023 telah mencapai 86,08 persen dan pasangan/keluarga yang telah memiliki akte nikah pada tahun 2023 telah mencapai 44,15 persen. Capaian ini tentu belum maksimal sehubungan dengan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat yang sangat membutuhkan kepemilikan KTP sebagai syarat menerima layanan pemerintah (sosial dan ekonomi) khususnya masyarakat miskin.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan bahwa belum mengalami kemajuan yang cukup berarti hal ini terlihat dari indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti terlihat dari Tabel 2.35. Perkembangan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019-2023 dari sisi kinerja pembangunan masyarakat dan desa, indikator utama yang dapat dijadikan patokan pembangunannya adalah Indeks Desa Membangun (IDM), dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perbaikan capaian.

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019-2023

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	341	559	559	559	486
Jumlah LPM	43	43	43	43	43
PKK aktif	43	43	43	43	43
Posyandu aktif	188	100	180	283	286
IDM (Desa Tertinggal)	23 Desa	18 desa	15 Desa	11 Desa	8 Desa
IDM (Desa Maju)	1 desa	2 desa	6 Desa	9 Desa	10 Desa
Persentase pengentasan desa tertinggal	16	21,73	16,67	26,6	27,3
Persentase peningkatan status desa mandiri	0	0	100	50	50

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P2 KB

Pada tahun 2020-2023 tidak ada lagi status desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan predikat desa sangat tertinggal. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 untuk capaian desa dengan kategori maju mengalami penambahan dari 9 desa tahun 2021 menjadi 10 desa di tahun 2023, begitu juga dengan status desa tertinggal dari 23 desa tertinggal tahun 2019 berkurang menjadi 8 desa di tahun 2023.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami peningkatan walau tidak signifikan, seperti terlihat dari Tabel 2.36. Untuk jumlah rata-rata anak per keluarga relatif stabil untuk setiap tahunnya hingga tahun 2023 rata-rata

jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 3 orang.

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	5	4	4	4	3
Rasio akseptor KB	54	58	58	62	67
Cakupan peserta KB aktif (persen)	54,96	58.39	58,40	58,44	58,63
TFR (Angka Kelahiran Total)	1,82	1,90	2,20	2,35	2,43
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/ mCPR)	11,76	13,30	21,27	24,15	24,56
Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	0,43	0,87	0,65	1,12	7,7

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P2 KB

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2019-2023 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dengan capaian sebesar 54,96 persen tahun 2019 dan meningkat setiap tahun hingga tahun 2023 menjadi sebesar 58,63 persen. Begitu juga dengan rasio akseptor keluarga KB setiap tahun mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2019 dengan rasio sebesar 54 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023 rasio akseptor KB menjadi 67.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bercirikan kepulauan. Konektivitas

antar pulau di Kepulauan Mentawai dan sebagai penghubung Kepulauan Mentawai dan Padang atau daerah lain di luar Mentawai urusan perhubungan mengambil bagian penting dalam menunjang dan memperlancar arus barang dan arus orang yang pergi dan menuju Kepulauan Mentawai.

Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dari cakupan layanan transportasi yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2019 cakupan layanan transportasi sebesar 78,5 persen dan capaian ini meningkat ditahun 2023 menjadi 88 persen.

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan layanan transportasi (persen)	78,5	80	83	85	88
Persentase armada angkutan laik jalan/ layar (persen)	72	70	80	80	82
Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (orang)	210.428	149.235	145.206	168.742	182.346
Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (ton)	65.720	47.654	52.669	65.163	75.003
Rasio konektivitas Kota	47,59	51,13	52,19	52,64	53,04
V/C Ratio di jalan Kota	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Sumber : Dinas Perhubungan

Hal ini didukung oleh sudah terbukanya akses transportasi di wilayah pantai barat seperti di Desa Simalegi. Begitu juga dengan kondisi sarana dan prasarana perhubungan terutama pelabuhan laut sebanyak 7 buah dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 3 buah dengan kondisi baik dan masih beroperasi

hingga sekarang. Sebagai bagian dari sistem konektivitas daerah, selain ketersediaan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah rencana pembangunan pelabuhan menjadi kebutuhan untuk menjawab konektivitas total antar wilayah/antar pulau dan konektivitas regional antar kabupaten dan propinsi.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional bahwa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut/ penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 9 pelabuhan yaitu di Pulau Siberut antara lain Pelabuhan Sikabaluan, Subelen, Mabukkuk, Sirilogui. Pulau Sipora antara lain Pelabuhan Simaoumbuk, Sao, Sagitsi Pulau Pagai Utara Selatan antara lain Pelabuhan Polaga, Sinaka.

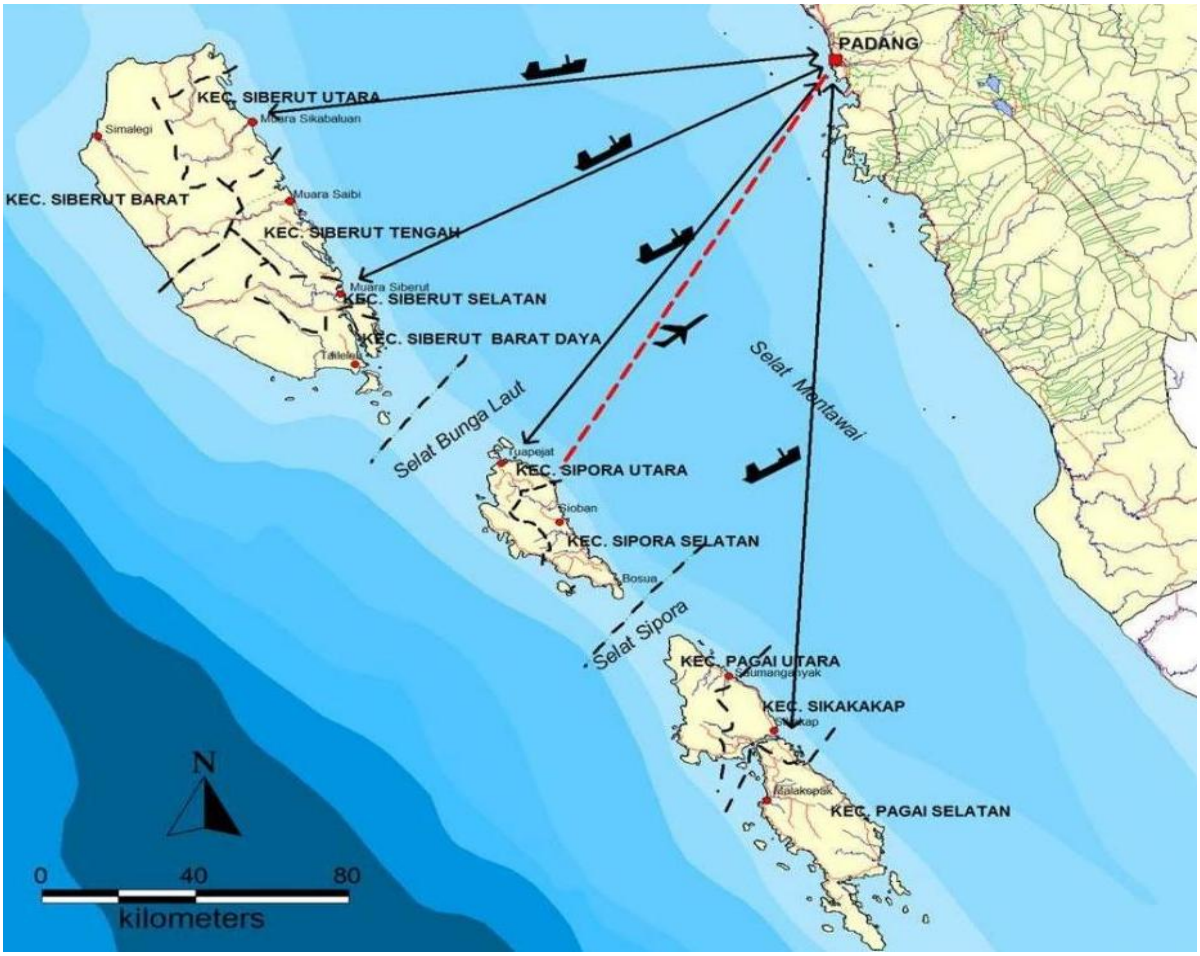
Tabel 2.38
Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

No	Nama Pelabuhan	Kepemilikan Aset	Pengelola	Status	Kondisi	Ket
1	Pelabuhan Muara Siberut	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
2	Pelabuhan Sikakap	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
3	Pelabuhan Siuban	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
4	Pelabuhan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
5	Pelabuhan Pasapuat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
6	Pelabuhan Sikabaluan	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
7	Pelabuhan Labuhan Bajau	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
8	Pelabuhan Penyeberangan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan

No	Nama Pelabuhan	Kepemilikan Aset	Pengelola	Status	Kondisi	Ket
9	Pelabuhan Penyeberangan Siberut	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
10	Pelabuhan Penyeberangan Sikakap	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan

Sumber : Dinas Perhubungan

Gambar 2.25
Jalur Pelayaran Padang-Kepulauan Mentawai



10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service to Internet*). Perkembangan pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2023 untuk SPBE di Kepulauan Mentawai sebesar 1,53 sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan niai SPBE tahun 2022 yang sebesar 1,23 sedangkan untuk tahun 2020 tidak dilakukan penilaian. Perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Layanan Telekomunikasi	86	84,5	85	86	88
Nilai SPBE	1,9	NA	0	1,23	1,53
OPD yang terhubung oleh akses internet yang disediakan Diskominfo (persen)	55,5	63,8	69,4	69,4	75
Layanan publik yang dilayani secara Online (persen)	4,8	5	5,2	5,2	10
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	70	70	70	70	72

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akses data dan komunikasi yang sangat terbatas, sarana dan prasarana yang masih minim juga sumber daya manusia dalam upaya *maintenance* yang belum ada sehingga biaya (*cost*) menjadi sangat besar dan kendala pengembangannya.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan indikator urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk persentase koperasi aktif secara tren dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 59,09 persen tahun 2019 menjadi 89 persen tahun 2023, indikator pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah, seperti terlihat pada Tabel 2.40. Untuk jumlah usaha mikro dan kecil juga mengalami tren peningkatan jumlah usaha. Tabel 2.40 menunjukkan untuk usaha mikro sebanyak 1.357 usaha pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi sebanyak 3.180 usaha. Dalam upaya menciptakan wirausaha baru (*enterprenuer*), program ke depan yang disusun adalah pelatihan/ peningkatan kapasitas keterampilan keahlian agar memiliki *skill* untuk dapat terjun ke dunia usaha, begitu juga dengan membangun relasi melalui perjanjian kerja sama dengan dunia usaha (*MoU*) sehingga di hulunya pembangunan sumber

daya tenaga kerja yang terampil (*skill*) didukung dengan di hilirnya adalah terserapnya tenaga kerja sebagai modal awal untuk menjadi wirausaha baru.

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase koperasi aktif	59.09	25,3	20	20	89
2	Jumlah BPR/BPRS	2	3	3	3	2
3	Usaha Mikro	1.357	1.956	2.508	3.180	3.180
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (persen)	3	3	3,50	3,5	3,8
5	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha (persen)	5	4	6	7	7,5

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Harapannya, dengan dukungan semua sektor dan pendampingan dari pemerintah daerah, untuk usaha mikro dan kecil dapat mengambangkan unit usaha/permodalan dan skala pemasaran serta legalitas sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningakatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah

diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan rata-rata pengurusan izin sekitar 5-6 hari.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi Proyek Investasi (PMDN & PMA)	11	10	16	44	154
Realisasi Investasi PMDN (juta Rp)	14.464,00	15.743,30	6.892,80	29.375,30	1.667,70
Realisasi Investasi PMA (000 US$)	466,10	148,80	1.158	114,50	NA

Sumber: Dinas PMPTSP

Perkembangan realisasi investasi tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yaitu dari Rp.1.667.700.000 jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp.29.375.300.000. Angka ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi investasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan sumber daya alam yang melimpah dan proses perijinan yang sangat mudah dan cepat. Untuk realisasi proyek baik melalui Penamaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2021 realisasi proyek sebesar 16 proyek, pada tahun 2022 sebesar 44 proyek dan pada tahun 2023 sebesar 154 proyek.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian indikator urusan kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada perkembangan jumlah organisasi yang masih bertahan. Pemuda yang diasosiasikan dengan paham idealisme yang dapat melihat setiap perkembangan dan isu daerah secara jernih tentunya akan mampu memberikan pemikiran dan dukungan yang utuh tanpa ada unsur kepentingan. Untuk urusan wajib kepemudaan dan olahraga dari data pada Tabel 2.42, secara umum dapat memberikan gambaran bahwa indikator menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dan terus meningkat selama periode 2019-2023. Hal ini terlihat dari Tabel 2.42 dibawah ini.

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah organisasi pemuda	9	9	12	10	14
Jumlah organisasi olahraga	20	10	15	12	16
Jumlah kegiatan kepemudaan	5	6	8	10	8
Jumlah kegiatan olahraga	10	3	0	5	12
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	30	25	20	20	24
Lapangan olahraga	267	205	145	150	150
Pertumbuhan wirausaha (enterprenuer)	0,36	0,65	0,58	1,183	0,93
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	10	14,14	14,14	15	15,3
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20	25,28	25,28	28	30

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.42 menunjukkan perkembangan jumlah organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan dari sisi kuantitas. Pada tahun 2019 jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 9 organisasi dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 jumlah organisasi kepemudaan menjadi sebanyak 14 organisasi. Begitu juga dilihat dari kapasitas ekonomi kepemudaan yang dilihat dari pertumbuhan wirausaha mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2019 pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,36 persen tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,93 persen pada tahun 2023.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan wajib statistik berkenaan dengan penyediaan data yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan, melihat perkembangan pembangunan dan dihilirnya sebagai bahan evaluasi untuk memberikan sebuah informasi analisis pembangunan. Penyelenggaraan urusan statistik menjadi bagian penting dalam penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perkembangan kinerja urusan statistik erat kaitannya dengan ketersediaan data dan informasi yang digunakan oleh setiap pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah melalui perangkat daerah.

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Statistik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Buku ”Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka”	1	1	1	1	1
2	Buku ”PDRB kabupaten”	2	2	2	2	2
3	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah (persen)	70	72,1	75	76,2	78,15
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50,00	55,56	61,11	69,44	71,4
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	38,89	41,67	50,56	58,33	60,5

Sumber : BPS dan Bappeda

Selama periode 2019-2023 secara rutin telah diterbitkan buku Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berbagai dokumen atau buku statistik dasar lainnya yang secara resmi dirilis melalui Badan Pusat Statistik (BPS) seperti dilihatkan pada Tabel 2.43. Data statistik ini baik statistik dasar maupun statistik sektoral yang berasal dari perangkat daerah tentunya menjadi pedoman dalam merumuskan dan menganalisis sebuah perkembangan indikator pembangunan daerah. Penyusunan buku Kepulauan Mentawai Dalam Angka (KKMDA) selalu diterbitkan setiap tahunnya oleh BPS Kepulauan Mentawai, begitu juga dengan dokumen lainnya seperti dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan pengeluaran dan lapangan usaha. Untuk data statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi atau

perangkat daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan khususnya dalam merumuskan indikator kinerja pemerintah daerah sehingga nantinya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan penerapan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Integrasi sistem informasi pemerintahan masih parsial sehingga perlu dilakukan kesepahaman sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan keamanan dan perlindungan data yang terjamin. Seluruh sistem informasi pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, layanan publik harus memenuhi kaidah-kaidah tingkat keamanan dengan menyelenggarakan keamanan persandian sehingga risiko kerusakan sistem, data hilang, *hack* dapat dicegah dan ditangkal.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Urusan Persandian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat keamanan informasi pemerintah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan persandian yang telah dikukuhkan ke dalam susunan struktur organisasi perangkat daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika belum memadai untuk menyelenggarakan tugas

dan fungsi dalam pengamanan informasi pemerintah daerah, terutama dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang secara keahlian (sertifikasi) belum ada, sehingga data terkait tingkat keamanan informasi pemerintah belum tersedia atau belum dapat dihitung/diukur.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk kedalam agenda pariwisata nasional dalam Pesona Indonesia. Selain itu dalam kebijakannya, telah disusun pokok-pokok pikiran kebudayaan pada tahun 2020 serta telah disertifikasi 4 tenaga tim ahli cagar budaya (TACB) untuk memfasilitasi dalam penilaian warisan budaya benda yang ada di Kepulauan Mentawai. Pembangunan kebudayaan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama tahun 2020 dan tahun 2021 selama pandemi yang dibatasi pergerakan/mobilitas dan bahkan melarang berkumpulnya orang, sehingga even dan festival terkait

kebudayaan tidak dilaksanakan. Dengan melihat dari perkembangan periode waktu 2019-2023, penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda situs budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 ada 3 even atau penyelenggaraan seni budaya setelah vakum pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, perkembangan indikator kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat seperti terlihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	8	0	0	1	3
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	2	2	3
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	12

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan objek kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah ditetapkan kurun waktu 2014-2023 telah mencapai 12 warisan budaya. Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain warisan budaya yang ditetapkan adalah Tato (2014), Sikerei (2019), Uma (2020), Kirekat dan Pasikut Abag (2022), Tahun 2023 antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja urusan wajib perpustakaan selama periode 2019-2023 diperlihatkan pada Tabel 2.46. Perkembangan indikator

jumlah pengunjung memberi bukti bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan pustaka daerah semakin membaik terutama dalam meningkatkan minat literasi dan numerasi masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 pada masa pandemi yang mengalami penurunan dari 10.273 pengunjung menjadi sebanyak 8.988 pengunjung di tahun 2020. Namun pada tahun 2023 jumlah kunjungan perpustakaan telah mencapai 13.400 pengunjung.

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Perpustakaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	10.273	8.988	9.842	12.445	13.400
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	19.796	19.796	21.044	32.773	33.003
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	NA	11	63,62	45,67
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (persen)	NA	NA	15	43,87	60,80

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk pembangunan literasi Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 dengan nilai indeks 45,67 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 63,62. Untuk tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 sebesar 60,8 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022

dengan nilai sebesar 43,87. Nilai literasi dan tingkat kegemaran membaca Kabupaten Kepulauan Mentawai baru dinilai pada tahun 2021 sehingga data capaian kinerja perpustakaan untuk tahun 2019-2020 belum tersedia. Upaya untuk meningkatkan literasi dan minat baca di Kepulauan Mentawai seperti perlombaan menulis, bercerita, pidato, cerdas cermat antar jenjang sekolah begitu juga dilakukan program pustaka keliling untuk mempermudah jangkauan anak-anak sekolah/ peserta didik dan juga masyarakat akan layanan perpustakaan seperti buku, buletin dan bahan pustaka lainnya.

Gambar 2.26
Layanan Perpustakaan untuk Masyarakat dan Anak Sekolah



18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja urusan wajib kearsipan dapat diukur dari pembinaan tata kelola arsip secara baku, persentase kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan dan indikator lainnya, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.47. Perkembangan pembangunan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikatakan belum berkembang secara signifikan. Selain dari masih

terbatasnya tenaga atau SDM kearsipan yang secara fungsional mengelola dan menata arsip juga masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menata arsip yang baik dan benar. Sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan dan layanan arsip setiap perangkat daerah dan pemerintah daerah tentunya urusan kearsipan sudah mulai menjadi bagian penting yang harus diintervensi sehingga pengelolaan kearsipan daerah semakin lebih baik.

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1	2,7	5,5	5,56	3,5
2	Persentase Kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	1	1	1,5	1,17	1,2
3	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	30,2	26	25	33	35
4	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	4,8	5	5	6,5	7

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Selain urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain meliputi beberapa

bidang, yaitu (1) Kelautan dan Perikanan (2) Pariwisata (3) Pertanian (4) Energi dan Sumber Daya Mineral (6) Perdagangan. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah kepulauan yang ditutupi oleh sepanjang garis pantai 1.402,66 km tentunya Kabupaten Kepulauan Mentawai dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa. Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan potensi kelautan sebesar 1.229.950 ton ikan, namun yang dikelola sebesar 10.807 ton atau sekitar 0,87 persen. Potensi ini memberikan gambaran nyata terhadap harapan bagi nelayan untuk meningkatkan ekonomi mulai dari peningkatan kapasitas nelayan, sarana dan prasarana, budi daya perikanan, pengolahan bahkan pada pemasaran produk perikanan.

Tabel 2.48
Produksi Perikanan Tangkap dan Budi Daya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Jumlah Produksi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perikanan Tangkap (ton)	7.543	7.698	8.694,5	10.354	10.800
2	Perikanan budi daya (ton)	114,44	127,59	308,14	320,6	328,65
3	Produksi Olahan Ikan (kg)	32,53	46,49	73,07	81,07	99,03

Sumber : Dinas Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 produksi perikanan tangkap sebanyak 7.543 ton dan mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap sebesar 10.800 ton. Jika dilihat dikonversikan ke dalam penghasilan para nelayan maka penghasilan yang didapatkan masing-masing nelayan adalah Rp.54.708.857/tahun atau sekitar Rp.4,5 juta/bulan. Untuk perikanan budi daya khususnya budi daya wilayah pesisir/ terumbu karang dengan luasan lebih dari 17.636,72 ha. Potensi budi daya kawasan pesisir terumbu karang seperti kerapu, lobster dan kepiting bakau sangat menjanjikan dengan pasar kebutuhan domestik dan juga pasar nasional dan luar negeri dengan produksi rata-rata pertahun sebesar 58 ton.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi

masyarakat berbasis kearifan lokal. Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal akan potensi pariwisatanya, kabupaten ini memiliki pelbagai kawasan objek wisata yang sudah dikenal hingga penjuru dunia. Banyaknya jenis objek wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dalam tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Pariwisata
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Item	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (orang)	9.164	1.315	3.807	9.318	9.815
Jumlah Kunjungan Wisata Domestik (orang)	64.621	29.186	41.144	32.979	54.588
Lama Kunjungan (Lama tinggal)	±10 hari	±5 hari	±5 hari	±5 hari	±5 hari
Penerimaan Retribusi Daerah	7,9 M	1,22 M	4 M	6 M	7,5 M
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	7	5	10	11	11,5
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	9	8	12	13	12,24
Tingkat hunian akomodasi	75,24	1,25	82,43	85,86	86,02
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,80	0,76	0,81	0,84	0,87
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7.3	1,4	4,2	6,04	15,69

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya menunjukkan perkembangan yang positif kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami kontraksi dikarenakan oleh dampak pandemi COVID-19 yang tentunya membatasi aktifitas

masyarakat dan juga larangan untuk melakukan even atau kegiatan yang memicu berkumpulnya masyarakat/orang. Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 9.164 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 64.621 orang dan meningkat hingga tahun 2023 sebesar 54.588 orang sedangkan wisatawan mancanegara sebanyak 9.815 orang. Penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata memang belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata sebesar 15,69 persen setiap tahunnya (kondisi normal), tentu strategi pengembangan pariwisata dan program pemasaran yang tepat menjadi hal penting harus diperhatikan dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pengembangan pariwisata saat ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pengembangan Daerah tujuan desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet (3M1K) yang diperkuat dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penetapan kawasan desa wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana aksi pengembangan daerah desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet adalah rencana daerah dalam pengembangan desa wisata untuk periode lima tahun. Penetapan kawasan desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet dapat ditentukan atau dikelompokkan berdasarkan jenis potensi pariwisata yang dimiliki. Pengembangan

kawasan desa wisata bukan hanya dengan menetapkan lokasi atau daerah mana saja yang menjadi kawasan strategis, namun perlu juga memperhatikan tema pengembangan, ketersediaan dana, perancangan lokasi pengkajian kelayakan dan peluang kerja sama antar pihak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Hasil pertanian dan perkebunan menjadi andalan dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai. Dari data BPS didapatkan bahwa dalam 5 tahun terakhir persentase kontribusi sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah lebih dari 48 persen. Begitu juga isu strategis dalam pengembangan sektor pertanian yang tidak sekedar menjual *raw material* tapi harus mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditi pertanian, sehingga mampu menyejahterakan para petani. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan lokal (ketahanan pangan), alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman/perkantoran dan alih fungsi lahan untuk komoditas pertanian lainnya (tidak konsisten) menjadi isu penting dalam mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Tabel 2.50 menunjukkan perkembangan produksi tanaman pertanian, perkebunan dan perkembangan ternak yang dibudi

dayakan oleh masyarakat. Produksi tanaman sagu, kelapa, cengkeh relatif stabil dengan masing-masing pertumbuhan produksi, sagu (17,31 persen), kelapa (35,59 persen), cengkeh (0,73 persen).

Tabel 2.50
Produksi Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Jumlah Produksi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Keladi (kwintal)	97.730	1.155	13.260	1.152	1.041,5
2	Ubi Kayu (kwintal)	18.800	2.290	1.150	333,5	515
3	Ubi Jalar (kwintal)	86.000	22.510	2.630	241,3	362,50
4	Pisang (kwintal)	11.990	22.893	19.506	75.351	139.873
5	Durian (kwintal)	56.780	54.599	20.700	57.801	117.211
6	Kelapa (ton)	9.346	15.113	15.591	13.824	13.854
7	Cengkeh (ton)	1.519	1.524	1.539	1.328	1.481
8	Cacao (ton)	2.330	2.301	133,47	210,8	147,34
9	Sagu (ton)	1.847	958	1.205,48	1.060,99	690,63
10	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2,42	2,5	2,47	2,5	2,5
11	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	80	80	85	85	85
12	Babi (ekor) --- produksi	30.489	27.598	25.561	31.878	42.510
	Babi (kg) --- pemotongan	3.000	4.200	15.625	16.117	16.368
13	Ayam Pedaging (ekor) --- pemotongan	1.900	2.700	4.371	4.457	4.804

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk perkembangan produksi tanaman pertanian/ perkebunan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pisang, kepala, sagu relatif terjaga

dan cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 produksi komoditi pisang sebesar 11.990 kwintal dan meningkat hingga tahun 2023 produksi komoditi pisang sebesar 139.873 kwintal, komoditi kelapa pada tahun 2019 sebanyak 9.346 ton meningkat menjadi 13.854 ton pada tahun 2023. Namun, pada komoditi sagu ada penurunan produksi yaitu pada tahun 2019 produksinya 1.847 ton menurun hingga tahun 2023 produksi komoditinya menjadi 690,63 ton, hal ini disebabkan karena budi daya sagu sudah mulai tidak dikembangkan dan alih fungsi lahan sagu menjadi areal perumahan atau pertanian komoditas lainnya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai rata-rata 13,09 persen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan walaupun di tahun 2020 dan 2021 sedikit ada perlambatan. Capaian ini tergolong sangat kecil, dikarenakan belum maksimalnya pengembangan sektor perdagangan terutama pusat-pusat perdagangan seperti pasar yang berkembang. Disisi lain sektor perdagangan yang didorong yang tumbuh dari tumbuh kembangnya usaha perdagangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dalam legalisasi sektor usaha perdagangan.

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,82	12,80	12,72	13,43	13,72
2	Jumlah Koperasi	84	84	83	85	89
3	Jumlah Perdagangan (Pasar, Toko, Swalayan)	584	643	880	343	1.412
4	Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan	4	5	6	6	6
5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	0	0	1,07	1,60	1,80
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	0,32	0,38	0,42	0,35	0,4
7	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	0	0,4	0,2	0,2

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama 5 tahun terakhir masih sangat konstan diangka 2-2,5 persen terhadap PDRB belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor *raw material*/primer dengan kontribusi dengan

rata-rata 48 persen setiap tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktur ekonomi ke arah sektor industri/pengolahan.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,34	2,43	2,57	2,48	2,45
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	0	2,07	1,25	0,031	1
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0	0	0,8	1
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0,02	0,04
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0	0,6825	0,2
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan pedesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah srategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir. Perkembangan transmigrasi di Kepulauan Mentawai telah menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini dapat dilihat perkembangan satuan permukiman transmigrasi yang telah menyatu menjadi bagian pemerintahan desa seperti pada Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 1 termasuk desa Desa Sipora Jaya, Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 2 termasuk pada Desa Sidomakmur dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 3 termasuk pada Desa Bukit Pamewa.

Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Urusan Transmigrasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) yang difasilitasi pembangunannya.	3	3	3	3	3
Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) yang difasilitasi pembinaan.	3	3	3	3	3

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai instansi yang memiliki tugas untuk melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah memiliki beberapa indikator pencapaian kinerja sebagai bentuk ukuran keberhasilan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Nilai IKM > 60%	81,25	77,99	80	83	85
Nilai EKPPD	-	2,6	2,7	2,8	3,4
Penyusunan APBD tepat waktu	30 November	30 November	30 November	30 November	30 November
Persentase MoU yang ditindaklanjuti	18,3	30	30	40	50
Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik > 80 persen	92	95	83	84	85
Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	80	100	100	100	100

Pencapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Daerah tidak terlepas dari peran dan kontribusi masing-masing Bagian, para Asisten dan Staf Ahli dan pejabat fungsional yang ada. Namun, beberapa capaian masih dapat digolongkan dengan tingkat capaian rendah seperti pada persentase MoU yang ditindaklanjuti masih dibawah 50 persen sehingga ini perlu menjadi perhatian agar beberapa MoU yang telah disepakati dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya secara teknis ditindaklanjuti dalam naskah perjanjian kerjasama.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi *budgeting*. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi Anggota DPRD maka ukuran indikator kinerja yang digunakan adalah kepuasan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD serta masyarakat yang mengunjungi DPRD.

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD	5	5	16	16	16
Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan sesuai SOP	85	90	100	100	100

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP	5	14	12	12	16
Jumlah produk hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan didukung oleh DPRD	5	8	12	12	16
Persentase kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD	80	95	100	100	100

Pelaksanaan tugas sekretariat DPRD secara prinsip adalah memfasilitasi penyelenggaraan agenda setiap pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, juga menjaga keselarasan agenda dan komunikasi antara pemerintah daerah (eksekutif) dan legislatif. Secara umum pelaksanaan tugas sekretariat DPRD telah mencapai 90 persen pada tahun 2023 dengan harapan di tahun berikutnya pelayanan dapat tingkatkan.

2.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Penunjang Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif. Kurun waktu hingga tahun 2022, perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin baik. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa penghargaan yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 2018, antara lain:

1. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2018.
2. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2019.
3. Perencanaan Terbaik III se-Sumatera Barat Tahun 2019.
4. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2020.
5. Perencanaan Terbaik Harapan III se-Sumatera Barat Tahun 2020.
6. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2021.
7. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2022.
8. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2023.
9. Perencanaan Terbaik Harapan III se-Sumatera Barat Tahun 2021.

Begitu juga dengan proses dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik itu Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 sedang dalam penyusunan, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya telah disusun dan batas waktu penetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Unsur Penunjang Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan keuangan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD merupakan instrumen fiskal di daerah yang digunakan dalam membiayai membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pencapaian kinerja penyelenggaraan keuangan Kabupaten Kepulauan

Mentawai telah pada pencapaian tertinggi yaitu dengan opini keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh pertama kali sejak kabupaten berdiri yaitu tahun 2019. Namun, pancapaian ini mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 untuk pengelolaan keuangan tahun 2021 dengan opini keuangan dengan predikat WDP dan pada tahun 2022 dan 2023 opini pengelolaan keuangan daerah Kembali mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 2.56
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini Keuangan	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
2	Realisasi PAD (persen)	47,0	62,25	69,78	112,89	83,26

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa menargetkan maksimal dalam pencapaian kinerja opini keuangan terhadap hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan setiap tahunnya dengan opini wajar tanpa pengecualian.

3. Unsur Penunjang Kepegawaian

Suksesnya pencapaian kinerja pembangunan daerah sangat tergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Perhatian pada unsur kepegawaian menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, juga sebagaimana amanat Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang

Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, seluruh Pemerintah Daerah diamanahkan untuk menerapkan Sistem Merit dilingkungannya. Penerapan sistem merit sebagai salah satu strategi dalam manajemen SDM ASN tentunya bukanlah hal yang mudah. Pada perjalanannya, banyak tantangan dan inkonsistensi yang ditemui dalam pelaksanaan sistem ini. Tantangan dan inkonsistensi datang tidak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata, namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara tidak langsung mempengaruhi.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai penerapan dan penilaian Sistem Merit dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek antara lain Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Karir, Promosi dan Rotasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan Serta Sistem Informasi. Penerapan Sistem Merit akan diukur dengan Penilaian Sistem Merit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya menjadi indikator dalam urusan penunjang kepegawaian menggantikan indikator Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70 persen. Pada tahun 2023 sistem merit di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 129 (skala 0-400) dimana tahun sebelumnya (2022) nilai Sistem Merit Kabupaten

Kepulauan Mentawai sebesar 80. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi pendidik masih belum dipenuhi sebagai syarat guru/pendidik dengan kisaran baru 16 persen.

4. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan juga dalam jabatan struktural dan fungsional yang diselenggarakan dalam upaya menyesuaikan kapasitas sumber daya dengan jabatan yang diemban sehingga mempercepat tercapainya tujuan organisasi.

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Kepegawaian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase penempatan yang diduduki berdasarkan kompetensi	70	70	72	73	75
Persentase peningkatan kinerja ASN	90	90	100	100	100
Indeks Profesional ASN	33,95	33,95	82	83	85

Pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari perkembangan indikator persentase penempatan (jabatan) yang diduduki berdasarkan kompetensi sudah mencapai 70 persen tahun 2023 dan diharapkan pada tahun berikutnya telah mengalami peningkatan yaitu pada angka 73-75 persen. Begitu juga dengan upaya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai pendidikan dan pelatihan telah mencapai

90 persen dari seluruh ASN khususnya PNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan urusan penunjang yang sangat vital dalam proses penyusunan perencanaan terutama dalam perumusan strategi/ kebijakan dengan penarikan kesimpulan secara ilmiah yang dijadikan pedoman dan dasar/rujukan pengambilan kebijakan.

Masih belum adanya SDM dalam bidang kelitbangan (peneliti) yang kompeten di dalam bidangnya. Selain itu juga disebabkan oleh permasalahan mengenai hasil penelitian dan pengembangan yang belum optimal sedangkan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan. Begitu juga dengan perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih fluktuatif, inovasi yang diartikan sebagai pembaharuan tata kelola dan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2022 dan 2021 telah mencapai predikat inovatif walaupun di tahun 2023 mengalami penurunan pada predikat kurang inovatif. Kebijakan pengembangan inovasi belum sepenuhnya menjadi bagian capaian kinerja pemerintah daerah terlebih pada perangkat daerah dan perlu penguatan kelembagaan sehingga pemanfaatan sumber daya kelitbangan dapat optimal.

2.1.3.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kedudukan inspektorat daerah adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase tindak lanjut temuan	69,70	77,76	86,25	76,80	86,20
2	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	96	97,25	97,58	100	100
3	Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2

Sumber: Inspektorat

Perkembangan indikator pengawasan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019-2023 menunjukkan tren peningkatan. Penguatan unsur pengawasan tidak dapat hanya berada pada unsur pengawasan atau berdasarkan temuan-temuan

pemeriksaaan, yang lebih penting adalah penguatan tata kelola, tertib adminstrasi dan penguatan sumber daya manusia sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan tertib dan taat azas. Untuk persentasi tindak lanjut temuan sudah mengalami perbaikan yaitu dari 69,7 persen pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 86,20 persen. Begitu juga dengan OPD yang menerapkan SPIP telah mencapai 100 persen pada tahun 2023.

2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kriminalitas	2,72	6,96	5,76	5,36	5,6

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum masih terkendali yaitu pada angka 5-6 persen. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas/ konflik untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, pengeroyokan, pelecehan, penyalahgunaan obat dan pelbagai jenis kejahatan lainnya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan

masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh dalam melakukan pencegahan konflik adalah sebagai berikut :

a. Adanya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat.
b. Meningkatnya intensitas pertemuan dengan jajaran Forkopimda dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi dalam penyelesaian masalah.
c. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) merupakan jenis komponen pengeluaran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.60
Angka Konsumsi RT
Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Pengeluaran RT	2.249.953	2.484.444	2.365.148	2.473.204	2.765.960
Pertumbuhan pengeluaran RT (persen)		6,63	10,42	-4,80	4,57	11,84
2	Jumlah RT	21.554	21.950	20.843	21.085	21.327

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 2.60 menunjukkan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan. Peningkatan konsumsi ini dipengaruhi oleh beberapa indikator ekonomi makro salah satunya adalah naiknya pendapatan masyarakat dan peningkatan konsumsi rumah tangga juga menggambarkan peningkatan kemampuan

ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19 dimana masyarakat lebih hati-hati/menjaga dalam melakukan pengeluaran/konsumsi khususnya untuk jenis konsumsi non pangan. Pertumbuhan angka konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang positif dan dengan tren walaupun di tahun 2021 mengalami perlambatan yang cukup dalam diangka minus 4,80 persen dan kembali positif di tahun 2022 pada angka 4,57 persen dan pada tahun 2023 naik menjadi sebesar 11,84 persen.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah RT. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Tabel 2.61 menunjukkan rasio konsumsi rumah tangga non pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini terlihat pada tahun 2019 persentase total pengeluaran non pangan terhadap pengeluaran rumah tangga sebesar 49,90 persen seterusnya hingga tahun 2023 sekitar menjadi 51,17 persen.

Tabel 2.61
Rasio Angka Konsumsi RT non Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2022
1.	Total Pengeluaran RT pangan	1.107.845	1.227.068	1.178.828	1.253.566	1.326.851
2.	Total Pengeluaran	2.249.953	2.484.444	2.365.148	2.473.204	2.592.987
Persentase		49,90	49,24	49,39	49,84	51,17

Sumber: BPS (diolah)

Hal ini menjadi perhatian khusus, artinya tingkat konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh konsumsi pangan (rata-rata melebihi 50 persen), artinya pola konsumsi masyarakat Mentawai masih sangat konsumtif dan belum produktif. Tentu konsumsi selain pangan dapat didorong dalam meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, kualitas lingkungan dan kesehatan.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu capaian yang dapat dijadikan ukuran dalam daya saing daerah adalah ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung kegiatan sektor rill masyarakat. Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

a. Aksesibilitas

Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

a) Sarana jalan yang tersedia dalam kondisi baik sepanjang 79,3 km atau sekitar 7 persen dari total jalan yang tersedia, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 971,4 km atau sekitar 85,96 persen dari total panjang jalan tersedia.
b) Bandar Udara Mentawai melayani penerbangan domestik Padang-Rokot (Tuapejat) dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Pelayanan penerbangan Padang-Tuapejat telah memiliki rute penerbangan tetap (3 kali seminggu) dengan kapasitas pesawat 15 s/d 20 orang.
c) Pelabuhan Laut sebanyak 5 buah, yaitu Pelabuhan Tuapejat, Pelabuhan Sioban, Pelabuhan Sikakap, Pelabuhan Sikabaluan, Pelabuhan Maileppet.

Untuk pelayaran Padang-Mentawai dapat dilalui oleh kelima pelabuhan tersebut dengan rute sudah terjadwal. Kapal yang tersedia sebanyak 3 buah (KMP Gambolo, KMP Ambu-Ambu, KMP Wira Samaeri) dan 2 unit Mentawai Fast juga melayani pelayaran rute Padang-Mentawai. Pelayaran antar pulau dalam wilayah Kepulauan Mentawai tersedia kapal penyeberangan antar pulau antara lain KM Simasin, KM Nade, KM Simatalu, dengan rute sudah terjadwal.

b. Air Bersih

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih secara agregat masih sekitar 55,46 persen. Hal ini menjadi perhatian serius

karena kebutuhan akan air bersih akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengembangkan SPAM untuk kawasan di 10 kecamatan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

c. Listrik dan Komunikasi

Rasio elektrifikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 masih rendah sekitar 74,59 persen. Kendala utama adalah infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas dan juga kemampuan ekonomi masyarakat calon pelanggan yang tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik. Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebanyak 14.717 pelanggan. Untuk 4 wilayah antara lain Tuapejat, Sioban, Sikakap, Muara Siberut, Sikabaluan telah beroperasi PLN selama 24 jam, sedangkan di daerah lain masih sekitar 10-12 jam/hari. Pengembangan sektor energi terutama energi baru dan terbarukan kedepan menjadi alternatif pilihan dalam rangka pembangunan energi yang berkelanjutan terutama dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% hingga tahun 2025.

Layanan surat menyurat juga sudah tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain di Sikakap, Sioban, Tuapejat, Muara Siberut, Sikabaluan. Begitu juga untuk akses telekomunikasi sudah dapat melayani konsumen di 10 kecamatan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelbagai jenis kejahatan lainnya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.62
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus Narkoba	3	8	4	5	6
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	7	14	18	15
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	5	8	8	6	8
5.	Jumlah kasus Pencurian	10	25	20	13	17
6.	Jumlah kasus Penipuan	5	12	5	6	5
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	56	60	51	48	51
9.	Jumlah Penduduk	92.021	87.623	88.389	89.401	91.427
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	2,72	6,96	5,76	5,36	5,6

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai cenderung mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 tingkat kriminalitas sebesar 2,72 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,96 persen dan pada tahun 2023 relatif menurun dengan angka sebesar 5,6.3 Harapannya dengan penguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan seluruh unsur masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat. Harapannya dengan penguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan seluruh unsusr masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.

b. Layanan Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu pendekatan proses pembangunan adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya

yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Peningkatan sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya mewujudkan manusia yang seutuhnya dan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan

pendidikan S1, S2 dan S3. Tabel 2.63 menunjukkan adanya peningkatan rasio lulusan sarjana pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 kurun waktu 2019-2023, persentase penduduk 15 tahun keatas ijazah S1, S2, dan S3 tahun 2019 sebesar 5,72 persen dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 8,54 persen.

Tabel 2.63
Jumlah Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas berijazah S1/S2/S3	3.361	3.512	5.494	5.590	5.590
Jumlah penduduk 15 tahun keatas	58.745	63.474	64 370	65.431	65.431
Persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 (1/2)	5,72	5,53	8,53	8,54	8,54

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah dapat tercapai. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan melalui pencapaian indikator kinerja RKPD yang sesuai/selaras dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Tabel 2.64
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1499	134.029.520.172	1499	122.173.537.668	100,00	91,15	1499	122.173.537.668	19,99	20,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang menerima Honorarium	60	380.580.000	60	317.200.000	100,00	83,35	60	317.200.000	25,00	31,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11	396.820.000	11	337.667.200	100,00	85,09	11	337.667.200	25,00	24,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21	847.599.225	21	683.681.177	100,00	80,66	21	683.681.177	25,00	37,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	42.741.000	10	42.574.300	100,00	99,61	10	42.574.300	25,00	35,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	18.000.000	2	18.000.000	100,00	100,00	2	18.000.000	25,00	37,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	100.030.000	20	98.778.490	100,00	98,75	20	98.778.490	16,67	8,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	84.000.000	12	60.659.384	100,00	72,21	12	60.659.384	25,00	16,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	68	1.125.644.000	68	1.109.924.000	100,00	98,60	68	1.109.924.000	24,29	30,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	76.750.000	2	57.427.500	100,00	74,82	2	57.427.500	25,00	23,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	39.960.000	13	24.446.800	100,00	61,18	13	24.446.800	25,00	10,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20	29.250.000	20	29.140.000	100,00	99,62	20	29.140.000	33,33	14,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	4.663.383.000	1	2.538.131.321	100,00	54,43	1	2.538.131.321	33,33	31,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5	5.563.522.329	5	5.494.788.400	100,00	98,76	5	5.494.788.400	62,50	45,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8	6.870.253.600	8	6.596.656.682	100,00	96,02	8	6.596.656.682	53,33	43,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun pada sekolah dasar	12	1.825.140.000	12	1.516.371.000	100,00	83,08	12	1.516.371.000	60,00	25,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10	1.292.795.800	10	1.200.757.200	100,00	92,88	10	1.200.757.200	50,00	30,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3	979.738.400	3	737.643.100	100,00	75,29	3	737.643.100	25,00	13,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	19	5.597.515.094	19	4.789.769.600	100,00	85,57	19	4.789.769.600	45,24	29,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10	3.676.842.700	10	3.379.815.000	100,00	91,92	10	3.379.815.000	50,00	24,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	23	7.252.923.310	23	6.711.750.900	100,00	92,54	23	6.711.750.900	54,76	37,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	168.171.800	1	159.200.800	100,00	94,67	1	159.200.800	16,67	5,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	168.146.800	1	159.418.800	100,00	94,81	1	159.418.800	16,67	4,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	8	806.691.000	8	734.454.350	100,00	91,05	8	734.454.350	53,33	31,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13000	14.823.314.540	13000	13.941.486.680	100,00	94,05	13000	13.941.486.680	25,00	23,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	225	1.179.212.200	225	1.167.807.100	100,00	99,03	225	1.167.807.100	37,50	19,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	13000	300.571.600	13000	300.373.700	100,00	99,93	13000	300.373.700	25,00	25,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	314	7.090.825.000	314	6.321.701.480	100,00	89,15	314	6.321.701.480	25,00	22,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah yang mengikuti pengembangan karir	200	1.734.942.800	200	1.546.263.100	100,00	89,12	200	1.546.263.100	25,00	51,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	134	276.034.900	134	269.624.542	100,00	97,68	134	269.624.542	25,00	22,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	134	170.875.000	134	169.169.400	100,00	99,00	134	169.169.400	25,00	21,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	11	3.944.449.350	11	3.504.096.800	100,00	88,84	11	3.504.096.800	25,00	43,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	10.638.608.360	6	8.974.566.508	100,00	84,36	6	8.974.566.508	25,00	37,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3	1.405.505.250	3	1.333.491.637	100,00	94,88	3	1.333.491.637	25,00	22,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3	1.478.674.720	3	1.303.191.248	100,00	88,13	3	1.303.191.248	33,33	14,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5	3.903.592.810	5	3.320.872.769	100,00	85,07	5	3.320.872.769	41,67	27,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2	1.327.949.000	2	1.263.298.430	100,00	95,13	2	1.263.298.430	25,00	25,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	3.277.010.800	3	2.994.075.626	100,00	91,37	3	2.994.075.626	33,33	32,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	1.222.939.800	2	1.067.528.695	100,00	87,29	2	1.067.528.695	25,00	21,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	664.056.500	1	544.105.057	100,00	81,94	1	544.105.057	25,00	23,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2	260.037.770	2	258.869.580	100,00	99,55	2	258.869.580	22,22	32,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6000	8.345.660.420	6000	8.332.877.920	100,00	99,85	6000	8.332.877.920	100,00	24,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	195.794.600	1	157.418.550	100,00	80,40	1	157.418.550	20,00	19,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6000	160.747.750	6000	150.625.946	100,00	93,70	6000	150.625.946	25,00	50,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	34	190.500.950	34	145.063.200	100,00	76,15	34	145.063.200	25,00	19,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200	3.326.387.000	200	3.224.746.800	100,00	96,94	200	3.224.746.800	25,00	35,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	479.508.800	100	388.799.400	100,00	81,08	100	388.799.400	25,00	32,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan pengelolaan Dapodik dan Aneka Tunjangan	34	220.252.200	34	188.281.205	100,00	85,48	34	188.281.205	25,00	20,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34	99.998.000	34	43.486.100	100,00	43,49	34	43.486.100	100,00	21,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2	370.878.200	2	368.573.650	100,00	99,38	2	368.573.650	33,33	46,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3	704.897.600	3	669.285.506	100,00	94,95	3	669.285.506	33,33	41,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	20	100.000.000	20	99.942.200	100,00	99,94	20	99.942.200	25,00	19,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100	149.996.600	100	146.007.700	100,00	97,34	100	146.007.700	25,00	32,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	260.269.900	150	229.721.100	100,00	88,26	150	229.721.100	33,33	28,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50	130.059.800	50	124.500.800	100,00	95,73	50	124.500.800	25,00	24,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	90	1.280.861.900	90	1.161.966.900	100,00	90,72	90	1.161.966.900	25,00	23,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	13	129.085.900	13	124.446.300	100,00	96,41	13	124.446.300	25,00	20,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	13	104.080.000	13	38.627.000	100,00	37,11	13	38.627.000	25,00	9,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55	150.000.000	55	130.925.406	100,00	87,28	55	130.925.406	25,00	29,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	55	149.994.800	55	147.822.200	100,00	98,55	55	147.822.200	25,00	73,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11	128.820.000	11	101.603.000	100,00	78,87	11	101.603.000	25,00	25,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10	1.674.577.300	10	1.329.615.800	100,00	79,40	10	1.329.615.800	22,73	22,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM												
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Nonformal												
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2	140.538.800	2	98.634.700	100,00	70,18	2	98.634.700	33,33	149,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan												
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500	140.658.600	500	106.731.600	100,00	75,88	500	106.731.600	25,00	23,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Belanja Transfer DAERAH KABUPATEN/KOTA												
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PERANGKAT DAERAH												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	30.000.000	1	29.190.000	20,00	97,30	1	59.190.000	5,00	49,33	Dinas Kesehatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	30.000.000	1	20.230.000	20,00	67,43	1	50.230.000	5,00	41,86	Dinas Kesehatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daera												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	395	33.320.690.551	395	31.433.592.192	100,00	94,34	395	64.754.282.743	20,79	35,87	Dinas Kesehatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya administrasi keuangan	862	2.595.574.338	862	2.582.096.667	100,00	99,48	862	5.177.671.005	33,33	21,16	Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	7	14.995.750	7	14.995.750	100,00	100,00	7	29.991.500	5,60	4,41	Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Perkantoran	50	97.629.060	0	93.726.559	0,00	96,00	0	191.355.619	0,00	128,47	Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	40	34.999.000	40	34.999.000	100,00	100,00	40	69.998.000	33,33	46,67	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	43	99.950.700	43	99.743.300	100,00	99,79	43	199.694.000	28,10	89,24	Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk perkantoran	10	69.999.900	10	69.889.800	100,00	99,84	10	139.889.700	33,33	98,44	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	300	15.000.000	235	15.000.000	78,33	100,00	235	30.000.000	45,63	84,51	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar	24	193.456.000	18	192.283.335	75,00	99,39	18	385.739.335	26,47	34,04	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telekomunikasi berupa internet, informasi, sumberdaya air dan listrik	36	60.200.000	18	53.930.268	50,00	89,59	18	114.130.268	200,00	16,80	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Pajak kendaraan	30	98.730.500	28	94.739.150	93,33	95,96	28	193.469.650	19,44	56,06	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbayarnya Pajak kendaraan	30	99.999.800	30	98.866.000	100,00	98,87	30	198.865.800	20,83	57,62	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rakit dan prasarana pendukung yang dibangun	1	1.785.195.489	1	1.292.616.329	60,00	72,41	1	3.077.811.818	20,00	5,70	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibangun	24	5.148.622.100	24	2.400.531.116	100,00	46,62	24	7.549.153.216	92,31	301,97	Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang diadakan	6	452.185.350	6	431.975.845	100,00	95,53	6	884.161.195	75,00	38,44	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan penunjang yang tersedia	2	7.161.175.900	2	6.866.431.768	100,00	95,88	2	14.027.607.668	10,00	1275,24	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat, vaksin yang tersedia	18	1.303.834.977	18	1.303.468.335	100,00	99,97	18	2.607.303.312	5,59	29,63	Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Habis Pakai	JenisBahan Habis Pakai yang tersedia	15	832.170.282	15	828.881.987	100,00	99,60	15	1.661.052.269	75,00	24,01	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang dipelihara	10	100.000.000	10	84.824.793	100,00	84,82	10	184.824.793	66,67	61,14	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2600	815.039.000	2.165	590.069.600	83,27	72,40	2.165	1.405.108.600	16,65	446,07	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	65	1.129.699.800	5	582.674.617	7,69	51,58	5	1.712.374.417	0,04	107,68	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan Kesehatan sesuai	2364	1.166.040.000	2.000	915.971.000	84,60	78,55	2.000	2.082.011.000	15,38	757,20	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Standar											
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	35	711.039.900	25	509.406.200	71,43	71,64	25	1.220.446.100	0,19	488,18	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	5	470.525.376	5	434.548.067	100,00	92,35	5	905.073.443	20,00	362,03	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif mendpat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	15	1.015.386.637	14	896.926.842	93,33	88,33	14	1.912.313.479	18,67	764,93	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang dengan lanjut usia mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5	1.117.926.798	5	1.111.236.630	100,00	99,40	5	2.229.163.428	5,26	2346,49	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang dengan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	65	517.319.623	62	459.443.205	95,38	88,81	62	976.762.828	59,05	806,22	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang dengan Diabetes mellitus medpata pelayanan Kesehatan sesuai standar	50	273.087.000	50	252.336.600	100,00	92,40	50	525.423.600	52,63	437,85	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10	614.849.900	10	592.378.000	100,00	96,35	10	1.207.227.900	50,00	1207,23	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	30	630.324.200	30	543.878.600	100,00	86,29	30	1.174.202.800	50,00	391,40	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayana	10	1.390.000.000	10	1.345.990.100	101,00	96,83	10	2.735.990.100	40,40	1563,42	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kesehahtan sesuai standar											
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen yang tersedia	25	149.887.900	25	146.329.100	100,00	97,63	25	296.217.000	50,00	183,73	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan mendapat pelayanan sesuai standar	10	1.016.220.288	10	989.369.777	100,00	97,36	10	2.005.590.065	20,00	44,20	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan sesuai standar	15	1.267.045.300	14	1.065.097.415	94,67	84,06	14	2.332.142.715	142,00	932,86	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen yang tersedia	1	50.000.000	0	16.625.000	0,00	33,25	0	66.625.000	0,00	44,42	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersedia	15	50.112.000	15	49.367.000	100,00	98,51	15	99.479.000	75,00	99,48	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	5	200.000.000	4	130.005.700	70,00	65,00	4	330.005.700	43,75	412,51	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen yang tersedia	236	99.999.700	220	97.465.280	93,22	97,47	220	197.464.980	88,00	248,54	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	1	128.146.000	1	87.999.000	100,00	68,67	1	216.145.000	50,00	216,15	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen yang tersedia	9	1.018.072.700	8	762.369.752	88,89	74,88	8	1.780.442.452	2,76	254,35	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersedia	100	9.261.065.962	60	8.572.495.700	60,00	92,56	60	17.833.561.662	1,71	13,26	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen yang tersedia	37	427.153.500	37	384.422.900	100,00	90,00	37	811.576.400	24,67	42,90	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	5	1.276.426.000	5	1.136.913.020	100,00	89,07	5	2.413.339.020	20,00	92,83	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi												
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	3	32.174.000	3	25.551.500	91,67	79,42	3	57.725.500	34,38	43,29	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah dokumen yang tersedia	2	38.550.000	2	31.828.190	100,00	82,56	2	70.378.190	40,00	11,26	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota												
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	21	25.000.000	0	6.920.800	0,00	27,68	0	31.920.800	0,00	107,25	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	10	35.000.000	10	25.872.400	100,00	73,92	10	60.872.400	40,00	97,40	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Jumlah dokumen yang tersedia	75	121.700.000	30	64.220.000	40,00	52,77	30	185.920.000	21,43	132,80	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
Daerah Kabupaten/Kota												
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)												
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen yang tersedia	3	50.000.000	3	48.915.000	100,00	97,83	3	98.915.000	50,00	84,78	Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen yang tersedia	25	50.000.000	25	48.560.000	100,00	97,12	25	98.560.000	41,67	82,13	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen yang tersedia	15	75.000.000	15	69.379.000	100,00	92,51	15	144.379.000	20,00	57,75	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen yang tersedia	15	98.577.000	15	77.760.700	100,00	78,88	15	176.337.700	30,00	105,80	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Operasional Pelayanan Puskesmas Betaet	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.501.417.304	3	720.796.512	25,00	48,01	3	2.222.213.816	6,25	37,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bosua	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.154.098.417	6	408.857.850	51,67	35,43	6	1.562.956.267	12,92	33,86	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bulasat	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.558.201.227	5	678.937.770	41,67	43,57	5	2.237.138.997	10,42	35,89	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Malakopa	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.841.220.599	5	709.033.150	41,67	38,51	5	2.550.253.749	10,42	34,63	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Mapaddegat	Jumlah dokumen yang tersedia	12	3.434.647.742	11	1.196.377.885	91,67	34,83	11	4.631.025.627	22,92	33,71	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional Pelayanan Puskesmas Ma Siberut	Jumlah dokumen yang tersedia	12	2.563.730.500	5	833.283.798	43,33	32,50	5	3.397.014.298	10,83	33,13	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Ma Sikabaluan	Jumlah dokumen yang tersedia	12	2.720.350.775	4	816.046.100	34,17	30,00	4	3.536.396.875	8,54	32,50	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Peipei	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.995.762.572	5	624.270.625	41,67	31,28	5	2.620.033.197	10,42	32,82	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saibi	Jumlah dokumen yang tersedia	12	2.229.417.916	4	546.451.550	35,00	24,51	4	2.775.869.466	8,75	31,13	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sarereiket	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.078.313.947	5	418.868.250	41,67	38,84	5	1.497.182.197	10,42	34,71	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saumanganya	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.777.978.785	5	352.474.100	37,50	19,82	5	2.130.452.885	9,38	29,96	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sigapokna	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.070.293.230	7	466.304.000	58,33	43,57	7	1.536.597.230	14,58	35,89	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sikakap	Jumlah dokumen yang tersedia	12	2.815.759.225	5	834.747.100	41,67	29,65	5	3.650.506.325	10,42	32,41	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Simatalu	Jumlah dokumen yang tersedia	12	1.008.824.537	7	486.104.260	58,33	48,19	7	1.494.928.797	14,58	37,05	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sioban	Jumlah dokumen yang tersedia	12	3.089.308.887	6	822.534.559	50,00	26,63	6	3.911.843.446	12,50	31,66	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108	10.279.502.516	108	9.915.423.602	100,00	96,46	108	9.915.423.602	25,00	24,11	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak	77	5.964.209.000	77	5.883.389.000	100,00	98,64	77	5.883.389.000	25,00	20,50	Rumah Sakit Umum Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	6	29.975.000	6	29.960.500	100,00	99,95	6	29.960.500	25,00	33,21	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	648.949.400	4	626.213.353	100,00	96,50	4	626.213.353	25,00	24,12	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	32	156.136.000	32	155.794.208	100,00	99,78	32	155.794.208	25,00	31,34	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening listrik dan air	3	494.500.000	3	426.252.881	100,00	86,20	3	426.252.881	25,00	21,46	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Gaji pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113	3.145.878.176	113	3.088.376.500	100,00	98,17	113	3.088.376.500	25,00	24,46	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	330.850.000	10	320.364.879	100,00	96,83	10	320.364.879	25,00	22,88	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	924.680.000	0	873.158.459	0,00	94,43	0	873.158.459	0,00	23,61	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1.705.211.700	1	1.522.306.836	100,00	89,27	1	1.522.306.836	25,00	23,03	Rumah Sakit Umum Daerah
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	8	2.137.663.384	8	2.137.180.880	100,00	99,98	8	2.137.180.880	50,00	24,99	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	261.360.000	4	254.206.650	100,00	97,26	4	254.206.650	100,00	24,32	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5	1.568.705.500	5	1.478.870.125	100,00	94,27	5	1.478.870.125	25,00	23,57	Rumah Sakit Umum Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KABUPATEN/KOTA	**Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4	55.619.400	4	52.768.400	100,00	94,87	4	52.768.400	25,00	23,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	5.510.764.473	72	5.163.005.854	100,00	93,69	72	5.163.005.854	25,00	23,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah orang yang menerimah Jasa Tenaga Administrasi	300	3.599.052.000	300	3.511.530.000	100,00	97,57	300	3.511.530.000	25,00	24,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	15.266.000	12	15.261.000	100,00	99,97	12	15.261.000	100,00	99,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	139.709.000	1	137.445.300	100,00	98,38	1	137.445.300	100,00	98,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	56.600.000	1	45.005.000	100,00	79,51	1	45.005.000	100,00	79,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	77.490.000	1	76.990.000	100,00	99,35	1	76.990.000	100,00	99,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	131.154.000	1	131.129.386	100,00	99,98	1	131.129.386	100,00	99,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**TerpenuhinyaKebutuhan Sarana Komunikasi Air,Listrik dan Internet**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	97.950.000	12	46.414.485	100,00	47,39	12	46.414.485	100,00	47,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan**											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	134.900.000	35	119.073.488	100,00	88,27	35	119.073.488	100,00	88,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35	657.669.600	35	651.787.926	100,00	99,11	35	651.787.926	3500,00	99,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	25.790.000	30	25.707.000	100,00	99,68	30	25.707.000	100,00	99,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	1	235.913.700	1	233.726.335	100,00	99,07	1	233.726.335	100,00	99,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase Pengelolaan Sumber Air Baku**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya Air Baku Berbagai Keperluan dan Terlindunginya Kawasan dari Ancaman Abrasi, Banjir dan Longsor**											
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1	974.315.000	1	969.994.673	100,00	99,56	1	969.994.673	100,00	99,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya Layanan Irigasi**											
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1	505.166.725	1	500.406.207	100,00	99,06	1	500.406.207	100,00	99,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4	5.930.453.275	4	4.881.552.456	111,11	82,31	4	4.881.552.456	400,00	82,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Rumah Tinggal Beakses Air Minum**											
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	3.219.521.700	1	2.034.160.000	100,00	63,18	1	2.034.160.000	100,00	63,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	1	1.014.447.000	1	711.789.550	100,00	70,17	1	711.789.550	100,00	70,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya	200	5.091.468.400	200	3.667.563.811	100,00	72,03	200	3.667.563.811	20000,00	72,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	20	928.863.850	20	790.284.820	100,00	85,08	20	790.284.820	2000,00	85,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	450	6.346.921.310	450	5.173.469.068	100,00	81,51	450	5.173.469.068	45000,00	81,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	4	5.034.586.398	4	3.615.795.901	114,29	71,82	4	3.615.795.901	400,00	71,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**Persentase Rumah Tangga ramah lingkungan**											
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Sistim dan Pengelolaan Persampahan**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	614.119.600	1	235.580.000	100,00	38,36	1	235.580.000	100,00	38,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase Rumah Tangga Bersanitasi**											
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya MCK Individual bagi Masyarakat**											
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1.234.682.200	1	805.628.000	100,00	65,25	1	805.628.000	100,00	65,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	50	8.042.866.700	50	3.672.995.427	100,00	45,67	50	3.672.995.427	5000,00	45,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Lingkungan yang tertata**											
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Tesedianya Bangunan Gedung Daerah siap Pakai**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1	5.759.382.761	1	4.371.955.925	100,00	75,91	1	4.371.955.925	100,00	75,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Jalan Mantap**											
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Kegiatan penyelengaraan jalan Kabupaten**											
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1	6.973.197.540	1	5.277.556.166	100,00	75,68	1	5.277.556.166	100,00	75,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1	712.336.650	1	5.277.556.166	100,00	740,88	1	5.277.556.166	100,00	740,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7	28.689.645.815	7	27.325.088.952	102,04	95,24	7	27.325.088.952	700,00	95,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1	78.267.091.980	1	65.565.797.295	74,63	83,77	1	65.565.797.295	100,00	83,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara berkala	6	9.185.353.000	6	8.818.539.026	100,00	96,01	6	8.818.539.026	600,00	96,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4	2.855.100.350	4	2.097.384.270	100,00	73,46	4	2.097.384.270	400,00	73,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	50	7.705.917.400	50	4.974.854.401	100,00	64,56	50	4.974.854.401	5000,00	64,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Tenaga Terampil Konstruksi**											
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi**											
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	10	33.396.000	10	29.261.900	100,00	87,62	10	29.261.900	1000,00	29,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Ketaatan Terhadap RTRW**											
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen RTRW dan/atau RRTR Kabupaten yang ditetapkan dan Disosialisasikan**											
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	239.280.500	1	218.968.967	100,00	91,51	1	218.968.967	100,00	91,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	57.283.000	1	36.193.900	100,00	63,18	1	36.193.900	100,00	63,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kot	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	65.970.860	1	59.935.000	100,00	90,85	1	59.935.000	100,00	90,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Permanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	182.906.400	1	152.531.000	100,00	83,39	1	152.531.000	100,00	83,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	1	57.281.660	1	54.763.000	100,00	95,60	1	54.763.000	100,00	95,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	60.498.000	1	56.940.641	100,00	94,12	1	56.940.641	100,00	94,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	30.738.000	5	30.703.000	100,00	99,89	5	30.703.000	16,67	18,84	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	14	2.206.928.133	8	1.786.122.971	57,14	80,93	8	1.786.122.971	14,29	20,23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium PNS	1	48.610.000	1	28.750.000	100,00	59,14	1	28.750.000	25,00	0,25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	20.000.000	1	19.999.500	100,00	100,00	1	19.999.500	25,00	21,74	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5	42.337.200	5	42.319.700	100,00	99,96	5	42.319.700	31,25	30,80	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	104.063.500	3	102.946.000	100,00	98,93	3	102.946.000	25,00	43,46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	33.115.600	4	33.114.900	100,00	100,00	4	33.114.900	25,00	24,15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	32.795.000	5	23.000.000	25,00	70,13	5	23.000.000	6,25	27,40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	131.784.000	1	111.874.158	100,00	84,89	1	111.874.158	25,00	27,29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	49.300.000	2	49.300.000	66,67	100,00	2	49.300.000	2,27	24,25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	60.855.000	3	44.452.000	75,00	73,05	3	44.452.000	7,50	17,93	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	93.000.000	3	77.610.305	100,00	83,45	3	77.610.305	25,00	20,64	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Prgawai Kontrak	32	504.146.000	13	372.922.600	40,63	73,97	13	372.922.600	29,55	19,31	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	51.120.000	4	35.013.000	80,00	68,49	4	35.013.000	20,00	16,20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa pemeliharaan, dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	5	41.158.000	3	29.371.114	60,00	71,36	3	29.371.114	15,00	15,36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	13	29.950.000	4	26.810.000	30,77	89,52	4	26.810.000	7,69	21,63	Dinas Perumahan dan Kawasan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dipelihara											Permukiman
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	88.300.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata**											
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											
Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	85.324.900	2	72.477.100	100,00	84,94	2	72.477.100	50,00	20,51	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20	178.979.000	10	55.221.000	50,00	30,85	10	55.221.000	0,94	7,99	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Becana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota tang Terehabilitasi	13	1.346.138.000	7	1.313.869.200	53,85	97,60	7	1.313.869.200	10,77	48,99	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyusunan Site Plan dan/ atau Detail Engineering Desig (DED) bagi Korban korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Desing (DED) bagi rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program kabupaten/Kota	3	56.420.000	0	7.320.000	0,00	12,97	0	7.320.000	0,00	2,95	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	130	3.796.388.000	41	3.646.963.614	31,54	96,06	41	3.646.963.614	15,83	23,47	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupate/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	4.577.340.900	7	2.489.119.300	70,00	54,38	7	2.489.119.300	12,07	79,18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Menigkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten**											
Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada	2	56.070.000	1	20.837.000	50,00	37,16	1	20.837.000	25,00	5,92	Dinas Perumahan dan Kawasan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota											Permukiman
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Meningkatnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	51.648.800	0	30.130.000	0,00	58,34	0	30.130.000	0,00	10,04	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya**											
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1	247.060.400	1	27.191.500	100,00	11,01	1	27.191.500	25,00	1,70	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Tertata**											
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	392	2.272.353.000	110	2.148.653.802	28,06	94,56	110	2.148.653.802	42,80	24,17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kerja sama Perbaikan rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1	114.795.800	1	85.931.664	100,00	74,86	1	85.931.664	25,00	12,05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Beserta PSU											
Pendataan dan Verifiksi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	166.556.400	1	131.277.163	100,00	78,82	1	131.277.163	25,00	17,76	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Permukiman yang Didukung oleh PSU											
Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10	5.452.566.700	7	1.298.117.013	70,00	23,81	7	1.298.117.013	12,28	9,01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kerja Sama Penyediaan/Pengelola PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja sama Penyediaan/Pengelola PSU Perumahan	1	41.621.000	1	27.960.300	100,00	67,18	1	27.960.300	25,00	10,94	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	31	2.961.813.121	31	2.835.876.000	100,00	95,75	31	2.835.876.000	25,00	95,75	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	3	46.600.000	3	25.360.000	100,00	54,42	3	25.360.000	25	54,42	Satpol PP dan Damkar
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	14	7.911.000	14	7.909.400	100,00	99,98	14	7.909.400	25	99,98	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya isi ulang gas	1	1.500.000	1	1.500.000	100,00	100,00	1	1.500.000	25	100,00	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	5	48.064.600	5	46.856.500	100,00	97,49	5	46.856.500	25	97,49	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	2	13.000.000	2	12.725.500	100,00	97,89	2	12.725.500	25	97,89	Satpol PP dan Damkar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15	59.005.000	15	58.518.700	100,00	99,18	15	58.518.700	25	99,18	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, air,penambahan daya listrik	3	83.800.000	3	79.731.629	100,00	95,15	3	79.731.629	25	95,15	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaga Kontrak	157	2.467.772.000	157	2.408.372.000	100,00	97,59	157	2.408.372.000	25	97,59	Satpol PP dan Damkar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1	20.600.000	1	20.520.000	100,00	99,61	1	20.520.000	25	99,61	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional	8	133.675.000	3	78.855.000	37,50	58,99	3	78.855.000	9	58,99	Satpol PP dan Damkar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	10	5.890.000	5	3.780.000	50,00	64,18	5	3.780.000	13	64,18	Satpol PP dan Damkar
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUN												
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	1	333.677.700	1	295.742.700	100,00	88,63	1	295.742.700	25	88,63	Satpol PP dan Damkar
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	1	37.664.000	1	37.421.600	100,00	99,36	1	37.421.600	25	99,36	Satpol PP dan Damkar

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa												
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota												
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatnya pengetahuan aparatur	1	48.978.000	1	48.776.280	100,00	99,59	1	48.776.280	25	99,59	Satpol PP dan Damkar
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3	202.198.600	3	168.491.802	100,00	83,33	3	168.491.802	25	83,33	Satpol PP dan Damkar
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	2	15.040.000	2	14.208.200	100,00	94,47	2	14.208.200	25	94,47	Satpol PP dan Damkar
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2	21.270.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	Satpol PP dan Damkar
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Terlaksananya Kegiatan pengadaan peralatan pemadam kebakaran	1	35.288.000	1	28.640.000	100,00	81,16	1	28.640.000	25	81,16	Satpol PP dan Damkar

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kabupaten/Kota												
Investigasi Kejadian Kebakaran												
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengujian penyebab kebakaran	2	92.465.000	5	71.618.800	250,00	77,46	5	71.618.800	63	77,46	Satpol PP dan Damkar
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran												
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemadaman kebakaran	2	47.676.000	2	44.401.000	100,00	93,13	2	44.401.000	25	93,13	Satpol PP dan Damkar
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya kegiatan Pembentukan rekar Pemadaman kebakaran	2	54.368.000	2	52.378.000	100,00	96,34	2	52.378.000	25	96,34	Satpol PP dan Damkar
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Terlaksananya kegiatan Pembentukan rekar Pemadaman kebakaran**											
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya kegiatan Pembentukan rekar Pemadaman kebakaran	1	14.543.500	1	12.393.500	100,00	85,22	1	12.393.500	25	85,22	Satpol PP dan Damkar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggafran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	11.400.000	4	5.098.800	80,00	44,73	4	5.098.800	66,67	5,10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	336	2.346.723.188	320	2.240.595.042	95,24	95,48	320	2.240.595.042	100,00	19,06	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	5	41.014.600	5	40.964.125	100,00	99,88	5	40.964.125	12,50	13,84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	5	7.125.000	5	7.120.900	100,00	99,94	5	7.120.900	20,83	9,39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	12	9.990.000	12	9.900.000	100,00	99,10	12	9.900.000	25,00	24,76	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20	125.758.000	20	118.019.339	100,00	93,85	20	118.019.339	28,57	15,44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	3	58.000.000	3	46.834.436	100,00	80,75	3	46.834.436	25,00	16,09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	744	1.050.120.000	720	1.043.220.000	96,77	99,34	720	1.043.220.000	288,00	24,26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas jabatan	2	55.143.750	2	51.823.206	100,00	93,98	2	51.823.206	25,00	18,48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional	16	151.675.000	16	135.984.488	100,00	89,66	16	135.984.488	25,00	12,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksnanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	14.410.000	10	14.276.375	100,00	99,07	10	14.276.375	62,50	11,46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	29.760.000	1	29.746.875	100,00	99,96	1	29.746.875	100,00	8,04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota												
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Org yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka lepada penduduk yang tinggal	80	83.152.100	80	52.770.400	100,00	63,46	80	52.770.400	20,00	8,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya											
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	100	84.250.350	100	65.130.242	100,00	77,31	100	65.130.242	28,57	13,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	12	189.130.250	12	172.901.900	100,00	91,42	12	172.901.900	25,00	16,64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelatihan Jitupasna	30	72.653.600	30	55.476.400	100,00	76,36	30	55.476.400	7,50	9,93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terhadap Bencana												
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksnanya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500	220.858.500	500	184.319.404	100,00	83,46	500	184.319.404	25,00	15,48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksanya distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1000	114.705.000	1000	80.591.120	100,00	70,26	1000	80.591.120	25,00	12,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN,												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota												
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pembangunan embung yang dapat diselesaikan	4	1.776.523.679	4	1.741.312.308	100,00	98,02	4	1.741.312.308	100,00	1160,87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**											
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	**Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	3.119.654.946	31	2.980.960.219	93,94	95,55	31	2.980.960.219	24,03	23,20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	27.600.000	1	27.600.000	100,00	100,00	1	27.600.000	25,00	25,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan administrasi umum perangkat	**Persentase ketersediaan dan**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
daerah	**kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor**											
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	10.660.000	1	10.660.000	100,00	100,00	1	10.660.000	25,00	59,22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	31.854.000	4	31.286.230	100,00	98,22	4	31.286.230	100,00	24,63	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	7	70.160.000	7	68.374.000	100,00	97,45	7	68.374.000	43,75	32,56	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	2	12.383.200	2	11.824.900	100,00	95,49	2	11.824.900	25,00	21,50	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasai SKPD	1	196.033.750	1	194.019.661	100,00	98,97	1	194.019.661	25,00	45,65	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar**											
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	49.200.000	1	48.967.270	100,00	99,53	1	48.967.270	25,00	24,48	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	481.110.000	1	476.910.000	100,00	99,13	1	476.910.000	25,00	18,93	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase barang milik daerah layak pakai**											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	1	61.258.000	1	44.505.655	100,00	72,65	1	44.505.655	25,00	79,33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	49.972.050	7	37.438.126	100,00	74,92	7	37.438.126	8,75	106,97	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	28	30.080.000	28	30.047.000	100,00	99,89	28	30.047.000	233,33	85,85	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	113.717.750	3	112.897.830	100,00	99,28	3	112.897.830	25,00	217,11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase penurunan PMKS**											
Kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)	**Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan**											
Peningkatan kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten	75	45.026.300	75	43.179.325	100,00	95,90	75	43.179.325	18,75	21,59	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	**Persentase PSKS yang dilatih**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja social masyarakat kewenangan kabupaten	43	58.853.800	14	54.278.942	32,56	92,23	14	54.278.942	19,18	55,29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran**											
Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan**											
Penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standat gizi minimal kewenangan kabupaten	1972	1.519.895.100	1972	1.516.263.832	100,00	99,76	1972	1.516.263.832	1972,00	1263,55	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2	143.543.900	2	142.251.828	100,00	99,10	2	142.251.828	5,00	355,63	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten	18	125.097.600	18	105.947.900	100,00	84,69	18	105.947.900	72,00	132,43	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program perlindungan dan jaminan sosial	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan social**											
Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin	**Persentase data fakir miskin yang valid**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
cakupan daerah kabupaten/kota												
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten	200	208.868.000	200	191.144.586	100,00	91,51	200	191.144.586	0,23	159,29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten	500	418.034.400	500	411.738.060	100,00	98,49	500	411.738.060	0,58	171,56	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program penanganan bencana	**Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran**											
Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	**Persentase korban bencana mendapatkan bantuan**											
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penangan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten	20	658.948.800	20	655.493.440	100,00	99,48	20	655.493.440	5,00	655,49	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kab/kota	**Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana**											
Koordinasi,sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten	20	223.097.000	20	187.728.250	100,00	84,15	20	187.728.250	25,00	187,73	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERITAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**											
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Rencana Tenaga Kerja Makro yang ditetapkan**											
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen rencana tenaga kerja makro yang ditetapkan	3	36.664.600	3	29.003.200	100,00	79,10	3	29.003.200	75,00	5,70	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja**											
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	**Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan**											
Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi kapasitas Instruktur dan Peningkatan sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun 2023	20	269.198.400	20	268.433.047	100,00	99,72	20	268.433.047	20,00	87,91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER	**Persentase OPD yang menggunakan PPRG**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**dalam perencanaan dan penganggaran**											
Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah OPD yang Mengikuti pelembagaan PUG**											
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten	1	27.218.000	1	23.209.600	100,00	85,27	1	23.209.600	12,50	58,02	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten	18	59.219.000	18	58.184.200	100,00	98,25	18	58.184.200	20,22	145,46	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	**Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan**											
Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	180	749.986.800	180	701.027.720	100,00	93,47	180	701.027.720	150,00	1168,38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**											
Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	**Jumlah dokumen/perangkat daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota**											
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kotaterhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	72.502.000	1	60.375.000	100,00	83,27	1	60.375.000	25,00	40,07	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	**Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi**											
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	88.510.000	4	58.857.840	100,00	66,50	4	58.857.840	100,00	73,57	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Jumlah Pencanangan Kecamatan Layak Anak**											
Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA**											
Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat AdvokasKebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4	137.973.550	3	135.876.550	75,00	98,48	3	135.876.550	42,86	33,97	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	18.160.900	1	17.855.000	100,00	98,32	1	17.855.000	7,14	8,51	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan**											
Kegiata pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	**Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan tehadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	2	73.705.000	2	72.952.843	100,00	98,98	2	72.952.843	2,78	36,48	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabuapten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten	1	98.244.900	1	70.963.398	100,00	72,23	1	70.963.398	25,00	35,48	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiata penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	**Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**											
Koordinasi dan sinkronisasasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindunan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	17	342.333.500	15	331.623.433	88,24	96,87	15	331.623.433	375,00	414,53	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiata penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan tingkat daerah**											
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan	1	106.488.900	1	95.990.203	100,00	90,14	1	95.990.203	25,00	95,99	Dinas Sosial, Pemberdayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus											Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kesejahteraan ASN**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Meningkatnya kesejateraan ASN	81	6.787.914.306	81	6.576.945.586	100,00	96,89	81	6.576.945.586	25,00	20,61	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya administrasi perkantoran	10	20.000.000	10	19.898.000	100,00	99,49	10	19.898.000	33,33	10,30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	meningkatnya informasi/wawasan ASN	7	14.000.000	7	13.995.000	100,00	99,96	7	13.995.000	25,00	23,72	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan singronisasi program dan kegiatan antar kab./propinsi dan pemerintah pusat	24	175.040.000	24	175.012.158	100,00	99,98	24	175.012.158	9,68	21,88	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	lancarnya administrasi perkantoran	12	77.500.000	12	70.297.169	100,00	90,71	12	70.297.169	25,00	21,14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota												
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	19000	343.718.000	19000	304.862.146	100,00	88,70	19000	304.862.162	4611,65	66,27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		26	2.475.995.023	26	2.279.140.048	100,00	92,05	26	2.279.140.048	25,00	19,95	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi	Terpenuhinya penerangan bangunan	7	15.840.000	7	15.824.887	100,00	99,90	7	15.824.887	25,00	33,41	Dinas Lingkungan Hidup dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kantor											Kebersihan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	204.128.300	47	204.100.600	100,00	99,99	47	204.100.600	25,00	30,74	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	13	4.804.900	12	4.804.900	92,31	100,00	12	4.804.900	23,08	24,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan yyang Disediakan	7	18.990.000	6	15.675.000	85,71	82,54	6	15.675.000	21,43	20,63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	120.602.000	50	118.855.682	100,00	98,55	50	118.855.682	25,00	30,32	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pentediaan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	44.000.000	1	23.271.076	100,00	52,89	1	23.271.076	25,00	11,64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	617.820.838	11	612.886.571	100,00	99,20	11	612.886.571	25,00	43,94	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16	53.130.717	16	51.995.967	100,00	97,86	16	51.995.967	25,00	24,07	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara, Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	279.895.757	10	278.204.715	100,00	99,40	10	278.204.715	25,00	37,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	10.110.000	5	10.110.000	100,00	100,00	5	10.110.000	25,00	25,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota												
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	2	5.594.300	2	5.594.300	100,00	100,00	2	5.594.300	100,00	0,47	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
Hidup Kabupaten/Kota												
Koordinasi Sinskronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkugan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air,Udara dan Laut	2	1.406.468.500	2	1.322.171.216	100,00	94,01	2	1.322.171.216	50,00	165,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerinth Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	139.896.000	1	122.896.584	100,00	87,85	1	122.896.584	25,00	15,36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
Pengelolaan Sampah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	36	144.711.500	32	44.487.100	88,89	30,74	32	44.487.100	0,04	4,45	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemprosesan Akhir	6	388.970.850	6	281.458.730	100,00	72,36	6	281.458.730	18,75	28,15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Pegawai Negeri	24	2.595.567.639	24	2.435.912.666	100,00	93,85	24	2.435.912.666	25,00	16,56	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN	terbayarnya honorarium PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang	3	36.000.000	3	23.400.000	100,00	65,00	3	23.400.000	25,00	16,25	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya komponen listrik atau sarana penerangan	7	70.000.000	7	68.263.591	100,00	97,52	7	68.263.591	70,00	176,16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	3	499.630.000	3	468.340.000	100,00	93,74	3	468.340.000	10,00	78,06	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan bahan logistik kantor	terlasaksananya atk dan makan minum pegawai, kebersihan	3	113.364.200	3	111.644.020	100,00	98,48	3	111.644.020	20,00	31,90	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya cetak dan penggandaan	2	26.109.600	2	26.109.600	100,00	100,00	2	26.109.600	20,00	11,13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2	14.400.000	2	14.400.000	100,00	100,00	2	14.400.000	4,44	150,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi skpd	terlaksananya rapat koordinasi antar skpd	12	100.506.000	12	99.553.865	100,00	99,05	12	99.553.865	20,00	53,54	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening air dan listrik	2	73.800.000	2	33.959.520	100,00	46,02	2	33.959.520	20,00	28,88	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terbayarnya gji pegawai kontrak	54	910.316.000	54	907.116.000	99,07	99,65	54	907.116.000	19,81	19,16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
Pelayanan Pendaftaran Penduduk												
Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	4	306.944.100	4	294.079.800	100,00	95,81	4	294.079.800	1,67	17,09	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelayanan Pencatatan Sipil												
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	meningkatnya masyarakat memiliki dok pencatatan sipil	5	131.506.900	5	130.824.500	100,00	99,48	5	130.824.500	1,67	5,23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap komunikasi dan informasi	2	184.146.500	2	159.594.259	100,00	86,67	2	159.594.259	20,00	21,28	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN												
Penyusunan Profil Kependudukan												
Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		100	3.301.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang Dibayarkan	12	2.818.781.852	12	2.690.960.991	100,00	95,47	12	2.690.960.991	25,00	23,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan yang Dibayarkan	12	26.400.000	12	26.400.000	100,00	100,00	12	26.400.000	25,00	25,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	6.000.000	4	5.275.000	100,00	87,92	4	5.275.000	25,00	21,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	18.478.000	3	18.478.000	100,00	100,00	3	18.478.000	25,00	25,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	118.423.348	12	115.818.348	100,00	97,80	12	115.818.348	25,00	24,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	36.170.000	12	36.170.000	100,00	100,00	12	36.170.000	25,00	25,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilakukan	12	130.980.000	12	128.982.824	100,00	98,48	12	128.982.824	25,00	24,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	43.800.000	9	29.048.685	75,00	66,32	9	29.048.685	18,75	16,58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.415.916.000	9	1.390.420.606	75,00	98,20	9	1.390.420.606	18,75	24,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	99.000.000	12	84.496.595	100,00	85,35	12	84.496.595	25,00	21,34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penataan Organisasi												
Sub Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang Dilakukan	12	85.490.000	8	85.362.100	66,67	99,85	8	85.362.100	16,67	24,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENATAAN DESA												
Penyelenggaraan Penataan Desa												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	6	231.886.100	4	231.716.800	66,67	99,93	4	231.716.800	16,67	24,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang Dilakukan	2	45.840.000	1	45.605.500	50,00	99,49	1	45.605.500	12,50	24,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Hasil Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang Dilakukan	4	150.000.000	3	149.136.023	75,00	99,42	3	149.136.023	18,75	24,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Mayarakat Hukum Adat Yang Masyarakat												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggara gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang Dilakukan	5	861.919.000	4	857.596.533	80,00	99,50	4	857.596.533	20,00	24,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk												
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK) Tingkat Kabupaten	Jumlah Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Yang Dilakukan	1	100.000.000	1	97.898.200	100,00	97,90	1	97.898.200	25,00	24,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		2	124.200.000	2	103.681.000	100,00	83,48	2	103.681.000	25,00	20,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		12	42.600.000	3	9.942.000	25,00	23,34	3	9.942.000	6,25	5,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearufan Budaya Lokal												
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8	80.000.000	3	30.160.000	37,50	37,70	3	30.160.000	9,38	9,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang Dilakukan	5	199.999.800	5	127.807.134	100,00	63,90	5	127.807.134	25,00	15,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya	Jumlah Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang Dilakukan	10	264.385.000	9	195.265.100	90,00	73,86	9	195.265.100	22,50	18,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang Dilakukan	12	481.490.000	7	153.878.000	58,33	31,96	7	153.878.000	14,58	7,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Hasil Pengendalian Program KKBPK	2	183.587.900	1	88.142.500	50,00	48,01	1	88.142.500	12,50	12,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)												
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	10	66.000.000	1	2.000.000	10,00	3,03	1	2.000.000	2,50	0,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB											
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12	86.000.000	0	26.400.000	0,00	30,70	0	26.400.000	0,00	7,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota												
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang Dilakukan	4	12.600.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5	228.854.000	4	162.813.000	80,00	71,14	4	162.813.000	20,00	17,79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4	148.455.400	4	139.152.800	100,00	93,73	4	139.152.800	25,00	23,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	1	10.500.000	1	1.176.000	100,00	11,20	1	1.176.000	25,00	2,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Jejaringnya	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang Dilakukan											
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB												
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3	9.000.000	1	2.910.000	33,33	32,33	1	2.910.000	8,33	8,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	21	375.500.000	10	93.906.300	47,62	25,01	10	93.906.300	11,90	6,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan	20	360.000.000	20	352.350.000	100,00	97,88	20	352.350.000	25,00	24,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Orientasi Pelatihan Teknis Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang Dilakukan	10	249.998.000	6	171.204.500	60,00	68,48	6	171.204.500	15,00	17,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang Disediakan	12	474.907.000	9	288.085.000	75,00	60,66	9	288.085.000	18,75	15,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Presentase Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	4.265.858.114	58	4.085.953.571	100,00	95,78	58	4.085.953.571	6,95	19,16	Dinas Perhubungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium dan Vakasi Non PNS, tersedianya honorarium pengelola keuangan	2	73.200.000	2	62.900.000	100,00	85,93	2	62.900.000	25,00	17,19	Dinas Perhubungan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah barang yang disediakan**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36	21.063.210	36	21.059.710	100,00	99,98	36	21.059.710	20,00	20,00	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53	89.347.600	20	21.059.710	37,74	23,57	20	21.059.710	9,43	5,89	Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	18.079.000	3	18.057.400	100,00	99,88	3	18.057.400	8,57	19,98	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	10	19.995.000	10	19.800.000	100,00	99,02	10	19.800.000	47,62	29,12	Dinas Perhubungan
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	24	198.750.000	24	198.682.428	100,00	99,97	24	198.682.428	22,02	13,80	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik	6	132.000.000	5	131.934.050	83,33	99,95	5	131.934.050	11,11	8,28	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1	2.364.534.000	0	2.354.050.557	0,00	99,56	0	2.354.050.557	0,00	33,19	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum**											
Peyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor	9	10.000.000	4	4.750.000	44,44	47,50	4	4.750.000	26,67	15,83	Dinas Perhubungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	8	182.374.020	8	181.469.400	100,00	99,50	8	181.469.400	50,00	49,75	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan**											
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenagan Kabupaten / Kota	Jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten	1	63.310.600	1	61.099.100	100,00	96,51	1	61.099.100	25,00	32,17	Dinas Perhubungan
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Analisa tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan**											
Analisa Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kanupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3	159.099.400	3	152.733.600	100,00	96,00	3	152.733.600	37,50	48,00	Dinas Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Analisa tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan pedesaan											
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100	518.568.536	85	435.752.484	85,00	84,03	85	435.752.484	1062,50	42,01	Dinas Perhubungan
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Analisa tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan**											
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota yang tersedia	2	566.485.500	2	551.863.800	100,00	97,42	2	551.863.800	25,00	48,71	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAAN PELAYARAN	**TERJAGANYA DAN TERKENDALINYA KEAMANAN LALU LINTAS DARAT**											
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasiaan untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**											
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk	1	13.302.089.600	1	11.187.716.628	100,00	84,10	1	11.187.716.628	3,33	16,82	Dinas Perhubungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Pelabuhan Yang Disusun**											
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasiaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	1	826.720.200	1	269.158.257	100,00	32,56	1	269.158.257	16,67	8,14	Dinas Perhubungan
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	2.813.330.116	1	1.457.489.974	100,00	51,81	1	1.457.489.974	16,67	12,95	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran**											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	25.500.300	6	25.062.000	100,00	98,28	6	25.062.000	25,00	20,89	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kesejahteraan ASN**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	2.056.769.794	20	1.960.351.335	100,00	95,31	20	1.960.351.335	25,00	23,83	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35	27.600.000	35	26.400.000	100,00	95,65	35	26.400.000	25,00	18,33	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatanya Pelayanan Administrasi Perkantoran**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	13.060.000	1	13.060.000	100,00	100,00	1	13.060.000	25,00	25,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yng diadakan	4	110.000.000	4	106.835.295	100,00	97,12	4	106.835.295	25,00	24,28	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	4	65.000.000	4	64.510.000	100,00	99,25	4	64.510.000	25,00	24,81	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2	15.990.000	1	4.800.000	50,00	30,02	1	4.800.000	12,50	8,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	162.284.000	6	161.866.244	100,00	99,74	6	161.866.244	25,00	26,73	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Kelancaran Operasional Pelaksanaan Kegiatan OPD**											
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang Disediakan	6	34.970.000	6	33.853.000	100,00	96,81	6	33.853.000	25,00	48,40	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	3	118.900.000	3	105.825.925	100,00	89,00	3	105.825.925	25,00	27,56	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayan Umum kantor yang disediakan	1	658.632.000	1	593.075.148	100,00	90,05	1	593.075.148	25,00	17,41	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangakat Daerah**											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	98.994.600	1	93.693.182	100,00	94,64	1	93.693.182	25,00	29,28	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	17	49.930.000	17	49.054.000	100,00	98,25	17	49.054.000	25,00	40,88	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	79.992.000	1	79.054.000	100,00	98,83	1	79.054.000	25,00	17,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah**											
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	76.032.400	0	30.336.600	0,00	39,90	0	30.336.600	0,00	12,58	Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3	268.054.200	0	124.858.400	0,00	46,58	0	124.858.400	0,00	51,79	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat,Media dan Komunitas Dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	36.872.000	0	18.455.900	0,00	50,05	0	18.455.900	0,00	7,66	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	2	152.147.500	1	149.427.700	50,00	98,21	1	149.427.700	12,50	61,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Layanan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo**											
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah											
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah	26	2.855.437.500	26	2.814.557.200	100,00	98,57	26	2.814.557.200	25,00	23,07	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai SPBE											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	225.431.800	1	222.878.871	100,00	98,87	1	222.878.871	25,00	24,48	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	22	2.347.173.224	22	2.225.744.071	100,00	94,83	22	2.225.744.071	20,00	20,76	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	20	37.400.000	20	37.400.000	100,00	100,00	20	37.400.000	33,33	25,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya 'Bahan Logistik Kantor	30	60.273.800	27	60.166.200	90,00	99,82	27	60.166.200	18,00	15,04	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan	20	24.020.000	20	23.989.600	100,00	99,87	20	23.989.600	30,77	6,25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	4	16.800.000	4	15.800.000	100,00	94,05	4	15.800.000	20,00	19,75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	153.712.000	14	153.132.993	100,00	99,62	14	153.132.993	20,00	25,52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya 'Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	40	44.000.000	25	27.058.495	62,50	61,50	25	27.058.495	12,50	9,66	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40	41.000.000	40	40.360.084	100,00	98,44	40	40.360.084	20,00	6,96	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN												
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopmpetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	2	478.525.300	2	453.916.293	100,00	94,86	2	453.916.293	100,00	94,86	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Standarisasi usaha koperasi	2	149.862.800	2	135.135.124	100,00	90,17	2	135.135.124	100,00	84,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi usaha mikro	250	72.517.200	230	70.470.700	92,00	97,18	230	70.470.700	92,00	70,47	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil												
Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha kecil	40	4.158.579.600	40	3.874.438.630	100,00	93,17	40	3.874.438.630	100,00	513,05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kesejahteraan ASN**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2.502.599.085	24	2.376.504.327	100,00	94,96	24	2.376.504.327	24,24	19,82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12	26.400.000	12	18.000.000	100,00	68,18	12	18.000.000	25,00	4,93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Tugas ASN											Terpadu Satu Pintu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN**											
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	11.244.000	12	11.244.000	100,00	100,00	12	11.244.000	19,35	44,98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**											
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	5.717.500	15	5.717.500	100,00	100,00	15	5.717.500	25,00	13,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	18.801.500	15	18.800.000	100,00	99,99	15	18.800.000	25,00	23,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79	146.188.200	79	146.071.600	100,00	99,92	79	146.071.600	25,00	21,09	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	3.000.000	6	1.650.000	100,00	55,00	6	1.650.000	25,00	8,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	150.005.000	36	149.642.518	100,00	99,76	36	149.642.518	22,50	17,71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**											
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	86.400.000	36	71.677.323	100,00	82,96	36	71.677.323	25,00	16,29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	yang Disediakan											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23	378.252.000	23	376.996.000	100,00	99,67	23	376.996.000	25,00	40,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD**											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	72.592.250	10	62.305.306	100,00	85,83	10	62.305.306	25,00	21,48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	15.350.000	23	15.350.000	100,00	100,00	23	15.350.000	23,00	13,46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu**											
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	**Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**											
Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	76.807.000	4	75.435.200	100,00	98,21	4	75.435.200	16,67	15,30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu**											
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	**Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	150	376.562.000	100	222.429.300	66,67	59,07	100	222.429.300	16,67	14,77	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	6	103.438.000	5	80.870.100	83,33	78,18	5	80.870.100	20,83	19,55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan**											
Peberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota												
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Tersedianya dokumen perencanaan penataan lapangan bola kaki	2	619.187.200	2	474.315.600	100,00	76,60	2	474.315.600	25,00	19,15	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
Kabupaten/Kota	muntei dan maileppet											
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet**											
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet	1	234.404.400	1	203.939.500	100,00	87,00	1	203.939.500	25,00	21,75	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3	571.881.300	3	401.964.830	100,00	70,29	3	401.964.830	33,33	20,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	2	300.000.000	2	266.315.877	100,00	88,77	2	266.315.877	25,00	22,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan dan Pemanfaatan											
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah pendidik dan pelatihan sumber daya manusia yang ditingkatkan	200	366.195.000	200	197.277.800	100,00	53,87	200	197.277.800	25,00	21,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**											
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	17.068.000	2	17.972.000	100,00	105,30	2	17.972.000	16,67	18,92	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23	2.069.312.571	23	1.951.665.767	100,00	94,31	23	1.951.665.767	27,38	18,04	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	43.200.000	1	33.600.000	100,00	77,78	1	33.600.000	25,00	16,80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	10.000.000	20	10.000.000	100,00	100,00	20	10.000.000	25,00	20,83	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	44.086.000	3	44.083.400	100,00	99,99	3	44.083.400	25,00	21,68	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	13	10.695.000	13	10.695.000	100,00	100,00	13	10.695.000	23,21	15,73	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	10.005.000	1	10.000.000	50,00	99,95	1	10.000.000	25,00	22,22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	111.430.000	20	90.883.263	55,56	81,56	20	90.883.263	13,89	18,55	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Laiinya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	29.804.000	3	28.864.651	100,00	96,85	3	28.864.651	75,00	25,32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	3	10.000.000	3	6.886.625	100,00	68,87	3	6.886.625	25,00	14,35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daya Air dan Listrik yang disediakan											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	384.132.000	11	382.263.090	100,00	99,51	11	382.263.090	25,00	33,47	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	56.250.000	10	42.908.465	100,00	76,28	10	42.908.465	25,00	21,45	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	5.070.000	15	5.070.000	100,00	100,00	15	5.070.000	25,00	21,13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN												
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan peprustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Managemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM:Information Technology Service Management)	1	303.930.000	1	290.930.000	100,00	95,72	1	290.930.000	25,00	23,93	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah	1	543.854.000	1	536.108.924	100,00	98,58	1	536.108.924	25,00	24,64	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kabupaten/Kota sesuai Standar nasional Perpustakaandi wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya											
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Peprustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1	50.000.000	1	49.446.000	100,00	98,89	1	49.446.000	2,50	27,47	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Peprustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	186.248.520	1	135.845.900	100,00	72,94	1	135.845.900	25,00	18,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	100	393.279.000	100	376.003.770	100,00	95,61	100	376.003.770	2,00	23,90	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10	224.205.800	5	147.043.100	50,00	65,58	5	147.043.100	6,25	73,52	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum	1	10.793.003.604	1	4.906.572.649	100,00	45,46	1	4.906.572.649	50,00	22,73	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Dawrah Kabupaten/Kota	yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	10	130.230.700	10	126.718.300	100,00	97,30	10	126.718.300	21,74	31,68	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA												
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3	32.340.000	3	32.093.900	100,00	99,24	3	32.093.900	1,39	14,40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	3.258.589.803	14	3.061.007.399	100,00	93,94	14	3.061.007.399	33,33	17,01	Dinas Perikanan
Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	816.392.000	12	802.436.136	100,00	98,29	12	802.436.136	25,00	11,80	Dinas Perikanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	9.750.000	6	9.750.000	100,00	100,00	6	9.750.000	20,00	9,75	Dinas Perikanan
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	48.540.000	32	48.346.000	100,00	99,60	32	48.346.000	22,86	13,62	Dinas Perikanan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	21.560.000	5	20.986.500	100,00	97,34	5	20.986.500	33,33	12,72	Dinas Perikanan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	15.000.000	2	15.000.000	100,00	100,00	2	15.000.000	25,00	11,11	Dinas Perikanan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	149.664.000	40	148.984.941	100,00	99,55	40	148.984.941	25,00	23,46	Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	348.000.000	1	347.496.184	50,00	99,86	1	347.496.184	12,50	19,86	Dinas Perikanan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	yang Disediakan											
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	103.041.250	13	102.710.500	100,00	99,68	13	102.710.500	23,21	13,69	Dinas Perikanan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	11.700.000	3	11.668.000	100,00	99,73	3	11.668.000	25,00	5,43	Dinas Perikanan
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP	**Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil**											
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah prasarana nelayanan yang diadakan	907	18.996.889.400	907	18.478.521.084	100,00	97,27	907	18.478.521.084	30,75	68,44	Dinas Perikanan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)												
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2	88.239.850	2	87.581.800	100,00	99,25	2	87.581.800	25,00	7,96	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Produksi perikanan kelompok nelayan budidaya**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil												
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	10	216.616.840	10	198.687.500	100,00	91,72	10	198.687.500	35,71	13,61	Dinas Perikanan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan												
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	275.439.920	1	260.793.945	100,00	94,68	1	260.793.945	4,55	5,43	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif**											
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Keciln												
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1	29.999.900	1	28.456.800	100,00	94,86	1	28.456.800	25,00	14,23	Dinas Perikanan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2	14.993.400	2	14.922.700	100,00	99,53	2	14.922.700	1,14	0,34	Dinas Perikanan
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota												
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93	114.989.200	93	109.858.700	100,00	95,54	93	109.858.700	21,58	33,80	Dinas Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terbayarnya honoraium Aparatur PNS dan Non PNS**											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, laporan keuangan, dan lakip	4	18.460.000	4	17.545.000	100,00	95,04	4	17.545.000	25,00	23,76	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	yang terbuat											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	3.631.510.399	46	3.519.665.037	100,00	96,92	46	3.519.665.037	25,00	24,23	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya operasional Perkantoran	43	1.131.600.000	43	1.127.392.843	100,00	99,63	43	1.127.392.843	25,00	24,91	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12	139.820.000	12	138.465.400	100,00	99,03	12	138.465.400	25,00	24,76	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	128.323.000	1	126.974.500	100,00	98,95	1	126.974.500	25,00	24,74	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	15.497.000	1	14.917.000	100,00	96,26	1	14.917.000	25,00	24,06	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningatnya koordinasi kepariwisataan dan olah raga	12	145.881.000	12	134.113.210	100,00	91,93	12	134.113.210	25,00	22,98	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	72.000.000	1	70.719.750	100,00	98,22	1	70.719.750	25,00	24,56	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Meningkatnya layanan operasional perkantoran**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	2	57.450.000	2	55.445.500	100,00	96,51	2	55.445.500	25,00	24,13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5	19.810.000	5	19.806.000	100,00	99,98	5	19.806.000	25,00	24,99	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Meningkatnya Kunjungan Wisata**											
Pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		28	3.317.861.615	28	3.129.457.829	100,00	94,32	28	3.129.457.829	25,00	23,58	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		3	239.334.000	3	203.301.500	100,00	84,94	3	203.301.500	25,00	21,24	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		4	1.408.596.998	4	1.323.799.235	100,00	93,98	4	1.323.799.235	25,00	23,49	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		6	67.710.000	5	51.200.000	83,33	75,62	5	51.200.000	20,83	18,90	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		3	1.864.447.000	3	1.766.302.862	100,00	94,74	3	1.766.302.862	25,00	23,68	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Terlaksananya Kapasitas SDM**											
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya sumber daya pemandu wisata selam, pemandu wisata tirta dan pemandu wisata surfing	120	384.040.000	100	316.057.400	83,33	82,30	100	316.057.400	20,83	20,57	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya sumber daya pemandu wisata selam, pemandu wisata tirta dan pemandu wisata surfing	120	840.624.000	120	793.883.244	100,00	94,44	120	793.883.244	25,00	23,61	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		120	99.233.000	120	49.283.100	100,00	49,66	120	49.283.100	25,00	12,42	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kesejateraan aparatur	79	1.684.130.000	79	1.677.430.000	100,00	99,60	79	1.677.430.000	658,33	143,55	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatan Pelayanan Perkantoran	43	101.689.600	43	99.685.200	100,00	98,03	43	99.685.200	23,63	36,13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	3	20.060.000	3,0	17.077.100	100,00	85,13	3	17.077.100	9,68	17,25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi Pemerintah Daerah**											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terkelolanya aset kendaraan dinas operasional	4	44.380.000	4	33.610.000	100,00	75,73	4	33.610.000	6,67	12,76	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya AC	11	7.000.000	11	6.920.000	100,00	98,86	11	6.920.000	39,29	24,71	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian												
Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	4.323.793.400	12	4.111.317.100	100,00	95,09	12	4.111.317.100	42,86	79,83	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain												
Pengadaan benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	40	2.274.026.600	40	2.266.643.400	100,00	99,68	40	2.266.643.400	40,00	43,32	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Rasio Cadangan Pangan Utama**											
Pembangunan Prasarana Pertanian	**Tersalurkannya Bahan Pokok dan Bahan Pangan Lainnya**											
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun	3	637.109.600	3	624.960.600	100,00	98,09	3	624.960.600	27,27	22,04	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Distribusi Perdagangan												
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terfasilitasinya Distribusi Perdagangan	4	204.851.300	4	195.830.300	100,00	95,60	4	195.830.300	100,00	155,37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	20	310.488.000	20	308.124.000	100,00	99,24	20	308.124.000	23,81	27,54	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota												
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan peran serta masyarakat	Terlaksanya Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri	13	3.848.858.500	5	817.455.000	38,46	21,24	5	817.455.000	38,46	57,18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	10.700.000	6	3.250.000	30,00	30,37	6	3.250.000	15,00	7,59	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99	9.353.759.059	99	8.964.416.632	100,00	95,84	99	8.964.416.632	25,00	1778,65	Sekretariat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	136.900.000	7	98.000.000	58,33	71,59	7	98.000.000	14,58	19,44	Sekretariat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	942.887.600	2	935.843.399	50,00	99,25	2	935.843.399	12,50	73,04	Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	232.075.000	1	231.096.643	100,00	99,58	1	231.096.643	25,00	53,26	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	1.377.487.000	9	1.365.603.200	75,00	99,14	9	1.365.603.200	18,75	102,65	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.036.334.000	12	1.036.172.335	100,00	99,98	12	1.036.172.335	25,00	56,87	Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kiendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disedfiakan	11	2.348.309.000	11	2.347.605.980	100,00	99,97	11	2.347.605.980	25,00	21,55	Sekretariat Daerah
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	56.440.600	10	55.529.390	100,00	98,39	10	55.529.390	25,00	21,61	Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	649.860.100	12	644.118.976	100,00	99,12	12	644.118.976	25,00	38,48	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	418.600.000	12	397.254.906	100,00	94,90	12	397.254.906	25,00	19,92	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	4.198.195.192	24	4.179.268.815	100,00	99,55	24	4.179.268.815	24,49	81,95	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan	8	613.548.000	8	544.115.851	100,00	88,68	8	544.115.851	25,00	34,91	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Jabatan	Pajaknya											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	6.915.976.055	25	6.856.670.481	100,00	99,14	25	6.856.670.481	25,00	27,68	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	4	2.532.972.000	4	2.486.576.017	100,00	98,17	4	2.486.576.017	25,00	31,71	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	16.900.000	10	16.789.500	100,00	99,35	10	16.789.500	25,00	20,99	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	4	274.950.000	4	274.516.730	100,00	99,84	4	274.516.730	25,00	38,13	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	300.000.000	1	300.000.000	100,00	100,00	1	300.000.000	25,00	15,68	Sekretariat Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang Disediakan	28	249.000.000	28	248.271.300	100,00	99,71	28	248.271.300	25,00	55,92	Sekretariat Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	1	1.712.300.000	1	1.594.035.320	100,00	93,09	1	1.594.035.320	25,00	42,86	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah												
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12	723.342.050	12	718.193.714	100,00	99,29	12	718.193.714	25,00	52,60	Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi												
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	36	180.209.880	30	150.754.907	83,33	83,66	30	150.754.907	20,83	14,87	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	97.136.000	1	90.596.705	100,00	93,27	1	90.596.705	25,00	17,27	Sekretariat Daerah
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	36	136.042.000	30	120.849.150	83,33	88,83	30	120.849.150	20,83	17,23	Sekretariat Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	39.694.200	3	35.291.000	100,00	88,91	3	35.291.000	25,00	13,68	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	93.067.000	1	91.444.140	100,00	98,26	1	91.444.140	25,00	18,03	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan												
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	422.558.000	12	420.643.528	100,00	99,55	12	420.643.528	25,00	61,62	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	487.208.800	12	478.580.067	100,00	98,23	12	478.580.067	25,00	65,18	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	370.977.390	12	364.640.656	100,00	98,29	12	364.640.656	25,00	50,78	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												
Administrasi Tata Pemerintahan												
Penataan Administrasi Pemerintahan	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,Terlaksananya Peningkatan Administrasi Pemerintahan,Penyelesaian Permasalahan Administrasi Pemerintah dan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4	152.266.000	4	141.653.950	100,00	93,03	4	141.653.950	25,00	19,43	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Forum Komunikasi Kecamatan,Inventarisasi Permasalahan di Kecamatan dan solusinya,Terlaksananya Pembinaan terhadap Kecamatan,dan Penyusunan Pedoman teknis Penataan Wilayah Kecamatan	30	335.490.000	30	333.316.311	100,00	99,35	30	333.316.311	25,00	69,78	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Proses Administrasi Pergantian Antar waktu Pimpinan dan Anggota Legislatif,Fasilitasi	5	221.039.900	5	199.724.484	100,00	90,36	5	199.724.484	31,25	20,17	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM),Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,Menyusun Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)											
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat												
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	1.489.619.600	2	1.319.152.614	100,00	88,56	2	1.319.152.614	25,00	22,01	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yasng Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,Pengendalian Pendududk dan KB	2	5.321.258.000	2	5.318.758.956	100,00	99,95	2	5.318.758.956	25,00	39,29	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait	3	4.196.397.900	1	3.934.946.450	33,33	93,77	1	3.934.946.450	8,33	30,49	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah raga,Pariwisata,Pendidikan,Kebudayaan,Perpustakaan,Kearsipan Trantibum Linmas											
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum												
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah berupa Perda, Perbup dan keputusan yang difasilitasi	15	220.333.200	15	218.492.650	100,00	99,16	15	218.492.650	25,00	23,53	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Pemda yang ditangani dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin	5	604.873.000	5	519.787.200	100,00	85,93	5	519.787.200	25,00	20,15	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di dokumentasikan dan disebarluaskan	4	155.040.800	4	154.834.400	100,00	99,87	4	154.834.400	25,00	24,97	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerjasama Daerah												
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Melakukan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Instansi Lainnya	1	2.323.000.000	1	2.301.591.977	100,00	99,08	1	2.301.591.977	25,00	28,55	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian												
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dewan Pengawas Defenitif	3	437.551.000	2	203.433.665	66,67	46,49	2	203.433.665	16,67	94,51	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen ETPD,Dokumen Koordinasi Tim Percepatan TPAKD,Pengendalian Inflasi dan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHB)	10	203.718.800	4	101.807.725	40,00	49,97	4	101.807.725	10,00	40,64	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan												
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	174.999.900	1	162.767.361	100,00	93,01	1	162.767.361	25,00	36,80	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	220.499.900	1	165.873.323	100,00	75,23	1	165.873.323	25,00	33,04	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	407.599.135	1	252.751.200	100,00	62,01	1	252.751.200	25,00	27,07	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Barang dan Jasa	12	380.620.400	12	362.585.729	100,00	95,26	12	362.585.729	25,00	32,96	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	512.148.000	12	462.232.964	100,00	90,25	12	462.232.964	25,00	32,96	Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah PNS Peserta Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	80	235.636.000	66	208.600.064	82,50	88,53	66	208.600.064	20,63	36,43	Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	1	165.268.800	1	111.819.641	100,00	67,66	1	111.819.641	25,00	20,10	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD												
PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keauangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	2.749.956.323	33	2.668.670.177	100,00	97,04	33	2.668.670.177	25,00	18,89	Sekretariat DPRD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	37.200.000	1	36.000.000	100,00	96,77	1	36.000.000	25,00	0,54	Sekretariat DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	26.060.000	2	25.556.640	100,00	98,07	2	25.556.640	25,00	3,19	Sekretariat DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	23.224.000	6	13.771.500	75,00	59,30	6	13.771.500	18,75	9,84	Sekretariat DPRD
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan	3	288.723.927	3	229.450.695	100,00	79,47	3	229.450.695	25,00	19,12	Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peralatan Gedung Kantor											
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3	28.908.300	2	23.956.000	66,67	82,87	2	23.956.000	16,67	2,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	350.404.700	1	330.617.900	100,00	94,35	1	330.617.900	25,00	14,61	Sekretariat DPRD
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	1	119.270.500	1	80.459.900	100,00	67,46	1	80.459.900	25,00	12,98	Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedinya Bahan Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	123.975.000	1	123.384.668	100,00	99,52	1	123.384.668	25,00	24,68	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	228.342.000	6	227.258.864	100,00	99,53	6	227.258.864	25,00	13,06	Sekretariat DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mabel	3	62.610.000	3	54.781.000	100,00	87,50	3	54.781.000	25,00	10,96	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan	3	317.250.000	3	105.518.346	100,00	33,26	3	105.518.346	25,00	6,06	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Pegawai Kontrak	59	1.229.976.000	59	1.134.163.790	100,00	92,21	59	1.134.163.790	25,00	#DIV/ 0!	Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	8	314.480.000	7	249.695.933	87,50	79,40	7	249.695.933	21,88	17,84	Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22	131.210.000	20	123.801.682	90,91	94,35	20	123.801.682	22,73	12,38	Sekretariat DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1	407.970.000	1	402.388.170	100,00	98,63	1	402.388.170	25,00	50,30	Sekretariat DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD												
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	20	9.041.357.250	20	8.938.838.304	100,00	98,87	20	8.938.838.304	25,00	22,51	Sekretariat DPRD
Penyediaaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100	223.910.000	20	202.048.330	20,00	90,24	20	202.048.330	5,00	30,61	Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD												
Fasiltasi Fraksi DPRD	Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD	4	3.731.600	3	3.357.840	75,00	89,98	3	3.357.840	18,75	22,50	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD												
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD												
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	216.607.000	1	212.467.400	100,00	98,09	1	212.467.400	25,00	14,97	Sekretariat DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan	8	648.410.000	8	647.000.156	100,00	99,78	8	647.000.156	25,00	12,61	Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peraturan Daerah											
Penyelenggaraan Kajian Perundang -undangan	Terlaksananya Penyelenggara Rancangan Peraturan Daerah	1	255.038.000	1	242.373.500	100,00	95,03	1	242.373.500	25,00	17,08	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1	31.500.000	1	31.500.000	100,00	100,00	1	31.500.000	25,00	15,75	Sekretariat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran												
Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1	18.718.800	1	17.858.800	100,00	95,41	1	17.858.800	25,00	12,76	Sekretariat DPRD
PembahasanPerubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	30.556.800	1	30.334.300	100,00	99,27	1	30.334.300	25,00	21,67	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1	209.453.800	1	191.813.000	100,00	91,58	1	191.813.000	25,00	13,70	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1	222.257.800	1	194.928.087	100,00	87,70	1	194.928.087	25,00	13,92	Sekretariat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1	163.438.800	1	157.394.400	100,00	96,30	1	157.394.400	25,00	15,74	Sekretariat DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan												
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang pemerintah dan Hukum	4	928.865.000	4	912.427.132	100,00	98,23	4	912.427.132	25,00	30,25	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Terlaksananya Pengawasan Urusan	4	856.680.000	4	854.013.906	100,00	99,69	4	854.013.906	25,00	30,67	Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Infrastuktur	Pemerintahan Bidang Infrastruktur											
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4	977.840.000	4	976.574.952	100,00	99,87	4	976.574.952	25,00	35,07	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4	717.039.000	5	690.098.350	125,00	96,24	5	690.098.350	31,25	24,78	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4	649.734.000	4	648.709.374	100,00	99,84	4	648.709.374	25,00	23,66	Sekretariat DPRD
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	90.417.000	1	84.885.200	100,00	93,88	1	84.885.200	25,00	2,81	Sekretariat DPRD
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggjawaban Kepala Daerah	1	234.280.800	1	179.853.340	100,00	76,77	1	179.853.340	25,00	12,92	Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD												
Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	6	1.556.171.000	5	1.322.684.344	83,33	85,00	5	1.322.684.344	20,83	15,25	Sekretariat DPRD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6	342.930.000	5	313.453.000	83,33	91,40	5	313.453.000	20,83	25,01	Sekretariat DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli	Terlaksananya Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli	3	120.000.000	2	100.000.000	66,67	83,33	2	100.000.000	16,67	13,89	Sekretariat DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	4	240.000.000	4	240.000.000	100,00	100,00	4	240.000.000	25,00	25,00	Sekretariat DPRD
Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Program	1	9.595.800	1	6.893.625	100,00	71,84	1	6.893.625	25,00	17,23	Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kerja DPRD											
Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat												
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	6	1.649.050.000	6	1.647.118.800	100,00	99,88	6	1.647.118.800	25,00	15,32	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	3	3.125.907.400	3	3.096.727.400	100,00	99,07	3	3.096.727.400	25,00	23,46	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD												
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6	2.558.174.000	6	2.556.214.738	100,00	99,92	6	2.556.214.738	25,00	22,03	Sekretariat DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3	4.562.400	1	3.090.625	33,33	67,74	1	3.090.625	8,33	0,26	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
PERENCANAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	38	3.377.462.375	38	3.242.994.322	100,00	96,02	38	3.242.994.322	25,00	19,11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	30.200.000	1	30.200.000	100,00	100,00	1	30.200.000	25,00	8,10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pelayanan administrasi umum**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Listrik yang dibutuhkan	12	38.814.000	12	38.814.000	100,00	100,00	12	38.814.000	25,00	34,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	321.752.000	3	321.752.000	100,00	100,00	3	321.752.000	25,00	33,88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyedian Barang Cetak dan Penggandan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	6	98.220.000	6	98.220.000	100,00	100,00	6	98.220.000	25,00	8,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	1	12.150.000	1	12.150.000	100,00	100,00	1	12.150.000	25,00	8,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	170.068.000	36	170.052.734	100,00	99,99	36	170.052.734	25,00	17,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah**											
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	428.359.450	1	428.359.450	100,00	100,00	1	428.359.450	25,00	36,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	289.753.000	36	289.031.774	100,00	99,75	36	289.031.774	25,00	15,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	354.322.000	12	353.542.422	100,00	99,78	12	353.542.422	25,00	17,44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah**											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	40.410.000	2	40.392.195	100,00	99,96	2	40.392.195	25,00	18,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah Liter BBM yang di gunakan	3595	51.945.000	3594	51.889.161	99,98	99,89	3594	51.889.161	34,63	30,49	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	4.000.000	2	4.000.000	100,00	100,00	2	4.000.000	25,00	0,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**											
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD**											
Pelasanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	104.179.400	2	104.179.000	100,00	100,00	2	104.179.000	25,00	17,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	402.299.000	2	402.027.021	100,00	99,93	2	402.027.021	25,00	26,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	5	644.095.000	5	643.946.900	100,00	99,98	5	643.946.900	25,00	32,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah												
Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan	36	259.389.200	36	257.507.865	100,00	99,27	36	257.507.865	25,00	42,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	1	279.956.200	0	265.414.773	0,00	94,81	0	265.414.773	0,00	22,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung**											
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan**											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18	100.000.000	18	92.029.922	100,00	92,03	18	92.029.922	25,00	15,34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bidang Pemerintahan												
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	478.488.400	4	467.856.191	100,00	97,78	4	467.856.191	25,00	77,98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah**											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	100.000.000	1	99.921.625	100,00	99,92	1	99.921.625	25,00	16,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	1	110.000.000	1	109.468.700	100,00	99,52	1	109.468.700	25,00	18,24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratuktur dan Wilayahan	**Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfratuktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10	129.995.300	10	127.839.980	100,00	98,34	10	127.839.980	25,00	21,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	10	80.004.700	10	77.578.731	100,00	96,97	10	77.578.731	25,00	12,93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bidang Kewilayahan											
KEUANGAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	28.574.392.182	51	20.394.226.597	100,00	71,37	51	20.394.226.597	25,00	17,84	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3	212.640.000	1	193.440.000	33,33	90,97	1	193.440.000	8,33	22,74	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	44.757.000	1	35.935.000	100,00	80,29	1	35.935.000	25,00	20,07	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	45.550.000	1	45.547.000	100,00	99,99	1	45.547.000	25,00	25,00	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	80.392.000	1	80.373.250	100,00	99,98	1	80.373.250	25,00	24,99	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	214.397.000	1	199.489.500	100,00	93,05	1	199.489.500	25,00	23,26	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	158.040.000	1	146.431.000	100,00	92,65	1	146.431.000	25,00	23,16	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	15.990.000	1	15.800.000	100,00	98,81	1	15.800.000	25,00	24,70	Badan Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	572.998.000	1	556.872.719	100,00	97,19	1	556.872.719	25,00	24,30	Badan Keuangan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	742.489.500	1	724.406.850	100,00	97,56	1	724.406.850	25,00	24,39	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2	729.456.000	2	696.491.266	100,00	95,48	2	696.491.266	25,00	23,87	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	694.709.976	2	569.606.005	100,00	81,99	2	569.606.005	25,00	20,50	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	3	222.204.000	1	192.526.979	33,33	86,64	1	192.526.979	8,33	21,66	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya											
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	114.860.000	2	111.790.000	100,00	97,33	2	111.790.000	25,00	24,33	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentsae OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik**											
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	67.111.500	2	61.018.100	100,00	90,92	2	61.018.100	25,00	22,73	Badan Keuangan Daerah
Koordnasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2	62.819.200	2	49.150.300	100,00	78,24	2	49.150.300	25,00	19,56	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	730.364.000	2	699.798.470	100,00	95,82	2	699.798.470	25,00	23,95	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	768.429.000	2	727.713.451	100,00	94,70	2	727.713.451	25,00	23,68	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	2	308.928.000	2	285.936.266	100,00	92,56	2	285.936.266	25,00	23,14	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	72	352.602.000	72	304.166.096	100,00	86,26	72	304.166.096	25,00	21,57	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlaah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	4	396.747.000	3	370.144.560	75,00	93,29	3	370.144.560	18,75	23,32	Badan Keuangan Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas	3	204.357.800	3	201.537.700	100,00	98,62	3	201.537.700	25,00	24,66	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3	95.589.600	3	91.390.000	100,00	95,61	3	91.390.000	25,00	23,90	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	12	233.371.600	9	228.362.482	75,00	97,85	9	228.362.482	18,75	24,46	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2d dengan instansi terkait	9	180.765.000	6	177.378.372	66,67	98,13	6	177.378.372	16,67	24,53	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	2	217.858.000	1	212.102.067	50,00	97,36	1	212.102.067	12,50	24,34	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2	241.158.400	2	224.264.945	100,00	92,99	2	224.264.945	25,00	23,25	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	1	68.511.400	1	59.006.400	100,00	86,13	1	59.006.400	25,00	21,53	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah											
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	72	175.802.000	72	103.934.376	100,00	59,12	72	103.934.376	25,00	14,78	Badan Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												
Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	4.497.167.877	1	3.278.137.206	100,00	72,89	1	3.278.137.206	25,00	18,22	Badan Keuangan Daerah
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1	107.720.464.569	1	60.597.292.380	100,00	56,25	1	60.597.292.380	25,00	14,06	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik**											
Pengelolaan Barang Milik Daerah												
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	4	24.497.600	4	23.088.800	100,00	94,25	4	23.088.800	25,00	23,56	Badan Keuangan Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36	62.383.600	36	57.077.620	100,00	91,49	36	57.077.620	25,00	22,87	Badan Keuangan Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	467.414.500	6	332.825.600	60,00	71,21	6	332.825.600	15,00	17,80	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30	174.870.800	30	160.618.830	100,00	91,85	30	160.618.830	25,00	22,96	Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	76.003.500	2	73.922.600	100,00	97,26	2	73.922.600	25,00	24,32	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	43.552.000	2	38.105.000	100,00	87,49	2	38.105.000	25,00	21,87	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase PAD terhadap total pendapatan**											
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah												
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	124.670.000	0	87.955.000	0,00	70,55	0	87.955.000	0,00	17,64	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian pajak daerah	6	281.224.400	5	253.380.000	83,33	90,10	5	253.380.000	20,83	22,52	Badan Keuangan Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	1	168.096.600	1	157.112.700	100,00	93,47	1	157.112.700	25,00	23,37	Badan Keuangan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1	81.364.000	1	69.646.400	100,00	85,60	1	69.646.400	25,00	21,40	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	1	350.402.200	1	204.214.964	100,00	58,28	1	204.214.964	25,00	14,57	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	4	584.493.000	4	560.592.700	100,00	95,91	4	560.592.700	25,00	23,98	Badan Keuangan Daerah
KEPEGAWAIAN												
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Lancarnya Kegiatan Perkantoran**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Ruang Kantor Yang Terang	55	2.703.197.305	6	2.579.054.257	10,91	95,41	6	2.579.054.257	2,73	23,85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya perlengkapan akantor	1	26.400.000	1	26.360.000	100,00	99,85	1	26.360.000	25,00	24,96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Lancarnya Kegiatan Perkantoran**											
Peneydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	Terwujudnya Ruang Kantor Yang Terang	15	16.659.000	15	15.383.500	100,00	92,34	15	15.383.500	22,73	13,35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Peralatanan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya perlengkapan akantor	1	27.909.000	0	22.585.000	0,00	80,92	0	22.585.000	0,00	80,92	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum ASN	4	79.331.000	4	77.875.600	100,00	98,17	4	77.875.600	6,25	5,21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tersedianya alat tulis kantor							0		0,00		

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	3	15.761.000	3	14.988.900	100,00	95,10	3	14.988.900	4,55	2,18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pemahaman Apartur tentang peraturan perundang-undangan	5	15.000.000	5	15.000.000	100,00	100,00	5	15.000.000	8,06	8,30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Singkronisasi Informasi dan Pemahaman terhadap pelaksaan Kegiatan	20	153.274.000	20	153.266.553	100,00	100,00	20	153.266.553	17,54	8,86	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	3	113.399.960	3	97.703.697	100,00	86,16	3	97.703.697	4,55	6,23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Kegiatan Kantor	1	302.578.800	1	301.915.821	100,00	99,78	1	301.915.821	20,00	1207,66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	1	42.386.600	1	42.231.701	100,00	99,63	1	42.231.701	1,39	9,94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan JasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	5	23.390.400	5	23.187.550	100,00	99,13	5	23.187.550	6,94	5,46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Lapangan												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	1	20.000.000	1	19.200.000	100,00	96,00	1	19.200.000	100,00	96,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah									**0**			
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN												
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terpenuhinnya ASN sesuai dengan formasi jabatan dan analisis kebutuhan	341	394.000.400	341	359.641.779	100,00	91,28	341	359.641.779	56,83	19,98	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinasi pelaksaan Administrasi Pemberhentian	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	1	90.835.000	1	88.357.900	100,00	97,27	1	88.357.900	1,00	9,60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mutasi dan Promosi ASN												
Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SDM	1	1.104.048.000	1	941.411.265	100,00	85,27	1	941.411.265	1,11	20,49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan karir asn	300	93.698.000	300	92.681.640	100,00	98,92	300	92.681.640	100,00	14,17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kompetensi ASN												
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyratan dalam penyesuian ijazah dan	25	461.859.400	25	381.175.800	100,00	82,53	25	381.175.800	83,33	49,55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pindah golongan ruang ASN											
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	10	98.045.000	10	89.229.600	100,00	91,01	10	89.229.600	66,67	18,44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pembinaan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	10	67.959.000	5	39.229.600	50,00	57,73	5	39.229.600	33,33	8,11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia												
Sertifikat, Kelembagaan kopetensi kopetensi manajerial dan fungsional	**Persentase peningkatan dan pengembangan kopetensi manajerial dan fungsional**											
Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional kepemimpian dan pejabat	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaran Urusan Pemerintah konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	160	738.719.600	160	708.999.077	100,00	95,98	160	708.999.077	42,33	4,93	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan Dalam**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan Pembangunan Daerah											
Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan												
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	312.760.500	1	306.017.600	100,00	97,84	1	306.017.600	25,00	30,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	303.733.000	1	280.058.500	100,00	92,21	1	280.058.500	25,00	25,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
INSPEKTORAT DAERAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	3.672.763.036	37	3.433.197.660	100,00	93,48	37	3.433.197.660	25,00	23,37	Inspektorat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	43.040.000	24	30.800.000	100,00	71,56	24	30.800.000	25,00	17,89	Inspektorat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	26	331.671.400	24	323.239.088	92,31	97,46	24	323.239.088	25,26	26,94	Inspektorat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tugas dan Fungsi												
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibutuhkan	15	13.000.000	15	12.938.500	100,00	99,53	15	12.938.500	12,50	7,61	Inspektorat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis komponen Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan	2	9.890.000	2	9.862.000	100,00	99,72	2	9.862.000	16,67	2,19	Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor yang dibutuhkan	5	175.970.200	3	173.863.000	60,00	98,80	3	173.863.000	15,00	24,70	Inspektorat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1	23.000.000	1	22.889.100	100,00	99,52	1	22.889.100	25,00	24,88	Inspektorat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan	1	20.000.000	1	18.500.000	100,00	92,50	1	18.500.000	25,00	23,13	Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan/dihadiri	12	972.217.800	12	968.371.705	100,00	99,60	12	968.371.705	20,00	66,78	Inspektorat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												Inspektorat
Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya		1	310.625.000	1	295.113.000	100,00	95,01	1	295.113.000	100,00	95,01	Inspektorat
Pengadaan Aset Tak Berwujud		3	173.814.000	3	157.684.500	100,00	90,72	3	157.684.500	100,00	90,96	Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah rekening yang dibayarkan	36	100.428.900	36	83.062.395	100,00	82,71	36	83.062.395	75,00	9,23	Inspektorat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daya Air dan Listrik												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		168	316.949.168	168	303.928.000	100,00	95,89	168	303.928.000	100,00	95,89	Inspektorat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan layak jalan	4	80.950.000	4	74.356.956	100,00	91,86	4	74.356.956	5,33	8,00	Inspektorat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan layak jalan	6	36.940.000	6	30.495.510	100,00	82,55	6	30.495.510	8,00	3,28	Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10	47.755.000	10	45.790.000	100,00	95,89	10	45.790.000	25,00	18,32	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												
Penyelenggaraan Pengawasan Internal												
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	24	310.764.100	24	308.251.900	100,00	99,19	24	308.251.900	20,69	12,58	Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah lapran hasil pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12	194.940.600	12	172.255.800	100,00	88,36	12	172.255.800	13,64	2,93	Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Jenis reviu kinerja	53	335.258.400	53	334.929.600	100,00	99,90	53	334.929.600	9,81	14,13	Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu	12	39.725.400	12	37.695.800	100,00	94,89	12	37.695.800	6,49	4,05	Inspektorat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	16	640.743.000	16	610.576.900	100,00	95,29	16	610.576.900	16,00	12,59	Inspektorat
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal	4	589.847.200	4	514.498.527	100,00	87,23	4	514.498.527	40,00	17,44	Inspektorat
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan TLHP	2	189.419.400	2	155.479.000	90,00	82,08	2	155.479.000	18,00	7,07	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu												
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	12	220.535.800	12	200.877.600	100,00	91,09	12	200.877.600	20,00	8,20	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan												
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan	6	137.794.000	6	113.352.600	100,00	82,26	6	113.352.600	30,00	11,93	Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi												
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan dan pendampingan dan asistensi yang dilakukan	4	49.940.000	4	49.285.000	100,00	98,69	4	49.285.000	11,43	2,53	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah laporan pelaksanaan ZI '- Jumlah laporan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi	10	61.144.600	10	59.192.100	100,00	96,81	10	59.192.100	40,00	2,63	Inspektorat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	birokrasi											
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah laporan klinik konsultasi 2. Jumlah laporan LHKASN 3. Jumlah laporan pelaksanaan LHKPN 4. Jumlah laporan renaksi KPK 5. Jumlah laporan UPG	5	66.145.200	5	64.965.490	100,00	98,22	5	64.965.490	20,00	3,25	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan dan penegakan Integritas	4	55.190.200	4	54.105.400	100,00	98,03	4	54.105.400	16,00	4,33	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN SIPORA UTARA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	67.729.500	12	67.682.000	100,00	99,93	12	67.682.000	25,00	41,68	Kecamatan Sipora Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Utara	16	1.372.742.754	15	1.301.719.269	93,75	94,83	15	1.301.719.269	23,44	20,34	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi	12	24.400.000	12	24.400.000	100,00	100,00	12	24.400.000	3,40	14,32	Kecamatan Sipora Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor											
Administrasi Umum perangkat daerah	**Terlaksananya layanan administrasi umum**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	6	5.960.000	6	5.960.000	100,00	100,00	6	5.960.000	25,00	39,08	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor, Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan	288	56.056.600	288	55.076.600	100,00	98,25	288	55.076.600	25,00	24,56	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	6	7.504.800	6	7.504.800	100,00	100,00	6	7.504.800	18,75	21,54	Kecamatan Sipora Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	61	110.224.000	61	110.019.600	100,00	99,81	61	110.019.600	25,00	36,26	Kecamatan Sipora Utara
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**											
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	1	5.217.000	1	5.217.000	100,00	100,00	1	5.217.000	6,25	2,82	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	12	24.000.000	12	18.493.511	100,00	77,06	12	18.493.511	25,00	11,85	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	12	342.120.000	12	328.291.306	100,00	95,96	12	328.291.306	25,00	20,70	Kecamatan Sipora Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum**											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	28.650.000	7	26.603.000	100,00	92,86	7	26.603.000	24,14	19,68	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat Transportasi yang dipelihara	3	37.450.000	3	35.450.000	100,00	94,66	3	35.450.000	75,00	34,59	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	3.650.000	5	3.650.000	100,00	100,00	5	3.650.000	10,00	2,76	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	198.260.800	1	198.130.000	100,00	99,93	1	198.130.000	10,00	29,06	Kecamatan Sipora Utara
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan**											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Nonperizinan yang diurus	150	37.924.000	150	37.914.000	100,00	99,97	150	37.914.000	36,23	42,89	Kecamatan Sipora Utara
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	100	42.976.900	100	42.560.800	100,00	99,03	100	42.560.800	21,01	19,06	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	12	15.868.000	12	15.868.000	100,00	100,00	12	15.868.000	25,00	14,96	Kecamatan Sipora Utara
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	12	40.907.800	12	40.775.000	100,00	99,68	12	40.775.000	25,00	25,11	Kecamatan Sipora Utara
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan**											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	400	5.085.000	1	5.085.000	0,25	100,00	1	5.085.000	0,06	1,39	Kecamatan Sipora Utara
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	20.000.000	6	19.999.800	100,00	100,00	6	19.999.800	25,00	18,18	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Indeks Kepuasan Masyarakat**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pasilitas Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan**											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	18	41.731.000	18	41.731.000	100,00	100,00	18	41.731.000	25,00	15,59	Kecamatan Sipora Utara
KECAMATAN SIPORA SELATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	39.840.000	12	39.810.000	100,00	99,92	12	39.810.000	25,00	23,04	Kecamatan Sipora Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Selatan	23	1.944.803.671	23	1.854.278.001	100,00	95,35	23	1.854.278.001	25,00	45,39	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	23	63.870.000	23	59.680.000	100,00	93,44	23	59.680.000	25,00	5,66	Kecamatan Sipora Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	**Terlaksananya layanan administrasi umum**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau	Jumlah komponen instalasi listrik atau	6	4.995.000	6	4.995.000	100,00	100,00	6	4.995.000	25,00	25,00	Kecamatan Sipora Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerangan Bangunan Kantor	penerangan Bangunan Kantor yang disediakan											
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	2	24.100.000	2	24.100.000	100,00	100,00	2	24.100.000	25,00	25,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3	63.214.600	3	60.970.200	100,00	96,45	3	60.970.200	25,00	24,11	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan		2	5.000.000	2	5.000.000	100,00	100,00	2	5.000.000	25,00	25,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	26	133.621.000	26	130.451.844	100,00	97,63	26	130.451.844	25,00	24,41	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksannya pengadaan kendaraan Dinas**											
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	275.680.000	1	268.970.000	100,00	97,57	1	268.970.000	25,00	24,39	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1	19.932.000	1	18.545.000	100,00	93,04	1	18.545.000	25,00	23,26	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	3	20.000.000	3	20.000.000	100,00	100,00	3	20.000.000	25,00	25,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	20	327.888.000	20	327.888.000	100,00	100,00	20	327.888.000	25,00	25,00	Kecamatan Sipora Selatan
Pemeliharaan Barang Milik daerah	**Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemumjang urusan pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4	19.364.000	4	19.360.000	100,00	99,98	4	19.360.000	25,00	24,99	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan**											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	12	28.156.000	7	28.156.000	58,33	100,00	7	28.156.000	14,58	25,00	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Indeks Kepuasan Dalam Forum Pembangunan**											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	7	17.999.900	7	17.002.400	100,00	94,46	7	17.002.400	25,00	23,61	Kecamatan Sipora Selatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Kecamatan (PKK)	7	20.000.000	7	19.970.000	100,00	99,85	7	19.970.000	25,00	24,96	Kecamatan Sipora Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Terwujudnya Pembinaan Penumbuhan Karakter Kesadaran dalam pengamalan Pancasila**											
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Penghayatan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Berkarakter melalui Pengamalan Pancasila di Tingkat Kecamatan dan Desa terwujudnya Pembinaan Keluarga yang berkarakter melalui Pengamalan pancasila serta Undang-Undang dasar 1945	7	19.990.000	7	19.979.000	100,00	99,94	7	19.979.000	25,00	24,99	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kepuasan Masyarakat**											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan**											
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7	3.545.200	7	3.309.000	100,00	93,34	7	3.309.000	25,00	23,33	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Indeks Kepuasan masyarakat**											
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa**											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Pembinaan Dokumen Keuangan Desa	7	73.725.200	7	73.715.200	100,00	99,99	7	73.715.200	25,00	25,00	Kecamatan Sipora Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Desa												
KECAMATAN PAGAI UTARA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Pagai Utara Utara	14	1.288.875.056	14	1.200.442.966	100,00	93,14	14	1.200.442.966	20,00	13,48	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	12	157.790.000	12	157.735.800	100,00	99,97	12	157.735.800	17,14	6,96	Kecamatan Pagai Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	**Terlaksananya layanan administrasi umum**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	6	9.647.000	6	9.647.000	100,00	100,00	6	9.647.000	24,00	19,35	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop Komputer dan Printer	3	22.810.000	3	22.210.000	100,00	97,37	3	22.210.000	100,00	97,37	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Serta Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	51	46.681.400	51	46.681.400	100,00	100,00	51	46.681.400	25,00	13,35	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5	5.400.000	5	5.400.000	100,00	100,00	5	5.400.000	16,67	11,09	Kecamatan Pagai Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	15	126.685.000	15	125.058.900	100,00	98,72	15	125.058.900	1,76	34,39	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	12	3.000.000	12	2.990.000	100,00	99,67	12	2.990.000	20,00	0,83	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	6	314.232.000	6	314.052.571	100,00	99,94	6	314.052.571	25,00	24,99	Kecamatan Pagai Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum**											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	12.000.000	6	11.955.000	100,00	99,63	6	11.955.000	13,33	8,24	Kecamatan Pagai Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1	40.227.500	1	39.857.500	100,00	99,08	1	39.857.500	20,00	25,71	Kecamatan Pagai Utara
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	3	74.940.020	3	74.095.000	100,00	98,87	3	74.095.000	8,33	32,93	Kecamatan Pagai Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kepuasan Masyarakat**											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan**											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	1	134.486.000	1	134.486.000	100,00	100,00	1	134.486.000	20,00	53,79	Kecamatan Pagai Utara
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Kecamatan	10	6.525.000	2	6.525.000	20,00	100,00	2	6.525.000	5,00	25,00	Kecamatan Pagai Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Indeks Kepuasan Masyarakat**											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan**											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	3	74.990.000	3	71.450.000	100,00	95,28	3	71.450.000	25,00	31,76	Kecamatan Pagai Utara
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	Fungsi Kontrol dan fungsi Evaluasi serta	3	43.140.000	3	43.117.700	100,00	99,95	3	43.117.700	25,00	24,99	Kecamatan Pagai Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Pelaporan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan											
KECAMATAN SIKAKAP												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**											
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	29.990.000	10	27.990.000	62,50	93,33	10	27.990.000	15,63	9,65	Kecamatan Sikakap
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	26	2.474.799.332	3	2.191.311.970	11,54	88,55	3	2.191.311.970	2,88	19,28	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	184.791.600	3	184.791.600	25,00	100,00	3	184.791.600	6,25	25,74	Kecamatan Sikakap
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang	3	7.995.000	3	7.960.000	100,00	99,56	3	7.960.000	7,89	21,67	Kecamatan Sikakap

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Disediakan											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Junlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	11.790.000	3	11.790.000	100,00	100,00	3	11.790.000	18,75	4,94	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	3	30.000.600	3	26.133.600	100,00	87,11	3	26.133.600	1,16	5,76	Kecamatan Sikakap
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	101.877.300	12	101.877.300	100,00	100,00	12	101.877.300	25,00	25,14	Kecamatan Sikakap
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.000.000	6	30.000.000	50,00	100,00	6	30.000.000	12,50	21,38	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Junlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	172.272.000	6	172.272.000	100,00	100,00	6	172.272.000	12,50	25,42	Kecamatan Sikakap
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase Terpeliharanya Baragn Milik Daerah**											
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Terlaksananya Leand Chlearing Kantor Camat Yang Baru	1	15.000.000	1	15.000.000	100,00	100,00	1	15.000.000	25,00	25,00	Kecamatan Sikakap
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2.000.000	1	1.995.000	50,00	99,75	1	1.995.000	11,11	16,59	Kecamatan Sikakap

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	8.000.000	2	7.250.000	100,00	90,63	2	7.250.000	25,00	20,87	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**											
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkian	12	39.994.000	4	35.493.000	33,33	88,75	4	35.493.000	8,33	18,48	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**											
KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa	3	34.994.050	3	34.684.050	100,00	99,11	3	34.684.050	25,00	18,14	Kecamatan Sikakap
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	24.994.000	3	24.974.000	100,00	99,92	3	24.974.000	6,25	22,62	Kecamatan Sikakap
PROGRGAM PENYELENGGARAAN	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**yang Ditangani/Diselesaikan**											
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan**											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Julah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	66.541.000	100	66.541.000	100,00	100,00	100	66.541.000	25,00	17,21	Kecamatan Sikakap
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	29.993.000	5	23.418.000	83,33	78,08	5	23.418.000	20,83	20,12	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**											
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah Desa yang Dibina**											
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan	9	49.990.000	6	49.340.000	66,67	98,70	6	49.340.000	16,67	22,55	Kecamatan Sikakap

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendayagunaan Aset Desa											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**											
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	81.930.900	16	81.930.900	100,00	100,00	16	81.930.900	25,00	28,25	Kecamatan Pagai Selatan
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	192	1.210.478.104	148	1.087.580.056	77,08	89,85	182	1.259.191.558	350,00	22,82	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	169.572.000	12	169.524.700	100,00	99,97	15	191.454.700	31,25	16,65	Kecamatan Pagai Selatan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1.260.000	1	1.260.000	100,00	100,00	2	2.520.000	50,00	36,21	Kecamatan Pagai Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	4	34.225.200	4	33.863.200	100,00	98,94	5	39.503.200	26,32	17,56	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	940.000	1	940.000	100,00	100,00	1	940.000	25,00	6,70	Kecamatan Pagai Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	155.620.000	28	152.667.300	100,00	98,10	40	196.709.100	35,71	23,12	Kecamatan Pagai Selatan
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.000.000	12	2.000.000	100,00	100,00	12	2.000.000	25,00	10,42	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Junlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	314.232.000	12	314.232.000	100,00	100,00	14	366.604.000	33,33	27,00	Kecamatan Pagai Selatan
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase Terpeliharanya Baragn Milik Daerah**											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	32.250.000	6	29.090.000	75,00	90,20	6	29.090.000	25,00	19,39	Kecamatan Pagai Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	2.840.000	4	2.840.000	100,00	100,00	4	2.840.000	12,50	2,18	Kecamatan Pagai Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**											
KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa	7	20.434.200	7	20.434.200	100,00	100,00	14	40.868.400	50,00	40,87	Kecamatan Pagai Selatan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	35.579.000	4	34.847.700	100,00	97,94	4	34.847.700	25,00	11,05	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan**											
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan**											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	1	75.000.000	1	74.855.000	100,00	99,81	1	74.855.000	0,25	26,13	Kecamatan Pagai Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	9.835.000	1	9.147.000	100,00	93,00	1	9.147.000	2,08	11,59	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**											
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah Desa yang Dibina**											
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	75.000.000	4	73.377.200	100,00	97,84	4	73.377.200	8,33	14,72	Kecamatan Pagai Selatan
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya pengolahan adm. keuangan Kec, Siberut Barat Daya	4	48.000.000	4	48.000.000	100,00	100,00	4	48.000.000	33,33	18,70	Kecamatan Siberut Barat Daya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	13	1.935.200.562	13	1.935.200.562	100,00	100,00	13	1.935.200.562	25,00	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pengelolaan Adm. Keuangan Kecamatan Siberut Barat Daya	12	505.820.000	12	505.820.000	100,00	100,00	12	505.820.000	11,11	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Administrasi Umum perangkat daerah	**Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	12.000.000	3	12.000.000	100,00	100,00	3	12.000.000	25,00	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Bnhan Logistik Kantor		32	111.500.000	32	111.500.000	100,00	100,00	32	111.500.000	8,33	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	4	4.751.800	4	4.751.800	100,00	100,00	4	4.751.800	33,33	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	136.120.000	12	136.120.000	100,00	100,00	12	136.120.000	25,00	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	12	42.000.000	12	42.000.000	100,00	100,00	12	42.000.000	25,00	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14	395.976.000	14	395.976.000	100,00	100,00	14	395.976.000	25,00	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**											
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat**											
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	12	50.960.000	12	50.960.000	100,00	100,00	12	50.960.000	2,00	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**											
Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi pemberdayaan desa**											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	72.558.600	3	72.558.600	100,00	100,00	3	72.558.600	25,00	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3	8.937.000	3	8.720.000	100,00	97,57	3	8.720.000	6,25	24,39	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah**											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Meningkatnya pengetahuan kebinekaan	1	67.970.000	1	67.400.000	100,00	99,16	1	67.400.000	25,00	24,79	Kecamatan Siberut Barat Daya
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	1	18.780.000	1	18.780.000	100,00	100,00	1	18.780.000	100,00	25,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**											
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa**											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	3	96.330.000	2	45.410.000	66,67	47,14	2	45.410.000	16,67	11,79	Kecamatan Siberut Barat Daya

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KECAMATAN SIBERUT SELATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	4	36.105.000	4	36.085.000	100,00	99,94	4	36.085.000	4,76	14,06	Kecamatan Siberut Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	18	1.601.283.608	18	1.538.927.318	100,00	96,11	18	1.538.927.318	16,22	13,16	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	12	98.130.000	12	94.822.000	100,00	96,63	12	94.822.000	7,02	3,61	Kecamatan Siberut Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	**Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13	5.210.000	13	5.210.000	100,00	100,00	13	5.210.000	17,33	11,00	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Bnhan Logistik Kantor		13	30.763.000	13	30.714.000	100,00	99,84	13	30.714.000	25,00	7,54	Kecamatan Siberut Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	5	4.990.000	5	4.990.000	100,00	100,00	5	4.990.000	11,90	14,52	Kecamatan Siberut Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	66.070.000	12	66.063.000	100,00	99,99	12	66.063.000	4,51	10,95	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	12	12.000.000	12	11.985.000	100,00	99,88	12	11.985.000	16,67	15,69	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	191.400.000	12	190.432.000	100,00	99,49	12	190.432.000	100,00	99,49	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas opersional	4	37.500.000	4	36.875.000	100,00	98,33	4	36.875.000	9,09	20,27	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	20.850.000	1	20.850.000	100,00	100,00	1	20.850.000	16,67	23,10	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya halaman gedung kantor	1	36.071.741	1	36.071.741	100,00	100,00	1	36.071.741	33,33	15,38	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PELAYANAN PUBLIK	**Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**											
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan**											
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kepuasan layanan terhadap masyarakat	1	10.000.000	1	9.408.750	100,00	94,09	1	9.408.750	16,67	22,59	Kecamatan Siberut Selatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat**											
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	300	29.995.000	300	28.797.500	100,00	96,01	300	28.797.500	17,65	13,84	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**											
Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi pemberdayaan desa**											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	20.749.000	1	20.749.000	100,00	100,00	1	20.749.000	16,67	16,24	Kecamatan Siberut Selatan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3	21.360.000	3	20.800.000	100,00	97,38	3	20.800.000	50,00	11,23	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah**											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Meningkatnya pengetahuan kebinekaan	1	95.590.000	1	91.350.000	100,00	95,56	1	91.350.000	16,67	19,67	Kecamatan Siberut Selatan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	1	18.460.000	1	18.172.000	100,00	98,44	1	18.172.000	100,00	61,60	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**											
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa**											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	1	51.467.500	1	48.827.500	100,00	94,87	1	48.827.500	100,00	68,95	Kecamatan Siberut Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Desa	Desa Pendayagunaan Aset Desa											
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terpasilitasinya kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa	5	21.826.000	5	21.123.500	105,19	96,78	5	21.123.500	21,04	12,56	Kecamatan Siberut Selatan
KECAMATAN SIBERUT TENGAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	51.675.000	6	51.405.000	100,00	99,48	6	51.405.000	12,50	24,91	Kecamatan Siberut Tengah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Siberut Tengah	144	1.181.392.982	132	1.107.653.264	91,67	93,76	132	1.107.653.264	22,92	18,62	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	12	128.300.000	12	126.250.000	100,00	98,40	12	126.250.000	25,00	28,01	Kecamatan Siberut Tengah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum perangkat daerah	**Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	6	2.729.000	6	2.729.000	100,00	100,00	6	2.729.000	25,00	25,00	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan	210	21.711.000	210	21.711.000	100,00	100,00	210	21.711.000	16,33	17,18	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	3	5.053.100	3	4.598.100	100,00	91,00	3	4.598.100	25,00	22,95	Kecamatan Siberut Tengah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	12	57.780.000	9	57.290.000	75,00	99,15	9	57.290.000	18,75	18,13	Kecamatan Siberut Tengah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**											
Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	15	18.098.800	15	18.098.800	100,00	100,00	15	18.098.800	38,46	10,34	Kecamatan Siberut Tengah
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	2	9.604.500	1	7.494.000	50,00	78,03	1	7.494.000	8,33	4,28	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	12	4.200.000	12	4.060.000	100,00	96,67	12	4.060.000	25,00	16,92	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	180	255.000.000	161	248.500.000	89,44	97,45	161	248.500.000	22,36	24,36	Kecamatan Siberut Tengah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**											
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2	6.000.000	2	6.000.000	100,00	100,00	2	6.000.000	12,50	18,75	Kecamatan Siberut Tengah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	33.750.000	1	31.872.650	100,00	94,44	1	31.872.650	16,67	8,21	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Fasilitasi Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan**											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	200	36.690.000	175	36.232.500	87,50	98,75	175	36.232.500	29,17	17,76	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	12	13.516.000	12	13.516.000	100,00	100,00	12	13.516.000	25,00	16,90	Kecamatan Siberut Tengah
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	2	19.858.000	2	19.288.000	100,00	97,13	2	19.288.000	25,00	24,11	Kecamatan Siberut Tengah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
Masyarakat di wilayah Kecamatan												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kepuasan Masyarakat**											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan**											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	100	59.758.000	1	57.210.500	1,00	95,74	1	57.210.500	0,25	15,06	Kecamatan Siberut Tengah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	2.100.000	1	2.100.000	100,00	100,00	1	2.100.000	4,17	1,50	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan**											
PASILITAS REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	12	90.599.750	12	90.119.750	100,00	99,47	12	90.119.750	25,00	25,03	Kecamatan Siberut Tengah
KECAMATAN SIBERUT UTARA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**											
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	6	47.861.000	6	47.789.000	100,00	99,85	6	47.789.000	25,00	18,73	Kecamatan Siberut Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oarng yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	2.034.238.824	25	1.951.185.490	100,00	95,92	25	1.951.185.490	25,00	23,72	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	208.963.000	12	207.089.300	100,00	99,10	12	207.089.300	25,00	22,69	Kecamatan Siberut Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	**Terlaksananya layanan administrasi umum**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	20	2.155.500	20	2.155.500	100,00	100,00	20	2.155.500	55,56	18,89	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	21.517.300	3	21.277.300	100,00	98,88	3	21.277.300	25,00	15,91	Kecamatan Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	2.492.000	3	2.357.900	100,00	94,62	3	2.357.900	37,50	21,59	Kecamatan Siberut Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	92.978.000	1	92.370.700	100,00	99,35	1	92.370.700	25,00	18,02	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakann	12	12.000.000	12	12.000.000	100,00	100,00	12	12.000.000	25,00	20,00	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	180.000.000	12	180.000.000	100,00	100,00	12	180.000.000	25,00	25,00	Kecamatan Siberut Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	19.450.000	1	17.450.000	100,00	89,72	1	17.450.000	25,00	22,43	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	1.500.000	2	1.500.000	66,67	100,00	2	1.500.000	16,67	8,33	Kecamatan Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	15.460.000	6	14.000.000	100,00	90,56	6	14.000.000	25,00	22,64	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Utara**											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Tersedianya Layanan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1	90.452.000	1	90.451.900	100,00	100,00	1	90.451.900	4,17	43,56	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Ketelibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Tersedianya Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	31.528.200	10	30.718.200	100,00	97,43	10	30.718.200	25,00	20,93	Kecamatan Siberut Utara
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	20.665.000	12	20.625.000	100,00	99,81	12	20.625.000	25,00	7,68	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN	**Persentase konflik di Kecamatan yang**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Ditangani/Diselesaikan**											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Tersedianya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	100	100.044.000	100	100.044.000	100,00	100,00	100	100.044.000	25,00	46,90	Kecamatan Siberut Utara
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	22.285.000	1	22.285.000	100,00	100,00	1	22.285.000	25,00	14,65	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**											
Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tersedianya Layanan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	1	74.996.000	1	74.542.700	100,00	99,40	1	74.542.700	25,00	15,26	Kecamatan Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendayagunaan Aset Desa											
KECAMATAN SIBERUT BARAT												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**											
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Evaluasi Kinerja OPD Kec Sib Barat**											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Perangkat Daerah	12	42.570.000	12	42.575.000	100,00	100,01	12	42.575.000	25,00	11,15	Kecamatan Siberut Barat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	120	964.021.502	120	893.316.544	100,00	92,67	120	893.316.544	25,00	17,92	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	283.925.000	12	283.040.000	100,00	99,69	12	283.040.000	25,00	24,21	Kecamatan Siberut Barat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	12	5.844.000	12	5.844.000	100,00	100,00	12	5.844.000	100,00	16,07	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	15	38.013.200	15	37.538.200	100,00	98,75	15	37.538.200	25,00	14,84	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12	1.925.000	12	1.675.000	100,00	87,01	12	1.675.000	25,00	9,90	Kecamatan Siberut Barat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakor	12	139.110.000	12	138.712.000	100,00	99,71	12	138.712.000	25,00	25,97	Kecamatan Siberut Barat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**											
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Lapangan yang disediakan	1	75.000.000	1	74.925.000	100,00	99,90	1	74.925.000	11,11	18,27	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	12	24.000.000	7	24.000.000	58,33	100,00	7	24.000.000	14,58	19,05	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	234.144.000	9	234.144.000	75,00	100,00	9	234.144.000	18,75	22,48	Kecamatan Siberut Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah**											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	8	13.000.000	8	12.500.000	100,00	96,15	8	12.500.000	25,00	19,84	Kecamatan Siberut Barat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan lain yang dipelihara	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	33,33	8,00	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD Kecamatan Siberut**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Barat											
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**											
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12	54.370.000	12	54.365.000	100,00	99,99	12	54.365.000	25,00	13,44	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalamPembangunan Tingkat Kecamatan**											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang	12	18.060.000	12	18.060.000	100,00	100,00	12	18.060.000	25,00	9,87	Kecamatan Siberut Barat
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	2	5.063.500	2	5.063.500	100,00	100,00	2	5.063.500	25,00	4,22	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan UUD 1945 , Pelestariaan Bheneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestariaan Bheneka Tunggal Ika	1	40.955.000	1	40.955.000	100,00	100,00	1	40.955.000	0,25	15,06	Kecamatan Siberut Barat
Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas forum pimpinan di Kecamatan	4	5.228.000	4	5.185.000	100,00	99,18	4	5.185.000	25,00	4,14	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Laporan Keuangan Desa Se-Kecamatan Siberut Barat Pada tepat waktu**											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa se-kecamatan Siberut Barat**											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan aset desa	30	68.619.000	30	68.619.000	100,00	100,00	30	68.619.000	25,00	17,43	Kecamatan Siberut Barat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	11	938.568.137	40	836.025.831	40,00	0,89	40	836.025.831	130,00	6,59	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak	11	36.000.000	44	36.000.000	44,00	1,00	44	36.000.000	119,00	3,56	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	0	5.047.000	11	4.779.000	11,00	0,95	11	4.779.000	96,00	9,19	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	20	35.001.200	20	34.506.200	20,00	0,99	20	34.506.200	45,00	10,46	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	6	5.005.900	6	5.005.900	6,20	1,00	6	5.005.900	47,20	3,45	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang	6	9.990.000	13	9.990.000	13,00	1,00	13	9.990.000	37,00	11,56	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
perundang-undangan	tersedia (jenis)											Perlindungan Masyarakat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15	75.014.000	16	73.405.432	16,00	0,98	16	73.405.432	64,00	6,04	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	tersedianya peralatan kantor	1	11.790.000	1	10.499.000	1,00	0,89	1	10.499.000	31,00	4,20	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	24	24.000.000	2	22.956.172	2,00	0,96	2	22.956.172	5,00	31,88	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan jasa peayanan umum kantor	Dana transfer umum Dana Aokasi umum	12	190.944.000	23	184.444.000	23,00	0,97	23	184.444.000	56,00	192,13	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya kendaraan dinas	1	20.002.400	4	19.900.000	4,00	0,99	4	19.900.000	7,00	19,90	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	10	5.120.000	6	5.120.000	6,00	1,00	6	5.120.000	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGUATAN IDEOOGI PANCASIA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Peaksanaan Bidang ideoogiPancasia dan Karakter Kebangsaan												
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya perekrutan Paskibra	1	975.561.854	140	935.709.700	140,00	0,96	140	935.709.700	350,00	81,37	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELAUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK												
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terbayarnya Bantuan Partai politik	9	708.490.050	11	707.724.182	11,00	1,00	11	707.724.182	56,00	22,05	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Monitoring Evauasi dan Peaporan di Bidang Pendidikan Poitik Etika Budaya Poitik Peningkatan Demokrasi Fasiitas Keembagaan Pemerintahan Perwakian dan Partai Poitik Pemiihan Umum/Pemiihan Umum Kepaa Daerah serta Pemantauan Situasi Poitik di Daerah	Terbayarnya Bantuan Partai politik	1	27.407.100	3	25.911.700	3,00	0,95	3	25.911.700	12,00	3,99	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Peaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			27.037.800	2	26.828.800	2,00	0,99	2	26.828.800	23,00	2,82	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												
Pelaksanaan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Teraciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama	2	125.130.600	2	97.483.280	2,00	0,78	2	97.483.280	1302,00	8,48	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahan Ekonomi ,Sosi,Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyaagunaan Narkotika, Fasiitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	2	78.387.000	2	76.843.600	2,00	0,98	2	76.843.600	602,00	7,32	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahan	Terawasinya aliran kepercayaan di	1	64.136.000	3	62.645.900	3,00	0,98	3	62.645.900	8,00	5,97	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
Ekonomi ,Sosi,Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyaagunaan Narkotika,Fasiitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Kepulauan Mentawai											Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Peaksanaan Pemantapan Kewajiban Nasiona dan Penganan Konfik Sosia												
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terkendalinya cegah dini konflik di Masyarakat	5	36.058.400	2	24.152.500	2,00	0,67	2	24.152.500	23,00	2,54	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	Terpantauanaya tenaga kerja asing	4	37.164.400	2	33.292.200	2,00	0,90	2	33.292.200	27,00	3,33	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/RPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
Peaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terpantauanaya tenaga kerja asing	4	118.478.900	2	13.697.473	2,00	0,12	2	13.697.473	32,00	1,14	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
CAAIAN REALISASI FISIK/KEUANGAN (%)			1.052.334.946.239		877.580.287.120	**90,93**	**83,39**			16,50	27,18	
PREDIKAT KINERJA						**Tinggi**	**Tinggi**					

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja yang kemudian dilakukan telaah lebih mendalam dengan perangkat daerah pengampu urusan, berdasarkan capaian tersebut menjadi catatan terhadap permasalahan yang akan ditarik dan didentifikasi pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya guru yang bersertifikat (sertifikasi) sekitar 27 persen.
2) Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan sarjana (starata 1) sekitar 46 persen.
3) Akses rumah menuju sarana Pendidikan yang berjauhan (letak geografis) dan tidak dapat ditempuh jalur darat.
4) Belum ada konsep pendidikan berasrama dalam upaya menjawab kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang tersebar dengan akses layanan pendidikan yang terbatas.
5) Terbatasnya sarana tempat tinggal/ asrama untuk para peserta didik yang jauh dari orang tua/tempat tinggal.

6) Masih rendahnya tingkat partisipasi kesetaraan, masih sekitar 56 persen.
7) Belum memadainya kualitas dan ketersediaan sarana layanan dan fasilitas pendidikan.
8) Masih terdapat/ banyak masyarakat (orang tua) Mentawai yang menyekolahkan anaknya pada sarana layanan pendidikan di luar Mentawai.
9) Masih terdapatnya lembaga pendidikan yang belum terakreditasi maupun masih terakreditasi B.
10) Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan sarana layanan kesehatan, dan masih banyak masyarakat masih menggunakan dukun (sikerei)/ tenaga non kesehatan.
2) Masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan khususnya masyarakat miskin (sekitar 46 persen).
3) Masih terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat dusun dengan kondisi geografis yang belum sepenuhnya dapat diakses jalur darat.

4) Belum adanya rumah sakit di setiap pulau besar (Siberut, Sikakap) sebagai bagian dari sistem kesehatan daerah.
5) Masih terbatasnya tenaga dokter umum, dokter spesialis dan alat-alat kesehatan hingga ke pusat-pusat layanan kesehatan di desa (Poskesdes).
6) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus penyakit menular dan tidak menular.
7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya cakupan aksesibiltas jalan sebagai prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2) Tingginya angka kemahalan kontruksi di Kepulauan Mentawai.
3) Tidak tersedianya material lokal sebagai bahan dasar pembangunan fisik (jalan dan jembatan) seperti batu, pasir, kerikil yang harus didatangkan dari luar Mentawai.
4) Belum terhubungnya akses darat (Jalan) Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan sebagai bagian dari sistem transportasi daerah.

5) Terbatasnya ruang pembangunan fisik di Kepulauan Mentawai dikarenakan sekitar 82 persen adalah Kawasan hutan.
6) Masih rendahnya keterjangkauan/cakupan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) daerah yaitu sebesar 30,23 persen atau sekitar 13 desa.
7) Ketersediaan sanitasi rumah tangga belum menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih banyak kawasan permukiman yang tidak dilengkapi dengan PSU sekitar 71,42 persen.
2) Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh (ada 28 kawasan kumuh).
3) Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
4) Masih banyaknya permukiman potensi bencana alam belum di relokasi.
5) masih terdapat kawasan permukiman masyarakat berada pada kawasan hutan.
6) Belum adanya hamparan lahan/tanah yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pembangunan, khususnya untuk menyediakan permukiman layak bagi masyarakat.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2) Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan masih terjadinya gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum.
3) Masih belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran, serta minimnya sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran.
4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta alat peraga informasi kebencanaan.
5) Letak geografis yang kepulauan dan permukiman penduduk yang terpencar di setiap dusun dengan akses dan infrastruktur telekomunikasi yang terbatas menyulitkan dalam koordinasi dan pemberian layanan kebencanaan.
6) Pada umumnya kawasan permukiman masyarakat masih berada pada zona rawan bencana.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih belum maksimalnya pengelolaan dan *updating* data DTKS, masih terdapat *exclusion error* dan *inclusion error* data kemiskinan daerah.
2) Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana seperti lumbung sosial, dapur umum, peralatan dan perlengkapan kesiapsiagaan bencana.

2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan dan pendampingan kewirausahaan (*entrepreneurship*) mulai dari hulunya pengembangan dan peningkatan kapasitas sampai pada hilirnya yaitu bisa mengembangkan usaha atau berwirausaha (mandiri).
2) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten.
3) Masih rendahnya kompetensi/skill tenaga kerja.
4) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan.

5) Belum adanya pendampingan terhadap akses tenaga kerja dan enterprenuer ke dunia usaha, permodalan dan pasar.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya kontribusi alokasi anggaran dalam penguatan kabupaten layak anak dan gender.
2) masih rendahnya komitmen pemangku kepentingan (pimpinan perangkat daerah, desa) dalam mencanangkan dan menerapkan kabupaten layak anak.
3) Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangakan usaha.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih tingginya ketergantungan pangan dari luar Mentawai.
2) Kebutuhan pangan masih terbatas pada pemenuhan pangan rumah tangga (subsisten).
3) Masih perlu ditingkatkannya penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya luasan lahan yang dilakukan sertifikasi lahan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) perwakilan Kepulauan Mentawai.
2) Mahalnya biaya operasional pengurusan sertifikasi lahan secara mandiri.
3) Belum tersedianya bank tanah yang digunakan sebagai wadah penyediaan tanah untuk pembangunan.
4) Masih rendahnya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait alih fungsi lahan, pemanfaatan lahan pada kawasan dan proses redistribusi lahan baik itu program TORA, perhutanan sosial, hutan adat (Masyarakat Hukum Adat).

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya tenaga atau sumber daya di bidang keahlian lingkungan hidup.
2) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3) Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah masih di ibukota kabupaten (tuapejat sekitarnya), sarana dan prasaraan yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.
4) Masih terbatasnya aparatur dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup.
5) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Andministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Kondisi geografis yang sulit dengan akses yang terbatas sehingga memakan waktu dan biaya yang besar dalam menjangkau di setiap wilayah masyarakat.
2) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah (OPD).
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
2) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama desa masih sekitar 6,9 persen BUMdes yang aktif.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait keluarga berencana.
2) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
3) Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
4) Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan seperti di pelabuhan, PJU, rambu-rambu.
2) Belum terbangunnya 5 pelabuhan penyeberangan sebagai simpul konektivitas sistem transportasi daerah.
3) Belum optmialnya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten (antar pulau), masih terdapat wilayah khususnya di pantai barat yang belum mendapatkan layanan transportasi laut.
4) Masih terbatasnya jalur/trayek pelayaran menuju Kepulauan Mentawai akses masih 3 kali seminggu.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya *grand design* pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
2) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
3) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
4) Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya koperasi yang aktif sekitar 20 persen.
2) Minimnya diversifikasi usaha koperasi.
3) Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri.
4) Masih rendahnya pendampingan kewirausahaan dan kepada pelaku usaha mikro.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.
2) Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah adat/ulayat.
3) Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
4) Belum lengkapnya data kajian terkait potensi dan peluang investasi.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya SDM keolahragaan.

2) Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
3) Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan.
4) Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan dan keolahragaan.
5) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
6) Masih rendahnya pembinaan terhadap bibit atlet potensial dan pembinaan bagi atlet.
7) Masih rendahnya pembinaan/pelatihan terhadap pemuda/i untuk berwirausaha.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum defenitifnya SOTK yang mengurusi statistik daerah.
2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.
3) Belum terjalinnya kerjasama dengan lembaga statistik (BPS) dan lembaga lain penyedia data dalam mewujudkan satu data terintegrasi.
4) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
5) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi secara optimal.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem infirmasi pemerintah daerah.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rendahnya pengenalan dan pemahaman budaya daerah oleh kalangan muda.
2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya.
3) Belum terselenggaranya event atraksi kebudayaan secara kontiniu.
4) Masih sedikitnya pengakuan dan penetapan cagar budaya.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum terdapatnya gedung perpustakaan daerah sebagai sarana layanan perpustakaan publik.

2) Masih terbatasnya sosialisasi dan penggunaan media sosial/elektronik dalam mengkampanyekan budaya literasi.
3) belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book), pustaka keliling
4) Terbatasnya tenaga dan sumber daya perpustakaan.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah.
2) Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip.
3) Keterbatasan ketersediaan SDM pengelola kearsipan.

2.3.1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budi daya.
3) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan).

4) Terbatatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es).
5) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayan tangkap dan budi daya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K.
2) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata.
3) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival.
4) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.
5) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
2) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.
3) Belum optimalnya pendampingan petani dan kelembagaan tani (kelompok tani).

4) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pertanian (jalan pertanian, irigasi), sarana prasarana, lahan, pupuk dan air.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penggunaan pasar sebagai sarana perdagangan.
2) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
3) Minimnya SDM penera alat UTTP.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM (revitalisasi IKM Taraet).
3) Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor industri pengolahan dan sektor industri lainnya.
4) Belum optimalnya pendampingan calon dan pelaku industri mikro dan kecil dalam hal bisnis proses, sertifikasi, manajemen mutu, akses pasar, permodalan.

2.3.1.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang

a. Unsur Penunjang Perencanaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah dalam penyusunan akuntabilitas kinerja.
2) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
3) Masih rendahnya kapasitas fungsional perencana dalam Menyusun dokumen perencanaan.

b. Unsur Penunjang Keuangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah (pajak dan retribusi daerah) untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.
3) Belum teradministrasinya aset dengan baik.

c. Unsur Penunjang Kepegawaian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN.
2) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat.
3) Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
4) Belum terlaksana sepenuhnya merit sistem.
5) Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya.
6) Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
7) Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN.

d. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum tersedianya tenaga/ SDM peneliti.
2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
3) Masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pemanfaatan kelitbangan dan berinovasi.

e. Unsur Penunjang Pengawasan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.
2) Masih rendahnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pendampingan reformasi birokrasi, penerapan ZI, WBK/WBBM, SAKIP dan berbagai penilaian tata kelola pemerintah lainnya.
3) Masih rendahnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP.
4) Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

2.3.2. Evaluasi terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs 2023

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, sebagai agenda untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs ini terdiri dari 17 tujuan yang saling terkait, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. TPB/SDGs memiliki 17 tujuan dengan 2 diantaranya (TPB 7 dan TPB 14) tidak menjadi kewenangan daerah. 17 tujuan tersebut yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (tanpa kemiskinan).
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (tanpa kelaparan).
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (kehidupan sehat dan sejahtera).
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (pendidikan berkualitas).
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (kesetaraan gender).
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan (air bersih dan sanitasi layak).
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua (energi bersih dan terjangkau).
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (industri, inovasi dan infrastruktur).

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara (berkurangnya kesenjangan).
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (kota dan permukiman yang berkelanjutan).
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (penanganan perubahan iklim).
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan (ekosistem lautan).
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (ekosistem daratan).
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh).
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebanyak 52 indikator atau dengan persentase 26,40%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	1.3.1.(a) = 3.8.2.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%		85%	69%	99%	99%	100%	SS
2.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	-	-	-	-	26,0%	44,0 %	SS
3.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.		63,80%	80,40%	83,40%	86,40%	63,20%	SS
4.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	-	87%	87%	89%	81%	82%	SS
5.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada		0	0	0	3	3	SS
6.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan,	Meningkat		34,60%	38,40%	40,90%	38,00%	39,10%	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
		kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.								
7.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	-	0,18%	0,17%	0,17%	0,14%	0,16%	SS
8.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	16 /100.000 KH	191 Jiwa	356 Jiwa	207 Jiwa	191 Jiwa	304 Jiwa	SS
9.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	-	94%	96%	97%	96%	93%	SS
10.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	-	0	0	0	0	0,04 %	SS
11.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	76	219	87	88	143	162	SS
12.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	-	204	59	40	124	27	SS
13.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	-	99,94	90,72	96	96,03	92,4	SS
14.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%		0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	SS
15.	3.8.2.(a) = 1.3.1.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	-	85%	69%	99%	99%	100%	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
16.	4.6.1.(a) = 4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%		99,51	98,1	98,76	98,76	99,66	SS
17.	4.6.1.(b) = 4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat		99,51	98,1	98,76	98,76	99,66	SS
18.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat		100%	100%	100%	100%	100%	SS
19.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	-	-	365	365	404	438	SS
20.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	-	-	-	0,003%	0,006%	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
21.	5.2.1.(a) = 5.2.1*	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		0,20%	0,10%	0,20%	0,20%	0,10%	SS
22.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	-	100%	100%	100%	100%	100%	SS
23.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	66%	64%	67%	60%	65%	SS
24.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat		-	0,73%	1,43%	2,55%	-	SS
25.	5.b.1* = 9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat		45,11%	54,35%	64,25%	65,50%	65,50%	SS
26.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	-	71,10	78,90	72,00	72,60	73,30	SS
27.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat		64,3	71,7	63,1	65	65,9	SS
28.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	-	50.622,7	55.105,2	54.034,8	54.691,7	57.317,6	SS
29.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	-	3	4,1	2,9	1,4	1,3	SS
30.	8.7.1*	Persentase dan jumlah anak usia 15-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur	meningkat		3,4 %	1,87 %	7,44 %	1,86 %	5,43 %	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
		berdasarkan International *Conference of Labour Statisticians*								
31.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%		0,8	0,76	0,81	0,84	0,87	SS
32.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat		34	18	47	28	70	SS
33.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat dalam Km)		5	5	5	5	5	SS
34.	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Meningkat		35%	35%	35%	35%	50%	SS
35.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan .	Meningkat	-	7	7	7	7	8	SS
36.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	28%	2,33%	2,42%	2,57%	2,48%	2,45%	SS
37.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	-	2,2%	2,3%	2,4%	-	-	SS
38.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	-	115,8%	123,8%	99,6%	110,4%	100,3%	SS
39.	9.c.1.(a) = 5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat		45,11%	54,35%	64,25%	65,50%	65,50%	SS
40.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	ada	-	10	10	10	10	10	SS
41.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	-	0	0	0	3	3	SS
42.	13.1.1* = 11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat	Ada	ada	0	0	0	3	3	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
		nasional dan daerah.								
43.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Menurun	0	0	0	0	0	SS
44.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Menurun	0	0	0	0	0	SS
45.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	-	0,17%	0,18%	0,24%	0,17%	0,08%	SS
46.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 40	Meningkat 60 %	0	0	71,74	67,25	68,18	SS
47.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	-	90,8%	78,4%	91,4%	87,2%	88,9%	SS
48.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten :60%, Kota: 65%	-	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	SS
49.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten /Kota: 50%	-	61,97 (B)	63,60 (B)	63,94 (B)	64,56 (B)	65,21 (B)	SS

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
50.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	-	78%	79%	82%	84%	87%	SS
51.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	-	87%	87%	89%	91%	91%	SS
52.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	SS

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan sebanyak 64 indikator atau dengan persentase 32,49%. Capaian dengan kategori SB ini lebihh tinggi dari kategori SS kemungkinan disebabkan oleh beberapa factor antara lain; kondisi social budaya masyarakat di kabupaten kepulauan Mentawai yang sebagian masih teguh dalam memegang kebiasaan tradisional yang mereka anut sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan berbagai jenis program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan masalah Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian

pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target Nasional (SB)

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	-	13,22 %	13,37 %	14,31 %	13,74 %	13,72 %	SB
2.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	99,50%	-	-	-	-	57%	SB
3.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SB
4.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%		-	-	-	-	33%	SB
5.	1.4.1.(c) = 3.7.1.(a)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	-	-	-	-	-	54,80%	SB
6.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	-	96,91%	90,45%	89,66%	87,77%	88,74%	SB
7.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sede	Meningkat menjadi 82,2%	-	97,48%	76,97%	62,90%	60,92%	60,77%	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
		rajat.								
8.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun		-	9732	1124	6240	11229	SB
9.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah		10	3	5	9	12	SB
10.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu		6	349	214	47	14	SB
11.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah / Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450		10	3	5	9	12	SB
12.	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6		189,6	189,6	169,42	152,96	162,58	SB
13.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun		0	0	Rp 93.000.000	Rp 190.000.000	0	SB
14.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	2,1 %	0	0	0	0	96 %	SB
15.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	-	15,80%	15,80%	16%	16,28	16,28	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
16.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun		9,50%	8,10%	7,80%	10,40%	11,80%	SB
17.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%		15%	13%	12%	18%	10%	SB
18.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	-	-	1,14	1,13	1,03	1,55	SB
19.	3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	-	-	-	-	-	33%	SB
20.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	-	28,1	23,8	28,3	24,2	29,8	SB
21.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	-	11,5	14,3	14,7	11,5	15,2	SB
22.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	-	25	20,2	24,9	20,4	27,3	SB
23.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	-	63,8	80,4	83,4	86,4	63,2	SB
24.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi	Meningkat menjadi 66%		-	-	42,55%	18,72%	46,26%	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
		metode modern.								
25.	3.7.1.(a) = 1.4.1.(c)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%		-	-	-	-	54,80%	SB
26.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	-	-	-	-	14,30%	17,40%	SB
27.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	-	0	0	55,20%	54,50%	54,10%	SB
28.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	-	0,0	-	47%	41%	41%	SB
29.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	-	117,47%	112,33%	110,24%	106%,29	107%.95	SB
30.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	-	139,03	119,41	90,9	89,16	104,31	SB
31.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	-	60%	34%	25%	27%	28%	SB
32.	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Meningkat menjadi 36,73 %	60%	0	34%	25%	27%	28%	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
33.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	-	0	1	1	2	6	SB
34.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		17%	14%	18%	17%	60%	SB
35.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun		66	64	67	60	65	SB
36.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat		5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	SB
37.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%		-	-	-	-	26%	SB
38.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%		65%	73%	43%	25%	47%	SB
39.	6.1.1.(a) = 1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	-	46,9%	55,7%	58,9%	63,7%	66,5%	SB
40.	6.1.1.(c) = 6.1.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	-	46,90%	55,70%	58,90%	63,70%	66,50%	SB
41.	6.3.2.(a) = 6.6.1.(a)	Kualitas air sungai, danau, air permukaan lainnya.	Meningkat		59	0	70	70	63,33	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
42.	6.3.2.(b) = 6.3.2.(a)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat		59	0	70	70	63,33	SB
43.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	-	6,52	6,11	2,66	10,71	7,03	SB
44.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta		50,12	53,19	54,60	60,44	64,70	SB
45.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	99,50%	0,013	0,012	0,005	0,021	0,013	SB
46.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	-	28,9	21,1	28,0	27,4	27,5	SB
47.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun		69,9	78,9	72	72,6	70,2	SB
48.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)		7899	1187	854	6052	7556	SB
49.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat		16	16	15	15	15	SB
50.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	-	-	0,09%	0,002%	0,02%	0,01%	SB
51.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,290-0,320	0,34	0,27	0,32	0,23	0,26	SB
52.	10.1.1.(a) = 1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	0,5-0,8 persen	13,22%	13,37%	14,31%	13,74%	13,72%	SB
53.	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	-	0,25%	-1,85%	-	-	-	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
54.	10.4.1.(b) = 1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	99,50%	0	0%	0%	0%	57%	SB
55.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	-	5	9732	1124	6243	11229	SB
56.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	-	189,6 %	189,6 %	169,42 %	152,96 %	162,58 %	SB
57.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	Menurun menjadi 0,11%	0	0	Rp 93.000.000	Rp 190.000.000	0	SB
58.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	Meningkat	-	-	-	1	1	SB
59.	13.1.2* = 11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Menurun	5	9.732	1.124	6.243	11.229	SB
60.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Meningkat	0	0	1	0	0	SB
61.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	0,13%	0,29%	0,34%	0,28%	0,21%	SB
62.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	-	0	0,0%	0,0%	0,0%	21,1%	SB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No Indikator	Nama Indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
63.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	-	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	SB
64.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	-	0	3,3%	6,7%	6,7%	6,7%	SB

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan sebanyak 24 indikator atau dengan persentase 12,18%. Capaian dengan kategori BB ini cukup signifikan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti belum adanya kegiatan hilirisasi dari produk pertanian sehingga tidak memberikan nilai tambah terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Disamping itu, tingkat resistensi masyarakat dalam mengubah pola hidup dan pola makan juga sangat berdampak terhadap status TPB, seperti adanya anggapan bahwa merokok merupakan suatu yang sangat dibutuhkan sehingga dianggap obat. Status Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai kawasan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) menyebabkan Kabupaten Kepulauan Mentawai terkendala dalam mencapai target TPB yang

dibebankan pemerintah pusat. Kondisi geografi yang merupakan kepulauan juga menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pemantauan terhadap berbagai jenis program pemerintah akibat jarak yang berjauhan dan kondisi transportasi yang belum memadai dan sangat mahal. Belum meratanya ketersediaan berbagai fasilitas umum seperti pasar dan sekolah ikut memperburuk tingkat capaian TPB/SDGs di Kabupaten Kepulauan Mentawai, akibat rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka dan juga rendahnya minat guru untuk ditempatkan di berbagai sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB)

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/ tahun	-	0	0	0	0	0	BB
2.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	-	0	0	0	0	0	BB
3.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	-	0	0	0	0	0	BB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
4.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten /kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	-	0	0	0	0	0	BB
5.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP /kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) hitungan Matematika	Meningkat		0	0	0	0	0	BB
6.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	-	0	0	0	0	0	BB
7.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	-	0	0	0	0	0	BB
8.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten /kota.	-	0	0	0	0	0	BB
9.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	-	0	0	0	0	0	BB
10.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten /kota	-	0	0	0	0	0	BB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
11.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	ada		0	0	0	0	0	BB
12.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	-	0	0	0	0	0	BB
13.	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	-	0	0	0	0	0	BB
14.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%	Meningkat menjadi 100%	0	0	0	0	0	BB
15.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat / ada	-	0	0	0	0	0	BB
16.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	100%	0	0	0	0	0	BB
17.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	35%	0	0	0	0	0	BB
18.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	Meningkat	0	0	0	0	0	BB
19.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Meningkat	Meningkat	0	0	0	0	0	BB

No.	Indikator TPB		Target Nasional s.d Tahun 2030	Target Nasional RPJPN Tahun 2045	Capaian					Status Capaian
	No indikator	Nama indikator			2019	2020	2021	2022	2023	
20.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	Meningkat 80 %	0	0	0	0	0	BB
21.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	-	0	0	0	0	0	BB
22.	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	ada	-	0	0	0	0	0	BB
23.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	-	0	0	0	0	0	BB
24.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	18-20%	0	0	0	0	0	BB

2.3.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 (enam) pelayanan dasar sebagaimana amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2023, seluruh Jenis Pelayanan Dasar dapat terlaksana dengan baik dengan pencapaian setiap Indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pendidikan Anak Usia Dini	3.678	2.075	56,42
2	Pendidikan Dasar	18.260	17.351	95,02
3	Pendidikan Kesetaraan	1.984	1.609	81,10

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Pendidikan tahun 2023 antara lain:

a. Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dinilai belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini masih rendah yaitu 35,76 persen.
b. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang sekolah dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi.

c. Masih kesulitan untuk mendapatkan data pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi).

d. Belum maksimalnya kinerja Tim penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan begitu juga dengan pembinaan kepada OPD pengampu SPM.

Tabel 2.69
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.899	1.899	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.544	1.544	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.363	1.363	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	4.951	4.951	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	13.345	13.345	100%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.993	8.447	70,43%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	10.852	8.021	73,91%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.977	2.699	90,66%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	200	177	88,5%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	43	40	93,02%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.470	1.753	70,97%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	2.807	2.678	95,40%

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2023 yakni :

a. Masih banyak remaja usia produktif belum merasa perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan remaja sehingga partisipasi kunjungan ke layanan kesehatan masih rendah.

b. Aksesibilitas kunjungan layanan kesehatan hingga ke dusun yang masih terbatas dan memerlukan biaya yang mahal menjadi kendala melakukan layanan kesehatan luar gedung untuk pelayanan kesehatan khususnya untuk penduduk usia lanjut.

c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya khususnya yang terindikasi TBC ke layanan kesehatan. Pada umumnya masyarakat malu dan merasa menjadi perhatian masyarakat jika didiagnosa mengidap penyakit TBC.

Tabel 2.70
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI MENTAWAI	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	28.242	13.637	14.605	48,29
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	28.242	6.758	21.484	23,93

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2023 yakni :

a. Belum maksimalnya kinerja pengelolaan air minum pada SPAM yang tersedia.

b. Jaringan SPAM yang tersedia sudah banyak yang rusak (bocor) sehingga perlu pemeliharaan atau pembangunan dengan biaya yang relatif mahal.

c. Pengelolaan BPSPAM/KPSPAM belum maksimal sehingga jaringan air bersih skema Pamsimas belum dapat dinikmati oleh masyarakat.

d. Sebaran rumah masyarakat yang membutuhkan sanitasi terpencar sehingga membutuhkan operasional yang besar dalam pembangunan sanitasi dalam kawasan permukiman.

e. Spesifikasi teknis pembangunan sanitasi rumah tangga yang belum memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat.

f. Pola hidup masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sanitasi (jamban) dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.71
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	144	144	-	100
2	Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	10	10	-	100

Capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah 100 persen karena tidak ada bencana alam dan melanjutkan program rehabilitasi rumah korban bencana di Desa Muara Sikabaluan (20 unit), Monganpoula (10 unit), Sirilogui (10 unit), Simalegi (40 unit), Cimpungan (31 unit), Muntei (33 unit). Begitu juga dengan capaian penyediaan rumah

yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah adalah 100 persen karena sudah melakukan identifikasi dan pendataan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah di Desa Tuapejat (10 unit).

Tabel 2.72
Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET PELAYANAN SPM	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	88.389	88.389	-	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	17.678	17.443	235	98,67
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	17.678	17.443	235	98,67
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8.981	8.981	-	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	17.425	16.600	825	95,27

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 adalah :

a. Masih kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal pada mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum.
b. Dalam pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan

perlindungan masyarakat bahwa Satpol PP mengalami kekurangan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana yang ada.

c. Masih terdapatnya perbedaan pemahaman dan persepsi tentang pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal antar pihak yang berkepentingan.

Tabel 2.73
Realisasi Capaian SPM Bidang Bidang Sosial Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET PELAYANAN SPM	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	469	469	-	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	123	123	-	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	2.552	2.552	-	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar Tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	2	2	-	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi korban bencana	-	-	-	

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2023 adalah :

a. Kendala dalam pengumpulan data diantaranya cakupan wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan sehingga harus

dijangkau menggunakan transportasi antarpulau. Selain itu juga terdapat kendala terkait akses ke daerah yang cenderung terpelosok dan jumlah personil yang masih kurang cukup.

b. Berdasarkan data yang dihimpun, seharusnya masih banyak penerima pelayanan dasar di luar target yang benar-benar membutuhkan bantuan pelayanan dasar namun tidak sejalan dengan anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi pelayanan dasar terhadap semua klaim luar panti.

c. Sarana dan prasarana yang seharusnya aktif namun sedang dalam kondisi kurang aktif saat ini seperti puskessos di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurang mendukung terealisasinya pelayanan dasar di masyarakat.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis yang dirumuskan berasal dari permasalahan jangka menengah yang segera harus diintervensi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2023-2026, begitu juga menjadi bagian permasalahan pembangunan dalam Evaluasi RKPD.

2.4.1 Pembangunan Manusia yang Holistik

Manusia menjadi aset yang paling berharga dan sangat penting bagi pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi sebuah kepastian akan meningkatkan dan mensejahterakan manusia. Pembangunan manusia dapat dilakukan pada dimensi pendidikan, kesehatan, budaya dan pengembangan ekonomi.

Pada dimensi pendidikan, pembangunan harus memastikan bahwa akses layanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana utama pendidikan yang menjadi tantangan karena Kepulauan Mentawai yang luas, begitu juga dengan karakteristik wilayah dan permukiman masyarakat yang tersebar dimana akses transportasi darat belum ada dan layanan pendidikan terdekat belum tersedia sehingga masyarakat harus berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Disisi lain, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing sedangkan masyarakat Mentawai didominasi dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk melanjutkan pendidikan dijenjang S1 ataupun diploma (vakasi) sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi perhatian kedepan. Sistem kesehatan daerah dengan konsep kepulauan mengharuskan adanya rumah sakit rujukan disetiap pulau besar seperti di Pulau Siberut (RS Pratama Siberut) yang sudah dibangun, di Pulau Sipora (RSUD Tuapejat) dan di Pulau Pagai Utara Selatan (RS Pratama Sikakap), ini menjadi kebutuhan utama dalam konektivitas layanan kesehatan daerah. Begitu juga dengan kelangkaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis untuk penanganan penyekit tertentu menjadi tantangan kedepan dan berbagai inovasi-inovasi layanan kesehatan akan muncul untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka stunting daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (stunting). Stunting adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran tinggi badan menurut umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran

fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual dan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Pembangunan manusia kedepan akan diperhadapkan pada eksistensi dan pola hidup yang modern sehingga potensi kehilangan jati diri, budaya, nilai-nilai luhur, kearifan lokal akan sangat besar. Pembangunan kebudayaan sudah mulai sedini mungkin menjadi bagian pembangunan manusia baik di tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA bahkan dijenjang perguruan tinggi. Pembangunan kebudayaan kedepan akan menjadi bagian dari pembangunan manusia dengan elaborasi kebijakan yang inklusif yang non-diskriminatif, berdasarkan partisipasi masyarakat lokal dan unsur-unsur nilai kebudayaan.

Pembangunan harus menjadikan manusia sebagai subjek yang produktif. Menciptakan wirausaha (*enterprenuer*) bukan sekedar melakukan pelatihan atau memberikan sarana dan prasarana latihan, namun hal yang lebih bernilai adalah eksistensi, konsistensi dan kontiniunitas wirausaha atau pelaku usaha dalam mengembangkan potensinya. Pendampingan calon pelaku usaha/wirausaha di Kepulauan Mentawai harus dilakukan, stigma terhadap memulai usaha harus memliki modal dana yang besar menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan peluang dalam memulai dan mengembangkan peluang usaha

sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wirausaha mulai dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan, bisnis proses, hingga dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang satu kesatuan dalam pendampingan kedepan.

2.4.2 Hilirisasi Komoditi Sektor Primer

Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu pada sektor primer (*raw material*) ke sektor perdagangan/jasa atau pada sektor industri. Kepulauan Mentawai dengan potensi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi sehingga permasalahan pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi. Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

2.4.3 Pengembangan Pariwisata Mentawai

Sebagai destinasi pariwisata yang telah dikenal hingga mancanegara, tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan segala sumber daya baik itu amenitas, aksesiblitas, atraksi, sumber daya manusia, dan menjaga kelestarian kawasan destinasi. Menjadi bagian dari destinasi prioritas yang telah ditetapkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berbenah dalam mempersiapkan destinasi kawasan

pariwisata dengan menjalin kerjasama/kolaborasi disetiap sektor baik di internal pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah, pihak swasta, pelaku ekonomi kreatif, investor. Selain itu pendampingan kawasan desa wisata yang bagian terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah menjadi hal penting dilakukan agar citra dan *length of stay* semakin baik, begitu juga dengan pengalaman/experience lebih bermakna.

2.4.4 Aksesibilitas

Sebagai prasyarat pembangunan dan kemajuan daerah, pembangunan infrastruktur jalan menjadi unsur utama yang harus disediakan. Dengan adanya infrastruktur jalan akan mengurangi biaya (cost), memaksimalkan efisiensi dan efektivitas, mempercepat layanan, meningkatkan produktivitas dan mempercepat reformasi struktur ekonomi daerah. Sebagai daerah kepulauan, tantangan aksesibilitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada dua, yaitu disisi darat adalah pembangunan jalan disepanjang pulau dengan terhubung pada setiap pelabuhan penyeberangan (hub) di setiap ujung pulau dan di sisi laut tersedianya sarana penyeberangan kapal antar pulau. Keadaan ini menjadi tantangan dikarenakan kondisi jalan yang tersedia/terbangun (trans Mentawai) dengan persentase yang masih rendah, begitu juga masih terdapat setidaknya 4 pelabuhan

penyeberangan yang harus dibangun serta kapal penyeberangan antar pulau yang memadai belum tersedia.

2.4.5 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seiring dengan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang baik/*good governance,* maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Berdasarkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, terdapat beberapa tujuan akhir dari Reformasi Birokrasi. *Pertama*, mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan.

Kedua, menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*. *Ketiga*, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. *Keempat*, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi. *Kelima*, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi. *Terakhir*, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Untuk mencapai enam tujuan tersebut telah ditetapkan delapan area perubahan dan hasil yang diharapkan. Delapan area tersebut antara lain organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja *(culture set*) aparatur.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di tengah perlambatan ekonomi global pada tahun 2023. Ini menjadi modal kuat dalam menghadapi risiko resesi di tahun 2024 dan tantangan pada tahun 2025 khususnya beberapa faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2024 diantaranya intensitas kegiatan partai politik pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Pembangunan tahun 2025 menjadi jalur percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Secara keseluruhan, Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2023, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu juga halnya dengan perkembangan ekonomi di

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat ditentukan aktivitas sosial ekonomi secara regional dan nasional. Perkembangan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam dalam 2 (dua) tahun terakhir tumbuh positif yaitu tahun 2022 sebesar 4,49 persen dan tahun 2023 tumbuh sebesar 4,04 persen meskipun mengalami perlambatan di tahun 2023, namun secara keseluruhan menunjukkan membaiknya aktivitas sektor pendukung ekonomi daerah seperti sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh positif dan didukung dengan semakin kuatnya ekonomi secara nasional memberikan kepercayaan bahwa pada Tahun 2024 dan 2025 ekonomi daerah akan tumbuh positif begitu juga dengan konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga

diprakirakan tumbuh sebesar 5,02 persen didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan pemilihan umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diprakirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diprakirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diprakirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diprakirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melakukan program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian antara lain melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan Program Kartu Prakerja.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam RKP Tahun 2024, namun dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini, pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di

kisaran 8,5–9,0 persen. Sebagai bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial, beberapa hal lainnya masih terus dilanjutkan, antara lain (1) penyiapan regulasi berupa Instruksi Presiden Registrasi Sosial Ekonomi untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala; (2) perluasan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi skema perlindungan sosial adaptif; (3) finalisasi instrumen graduasi program bantuan sosial dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilakukan lintas sektor; (4) peningkatan standar pelayanan minimum khususnya di bidang sosial; dan (5) penjangkauan aktif terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah.

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini tahun 2023. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381–0,384.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan

kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator pembangunan ke depannya.

Nilai Tukar Petani dari tahun 2021-Maret 2024 mengalami tren peningkatan yang signifikan. El Nino yang terjadi di sepanjang tahun 2023 menyebabkan penurunan produksi pada sejumlah komoditas pertanian. Meskipun demikian, Nilai Tukar Petani masih bertumbuh positif salah satunya karena peningkatan harga komoditas sehingga indeks yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan indeks yang dibayarkan petani. Subsektor perikanan dan subsektor peternakan menunjukkan penurunan di awal tahun 2024, namun subsektor lain menunjukkan peningkatan sehingga Nilai Tukar Petani secara umum tetap tumbuh positif. Berdasarkan perkembangan tersebut, di tahun 2024 Nilai Tukar Petani diprakirakan dapat melampaui target 105-108, dimana subsektor perkebunan diperkirakan masih menjadi kontributor utama dalam peningkatan Nilai Tukar Petani tersebut.

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, 2022-2024

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	Capaian 2022	Capaian 2023	*Outlook* 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,05	5,20
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,86	5,32	5,0-5,7
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	9,36	8,5-9,0
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,77	74,39	75,09
5	Rasio Gini (nilai)	0,381	0,388	0,381-0,384
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	106,45	105,40	107-110
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	107,33	112,46	105-108
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,85	27,02	27,27

Sumber: RKP 2025

Postur makro fiskal tahun 2025 diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi dalam menjembatani terwujudnya Indonesia Emas 2045. Di tengah perkiraan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,50–3,50 persen (*yoy*). Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran (*supply*) dan pemintaan (*demand*) dalam kerangka menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), mencakup (i) kestabilan harga melalui pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi

harga dalam jangka pendek, antara lain operasi pasar, pasar murah; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi implementasi Program Lumbung Pangan (*Food Estate*), pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas serta penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD); serta (iv) komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, penguatan koordinasi pusat-daerah sejak proses perencanaan, dan pengelolaan ekspektasi.

Arah kebijakan sektor keuangan ke depan akan difokuskan pada upaya percepatan pendalaman sektor keuangan melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang memuat berbagai upaya diantaranya (1) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (2) peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil termasuk UMKM, (3) perluasan basis investor ritel, (4) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (5) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, (6) peningkatan pembiayaan hijau, serta (7) implementasi harmonisasi kebijakan.

Arah kebijakan tahun 2025 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta

mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045 dengan Fokus Kebijakan Makro Tahun 2025 antara lain:

Percepatan Transformasi Ekonomi; Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

Pembangunan Inklusif; Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pembangunan Berkelanjutan; Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan

berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

Mewujudkan Stabilitas Ekonomi; Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2025, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diprakirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim

akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian smelter di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,2 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,9–20,0 persen di tahun 2025. Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US$22,10 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 sekitar -1,6% akibat pandemi COVID-19 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29% dan terus meningkat menjadi 4,36% di tahun 2022. Sedangkan secara keseluruhan di tahun 2023 berdasarkan data sangat sementara yang dikeluarkan BPS maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan capaian 4,62%. Peningkatan aktivitas masyarakat yang terjadi di sepanjang tahun 2023 mendorong terjadinya transaksi ekonomi terutama pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi.

Pertumbuhan PDRB per kapita pun yang sempat terkontraksi ke angka Rp.43,70 juta di tahun 2020 kembali meningkat ke angka Rp.45,41 juta di tahun 2021, terus meningkat ke angka Rp.50,52 juta di tahun 2022 dan diprediksi meningkat ke angka Rp.54,50 juta di tahun 2023. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Hanya saja selama kurun waktu tahun 2022 tingkat inflasi di Sumatera Barat melonjak tajam ke angka 7,21%, namun angka ini kembali turun di tahun 2023 menjadi 2,47%.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *Gini Ratio* cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir ke angka 0,300 pada tahun 2022 yang lalu dan turun ke angka 0,280 pada tahun 2023. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,388 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Willliamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik namun tidak serta merta menurunkan ketimpangan wilayah yang sedikit meningkat ke angka 0,315 dan menjadi 0,319 di tahun 2022. Kondisi ini diprediksi kembali sedikit meningkat ke angka 0,321 di tahun 2023.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, pemulihan ekonomi telah mengurangi jumlah penduduk miskin dari 364,79 ribu jiwa di tahun 2020 menjadi 339,93 ribu jiwa di tahun 2021. Namun kondisi ekonomi global memaksa terjadinya kenaikan harga bahan pokok yang kembali menambah jumlah penduduk miskin menjadi 343,82 ribu jiwa di tahun 2022. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada tingkat kemiskinan yang sempat

berkurang dari 6,04% pada bulan September 2021 menjadi 5,92% di bulan Maret 2022, kembali meningkat ke angka 6,04% di bulan September 2022 namun kembali turun ke angka 5,95% di bulan Maret 2023. Sementara itu walaupun jumlah pengangguran bertambah 158 orang dari tahun 2021 kemudian berkurang sekitar 601 orang menjadi 179.505 orang penganggurandi tahun 2023. Angka ini menempatkan Tingkat Pengangguran Terbuka berkurang dari 6,52% menjadi 6,28% dan turun ke angka 5,94 di tahun 2023.

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2024 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,0%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2024 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 4,76%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 4,62%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,0%. Untuk tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP

2025 diperkirakan berada pada angka 4,4 – 5,4 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan serta perhelatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024 membawa kepastian pengambilan kebijakan ioleh pemerintah. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Sasaran Pembangunan
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		*Outlook* 2024
		2022	2023	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	4,62	5,00
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,67	33,47	34,75
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,52	53,92	57,94
4	Indeks Gini (Rasio)	0,292	0,291	0,290
5	Indeks Williamson	0,316	0,321	0,320
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,95	5,83
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	343,82	340,37	338,70
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	5,94	5,75
9	IPM	75,16	75,80	76,67
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,88	74,14	74,22
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,11	14,12
	- Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,18	9,28	9,37
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.130	11.380	11.547
10	Inflasi (%)	7,43	2,46	3,50

Sumber : RKPD Prop. Sumatera Barat Tahun 2025

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat kedepannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

4. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpagan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM.

3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perkembangan ekonomi daerah yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif mengindikasikan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebesar 2,89 persen naik menjadi 4,94

persen pada Tahun 2022. Seiring dengan terkendalinya COVID-19 dan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah yang secara hati-hati diterapkan dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 seiring dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional dan tren pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat yang diprediksi tumbuh positif. Pembangunan sumber daya ekonomi berbasis komoditas unggulan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2025, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian/*value added* dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Hal ini selaras arah pembangunan nasional yang menitik beratkan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi/penguatan teknologi dan infrastruktur ekonomi.

Momentum percepatan ekonomi yang menjadi fokus pembangunan nasional menjadi *trigger* bagi daerah yang diharapkan senantiasa memberikan efek pengganda untuk mendorong sektor publik, layanan dasar dan ekonomi terpenuhi.

Secara umum, gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2025*

Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Juta Rp	54,8	60,91	61,82*	67,02**
IPM	indeks	62,19	63,13	62,48*	64,46**
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	4,04	4,27*	4,37*
Tingkat Kemiskinan	%	13,97	13,72	14,44*	9,59**
Tingkat Pengangguran	%	1,39	1,33	2,70*	1,32**
Gini Rasio	%	0,233	0,259	0,316*	0,256**

Sumber: Badan Pusat Statistik (https://sumbar.bps.go.id/)
** RPD KKM 2023-2026*
*** Rancangan Akhir RPJPD KKM 2025-2045*

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan nasional melalui percepatan transformasi ekonomi menjadi ruang bagi daerah untuk ambil peran dan bagian yang integral sebagai satu kesatuan dengan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang lebih mendorong pembangunan manusia dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pengentasan stunting.
2. Pembangunan infrastruktur ekonomi sebagai prasyarat pengembangan sektor sosial ekonomi masyarakat senantiasa didorong dengan alokasi anggaran yang memadai.
3. Pengembangan produk komoditas unggulan daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah yang dapat dioptimalkan

dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Menjaga kestabilan harga komoditas pangan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui menjaga kelancaran distribusi logistik (transportasi penyeberangan) serta penguatan kemandirian dalam penyediaan pangan lokal.
5. Optimalisasi alokasi belanja pemerintah melalui penggunaan produk dalam negeri dan lokal untuk penguatan ekonomi masyarakat lokal dan peningkatan program dan kegiatan padat karya.
6. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan even pariwisata, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan.
7. Penguatan pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMK (optimalisasi *craft center* dan forum UMK, sertifikasi dan uji produk UMK), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan UMK, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha UMK dan koperasi, perluasan pemasaran melalui upaya

kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM UKM dan koperasi, pengembangan *sharing* program yang difokuskan pada pemberdayaan UKM dan koperasi.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 menjadi salah satu faktor utama dalam percepatan capaian pertumbuhan ekonomi daerah, Tahun 2023 menjadi kunci mengejar pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan dan juga potensi krisis pangan dan energi yang berkembang hingga saat ini sebagai dampak dari perang rusia dan NATO serta perang di kawasan timur tengah. Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dalam pembangunan tahun 2024 dan 2025 adalah:

1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dana transfer ke daerah yang akan mengalami penyesuaian yang ketat sedangkan sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan masih sangat terbatas.
2) Kemampuan daerah dalam meredam dan mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga dapat memulihkan aktivitas

ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepastian berusaha/investasi daerah.

3) Optimalisasi pengembangan IPTEK dan inovasi dalam mengikuti perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat.
4) Potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang melimpah tetapi belum memiliki nilai tambah sehingga perlu integrasi pengembangan komoditi unggulan hulu hilir hingga pada pemasarannya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Tahun 2025 menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transfomasi ekonomi nasional dan percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional memperhatikan kondisi yang tengah terjadi secara nasional dan global, namun tetap bertumpu pada keadaan fiskal yang sehat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Berdasarkan perhitungan rasio kapasitas fiskal daerah dikelompokkan dengan kategori sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 0,947	sangat rendah
0,947 ≤ RKFD < 1,203	rendah
1,203 ≤ RKFD < 1,459	sedang
1,459 ≤ RKFD < 1,715	tinggi
1,715 ≤ RKFD	sangat tinggi

Melihat perkembangan nilai peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa kecenderungannya membaik. Artinya daerah dalam membiayai alokasi belanja rutin, belanja tertentu, pembiayaan tertentu sudah mempunyai kemampuan.

Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2019-2023

Tahun	Rasio KFD	Kategori KFD
2019	0,625	Rendah
2020	0,415	Sangat Rendah
2021	0,628	Rendah
2022	1,552	Sedang
2023	1,730	Sangat Tinggi
Rata-rata	0,99	Rendah

Sumber: https://jdih.kemenkeu.go.id/

Pada Tabel 3.4. tampak bahwa Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2019-2023 rata-rata 0,99 persen dengan kategori rendah. Secara keseluruhan, KFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang cenderung membaik dari tahun

2020-2023 yaitu dari rasio 0,415 (2020) naik menjadi rasio 1,552 (2022) dan naik menjadi rasio 1,730 pada tahun 2023.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum untuk peningkatan Pendapatan Daerah tersebut dibutuhkan berbagai kebijakan sesuai dengan kondisi riil sumber Pendapatan dengan tanpa membebani sumber daya sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi *online* bekerja sama dengan Bank Nagari, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
3. Pemberian insentif pajak dan retribusi daerah berupa keringanan pembayaran, penghapusan, penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui operasi patuh pajak dan berbagai sosialisasi terkait pajak.

5. Meningkatkan pelayanan pajak dan opsen pajak dengan mudah, murah dan cepat serta pelibatan masyararakat, pemangku kepentingan serta jejaring dalam peningkatan pajak.
6. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.
7. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment.*
9. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya

pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan percepatan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.

10. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2026

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun	
	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Asli Daerah	**43.986.409.611**	**50.360.638.686**	**59.936.430.699**	**61.472.685.390**	**43.284.214.853**
Pajak Daerah	6.774.251.385	6.066.362.757	9.016.302.757	10.552.557.448	7.842.042.760
Retribusi Daerah	11.663.347.221	21.110.275.929	26.154.404.977	26.154.404.977	10.391.664.328
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.093.811.005	14.099.000.000	14.907.522.965	14.907.522.965	13.150.439.657
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.455.000.000	9.085.000.000	9.858.200.000	9.858.200.000	11.900.068.108
Pendapatan Transfer	**810.923.680.871**	**859.822.191.100**	**889.458.528.804**	**821.630.569.766**	**806.041.638.462**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	767.541.118.000	824.412.254.000	842.502.685.000	812.116.120.000	779.738.228.270
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.960.838.000	18.095.324.000	15.139.199.000	15.139.199.000	15.501.585.527
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	549.794.757.000	569.037.573.000	602.341.290.000	571.954.725.000	551.997.236.996
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.004.624.000	106.880.270.000	71.705.967.000	71.705.967.000	85.334.340.573
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	74.851.582.000	85.505.996.000	87.201.114.000	87.201.114.000	75.151.437.737
DID	-		20.978.611.000	20.978.611.000	5.000.000.000

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun Berjalan 2024	Proyeksi/Target pada Tahun 2025	2026
Dana Desa	44.929.317.000	44.893.091.000	45.136.504.000	45.136.504.000	46.753.627.437
Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.382.562.871	35.409.937.100	46.955.843.804	9.514.449.766	26.303.410.192
Pendapatan Bagi Hasil	41.125.926.871	35.409.937.100	45.295.843.804	9.514.449.766	26.303.410.192
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.125.926.871	35.409.937.100	45.295.843.804	9.514.449.766	26.303.410.192
Bantuan Keuangan	2.256.636.000	-	1.660.000.000		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**7.817.957.663**	**7.817.957.663**	**8.128.987.200**	**7.014.568.732**	**6.817.957.663**
Hibah	-			-	-
Dana Darurat	-			-	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan	7.817.957.663	7.817.957.663	8.128.987.200	7.014.568.732	6.817.957.663
PENDAPATAN DAERAH	**862.728.048.145**	**918.000.787.449**	**957.523.946.703**	**890.117.823.888**	**856.143.810.977**

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2025 diestimasikan tidak jauh berbeda dengan kondisi pendapatan asli daerah yang secara nyata telah diterima oleh daerah pada tahun 2024 mengingat sumber pendapatan tersebut secara riel menjadi alokasi yang diterima secara maksimal untuk pembiayaan pembangunan daerah. Begitu juga dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 bahwa BBNKB tidak lagi menganut pola bagi hasil melainkan dengan pola opsen sehingga ketentuan terkait pajak daerah mengalami penambahan berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Dampak ketentuan tersebut, belanja bagi hasil dari pemerintah provinsi menjadi berkurang dan dialihkan menjadi penerimaan pajak daerah. Untuk itu, terkait target pendapatan pajak daerah dan pendapatan bagi hasil dari provinsi dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada target opsen PKB dan opsen BBNKB yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar Rp.61.472.685.390 dengan rincian pajak daerah sebesar Rp.10.552.557.448, Retribusi Daerah sebesar Rp.26.154.404.977, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.14.907.522.965, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.9.858.200.000.

Pendapatan transfer untuk tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.821.630.569.766. Pendapatan transfer ini terdiri dari

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.812.116.120.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.9.514.449.766 sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 yaitu sebesar Rp.7.014.568.732.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja. Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Kapasitas riil keuangan diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Tabel 3.6
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
1.	Pendapatan	890.117.823.888
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	32.862.612.319
	Total penerimaan	922.980.436.207
	Dikurangi:	
4	Belanja Tidak Langsung	382.110.427.009
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**538.870.009.198**

Tabel 3.6 menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2025 yang menggambarkan kemampuan untuk

pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga, yaitu:

1. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

   Belanja wajib: belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan Sosial).

   Belanja mengikat: belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
2. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

3. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.7
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2025 (Rp)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		538.870.009.198
1	Prioritas I	274.823.704.691
2	Prioritas II	161.661.002.759
3	Prioritas III	102.385.301.748

Tabel 3.7 menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah untuk 3 prioritas yaitu untuk prioritas pertama yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar sebesar Rp.274.823.704.691, untuk prioritas kedua yang dialokasikan untuk membiayai program prioritas pembangunan daerah sebesar Rp.161.661.002.759 dan prioritas ketiga yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya sebesar Rp.102.385.301.748.

Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai program prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan belanja mengikat. Pemenuhan belanja wajib digunakan untuk pendanaan urusan

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, yaitu untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas), Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap), Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih), Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing), Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas), Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja), Kedaulatan Energi (Mentawai Terang), Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab), Penataan Birokrasi (Mentawai Prima).

5. Melakukan koordinasi (kontrol) secara rutin dengan seluruh OPD dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2026

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Operasi	**621.907.626.848**	**635.681.054.019**	**742.775.617.173**	**675.667.469.650**	**552.319.089.293**
Belanja Pegawai	325.003.701.706	319.567.764.046	376.104.729.806	382.110.427.009	301.904.157.661
Belanja Barang dan Jasa	273.144.346.431	295.255.928.253	321.127.296.667	277.059.336.128	232.583.987.060
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	11.000.000.000	5.700.000.000	8.500.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000
Belanja Hibah	11.262.328.711	13.463.361.720	35.712.240.700	6.457.706.513	5.849.569.065
Belanja Bantuan Sosial	1.497.250.000	1.694.000.000	1.331.350.000	40.000.000	981.375.507
Belanja Modal	**157.012.401.692**	**239.607.613.815**	**152.021.458.339**	**122.099.543.378**	**204.286.743.642**
Belanja Modal Tanah	50.000.000	1.006.000.000	6.785.436.000	280.000.000	4.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.527.441.782	29.684.648.564	17.837.257.922	8.383.129.883	28.674.304.475
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.977.132.611	106.582.098.774	29.264.277.020	38.891.540.818	47.011.228.469
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	87.867.827.299	102.129.466.477	96.127.086.997	74.394.872.677	123.073.939.498
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.590.000.000	205.400.000	1.850.900.400	150.000.000	1.527.271.200
Belanja Tidak Terduga	**2.220.398.523**	**4.497.167.877**	**2.000.000.000**	**12.661.768.336**	**1.000.000.000**

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun Berjalan 2024	Poyeksi/Target pada Tahun 2025	2026
Belanja Tidak Terduga	2.220.398.523	4.497.167.877	2.000.000.000	12.661.768.336	1.000.000.000
Belanja Transfer	**103.473.560.773**	**79.304.921.569**	**110.401.623.674**	**110.551.654.843**	**105.110.265.295**
Belanja Bagi Hasil	1.575.096.173	2.717.663.869	3.517.070.774	3.670.696.243	1.606.755.606
Belanja Bantuan Keuangan	101.898.464.600	76.587.257.700	106.884.552.900	106.880.958.600	103.503.509.689
BELANJA DAERAH	**884.613.987.836**	**959.090.757.280**	**1.007.198.699.186**	**920.980.436.207**	**862.716.098.230**

Belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.920.980.436.207. Belanja ini terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.675.667.469.650 Belanja Modal sebesar Rp.122.099.543.378 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.12.661.768.336 dan Belanja Transfer sebesar Rp.110.551.654.843. Untuk belanja pegawai pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.382.110.427.009, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan untuk belanja pegawai sebesar 30 persen diluar belanja tunjangan guru, bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan belanja pegawai dengan porsi menuju 30 persen pada tahun 2027 sehingga pada proporsi alokasi belanja pegawai tahun 2025 diluar tunjangan guru (Rp.62.752.475.000,00) yaitu sebesar 34,68 persen.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Arah kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin

menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah.

2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif/surplus, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pada tahun 2025, diproyeksikan untuk pembiayaan daerah Kab. Kepulauan Mentawai sebesar Rp.30.862.612.319, artinya bahwa untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dialokasikan sesuai dengan peruntukan/penggunaannya sehingga SiLPA yang bersifat umum atau penggunaannya bebas/tidak terikat sudah ada peruntukkannya.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2026

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2022	2023	2024	2025	2026
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**42.013.999.823**	**74.953.685.319**	**49.674.752.483**	**32.862.612.319**	**9.572.287.253**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	42.013.999.823	74.953.685.319	49.674.752.483	32.862.612.319	9.572.287.253
Pencairan Dana Cadangan	-			-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-			-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-			-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-			-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-			-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**42.013.999.823**	**74.953.685.319**	**49.674.752.483**	**32.862.612.319**	**9.572.287.253**
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	-	-	**-**	**-**
Pembentukan Dana Cadangan	-			-	-
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	3.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-			-	-

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun Berjalan 2024	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2025	2026
Pemberian Pinjaman Daerah	-			-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-			-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.000.000.000**	**-**	**-**	**2.000.000.000**	**3.000.000.000**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**40.013.999.823**	**74.953.685.319**	**49.674.752.483**	**30.862.612.319**	**6.572.287.253**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai penjabaran tahun ke-3 Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dokumen RKPD memiliki peran strategis dalam merumuskan sasaran prioritas pembangunan yang disusun untuk mencapai target tujuan pembangunan daerah. Pembangunan sumber daya ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi perencanaan jangka menengah nasional periode pertama dan perencanaan tahun 2025 menjadi perencanaan tahun pertama. Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka (tahun 2045) serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden mengamanatkan penyusunan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Amanat ini ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang terbentuk pada pembukaan UUD 1945. Pada visi Indonesia 2045 ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan *middle income trap* dan menjadi negara maju atau *high income country* sebelum tahun 2045. Sebagai operasionalisasi Visi Misi dan Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2025–2029, serta landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, disusun tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029, yakni (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup,

meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi Pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN Tahun 2025–2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 mempertimbangkan arahan Presiden, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, kerangka ekonomi makro, dinamika ketidakpastian global, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan yaitu:

"**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi**
yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya langkah awal pencapaian target sasaran RPJMN Tahun 2025–2029, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029 sehingga sasaran Pembangunan tahun 2025 antara lain:

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional, 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,6
Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,5-5,0
Rasio Gini	Nilai	0,379-0,382
Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
Pengurangan Emisi Has Rumah Kaca (GRK)	%	38,6
Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	113-115
Nilai Tukar Nelayan(NTN)	Nilai	104-105

sumber: RKP 2025

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Visi Pembangunan Propinsi Sumatera Barat “Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan” yang dijabarkan melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, 2021-2026

VISI **Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Menurunnya prevalensi *stunting* 3. Meningkatnya Kualitas. 4. Pendidikan Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK. 2. Meningkatnya Budaya Literasi. 3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan). 2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan.

VISI **Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
		3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan.
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan. 2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah. 3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera. 4. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor. 5. Meningkatnya pertumbuhan investasi. 6. Meningkatnya peran ekonomi digital.
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat. 2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi 2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas 4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	1. Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2020 hingga 2022, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2025, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni:

"Penguatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis"

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 (tiga) sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.
2. Transformasi ekonomi yakni menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah

tinggi guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Transformasi ekonomi diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.
5. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:
    a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja.
    b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan Masyarakat.
    c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses

terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2025 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2025, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Proyeksi Indikator Makro Daerah Propinsi Sumatera Barat, 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	36,10
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	62,29
4	Indeks Gini (Rasio)	0,289
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,65
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	330,84
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,65
8	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekoh (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	77,41 74,79 14,13 9,46 11.719
9	Indeks Williamson	0,319

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Kebijakan pembangunan tahun 2025 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonom i dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam upaya pencapaian pentahapan pembangunan jangka menengah (RPJMD 2025-2029) dan jangka panjang (RPJPD 2025-2045). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (transformasi sosial) dan infrastruktur ekonomi berbasis komoditas unggulan (transformasi ekonomi) menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1.1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan
		1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
		1.3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumber daya manusia
2	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	2.1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas
		2.2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air
		2.3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah
		2.4	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi

Tujuan		Sasaran	
		2.5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika
		2.6	Meningkatkan ratio elektrifikasi daerah
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	3.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
		3.2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
		3.3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	4.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat
		4.2	Meningkatkan kesempatan kerja
		4.3	Terkendalinya inflasi daerah
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		5.2	Meningkatnya kapabilitas pemerintahan
		5.3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
6	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	6.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya
		6.2	Meningkatnya budaya literasi
7	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	7.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender

Pembangunan ekonomi tahun 2025 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi dan sebagai pijakan awal menuju Mentawai Emas 2045 dengan memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan baik nasional maupun regional, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan yaitu:

“Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim”

Tema tersebut memiliki arti yang penting sebagai wujud menghadirkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas,

menggali potensi daerah berbasis maritim dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 “Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim”, memiliki makna antara lain:

1. Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan.
3. Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi pada pusat atau kawasan ekonomi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
4. Meningkatkan nilai tambah sektor maritim di dalam dan antar sektor ekonomi.

Pembangunan daerah tahun 2025 yang fokus pada tema pembangunan tahunan, namun pada prinsipnya dengan tidak mengabaikan komitmen dan upaya yang kuat untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi dan *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perwujudan tema pembangunan tersebut dicerminkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan target pembangunan daerah merujuk pada indikator

kinerja yang tertuang dalam RPD, dan untuk target pembangunan yang telah tercapai di tahun sebelumnya atau tahun berjalan maka perumusan target sasaran dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan dokumen perencanaan atau dilakukan proyeksi.

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	67,02*
IPM	indeks	66,15*
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,37
Tingkat Kemiskinan	%	14,31
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,32*
Gini Rasio	%	0,260*

Ket:
* = proyeksi pada RPJPD KKM 2025-2045

Sebagai bentuk konsistensi dan keselarasan dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025, berikut disajikan persandingan keselarasan tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

Tabel 4.6
Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2025

Tema RKP Tahun 2025	Tema RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis	Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim

Keselarasan tema pembangunan telihat dari upaya bersama bagaimana mewujudkan transformasi khususnya pada sektor

ekonomi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui salah satunya hilirisasi sumber daya alam berbasis maritim untuk peningkatan nilai tambah yang didukung dengan pembangunan sumber daya ekonomi baik infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia *re-skilling/up-skilling*, kelembagaan, penguatan pasar, manajemen rantai pasok, dan penguatan investasi.

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Propinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3–5,6	5,05	4,37
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,0–8,0	5,65	14,31
Rasio Gini	Rasio	0,379–0,382	0,289	0,260
Indeks Modal Manusia/ Indeks Pembangunan Manusia	Persen	0,56	77,41	66,15
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,5–5,0	5,55	1,32

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.8
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	81,69–85,23

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi, dan penegakan hak asasi manusia.

Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali

kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif. Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya;

serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

2. Memperkokoh Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.9
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Asia Power Index (*Military Capability*)	Indeks	20
Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)	Indeks	61,54
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	67,5
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	7,21
Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,77
Kapasitas tampungan air	m3/kapita	65,18
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	39,20
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,5
Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Indeks	43
Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	70,80
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	24,00 (16,00 terdaur

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
		ulang)
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,44
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,68
Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	 % %	 32,65 28,12

Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential* force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi

Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan

keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.

Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan *choke point*, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut.

Arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.

Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat

penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *good neighbour policy*, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara, (6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/ prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi *aset soft power* Indonesia.

Arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur *smart diplomacy*, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan

kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.

Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan *Triangular*, (2) *Integrated National Financing Framework*, (3) pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi *Trade, Tourism, Investment* (TTI) Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan.

Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global, (5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan

(6) pengawalan proses aksesi Indonesia ke *Organization for Economic Co-operation and Development*.

Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara *holding* pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan

melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up* untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu,

sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewable*s) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/ distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan

pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang

diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan

pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis *reduce, reuse,* dan *recycle*, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan). Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi; (20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi; (21) pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat alam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati; (24)

penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan. Strategi terkait peningkatan

kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; (45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52)

mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan. Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target *net zero emission* dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait *carbon trade* dan kelengkapan lembaga penunjang *carbon trade*; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (*coal-fired power plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan; (67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi *renewable*

energy sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; (69) mendorong adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle*) untuk transportasi umum. Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi (70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.

Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (*prime mover*) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance* dan *good neighbor policy*; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan

kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem *mangrove*, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari,

penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait *science, technology, engineering, art, and mathematics*, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.10
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	%	1,44
Rasio Kewirausahaan	%	3,14
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	%	1,26
Rasio PDB Pariwisata	%	4,60
Devisa Pariwisata	(miliar USD)	22,10
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7,92
Aset Perbankan/PDB	%	59,50
Aset Dana Pensiun/PDB	%	8,10
Aset Asuransi/PDB	%	8,78
Kapitalisasi Pasar Modal/PDB	%	56,7
Total Kredit/PDB	%	35,1
Inklusi Keuangan	%	90,6

Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu; (3) menyediakan layanan dan pembangunan

infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul *transhipment* sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.

Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat; (4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia;

(5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia; (9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (12) menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings*, *incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, (17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas

yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, *meetings, incentives, conventions, and exhibitions*, olahraga, ramah muslim, *yacht and cruise*, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta (19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*).

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang *unbankable* menjadi koperasi *bankable*; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen

koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan; (2) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses *fintech*, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, sasaran pembangunan diukur melalui indikator berikut.

Tabel 4.11
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas c. Harapan lama sekolah (tahun)	 Nilai Nilai Nilai Tahun Tahun	 396 404 416 9,46 13,37
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tinggi	%	33,94
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	66,78
Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global	 % Peringkat	 0,30 60
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,50-5,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,30
Usia Harapan Hidup	Tahun	74,43
Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu b. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	 per 100.000 kelahiran hidup %	 122 18,80
Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	272

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	70,29
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,425

Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi.

Arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, antara lain:

a. Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi,

kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan *low-skilled* berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi *school to work* dan integrasi *soft skills* bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya literasi dan

meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

b. Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi,

standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics*; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.

c. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan

(*universal health coverage*) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan *stunting*; (c) mencegah terjadinya *stunting* pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan

penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman *stunting* (gizi buruk); (n) meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (*family medicine*); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif

kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi *pre-market*, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia

kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

d. Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan *resiliensi* anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan

kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk *stereotype*, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

e. Meningkatkan Prestasi Olahraga, mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan

kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (*student athlete program*) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Keberlanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.12
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Rasio PDB Industri Pengolahan	%	19,9-20,0
Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	30,1-30,2
Ekspor Barang dan Jasa	%	21,0-21,6
Biaya Logistik (% PDB)	%	13,50

Keberlanjutan hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri dan rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut).

Keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui (1) pengembangan pembiayaan inovatif (*innovatif financing*) dan optimalisasi insentif fiskal/nonfiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi; (3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada; (4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk

peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap; (5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang; (6) akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi.

Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global yang mendukung perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung partisipasi pada rantai pasok global dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, integrasi ekonomi domestik dan global akan berfokus pada (1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusatpusat pertumbuhan baru, (b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru; (2) optimalisasi *backbone* dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi *hinterland* dengan simpul utama; (3) perkuatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, (b) pengintegrasian dan digitalisasi logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia

logistik; (4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik; (5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle*; serta (h) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, dapat dilihat dari pencapaian target pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.13
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk	%	15
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	43,19
Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	22
Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional	%	44,34
Persentase desa mandiri	%	4
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	67,00

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

Arah kebijakan membangun desa dan membangun dari desa dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program

Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa.

b. Penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa.

c. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota.

d. Pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan.

e. Peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa.

f. Penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa.

g. Optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan).

h. Pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan.

i. Penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa.

j. Pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa).

k. Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan.

l. Pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran.

m. Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.

Arah kebijakan pemerataan ekonomi dilaksanakan melalui:

a. Pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan.

b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda).

c. Peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi.

d. Pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro.

e. Pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation*.

Arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan

sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Keberhasilan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dirumuskan dalam pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.14
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Return on Asset (ROA) BUMN	%	3,45
Indeks Integritas Nasional	Indeks	74,52
Indeks Materi Hukum	Indeks	0,51
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,68
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,00
Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	38
Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	0,69
Rasio Perpajakan terhadap PDB	%	10,70–11,20
Tingkat Inflasi	%	1,5–3,5

Prioritas Nasional dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

Arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan *Data Base* Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin

penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.

Arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum, yang dilaksanakan melalui (1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai *think-tank* dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian,

kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum.

Arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi (1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft competency* Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *future jobs* di era digital; (4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan

total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep *total reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan *talent pool* dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan.

Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui (1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; (2) digitalisasi pelayanan publik; (3) pengembangan talenta digital pelayanan publik; (4) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan (5) perluasan akses pelayanan publik. Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui (1) optimalisasi pendapatan negara, (2) optimalisasi belanja negara, dan (3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan (pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang yang kredibel). Tata kelola pemerintahan juga mencakup upaya peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan yang difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah; (b) memperkuat lembaga rehabilitasi

penyalahgunaan narkoba; (c) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa; (d) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba; (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba, serta (f) meningkatkan kemampuan surveillance dan intelijen pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian online, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

8. Memperkuat Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan

makmur, pada tahun 2025 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.15
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58,39
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	76,77
Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	%	0,137

Arah kebijakan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang difokuskan pada:

1. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis, melalui (a) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa; (b) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (c) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini; (d) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan

pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal; (e) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya; (f) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (g) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (h) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan; (i) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal; (j) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman; (k) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.

2. Melestarikan budaya, melalui (a) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan; (b) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital; (c) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia; (d) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilainilai

luhur bangsa bagi generasi muda; (e) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia; (f) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya; (g) mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia; (h) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia; (i) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara; (j) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia; (l) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m)

mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas; (n) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; (o) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (p) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan; (q) memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (r) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia; (s) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta (t) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

3. Penanganan bencana, melalui (a) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; (b) memperkuat sistem deteksi bencana (*early warning system*) dengan penerapan teknologi terkini; (c) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut; (d) membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana; (e) menata

koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana; (f) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana; (g) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana; (h) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana; (i) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana; (j) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta (k) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 juga responsif dan tanggap terhadap ketidakpastian perkembangan

ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2025 akan difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni "Penguatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis", yakni :

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta Sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :
   a. Nilai Tukar Petani (NTP), dengan target sebesar 101,60.
   b. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP), dengan target sebesar 105,03.
   c. Pendapatan pembudidaya ikan, dengan target sebesar Rp.54,838 juta.
   d. Pendapatan nelayan, dengan target sebesar Rp.44,158 juta.
   e. Pendapatan Peternak, dengan target sebesar Rp.55.418 juta.
   f. Peningkatan Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dibandingkan tahun sebelumnya dengan target sebesar 5%.
   g. Peningkatan Pendapatan Petani Hutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan target sebesar 5%.

h. Konstribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, dengan target sebesar 17,65%.

i. Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB, dengan target sebesar 9,15%.

j. Jumlah enterpreneur baru tercipta, dengan target sebanyak 173.711 orang.

k. Persentase Konstribusi Pariwisata pada PDRB, dengan target sebesar 1,37%.

l. Persentase Konstribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB, dengan target sebesar 7,50%.

2. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:

a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target sebesar 5,05%.
- PDRB ADHK Per Kapita, dengan target sebesar Rp.36,10 juta.
- PDRB ADHB Per Kapita, dengan target sebesar Rp.62,29 juta.
- Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 5,55%.

b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata

dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :

- Rasio Gini, dengan target sebesar 0,289.
- Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan, dengan target 37,8%.
- Tingkat Kemiskinan, dengan target sebesar 5,65%.
- Pengeluaran Riil Perkapita, dengan target sebesar Rp.11.719 ribu.

c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni:

- Indeks Pembangunan Manusia, dengan target sebesar 77,41.
- Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum yang layak, dengan target sebesar 88,00%.
- Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi yang layak, dengan target sebesar 88,00%.
- Persentase Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, dengan target sebesar 92%.
- Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan, dengan target sebesar 92,4%.

Prioritas pembangunan pada tahun 2025 merupakan prioritas yang sama pada tahun 2022-2026, hal ini agar terjadinya konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya serta menjaga agar arah pembangunan RPJMD tetap terjaga, sehingga hasil akhir di tahun 2026 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Prioritas Pembangunan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.

   Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Kualitas Pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi. Selain pendidikan berkualitas, pada Prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil

yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/ pikiran/ ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna,sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Prioritas Pembangunan 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.

   Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara', Syara'Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal-vertikal maupun horizontal-horizontal.

   Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang

perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS-SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

3. Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

   Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan antara lain karena lebih dari 20% struktur perekonomian di Sumatera Barat di topang dengan sektor pertanian, selain itu sektor ini juga berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), adanya potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan. Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

4. Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/ Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital.

   Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertenian, Kehutanan dan Perikanan, namun sekotor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatan tigkat pendapatan masyarakat sehinnga Sumatera Barat dapat keluar dari *middle income trap*.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusal Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Prioritas Pembangunan 5: Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan.

   Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga proritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa

dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/ minum, dan jasa-jasa. Dalam pengembangan sektor pariwisata, Sumatera Barat mengambil langkah pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT) yang berarti memberikan pemberdayaan yang lebih demokratis dengan memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakat setempat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata serta menikmati hasilnya secara lebih adil dan merata.

Pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT) juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal atau sebagai upaya untuk mengelola sumber daya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Syarat-syarat dari pariwisata berbasis komunitas *Community Based Tourism* (CBT) adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi dalam pengelolaan, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, dapatkan posisi yang valid dengan otoritas terkait, meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan sosial, mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, menghormati warisan budaya lokal, berpartisipasi aktif dalam konservasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas

pengalaman wisatawan dengan meningkatkan kualitas interaksi dan bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat.

6. Prioritas Pembangunan 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

   Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi). Sehingga pada prioritas ini akan di fokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang berkualitas, penyediaan infrastruktur konektivitas untuk meminimalisir ketimpangan wilayah dengan tidak mengesampingkan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan. Disamping itu mengingat Sumatera Barat juga merupakan kawasan yang dengan indek risiko bencana yang relatif tinggi, ketahanan bencana juga menjadi prioritas utama.

7. Prioritas Pembangunan 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

   Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

   Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem

   pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Untuk itu, dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandasan dalam prinsip *good and clean*

government. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Pembangunan ekonomi tahun 2025 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi, memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu "Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim", yaitu:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan, dengan arah kebijakan antara lain:

a. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
b. Pendampingan kelompok usaha masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
c. Pendampingan kewirausahaan hulu hilir (peningkatan kapasitas, bisnis proses, akses finansial, akses pasar).
d. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
e. Pembinaan pembangunan desa wisata.
f. Pendampingan industri pengolahan perikanan.
g. Pendampingan budidaya perikanan.
h. MoU dengan pasar atau badan usaha.

2. Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi pada pusat atau kawasan ekonomi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata, dengan arah kebijakan antara lain:
   a. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, sistem jaringan dan sampul transportasi serta pusat pemerintahan.
   b. Pengembangan kawasan strategis daerah.
   c. Penguatan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
   d. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
   e. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.

f. Percepatan penyediaan ases air bersih untuk masyarakat perdesaan.
g. Pembangunan destinasi wisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag, Katiet).

3. Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.
   a. Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah (pisang, dan ikan).
   b. Pengembangan komoditi pertanian yang berorientasi pasar.
   c. Pembinaan hulu hilir pelaku usaha atau wirausaha (*enterprenuer*).
   d. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
   e. Kemudahan perizinan.

Tema pembangunan daerah ini diwujudkan dalam beberapa prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan sebagai bagian dari arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026, antara lain:

1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)

   Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem pembangunan pendidikan dengan berkomitmen *mandatory spending* minimal 20 persen pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraaan. Pembangunan Pendidikan sebagai satu kesatuan pembangunan sistem pendidikan daerah yaitu mulai dari sisi hulunya yaitu membuka akses layanan

pendidikan bagi masyarakat, penyediaan sarana dan prasana pendidikan seperti membuka sekolah baru, pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, beasiswa pendidikan, sekolah gratis, penyediaan asrama dan transportasi sekolah. Pada tahapan proses pembelajaran melalui penguatan pelaksanaan kurikulum merdeka, pendidikan karakter `pelaksanaan guru penggerak, merdeka mengajar, merdeka belajar, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, penguatan musyawarah tenaga kependidikan/ guru dan kepala sekolah, fasilitasi sertifikasi guru/tenaga pendidik selain itu, diberikan beasiswa bagi tamatan SMA/SLTA masyarakat Mentawai yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sehingga disisi hilirnya menghasilkan peserta didik/ sumber daya manusia yang memiliki kemampuan afeksi, kognisi dan psikomotor pendidikan untuk mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing.

Dengan prioritas pembangunan ini diharapkan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan secara kumulatif meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), menurunkan angka putus sekolah, peningkatan rata lama dan harapan lama sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan melalui pencapaian rapor pendidikan daerah yang lebih baik.

Tabel 4.16
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan		
	Rata Lama sekolah	8,32 tahun*
	Harapan Lama Sekolah	13,28 tahun
Meningkatnya Budaya Literasi		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,8

Ket:
* = target RPJPD Tahun 2025-2045

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) pada Tahun 2025 antara lain:

1. Pemenuhan SPM Pendidikan.
2. Pendidikan gratis bagi semua.
3. Beasiswa Perguruan Tinggi bagi masyarakat miskin berprestasi.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*.
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
6. Pembangunan dan Pendidikan Berasrama.
7. Peningkatan jenjang pendidikan tenaga pendidik (ke S1)
8. Fasilitasi Sertifikasi Pendidik.
9. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
10. Pengembangan intra dan ekstrakurikuler atau pembelajaran lingkungan.

11. Peningkatan fungsi perpustakaan.
12. Pengembangan pustaka keliling.
13. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah.
14. Pembinaan dan pengawasan perpustakaan daerah dan desa.

Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan pembagunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) dilaksanakan dengan program prioritas seperti pada Tabel 4.17 berikut ini.

Tabel 4.17
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
Prioritas Pembangunan : Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)						
1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Persen	28	66.438.060.836	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SD	Persen	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SMP	Persen	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD /MI/ paket A	Persen	85		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SMP /MTS/ Paket B	Persen	62,50		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	>50		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi	Persen	>50		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM PRIORITAS	KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
		kompetensi minimum				
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	Persen	3	309.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	Persen	94	206.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	Persen	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	Persen	22		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	30	315.180.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Persen	89	11.871.780.000	Sekretariat Daerah
TOTAL					76.539.172.236	

Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 5 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.76.539.172.236.

2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)

Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah untuk medukung perlindungan kesehatan semesta bagi Masyarakat Mentawai dengan mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 persen. Sebagai daerah kepulauan dengan 3 pulau besar yang terpisah oleh laut yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora dan Pulau Pagai Utara Selatan perlu mengakomodasi sistem layanan Kesehatan berbasis kepulauan dengan menempatkan RS rujukan di setiap pulau

besarnya sebagai tindakan kuratif pertama sebelum selanjutnya dilakukan tindakan layanan rujukan lanjutan baik itu di tingkat kabupaten atau di tingkat propinsi.

Penguatan sistem kesehatan daerah dilakukan dengan penguatan disisi hulunya yaitu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasana kesehatan, menyediakan alat kesehatan yang terstandardisasi, menjamin ketersediaan obat-obatan, menyediakan tenaga kesehatan hingga ditingkat desa dan dusun baik itu puskesmas pembantu (pustu) dan poskesdes. Selain itu, juga diberikan jaminan kesehatan dan jaminan persalinan bagi Masyarakat miskin. Dalam proses peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dilakukan peningkatan kapasitas dan kepastian keahlian tenaga kesehatan melalui fasilitasi sertifikasi profesi kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, melaksanakan pelayanan kesehatan diluar gedung dengan melibatkan tenaga dokter hingga ke dusun-dusun, melakukan kerjasama dengan RS dan perguruan tinggi melalui *sister hospital,* penguatan RSUD menjadi BLUD, begitu juga penguatan pada promosi dan advokasi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti para kader posyandu, pemerintahan desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (SurfAid, Yayasan Fondasi Hidup, CDRM-CDS,

Bank Nagari/badan usaha lainnya). Intervensi spesifik sebagai upaya terintegrasi penurunan *stunting* di Kepulauan Mentawai pada 10 desa lokasi prioritas yaitu Desa Betumonga, Matotonan, Goisooinan, Malancan, Bulasat, Sido Makmur, Betumonga, Sigapokna, Silabu, Makalo menjadi fokus dalam pencapaian target penurunan *stunting* pemerintah dan pemerintah daerah khususnya tahun 2025. Begitu juga dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian pada kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan, berperilaku hidup sehat, memperbaiki pola gizi serta menjadi bagian dalam mengkampanyekan dan mengadvokasi kesehatan, sehingga dihilirnya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Dengan prioritas Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, penurunan prevalensi *stunting*, menurunkan angka morbiditas dan perbaikan pada kualitas Kesehatan daerah yang dilihat dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).

Tabel 4.18
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan		
	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6
	Angka Harapan Hidup	71,28 tahun*
	Prevalensi *stunting*	31,9%*

Ket: * = target RPJPD Tahun 2025-2045

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) pada Tahun 2025 antara lain:

1. Pemenuhan SPM Kesehatan.
2. Promosi kesehatan.
3. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*.
5. Penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin.
6. Pelayanan kesehatan daerah terpencil.
7. Advokasi kesehatan lingkungan.
8. Pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan sampai ke desa.
9. Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan.
10. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan.
11. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum.
12. Peningkatan komitmen pemerintah Daerah dalam pengentasan *stunting*.

13. Komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah *stunting*.
14. Pelaksanaan aksi konvergensi untuk mencegah *stunting* kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Tabel 4.19
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)					
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	90%	39.382.768.828	Dinas Kesehatan, RSUD
		Cakupan Desa UCI	85%		
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	22 /1000 KH		
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)	250 / 100rb KH		
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan	80%		
		Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	<5%		
		Akreditasi Rumah Sakit	B		
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	90/ 100.000 penduduk		
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Rata-rata lama pasien dirawat	5 Hari	100.000.000	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Makanan Minuman				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12 Puskesmas	834.294.600	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	90%		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa dengan PHBS	25 desa	250.000.000	Dinas Kesehatan
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah	33%	3.394.495.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	64%	1.743.041.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL				45.704.599.428	

Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 6 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.45.704.599.428 .

3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

   Pembangunan infrastruktur diperdesaan dan perkotaan dan Pembangunan infrastruktur dalam menunjang konektivitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pembangunan jaringan jalan dan membuka konektivitas transportasi daerah merupakan hal mendasar dalam memajukan suatu daerah. Program

peningkatan jaringan jalan Trans Mentawai menjadi prioritas dalam membuka akses sosial ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan kawasan strategis atau pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan wilayah seperti pada pusat ibukota kecamatan didukung dengan ketersediaan infrastruktur jaringan jalan, air bersih, telekomunikasi. Untuk wilayah yang belum dihubungkan atau diakses melalui transportasi darat maka akses tranportasi laut diarahkan untuk menjangkau konektivitas daerah tersebut terutama sebagai interkoneksi jalan Trans Mentawai.

Pengembangan kawasan perkotaan Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut, Muara Sikabaluan terus didorong dengan kelengkapan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas sosial, budaya dan ekonomi masyarakat seperti pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan/jembatan, akses transportasi laut (antar pulau dan Mentawai-Padang), pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pengembangan dan pembangunan irigasi, Pembangunan TPS kecamatan (Sipora Selatan, Sikakap, Siberut Selatan, Siberut Utara). Begitu juga dengan kawasan atau pusat kegiatan wilayah lainnya senantiasa didorong pembangunan infrastruktur jalan, telekomunikasi, transportasi laut antar pulau (kapal cepat), air bersih. Selain itu, prioritas ini juga

diarahkan untuk mendukung program terintegrasi dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting* daerah pada lokus intervensi seperti pada Desa Simatalu, Muntei, Sagulubbeg, Sikakap, Madobag, Sirilogui, Taikako, Pasakiat Taileleu, Saumanganya, Matotonan, Goisooinan, Malancan, Bulasat, Sido Makmur, Betumonga, Sigapokna, Silabu, Makalo. Selain itu, juga mendukung kawasan strategis pariwisata daerah 3M1K yaitu pada kawasan pariwisata Mapadegat, Madobag, Muntei, dan Katiet.

Dengan prioritas Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatnya panjang jaringan jalan mantap, cakupan air baku, cakupan telekomunikasi, rasio elektrifikasi, cakupan layanan transportasi daerah.

Tabel 4.20
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas		
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	20%
Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air		
	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	75%
	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	78%
Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah		
	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi		
	Cakupan Layanan Transportasi	85%
Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika		
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	90%
Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah		
	Rasio Elektrifikasi	88%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan pembangunan infrastruktur, pembangunan perdesaan perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Pembangunan jalan Trans Mentawai.
3. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, budaya, sistem jaringan dan simpul transportasi serta pusat pemerintahan.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*.
5. Pembangunan sistem layanan irigasi.
6. Penyediaan air baku.
7. Pengendalian abrasi sungai dan pantai.
8. Penanaman kembali lahan krisis pesisir pantai.
9. Revisi RTRW kabupaten.
10. Penyusunan regulasi rencana rinci tata ruang.
11. Penyediaan sistem informasi tata ruang.
12. Pengembangan kawasan strategis daerah
13. Penguatan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
14. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
15. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.

16. Pengembangan SPBE (e-goverment).
17. Pembukaan jalan untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
18. Pengembangan kawasan permukiman.
19. Pembangunan SPAM di desa prioritas (Muara Siberut, Sioban, Tuapejat).
20. Fasilitasi pembangunan SPAM (Sikabaluan).
21. Percepatan penyediaan kases air bersih untuk masyarakat perdesaan.
22. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
23. Pembangunan TPST Tuapejat.
24. Pembangunan TPS Kecamatan
25. Pengadaan sarana dan prasana persampahan.
26. Pengelolaan persampahan.
27. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.

Tabel 4.21
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan
dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)					
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	12%	77.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8%	65.918.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan jaringan irigasi	28 ha	20.576.090.634	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Penataan Ruang
		Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	7,80%		
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%	2.848.441.548	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	82%	200.382.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase armada angkutan laik jalan/layar	90%	1.165.618.800	Dinas Perhubungan
7	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	321.442 orang	12.507.262.500	Dinas Perhubungan
		Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	709.300 ton		
8	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	88%	3.029.993.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	65%	12.515.332.732	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	52%	7.520.593.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	9%	627.360.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	33%	3.394.495.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Berkurangnya titik genangan Air	73%	1.014.439.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL				111.350.096.971	

Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 13 program

prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.111.350.096.971.

4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)

   Prioritas ini diarahkan pada penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu pada pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat korban bencana atau masyarakat yang terdampak program pemerintah seperti pada Desa Monganpoula, Pulitcoman (korban banjir) Desa Simalegi, Simatalu (bencana gempa bumi). Prioritas pembangunan ini juga mendukung upaya terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanganan *stunting* yaitu pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni seperti pada wilayah Simatalu, Muntei, Sagulubbeg, Sikakap, Madobag, Sirilogui, Taikako, Pasakiat Taileleu, Makalo, Saumanganya, Matotonan, Goisooinan, Malancan, Bulasat, Sido Makmur, Betumonga, Sigapokna, Silabu.

   Selain itu, juga penyediaan prasarana sarana utilitas pendukung hunian masyarakat seperti drainase, jalan lingkungan perumahan, Sanitasi, pengelolaan persampahan dan mitigasi bencana. Begitu juga integrasi program dalam mendukung kawasan strategis pariwisata di Desa Muntei dan

Madobag melalui rehabilitasi rumah masyarakat bercirikan ornamen Mentawai.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan persentase rumah layak huni, jumlah desa dengan STBM dan meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana.

Tabel 4.22
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)
Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		
	Persentase Rumah Layak Huni	45%
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan		
	Jumlah Desa STBM	4 desa
Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana		
	Indeks Resiko Bencana	197,2*

Ket: * data RPJPD Tahun 2025-2045

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Penguatan penerapan SPM Perumahan Rakyat.
2. Penguatan penerapan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
3. Pengembangan kawasan permukiman.
4. Relokasi permukiman terkena bencana atau berpotensi terkena bencana.
5. Pembangunan rumah layak huni.
6. Pembangunan rumah khusus (PNS, TNI/POLRI, nelayan, Asrama/barak).

7. Pengadaan sarana dan prasana persampahan.
8. Pengelolaan persampahan.
9. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.
10. Penanaman dan pemeliharaan pohon/bakau disekitaran sungai atau pesisir pantai.
11. Membuka layanan pengaduan terkait pengrusakan lingkungan.
12. Penggunaan material lokal yang layak untuk pembangunan skala perdesaan dengan memperhatikan kelestarian dan dampak lingkungan.
13. Pengembangan desa siaga dan tangguh bencana.
14. Penanganan dan penanggulangan bencana.

Tabel 4.23
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)
Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)					
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	15%	4.304.644.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	52%	5.356.785.400	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	9%	627.360.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Pemukiman dengan prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	63%	3.425.803.200	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Persentase Kasus Perusakan lingkungan	100%	317.862.000	Dinas Lingkungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Kerusakan Lingkungan Hidup	hidup yang tertangani			Hidup dan Kebersihan
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	100%	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	199.999.879	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana tertangani	100%	1.342.254.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	100%	707.736.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TOTAL				16.482.445.779	

Prioritas Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 9 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.16.482.445.779.

5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)

   Prioritas ini diarahkan dengan pendekatan pengembangan komoditas unggulan daerah pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pisang, kelapa, cengkeh dan pengolahan perikanan di wilayah Kecamatan Pagai Selatan (Malakopa, Bulasat) dan Kecamatan Siberut Utara (Sikabaluan/Bose, Monganpoula) menjadi komoditas unggulan pertanian perkebunan dan perikanan yang dikembangkan

melalui hilirisasi dalam rangka menaikkan nilai tambah produk komoditas daerah dan memberikan peluang pasar yang lebih besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hilirisasi komoditas pisang di sisi hulu dengan memastikan ketersediaan prasarana bagi industri pengolahan komoditas pisang di Bulasat (Kec. Pagai Selatan), Sikabaluan (Kec. Siberut Utara). Infrastruktur pendukung tersedia seperti akses jalan ekonomi dan jalan produksi pertanian, irigasi, air bersih, listrik.

Pada tahapan proses yaitu memastikan proses industri pengolahan tepung pisang berjalan (*sustainable*), pertama adalah memastikan pasokan (*supply*) terpenuhi yaitu dengan budidaya pertanian melalui perluasan dan peningkatan kapasitas produksi tanaman pisang. Pada tahapan ini harus memastikan ketersediaan bibit unggul tanaman pisang, pupuk, alsintan (alat mesin pertanian) dalam rangka mekanisasi/ modernisasi pertanian, penyuluhan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani/ kelompok petani. Kedua adalah kelompok tani (poktan) atau badan usaha pertanian memiliki kapasitas dalam mengoperasionalkan, mengelola dan menjalankan/ bisnis proses industri pengolahan tepung pisang yaitu melalui peningkatan kapasitas kelembagaan/ badan

usaha pertanian, membuka/ fasilitasi akses keuangan/ koperasi, sertifikasi produk/perizinan usaha, regulasi.

Pada tahap akhir, sisi hilirnya adalah memastikan pasar sudah terhubung dengan hasil produk industri pengolahan. Pada tahap ini proses logistik produk akhir sudah tersistematis dan terhubung ke pasar atau *offtaker*. Selain itu, juga memastikan peluang pasar melalui *marketplace*, *e-commerce*, kolaborasi atau kerjasama mitra strategis.

Pengembangan kawasan holtikultura (Sikakap, Sipora Utara, Siberut Selatan, Siberut Utara) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketahanan pangan daerah serta budidaya perikanan (lele, ikan gerapu, kepiting bakau) di Desa Sidomakmur, Desa Sikakap, Desa Katurei, pengolahan ikan asin di Desa Sikabaluan Dusun Bose.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya wirausaha yang tumbuh.

Tabel 4.24
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
	Pendapatan Perkapita	Rp.67,02 jt*
	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra

Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pendampingan kelompok nelayan.
2. Pengembangan alat tangkap dan mesin nelayan yang lebih modern.
3. Pendampingan industri pengolahan pertanian dan perikanan.
4. Pendampingan budidaya perikanan.
2. Pengembangan keanekaragaman pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
3. Pengembangan komoditi pertanian yang berorientsi pasar.
4. Pengembangan perternakan lokal dan peternakan anakan.
5. Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah (pisang, dan ikan).
6. MoU dengan pasar atau badan usaha.
7. Pendampingan usaha mikro kecil dan koperasi.

Tabel 4.25
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)					
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Indeks Ketahanan Pangan	54	1.429.994.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kawasan pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian	85%	2.535.981.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama	4,5 ton		

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		lokal lainnya per hektar			
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian dan Peternakan		3.853.349.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pisang	148.000 kwintal		
		Cengkeh	1.650 ton		
		Keladi	1.800 kwintal		
		Kelapa	18.000 ton		
		Sagu	1.100 ton		
		Sapi	3.100 ekor		
		Babi	48.000 ekor		
		Unggas	83.000 ekor		
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertangani	100%	59.999.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan nelayan kecil	10.000 ton	1.350.000.000,	Dinas Perikanan
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya	300 ton	3.999.690.540	Dinas Perikanan
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Kelompok/Usaha Mikro Kecil pengolahan perikanan yang produktif	22%	1.831.139.060	Dinas Perikanan
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	8%	2.320.003.000,	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
TOTAL				17.380.157.500	

Prioritas Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 8 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.17.380.157.500.

6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)

Prioritas ini diarahkan pada tujuan menjadikan Mentawai menjadi pariwisata kelas dunia melalui pembangunan dan penataan destinasi pariwisata baik dengan skema investasi maupun melalui pemberdayaan masyarakat untuk kawasan pariwisata prioritas daerah 3M1K (Muntei, Madobag, Mapadegat, Katiet), pembinaan dan pendampingan desa wisata, penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata lokal serta fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Siberut.

Pembangunan pariwisata Kepulauan Mentawai didorong melalui proses perencanaan terintegrasi melibatkan berbagai sektor dan pelaku pariwisata. Pembangunan kawasan pariwisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag dan Katiet) disisi hulu didorong dengan memastikan ketersediaan infrastruktur jalan sebagai konektivitas wilayah/kawasan. Pada kawasan pariwisata Mapadegat terus didorong untuk konektivitas jalan baik menghubungkan ke kawasan wisata Mapadegat juga menghubungkan kawasan wisata pendukung/penopang seperti pembangunan jalan Mapadegat-Dermaga, jalan lingkungan Desa Muntei, pengembangan jaringan air bersih, rehab rumah di sekitaran kawasan, pengembangan kawasan destinasi Mapadegat dan kawasan destinasi Muntei, peningkatan kualitas kapasitas sistem

informasi dan telekomunikasi. Untuk pengembangan dan optimalisasi kawasan destinasi pariwisata dilaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non fisik seperti pembangunan kawasan destinasi serta pendukungnya, begitu juga dengan penyelenggaraan festival pesona Mentawai, pagelaran budaya, pengembangan kapasitas pelaku wisata, usaha mikro kecil, pembinaan sanggar budaya, pelatihan budayawan, pemerhati wisata, pelatihan kelompok sadar wisata (pokdarwis) serta pembinaan kapasitas desa wisata.

Pada sisi hilirnya promosi, penguatan branding destinasi wisata 3M1K khususnya kawasan wisata Mapadegat dan kawasan wisata Desa Muntei terus dilakukan dalam upaya memperkenalkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke Mentawai. Untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Siberut di Kecamatan Siberut Barat Daya sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan serta kegiatan terkait. KEK Pariwisata Siberut terus didorong untuk ditetapkan oleh Dewan KEK Nasional.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya wirausaha yang tumbuh.

Tabel 4.26
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
	Pendapatan Perkapita	Rp.67,02 jt*
	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%

Ket: * data RPJPD Tahun 2025-2045

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pembangunan destinasi wisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag, Katiet)
2. Pembinaan pembangunan desa wisata.
3. Penguatan kapasitas pelaku wisata, usaha kreatif mikro kecil.
4. Promosi dan *branding* destinasi wisata.

Tabel 4.27
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)					
1	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	14.500 orang	952.541.090	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wisatawan domestik	730.000 orang		
		PAD sektor pariwisata	13 miliar rupiah		
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	7 hari	2.417.900.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	4%	542.123.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	15%	4.304.644.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	12%	45.884.169.957	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	321.442 orang	12.507.262.500	Dinas Perhubungan
TOTAL				66.608.641.347	

Program Prioritas mendukung Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 6 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.66.608.641.347.

7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

   Prioritas ini dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis produk lokal dengan memanfaatkan BUMD atau BUMDes, dalam prioritas ini diharapkan munculnya wirausaha muda (enterprenuer), hilirisasi produk pertanian dan perikanan hingga pada akses pasar/pemasaran, Pendampingan UMKM dan IKM (Kelembagaan, Kapasitas SDM, Bisnis Plan/ Proses, Permodalan, Kerjasama Pasar).

   Pada sisi hulu, penguatan kemudahan investasi melalui regulasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Perizinan Berusaha di Kabupaten Kepulauan

Mentawai untuk membuka dan meningkatkan realisasi investasi. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis/ keahlian pada Balai Latihan Kerja (BLK) Siberut terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja pasar dan pembinaan calon wirausaha/wirausaha baru. Pada tahapan prosesnya, upaya yang dilakukan adalah membuka akses pasar tenaga kerja melalui bursa tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri bekerja sama dengan lembaga atau penyedia tenaga kerja. Begitu juga dengan membuka kerjasama dengan dunia usaha yang disesuaikan dengan jenis pelatihan tenaga kerja yang dilakukan. Untuk usaha mikro dan kecil difasilitasi dalam membuka akses keuangan bagi usaha kecil mikro untuk pengembangan kapasitas usaha/ produksi, fasilitasi izin produksi, sertifikasi halal, higienis dan perizinan lainnya yang sejenis. Begitu juga dengan penguatan sistem logistik daerah, dalam upaya pengendalian inflasi, menjaga harga barang, melakukan operasi pasar, pasar murah dan memperkuat rentang kendali distribusi barang dan jasa. Sehingga pada hilirnya pembangunan pada prioritas ini akan dihasilkan tenaga kerja yang produktif, memiliki keahlian dan siap untuk memenuhi kebutuhan pasar, begitu juga dengan terciptanya wirausaha/ enterprenuer baru dan peningkatan kapasitas usaha mikro/wirausaha.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan dapat menjaga inflasi daerah.

Tabel 4.28
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya Kesempatan Kerja		
	Nilai Investasi	50 miliar rupiah
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,32%*
Terkendalinya Inflasi Daerah		
	Tingkat Inflasi	3,50%

Ket: * data RPJPD Tahun 2025-2045

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pembinaan hulu hilir pelaku usaha atau wirausaha (enterprenuer).
2. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Kemudahan perizinan.
4. Pengawasan peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat.
5. Pengendalian harga kebutuhan pokok.
6. Pengendalian dan pengawasan biaya/*cost* distribusi barang kebutuhan masyarakat.
7. Menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi krisis/gejolak sosial ekonomi atau keadaan darurat.

Tabel 4.29
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)					
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	1,80%	81.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerj	24%	199.999.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	56%	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi	12,0%	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kesesuaian perencanaan penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (investasi)	90%	199.999.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasi realisasi investasi	2,50%	391.957.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	6%	180.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti	90%	1.633.816.825	Sekretariat Daerah
TOTAL				2.886.773.525	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 8 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.886.773.525.

8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)

   Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai melalui fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN.

   Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi daerah.

Tabel 4.30
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah		
	Rasio Elektrifikasi	88%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pembukaan jalan dalam rangka membuka akses untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
2. Penyediaan listrik bagi kawasan permukiman melalui fasilitasi listrik bagi keluarga miskin baik pendanaan APBD Propinsi ataupun melalui kementerian/Lembaga dan swasta.

Tabel 4.31
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)					
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan desa yang terakses listrik	95,35%	1.633.816.825	Sekretariat Daerah
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	12%	45.884.169.957	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL				47.517.986.782	

Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.47.517.986.782.

9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

   Prioritas ini dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi pembangunan rumah ibadah, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas, pembinaan, perlindungan perempuan dan anak, pengembangan seni budaya, pelestarian budaya, mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama, tokoh agama. Tokoh adat/budaya, tokoh masyarakat, serta pembinaan Masyarakat Hukum Adat, penegakan perda serta penguatan Forkopimda.

   Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah MHA yang dilestarikan, meningkatnya

Tingkat Kabupaten Layak Anak, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender.

Tabel 4.32
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya		
	Jumlah MHA yang dilestarikan	8 MHA
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender		
	Tingkat Kabupaten layak Anak	550 (pratama)
	Indeks Pembangunan Gender	90,02

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pembangunan kebudayaan.
2. Pengembangan kurikulum budaya Mentawai.
3. Sinergitas dan harmonisasi antar pemangku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
2. Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
3. Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
4. Pengakuan, penetapan, dan perlindungan masyarakat hukum adat
5. Penetapan dan revitalisasi warisan budaya.
6. Peningkatan dialog dan harmonisasi antar pemangku agama, tokoh adat/ budaya dan tokoh masyarakat

7. Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
8. Pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.
9. Pencegahan dan pendampingan kekerasan pada perempuan dan anak.
10. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan yang responsif gender.

Tabel 4.33
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)					
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	64%	455.903.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar yang dibina	4 sanggar	475.128.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	5 MHA	161.341.960	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MHA yang diberdayakan	8 MHA	608.932.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	79.999.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	5 kec	140.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					dan Perlindungan Anak
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	135.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	78%	341.138.000	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas aktif	70%	30.068.800	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
10	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	100%	99.999.600	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
11	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial	Persentase konflik sosial tertangani	100%	115.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	127.114.000	Seluruh Kecamatan
TOTAL				2.769.625.260	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 12 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.769.625.260.

10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

Prioritas ini dilakukan dengan menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penyelenggaraan SPBE, menata kembali struktur pemerintah daerah, penerapan sistem merit dalam pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, penuntasan kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewujudkan WTP atas laporan keuangan daerah, penerapan *e-Goverment*, penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan penguatan inovasi daerah dengan menerapkan setiap OPD minimal 2 Inovasi. Penguatan fungsi unsur penunjang pemerintahan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BKD, BKPSDM, Sekretariat Daerah, Inspektorat.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai kepatuhan standar pelayanan publik, meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat, meningkatnya Indeks Profesional ASN, meningkatnya Indeks Inovasi Daerah, meningkatnya Indeks SPBE, meningkatnya Maturitas SPIP, Opini BPK, WBK/WBBM, meningkatnya Nilai SAKIP.

Tabel 4.34
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	45
	Indek Kepuasan masyarakat	84
Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan		
	Indeks Profesional ASN	83
	Indeks Inovasi Daerah	45,78*
	Indeks SPBE	2,4
	Maturitas SPIP	Level 3
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel		
	Opini BPK	WTP
	WBK/WBBM	4 OPD
	Nilai SAKIP	BB

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pelaksanaan merit sistem
2. Pemberian TPP berbasis kinerja
3. Penerapan/implementasi SPBE
4. Penyederhanaan SOTK menunjang tujuan pembangunan.
5. Pembinaan dan pendampingan tata kelola pemerintahan yang melibatkan antar OPD dan stakeholder.
6. Penguatan tata kelola melalui kerja sama antar pemerintah daerah/Lembaga.
7. Pendampingan penerapan Reformasi Birokrasi SAKIP, Zona Intregritas, WBK/WBBM.

Tabel 4.35
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)					
1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	80%	75.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95%	149.966.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	B	32.895.000	Semua Kecamatan
4	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,30%	489.999.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	93%	299.999.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dan *update*	85%	33.141.440	Semua Kecamatan
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan realisasi anggaran diatas 90 %	92%	558.418.600	Semua Kecamatan
8	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	10%	1.347.282.470	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	88%	1.917.371.100	Inspektorat
		Kapabilitas APIP	Level 3		
10	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	60%	304.687.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90%	49.999.800	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
12	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	240	1.870.965.700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	13%	2.049.999.800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	80%	1.038.918.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	10		
15	Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	45%	157.576.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
16	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20%	105.049.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	90%	31.054.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu	100%	1.346.481.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	88%		

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
19	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88%	1.000.256.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	88%		
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	88%		
20	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	100%	127.687.547.979	Badan Keuangan Daerah
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	40%		
		Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	98%		
21	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	83%	1.345.396.100	Badan Keuangan Daerah
22	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan	9,50%	2.352.729.700	Badan Keuangan Daerah
23	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	88%	304.989.400	Inspektorat
24	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	89%	9.732.158.400	Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah	2%		
		Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	100%		
25	Program Perekonomian	Persentase OPD dengan	84	1.633.816.825	Sekretariat

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	dan Pembangunan	realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen			Daerah
		Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu	90		
26	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang disetujui	80%	17.763.199.200	Sekretariat DPRD
		Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	4 hari		
		Persentase usulan masyarakat melalui reses/ monev menjadi pokok pikiran DPRD	80%		
		Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	75%		
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	475.231.531.815	Seluruh OPD
TOTAL				648.910.431.429	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 27 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.648.910.431.429.

Tabel 4.36
Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Pendanaannya, 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	8,32 tahun	76.539.172.236
			Harapan Lama Sekolah	13,28 tahun	
		Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,8	
2	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan	0,6	45.704.599.428

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)
			Masyarakat (IPKM)		
			Angka Harapan Hidup	71,28 tahun	
			Prevalensi *stunting*	31,9%	
3	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	20%	111.350.096.071
		Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	75%	
			Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	78%	
		Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	85%	
		Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	90%	
		Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	88%	
4	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	45%	16.482.445.779
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	4 desa	
		Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	197,2	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)
5	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.67,02 jt	17.380.157.500
			Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	
6	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.67,02 jt	66.608.641.347
			Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	
7	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	50 miliar rupiah	2.886.773.525
			Tingkat Pengangguran Terbuka	1,32%	
		Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	3,50%	
8	Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	88%	47.517.986.782
9	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	8 MHA	2.769.625.260
		Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Tingkat Kabupaten layak Anak	550 (pratama)	
			Indeks Pembangunan Gender	90,02	
10	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	45	648.910.431.429
			Indek Kepuasan masyarakat	84	
		Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan			
		Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	83	
			Indeks Inovasi Daerah	45,78	
			Indeks SPBE	2,4	
			Maturitas SPIP	Level 3	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	
			WBK/WBBM	4 OPD	
			Nilai SAKIP	BB	
TOTAL					1.036.149.929.357

Tabel 4.36 menunjukkan total anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai 10 prioritas Pembangunan adalah sebesar Rp.1.036.149.929.357. Alokasi anggaran untuk mendanai prioritas Pembangunan dijabarkan dalam program prioritas, dan terdapat beberapa program prioritas yang digunakan bersama untuk mendukung prioritas pembangunan daerah seperti pada program penyelenggaraan jalan.

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya Pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan sebagai satu kesatuan perencanaan Pembangunan nasional. Penyelarasan prioritas Pembangunan juga sebagai wujud kesamaan pandangan, cita-cita dan tujuan akhir Pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.37
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah, 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
			Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
			Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)
			Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
			Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
			Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
			Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025
			Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
			Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
			Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
			Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
		Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pembangunan Pertanian Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

Begitu juga dengan keselarasan prioritas pembangunan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran 1 (satu) tahun implementasi

dokumen perencanaan jangka menengah terhadap tujuan dan sasaran Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 yang dapat dilihat seperti tabel berikut.

Tabel 4.38
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah
dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Tujuan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	66,15	
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	8,32 tahun	
		Harapan Lama Sekolah	13,28 tahun	
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	25%	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
		APK SD	100%	
		APK SMP	100%	
		APM SD /MI/ paket A	85%	
		APM SMP SMP /MTS/ Paket B	62,50%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	
		Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	>50%	
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	>50%	
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	3%	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	94%	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
		Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	100%	
		Persentase tenaga pendidik	22%	

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		bersertifikat profesi		
Sasaran 2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6	
		Angka Harapan Hidup	71,28	
		Prevalensi *stunting*	31,9	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	90%	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
		Cakupan Desa UCI	85%	
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	22 /1000 KH	
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)	250 / 100rb KH	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan	80%	
		Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	<5%	
		Akreditasi Rumah Sakit	B	
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	90/ 100.000 penduduk	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rata-rata lama pasien dirawat	5 Hari	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12 Puskesmas	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
		Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	90%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa dengan PHBS	25 desa	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
Sasaran 3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumber daya manusia	Persentase Penduduk Miskin	14,31%	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90,00%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja dilatih yang telah bekerja	24%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi sehat	10%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	64%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga	Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke	4%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	sejahtera (KS)	Keluarga sejahtera		(Mentawai Kerja)
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes yang mendapatkan profit	2%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang Aktif	105 lembaga kemasyarakatan	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,3%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	14 organisasi	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Prestasi olah raga	10 Cabang olah raga	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase penurunan PMKS	28%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	100%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Tujuan 2:	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur	15%	
Sasaran 1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	20%	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	12%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	75%	
		Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	78%	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan jaringan irigasi	28 ha	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
		Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	7,80%	
Sasaran 3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	82%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah sesuai dengan regulasi	100%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 4	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	85%	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase armada angkutan laik jalan/layar	90%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	321.442 orang	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
		Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	709.300 ton	
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	90%	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang	88%	Pembanguan

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	88%	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan desa yang terakses listrik	95,35%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Tujuan 3:	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,1	
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	45%	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	15%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	52%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	65%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	52%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	9%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	33%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Berkurangnya titik genangan Air	73%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				(Mentawai Mantap)
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Pemukiman dengan prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	63%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Sasaran 2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	4 desa	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Perusakan lingkungan hidup yang tertangani	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Sasaran 3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	197,2	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana tertangani	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Penanganan Bencana	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Tujuan 4 :	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	4,37%	
		Indek Gini	0,260	
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.67,02 jt	
		Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	14.500 orang	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
		Jumlah wisatawan domestik	730.000 orang	
		PAD sektor pariwisata	13 miliar rupiah	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	7 hari	Pembangunan Pariwisata (Mentawai

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				Emas)
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	4%	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Indeks Ketahanan Pangan	54	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kawasan pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian	85%	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,5 ton	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian dan Peternakan		Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
		Pisang	148.000 kwintal	
		Cengkeh	1.650 ton	
		Keladi	1.800 kwintal	
		Kelapa	18.000 ton	
		Sagu	1.100 ton	
		Sapi	3.100 ekor	
		Babi	48.000 ekor	
		Unggas	83.000 ekor	
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Bina kelompok Tani yang produktif	45%	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penyakit Hewan yang tertangani	100%	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertangani	100%	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan nelayan kecil	10.000 ton	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya	300 ton	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Kelompok/Usaha Mikro Kecil pengolahan perikanan yang produktif	22%	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	9%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	8%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Sasaran 2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	50 miliar rupiah	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,32%	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	1,80%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	45%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	56%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	2%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Peningkatan Sarana	Persentase peningkatan	12,0%	Pembangunan Usaha

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Distribusi Perdagangan	omset pedagang pasar yang direvitalisasi		Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan nilai penjualan (omset usaha perdagangan)	4%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kesesuaian perencanaan penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (investasi)	90%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasi realisasi investasi	2,50%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Sasaran 3	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	3,50%	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	6,0%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti	90%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Tujuan 5 :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Indek RB	B	
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	45	
		Indek Kepuasan masyarakat	84	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	80%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)	35%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	B	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,30%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	93%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dan *update*	85%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan realisasi anggaran diatas	92%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		90 %		
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	10%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
Sasaran 2	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	83	
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	
		Indeks SPBE	2,4	
		Maturitas SPIP	Level 3	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	88%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Kapabilitas APIP	Level 3	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	60%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	25%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	240	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	13%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	80,00%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	10	
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keselarasan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan yang responsif gender dan peduli anak	37%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	45%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		pertanggungjawaban		
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	90%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	
		WBK/WBBM	4 OPD	
		Nilai SAKIP	BB	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu	100%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	88%	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	88%	
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	88%	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	100%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	40%	
		Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	98%	
	Program Pengelolaan Barang	Persentase Barang dan Jasa	83%	Penataan Birokrasi

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Milik Daerah	yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik		(Mentawai Prima)
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan	9,50%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	88%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	89%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah	2%	
		Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	100%	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	84	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu	90	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang disetujui	80%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	4 hari	
		Persentase usulan masyarakat melalui reses/ monev menjadi pokok pikiran DPRD	80%	
		Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	75%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	68%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
Tujuan 6 :	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,6	
Sasaran 1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	8 MHA	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	64%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar yang dibina	4 sanggar	Pembangunan Kebudayaan

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				(Mentawai Beradab)
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	5 MHA	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MHA yang diberdayakan	8 MHA	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
Sasaran 2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,8	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	30%	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
Tujuan 7 :	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	3,2 persen	
Sasaran 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Tingkat Kabupaten layak Anak	550 (pratama)	
		Indek Pembangunan Gender	90,02	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	89%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	5 kec	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran	20 OPD	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
		Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya	75%	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	78%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas aktif	70%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	100%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial	Persentase konflik sosial tertangani	100%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengambil peran dan turut mendukung pencapaian 8 (delapan) Prioritas Nasional, sehingga terwujudnya keselarasan proritas Pembangunan baik tingkat nasional maupun di daerah. Adapun penyelarasan dan dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.39
Dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme.		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z.		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
				Pelaksanaan tugas Paskibraka
				Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembentukan Paskibraka
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota.
		Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Penyehatan media arus utama dan peningkatan kapasitas lembaga dan insan pers	Relasi Media
				Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
		Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas.		

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.		
		Penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan		
		Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.	Diseminasi Informasi
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
		Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	Penyehatan media arus utama dan peningkatan kapasitas lembaga dan insan pers	Relasi Media
				Penyusunan Konten
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
				Diseminasi Informasi
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan *stereotip* gender.		Relasi Media
				Penyusunan Konten
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.	Transformasi pengarusutamaan HAM	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
		Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya.	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan bantuan hukum	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya.	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan dan pemulihan saksi dan korban	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi.
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Memperkuat komponen cadangan.	Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medan	
		Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara.	Penguatan intelijen dan kontra intelijen	
		Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.	Operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medanefektivitas menjaga kedaulatan NKRI.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar.	Pengawasan dan pemeliharaan keamanan laut di ALKI dan *choke point*	
		Memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan	Pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		penanggulangan aksi terorisme.		Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
		Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan	1. Pengembangan pangan akuatik. 2. Pengembangan pangan hewani. 3. Pengembangan pangan nabati. 4. Penguatan cadangan pangan. 5. Penjaminan mutu dan keamanan pangan. 6. Peningkatan produktivitas	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			hutan. 7. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 8. Penguatan pengelolaan hutan lestari. 9. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. *10.* Pemulihan luas lahan mangrove	
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
				Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
				Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				berdasarkan skala usaha dan risiko
				Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil.
				Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
				Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
		Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio	1. Pengembangan pangan nabati. 2. Peningkatan produktivitas hutan. 3. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 4. Penguatan pengelolaan hutan lestari.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
		Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian.	1. Pengembangan pangan hewani. 2. Pengembangan pangan nabati. 3. Penguatan cadangan pangan. 4. Penjaminan mutu dan keamanan pangan.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Biji/Benih
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
				Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kabupaten/Kota
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya	1. Pengembangan pangan hewani. 2. Pengembangan pangan nabati. 3. Penguatan cadangan pangan. 4. Penjaminan mutu dan keamanan pangan.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
				Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Pemantauan Stok Pangan
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
				Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
		Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional	1. Peningkatan produktivitas hutan. 2. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 3. Penguatan pengelolaan hutan lestari. 4. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. 5. Pemulihan luas lahan mangrove	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
				Pelaksanaan remediasi
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
		Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara *holding* pangan ID *Food* sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan,	Penguatan satu data pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya		
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
				Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro
				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		Menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up* untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan		Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu	Pengembangan pangan nabati.	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
				Penyusunan *Action Plan*

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kot
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
		Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)	Pengembangan pangan akuatik.	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
				Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
		Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal	Penguatan cadangan pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan	Penjaminan mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
				Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro
		Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan	1. Peningkatan produktivitas hutan. 2. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. *3.* Penguatan pengelolaan hutan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional	lestari. *4.* Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. *5.* Pemulihan luas lahan mangrove	
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan	Penguatan satu data pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
		Penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air.	Pembangunan Bendungan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau	2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	
				Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
				Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
				Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
				Normalisasi/Restorasi Sungai
				Peningkatan Kanal Banjir
				Peningkatan Tanggul Sungai
				Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
				Pembangunan Unit Air Baku
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
				Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
				Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Bendung Irigasi
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Bendung Irigasi
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
		Peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air. 2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Bendung Irigasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
				Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Bendung Irigasi
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
		Pengelolaan risiko bencana daya rusak air	Pengelolaan risiko daya rusak air.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
				Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
				Pembangunan Kanal Banjir
				Rehabilitasi Kanal Banjir
				Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
				Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
				Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
				Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
		Penyempurnaan tata kelola infrastruktur	Penyempurnaan tata kelola	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir	infrastruktur sumber daya air	untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Pembangunan Unit Air Baku
				Pembangunan Tanggul Sungai
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
				Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi Unit Air Baku
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
		Revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air. 2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	Pembangunan Tanggul Sungai
				Pembangunan Kanal Banjir
				Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir
				Rehabilitasi Tanggul Sungai
				Rehabilitasi Kanal Banjir
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim	Penguatan industri halal	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Pameran Dagang Nasional
				Pameran Dagang Lokal
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
		Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pameran Dagang Nasional
		Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal	Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah (UMKM) halal	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
		Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah	Penguatan keuangan syariah	
		Penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari	Penguatan dana sosial syariah	

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		badan usaha milik negara dan swasta nasional		
		Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat	Digitalisasi sektor ekonomi	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
				Penyusunan Konten
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro	Digitalisasi sektor ekonomi	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
		Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing.	● Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan (*AI, blockchain, metaverse*) ● Digitalisasi sektor ekonomi	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.	● Penguatan SDM digital. ● Digitalisasi sektor strategis. ● Digitalisasi sektor ekonomi	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
		Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*)	Perluasan implementasi teknologi bersih	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan ekonomi sirkular industri	● Penerapan efisiensi sumber daya. ● Penguatan ekosistem daur ulang	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan efisiensi sumber daya	Penerapan efisiensi sumber daya	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan produk ramah	Pengembangan produk ramah	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		lingkungan.	lingkungan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material.	Penerapan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
		Menguatkan ekosistem daur ulang.	Penguatan ekosistem daur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
		Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber	Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
				Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		Meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis *reduce, reuse,* dan *recycle*	Penanganan sampah melalui pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pengolahan sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			reduce, reuse, recycle serta fasilitas pangolin lainnya	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		Optimalisasi tempat pengolahan sampah	Penyediaan, optimalisasi,	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*	rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur persampahan, termasuk konservasi tempat pemrosesan akhir dan *landfill mining*	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		Perbaikan tata kelola persampahan	● Penyadartahuan dan pemicuan perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama peningkatan permintaan, partisipasi, serta kemauan untuk membayar Retribusi. ● Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
		Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan)	● Peningkatan produktivitas hasil hutan. ● Penguatan pengelolaan hutan lestari.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		Mengelola sumber daya genetik	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pelaksanaan remediasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif	Pengendalian spesies asing invasif	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
		Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		Penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati	Penguatan data, informasi, dan IPTEK keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan PrasaranaKeanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan	Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar dilakukan secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		Pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		Pengembangan pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*)	Pengembangan pengelolaan keamanan hayati *(biosafety)*	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya		

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya		
		Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar,langka, dan terancam punah		
		Merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema *public private people partnership* dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat		
		Menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.		Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Analisis denda terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		Meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau	Penyediaan pasokan air berkelanjutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan air limbah	Penguatan tata kelola penyelenggaraan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD)
		Meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/ kota di Indonesia	Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kab/kota di Indonesia	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut	Pengelolaan risiko daya rusak air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan kualitas lahan	Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
		Menurunkan laju deforestasi		
		Meningkatkan kualitas ekosistem gambut		
		Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		Menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Hak MHA terkait dengan PPLH
				Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
		Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif	Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan	Penurunan laju deforestasi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan	Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
		Melakukan pembangunan rendah karbon	Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
		Efisiensi energi	Efisiensi energi	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
				Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
		Peningkatan transportasi berkelanjutan	Peningkatan transportasi berkelanjutan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemenuhan fasilitas PelayananAngkutan pelabuhan Pengumpan lokal
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
				Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
				Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
		Peningkatan cadangan karbon	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Pencegahan pengurangan cadangan karbon	Peningkatan pencegahan pengurangan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			karbon	
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
		Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
		Pengembangan industri hijau	Pengembangan industri hijau	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		Pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular	● Penerapan efisiensi sumber daya. ● Penguatan ekosistem daur ulang	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target *net zero emission* dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau	Pengembangan industri hijau	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				oordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang *carbon trade*		
		Melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (c*oal-fired power plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan		
		Menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi *renewable energy* sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
				Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (*carbon tax/carbon trading*, dst) di daerah
		Mendorong adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle*) untuk transportasi umum	Peningkatan transportasi berkelanjutan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing	Pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau	Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.	Penguatan peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
		Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance* dan *good neighbor policy*	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
		Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir	Rehabilitasi ekosistem karbon biru – mangrove dan lamun	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
		Mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi	Pengembangan industri perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				(UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala Keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
		Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait *science, technology, engineering, art, and mathematics*, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global	Penguatan data, informasi, dan IPTEK. keanekaragaman hayati	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala Keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Pembangunan Jalan
				Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Rehabilitasi Jembatan
		Menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu.	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Bermotor
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
		Menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi.	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan kabupaten/kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/ kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah.		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
		Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran.	Integrasi layanan usaha	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Perluasan Kesempatan Kerja
		Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi.	Formalisasi usaha serta standardisasi dan sertifikasi produk	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
				Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat.		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
		Mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan.	Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
		Melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha.	Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
		Mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global.		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok
				Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan *start-up*.	● Peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis Koperasi. ● Pengembangan koperasi sektor produksi skala besar	Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
				Peningkatan Produktivitas, Nilai ambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		Mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.	Pengembangan dan pemeliharaan basis data tunggal koperasi dan UMKM	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
		Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas.	Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif.	Pengembangan Sistem Pemasaran
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
		Integrasi data ekonomi kreatif	Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi kreatif
				Perlindungan Hasil Kreativitas
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		Percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis	● Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts. ● Penguatan ekosistem seni, budaya, kerajinan. ● Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi ● dan gim.	Perlindungan Hasil Kreativitas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka	● Penguatan ekosistem kuliner.	
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
		Perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia.		Pengembangan Sistem Pemasaran
				Penyediaan Infrastruktur
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global.	● Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi. ● Peningkatan kapasitas sisi pasokan industri Digital.	Penyediaan Infrastruktur

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			● Digitalisasi sektor ekonomi ● Digitalisasi sektor strategis.	
				Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
				Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif
				Penyusunan Skema Insentif Daerah
		Penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum).		Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
		Mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia.		Pengembangan Pendidikan
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)
				Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
				Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
				Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global.		Penyusunan Skema Insentif Daerah
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Luar Negeri
		Perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata.		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger
		Menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata.		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
		Menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata.		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan.		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana.		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
		Pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*)	Perluasan akses dan inovasi pembiayaan.	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
				Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
		Memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		multipihak.		
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi *bankable.*		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
		Menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif.		Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
				Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi
				Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
		Memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dengan melakukan penguatan layanan 1 tahun pra sekolah (TK/RA/BA) dan percepatan wajib belajar 12 tahun yang berfokus pada jenjang pendidikan yang masih membutuhkan akselerasi pelaksanaan wajib belajar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
				Pemeliharaan Mebel Sekolah
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
				Penyediaan infrastruktur TIK
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Penataan Ruang/Sudut Baca
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang.	Penguatan pembelajaran berbasis teknologi	Penyediaan infrastruktur TIK

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			digital	
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Laboratorium
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
				Pembangunan Asrama Sekolah
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Pembangunan Fasilitas Parkir
				Pembangunan Kantin Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Pengadaan Mebel PAUD
				Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
				Pengadaan Perlengkapan PAUD
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
		Revitalisasi pendidikan nonformal.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
				Pengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
		Penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI).		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Nonformal/Kesetaraan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Penguatan tata kelola pendidikan.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kot
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif.		Perluasan Kesempatan Kerja
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
				Job Fair/Bursa Kerja
				Pelayanan antar Kerja
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
		Memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif	Mobilitas dan pelindungan tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Perluasan Kesempatan Kerja
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Job Fair/Bursa Kerja
				Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
		Meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		Melaksanakan *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan *low-skilled* berbasis pembelajaran sepanjang hayat.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Memfasilitasi transisi *school to work* dan integrasi *soft skills* bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		.		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
		Melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	Pengembangan budaya literasi dan peningkatan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
				Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
		Perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.		
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima.	Perluasan cakupan bantuan pendidikan prestasi dan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar sampai jenjang pendidikan tinggi, termasuk beasiswa atlet dan seniman	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global.	Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter peserta didik.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
		Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional.	Pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya.	
		Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya.	Penguatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis industri dan keunggulan wilayah	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembangunan Ruang Praktik Siswa
				Pembangunan Ruang Laboratorium
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
				Pembangunan Asrama Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga	Penataan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi dan program studi untuk peningkatan kualitas dan	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics.*	penguatan bidang STEAM.	
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.	Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		Memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi.	Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya.	Pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
		Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.	Pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
		Meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio.	Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		Menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing	Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.		
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (*universal health coverage*) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting.	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin).	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain).	Pengendalian penyakit tuberkulosis. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			kesehatan jiwa Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria).	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Investasi pelayanan kesehatan primer. Penguatan layanan nggulan dan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah sulit akses	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		Memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap.		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Layanan Kesehatan
				Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
		Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah.		
		Memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas.		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan	
		Memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman *stunting* (gizi buruk).	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
		Memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
		Membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (*family medicine*).		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak.		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Mendorong promosi produk pangan olahan		Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi		
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
				Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran,		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan		
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
		Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.	Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal
				Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
		Penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan.	Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Baduta/Balita)
		Penyediaan fasilitas pendukung keluarga.	Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga. Penguatan keluarga tunggal, pasca perceraian, dan pekerja migran untuk mengoptimalkan fungsi pengasuhan keluarga	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
				Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
		Penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan.	Pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
		Pemenuhan hak anak secara universal.	Penyediaan layanan yang ramah anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara universal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak.	Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan epemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
		Penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko.	Penguatan resiliensi dan peningkatan partisipasi anak secara bermakna	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
				koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
		Penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan.	Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi.	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan epemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			ketenagakerjaan.	
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan.	Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di proses pembangunan	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		Penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia.	Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut Usia.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		Mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		Memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
				Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
		Mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
				Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
		Membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		disabilitas.	penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	
				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
		Memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk *stereotype*, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Mengembangkan program siswa olahragawan (*student athlete program*) secara berjenjang dan berkelanjutan.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
		Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional.	Peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi. Peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA. Peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif.	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.	Peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru. Peningkatan konektivitas integrasi *hinterland* dengan simpul utama	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
				Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa.		
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa.	Transformasi dan pemberdayaan ekonomi perdesaan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
		Pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya		Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota		
		.		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
				Mendukung Pembangunan Puskesmas
				Pembangunan Tanggul Sungai
				Normalisasi/Restorasi Sungai
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				Optimalisasi TPA/TPST/SPA
				Pembangunan TPA/TPST/SPA
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan.	Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan perdesaan	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
				Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		Peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa		Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa.	Penguatan tata kelola, keuangan, dan pendampingan desa adaptif.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
				Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
		.		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan).		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa		Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
		Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan		
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		Pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga	Transformasi pembangunan daerah lambat tumbuh	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.		
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi.	Fasilitasi pembangunan rumah baru layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara terpadu.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		.		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		.		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
		Pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta		Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro		
				Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen
		Pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation*.		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	Mendukung Basis Data Terpadu untuk pemberantasan kemiskinan melalui Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara Berkesinambungan.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		.		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial
		Penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		Peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar,dan Kartu Indonesia Sehat.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		Penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain.	Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain	Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi	Penyediaan Makanan
				Penyediaan Sandang
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Layanan Kedaruratan
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan.		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar		Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		.		
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin *independensi*, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.	Pengelolaan dan audit keuangan partai politik.	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan Data	Digitalisasi pelayanan publik.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu.		
				Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
				Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
				Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
				Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
		Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.		Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
				Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
				Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai *think-tank* dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi.		
		Meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan		
		Menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.		
		Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik.		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan		

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.		
		Meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		Mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.		
		Penguatan budaya hukum		Fasilitasi Bantuan Hukum
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft competency* Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
				Kerjasama Pengawasan Internal
		Memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung.		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				dan Pemberantasan Korupsi
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		Mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *future jobs* di era digital.		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		Memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total *reward* dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara.	Penerapan *total reward*	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		.		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total *reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem	Penerapan *total reward*	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara.		
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Pengelolaan *Assessment Center*
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan *talent pool* dan mobilitas talenta		Pembinaan Disiplin ASN
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
				Pengelolaan Promosi ASN
				Pengelolaan Mutasi ASN
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		Memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
				Pengelolaan Data Kepegawaian

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
		Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
		.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
		Transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik, melalui menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi	Digitalisasi pelayanan publik.	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; digitalisasi pelayanan publik; Pengembangan talenta digital pelayanan publik; penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan perluasan akses pelayanan publik.		
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		.		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
		.		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
		Reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi belanja negara, dan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan Perpajakan. Optimlaisasi *local taxing power*. Peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat. Optimalisasi kualitas belanja TKD. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan inovatif dan berkelanjutan	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
				Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah.	Kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
		Meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba.		
		Meningkatkan kemampuan *surveillance* dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba		
		Menutup semua akses ke situs perjudian *online.*	Penutupan akses ke situs perjudian *online*	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		.		
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi.		Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		Meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.		
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa.	Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermaslahat.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini.	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung
				Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		Mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal.	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
		Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.	Peningkatan kerukunan umat beragama.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan.	Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermaslahat.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan.	Peningkatan kerukunan umat beragama.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal.	Penjaminan produk halal.	Pengembangan Usaha Mikro
		Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman.	• Peningkatan kerukunan umat beragama. • Transformasi layanan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			penyelenggaraan ibadah haji.	
		Merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata.	● Peningkatan bimbingan keagamaan dan bimbingan perkawinan. ● Revitalisasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan.	Peningkatan peran lembaga agama dan keagamaan dalam layanan keagamaan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.	Pengembangan dana sosial keagamaan untuk mendukung program pembangunan.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
		Meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilainilai luhur bangsa bagi generasi muda.	Pengelolaan terpadu cagar budaya.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan,		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia		
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		.		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		Mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia.	Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara.	Pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya.	Pengembangan produk dan jasa berbasis seni budaya.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		Mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		Mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas.	Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		.		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila.	Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan.	Pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Pemperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.	Pelindungan hutan adat dan tanah ulayat serta pemberdayaan asyarakat dan komunitas adat.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia.	Pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.	Transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota
				Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi
		Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana.	Melaksanakan peningkatan peran lembaga dan kapasitas sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Memperkuat sistem deteksi bencana (*early warning system*) dengan penerapan teknologi terkini.	Membangun sistem peringatan dini multi ancaman bahaya dan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana terpadu.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi	Memulihkan pelayanan dasar bidang fisik, sosial, dan ekonomi	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.	di daerah terdampak bencana.	
		Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.	Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis kewilayahan.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana.		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana.		Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
		Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana.		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
		Pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan	Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		bencana.	kewilayahan.	
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
		Mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana	Meningkatkan layanan literasi dan edukasi kebencanaan berbasis masyarakat, termasuk melalui desa tangguh bencana.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
		Mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim.	● Meningkatkan ketahanan pesisir dan laut. ● Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air. ● Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
		Meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.	● Melakukan peningkatan keandalan dan kebermanfaatan infrastruktur tahan bencana, termasuk penguatan perijinan bangunan gedung. ● Penetapan dan penyelenggaraan rencana ● aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RAK	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			LLAJ) secara komprehensif dan sinergis. ● Peningkatan penanganan daerah rawan kecelakaan (DRK). ● Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi udara, laut, dan darat	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 4.40
Dukungan Program Prioritas Daerah (RKPD) Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2025
terhadap Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing				
	1.1 SUMBAR Sehat dan Cerdas				
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	
		1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	
		1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
		1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	
			1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	
			1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	
			1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekola	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	
			1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	
			1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
			1.01.02.2.02.0036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	
			1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	
			1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	
			1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
			1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD Meningkatnya APK PAUD	
			1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	
			1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
			1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	
			1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kelulusan Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
			1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
			1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	
			1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	
			1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Cakupan Desa UCI Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah Penduduk Akreditasi Rumah Sakit Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
			1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	
			1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	
			1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	
			1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat,	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah *Public Safety Center* (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	
			1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	
			1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	
			1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rata-rata lama pasien dirawat	Dinas Kesehatan/RSUD
			1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	
			2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	
			2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	
			5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Kesesuaian Kajian Inovasi dan Penelitian Sesuai Denga Kebutuhan Perencanaan	
			5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai dengan kebutuhan Perencanaan	
			5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Partisipasi pada raimuna dan jambore nasional. 2. Terbayarnya operasional organisasi kepemudaan. 3. Terselenggarannya jamboree pramuka tingkat kabupaten 4. Terselenggarannya kursus 5. gerakan kepramukaan 6. Terselenggaranya kegiatan kepramukaan dan kepemudaan.	
			2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	
			2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya kompetisi sepak bola allstar di Tuapejat. 2. Terselenggaranya kompetisi sepak bola (Bupati Cup). 3. Terselenggaranya kompetisi surfing internasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 4. Terselenggaranya kompetisi surfing tingat kabupaten.	
			2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
			2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	
			2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai SNP	
			2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	
			2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	
			2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	
			2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	
			2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	
			2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	
			2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar	
			2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	
			2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daftar arsip in-aktif yang telah dibuat daftar	
			2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	
			2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten. 2. Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten.	
			2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip sesuai NSPK	
			2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah				
	2.1 SUMBAR Religius dan Berbudaya				
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Sertifikasi Tenaga Permuseuman	
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	
		2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	
		2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Perlindungan Masyarakat
			8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Menngkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya	
			8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	
			8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah. 2. Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Sekretariat Daerah
			4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan	Semua Kecamatan
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	
			7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang tertangani	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
		2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terwujudnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
		2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
		2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		
		2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				
	3.1 SUMBAR Sejahtera				
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Jaringan Irigasi Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya cakupan layanan unit air baku	
		1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	
			1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	
			1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	
			2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Indek Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	
			2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	
			2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan	
			2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersedianya target konsumsi pangan perkapita/tahun	
			2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
			3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Babi, Cengkeh keladi, kelapa, Produktivitas Pertanian dan Peternakan (pisang) Sagu, Sapi, Unggas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) yang dikelola	
			3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	
			3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mutu Produk Perternakan	
			3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya hijauan pakan ternak	
			3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Lain		
			3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dangan Utilitas Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lain per hektar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	
			3.27.03.2.01.0017	Penyusunan *Action Plan* Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	
			3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang diadakan	
			3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
			3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/kejadian bencana pertanian yang ditangani	
			3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	
			3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	
			3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat	Jumlah Layanan dalam Rangka	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Pelelangan Ikan (TPI)	Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
		3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Usaha Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	
		3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Usaha Mikro dan Kecil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	
		3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	
			4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio elektifikasi Cakupan desa yang terakses listrik	
			4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	
			4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	Sekretariat Daerah
			2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
			2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Persentase Dokumen peta Potensi dan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kabupaten/Kota	peluang Investasi yang tersusun	
			2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	
			2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Industri tumbuh yang mengunakan produk dalam negeri	
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, *marketplace*, perhotelan dan jasa akomodasi	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun	
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
4	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital				

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	4.1 SUMBAR Sejahtera				
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Koperasi Sehat	
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan pelaku usaha mikro	
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya daya saing dan pertumbuhan koperasi dalam perekonomian	
		2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Kabupaten/Kota	
			2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Laporan Jumlah UMKM	
			2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	
			2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya fasilitasi UMKM	
			2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	
			3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP toko swalayan) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Meningkatnya izin usaha bagi toko/swalayan	
			3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Meningkatnya pengawasan izin usaha minuman beralkohol	
			3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya retribusi pasar	
			3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola perdagangan yang dibina	
			3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	
			3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan	
			3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	
			3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan produk dalam negeri	
			3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	
			3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya izin usaha industri	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	
			2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo. 2. Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah	
			2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya nilai indeks SPBE Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Eeletronik	
			2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
			2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
			2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
		2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	
		2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	
		2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	
		2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	
		2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan				
	5.1 SUMBAR Sejahtera				
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama Kunjungan Wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1. Berkembangnya desa muntei menjadi kampung wisata adat dan budaya. 2. Berkembangnya pengelolaan ekowisata di Desa Matotonan. Berkembangnya ekowisata di Desa Saibi Samukop Berkembanya ekowisata di Desa Madobag. 3. Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan perumahan Mapadegat menjadi perumahan bermotif adat dan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				menjadi rumah adat. 4. Tersedianya dokumen perencanaan aksebilitas dan amenitas kawasan manggrove Tuapejat. 5. Tersedianya dokumen perencanaanaksebilitas dan amenitas wisata air terjun Mapetri Sioban dan wisata Mapadegat. 6. Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas toilet dan kamar mandi dan kamar tidur di tempat wisata Mapadegat, Katiet, Madobag dan Muntei.	
		3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas sound sistem di lokasi wisata mapadegat	
		3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		3.26.02.2.02.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya jumlah dan kualitas toilet dan kamar tidur dikampung wisata Muntei, Mapadegat, Madobag dan Katiet. 2. Persentase Kawasan Destinasi yang Telah dimanfaatkan. 3. Terbangunnya aksebilitas dan amenitas kawasan manggrove Tuapejat. 4. Terbangunnya aksebilitas dan amenitas pariwisata air terjun Mapetri desa Sioban. 5. Terbangunnya dermaga jetty (Katiet, Tuapejat,).	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				6. Terbangunnya fasilitas parkir di wisata Mapadegat. 7. Terbangunnya fasilitas umum dikawasan objek wisata. 8. Terbangunnya fasilitas umum wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet 9. Terbangunnya gapura/ identitas gerbang di lokasi 3M1K. 10. Terbangunnya gerbang retribusi kawasan wisata Mapadegat. 11. Terbangunnya jalur pejalan kaki/ jalan setapak dan pendestrian, broadwalk dikawasan wisata (Muntei, Madobag, Jati dan Katiet). 12. Terbangunnya landmark kawasan wisata dusun Muntei. 13. Terbangunnya landmark Tuapejat. 14. Terbangunnya pagar pembatas wisata Mapadegat. 15. Terbangunnya pangggung/ pentas pertunjukkan di lokasi wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet. 16. Terbangunnya pos pengawas pantai di Mapadegt, Katiet dan Jati. 17. Terbangunnya Pos TIC di kawasan wisata Mapadegat 18. Terbangunnya sarana dan prasarana wisata di Mapadegat. 19. Terbangunnya talud pantai di Mapadegat dan Katiet. 20. Terbangunnya tempat berjualan bagi pedagang kaki lima bidang kuliner dan penjual barang kerajinan tangan dikawasan wisata Mapadegat.	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					21. Terbentuknya satgas kebersihan pariwisata (Tuapejat). 22. Terfasilitasinya jumlah sapras di kawasan wisata (Madobag, Matotonan, Saibi). 23. Terlatihnya tenaga *bodyguard* pengawas Pantai (Jati, Mapadegat, Katiet, Goisooinan). 24. Terlengkapinya fasilitas mobiler, peralatan dan perlengkapan pendukung TIC Mapadegat. 25. Terlengkapinya sarana perlengkapan homestay Mapadegat. 26. Terpeliharanya bangunan pos pengawas Pantai. 27. Terpeliharanya pos pengawasan Pantai. 28. Tersedianya gazebo dilokasi wisata Mapadegat. 29. Tersedianya moringbuoi di Malakopa, Silabu, Tuapejat dan Katiet. 30. Terselenggaranya monev destinasi pariwisata. 31. Terselenggaranya Rapat koordinasi bidang pengembangan kelembagaan dan destinasi. 32. Tertatanya DAS sungai Kulukubuk. 33. Tertatanya halaman homestay Katiet. 34. Tertatanya kawasan wisata Mapadegat.	
			3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Domestik Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					PAD sektor pariwisata	
			3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah partisipasi event luar negeri meningkat. 2. Jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikasi meningkat. 3. Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri. 4. Jumlah Terfasilitasinya promosi dalam negeri. 5. Meningkatnya jumlah promosi pariwisata melalui media terbuatnya film pariwisata. 6. Terfaslitasinya Jumlah kunjunan-kunjungan kepariwisataan. 7. Tersediannya profil statistik dan data kepariwisataan Tersedianya billboard pemasaran. 8. Tersedianya data dan informasi pariwisata ditingkat prov dan luar negeri. 9. Tersedianya kalender event Tersedianya kegiatan pengawasan wisata Bahari. 10.Tersedianya operasional bagi pos pengawas wisata bahari dan TIC. 11.Terselenggaranya event festival masyarakat tradisional di Buttui. 12.Terselenggaranya event festival muanggau Goisooinan. 13.Terselenggaranya event festival mujarik di Goisooinan. 14.Terselenggaranya event festival pembuatan sampan di Jati. 15.Terselenggaranya event festival tato Mentawai di Mapadegat. 16.Terselenggaranya festival kuliner tradisional di mapadegat Terselenggaranya	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					festival pesona Mentawai di Tuapejat	
			3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1. Meningkatnya jumlah orang/masyarakat yang berpartisipasi dalam kemitraan pariwisata. 2. Meningkatnya jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Meningkatnya kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis). 4. Meningkatnya kapasitas tenaga kerja bidang ekonomi kreatif khusus untuk kuliner. 5. Terfasilitasinya pengembangan SDM dibidang ekonomi kreatif. 6. Terfasilitasinya proses kreasi produksi konsumsi dan konservasi wisata ekonomi kreatif.	
			3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	
			3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1. Meningkatnya jumlah kapasitas tenaga kerajinan tangan berbahan material lokal 2. Terfasilitasinya pembentukan kelembagaan dan tata kelola wisata berbasis masyarakat, Tersedianya dokumen kajian pembuatan kain batik motif Mentawai	
			3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
			4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Rasio elektifikasi Cakupan desa yang terakses listrik. 2. Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti. 3. Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen. 4. Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu.	Sekretariat Daerah
			4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik. 2. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik. 3. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik. 4. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Utamanya Listrik	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1. Persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen. 2. Persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen. 3. Persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan				
	6.1 SUMBAR Berkeadilan				
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata persentase lingkungan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	
		1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	
			1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	
			1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	
			1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana	
			1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	"Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha"	
			1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	
			1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
			1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	
			1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
			1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
			1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM	
			1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	
			1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPA	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	
			1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	
			1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	
			1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan system pengelolaan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	
			1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			(SPALD)	yang Dikembangkan Kapasitasnya	
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Berkurangnya titik genangan air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan perkotaan yang dilengkapi drainase lingkungan	
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
		1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kawasan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	
		1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	
		1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan
			2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
			2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
			2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	
			1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	
			1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	
			1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	
			1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	
			1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Jaringan Irigasi Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnyadi Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	
			1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	
			1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	
			1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					dengan kondisi baik dan sedang	
			1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
			1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	
			1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	
			1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	
			1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	
			1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	
			1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	
			1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	
			2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan
			2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
			2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
			2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	
			2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan
			2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
			2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
			2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio elektifikasi Cakupan desa yang terakses listrik	
			4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	
			4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	Sekretariat Daerah
			2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terwujudnya Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	
			2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	
			2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	
			2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	
			2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
			1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan	
			1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok	Jumlah Orang yang Mendapatkan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	
			1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Bencana tertangani 2. Persentase Kelompok masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Siap Menghadapi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	
			1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	
			1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
			1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	
			1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	
			1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Jumlah warga Negara termasuk kelompok	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Bencana Kabupaten/Kota	rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	
			1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	
			1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban. 2. Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	
			1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	
			1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	
			1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	
			1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaranhutan dan lahan	
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas				
	7.1 SUMBAR Berkeadilan				
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	
			2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
			3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Industri tumbuh yang mengunakan produk dalam negeri	
			3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, *marketplace*,	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					perhotelan dan jasa akomodasi	
			2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
			2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun	
			2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
			2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
			4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang Mengikuti ULP tepat waktu	
			4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Semua Kecamatan
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya pembinaan Penumbuhan keluarga yang Berkarakter Melalui pengamalan Pancasila Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Desa	
			2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	
			2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	
			2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
			2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	
			2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	
			5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal Akses publik terhadap informasi keuangan daerah. 2. Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	Badan Keuangan Daerah
			5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Pedoman Pelaksanaan APBD 2. Persentase Tahapan Penyusunan Rencana Penganggaran Tepat Waktu	
			5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	
			5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	
			5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah [deleted] Syarat Penyaluran DAU, DAK dan DID	
			5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Baik	
			5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
			5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	
			5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Baik Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan Baik	
			5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	terpenuhinya dokumen kependudukan pendaftaran penduduk (KK,KTP,KIA,ket Pindah datang)	
			2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	
			2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	terpenuhinya dokumen Pencatatan Sipil (Akta lahir, akta kawin,akta cerai,akta kematian)	
			2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	
			2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid dan update	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya data profile kependudukan	
			2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	
			1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penurunan PMKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
						Perlindungan Anak
			1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan	
			1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dilatih	
			1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar pasnti sosial yang mendapat bantuan	
			1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase PMKS menerima jaminan sosial 2. Persentase data fakir miskin yang valid	
			1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelembagaan PUG	
			2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	
			2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	
			2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/perangkat daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	
			2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA	
			2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	
			2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	
			2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	
			2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	
			2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Penguatan dan pengembangan tingkat daerah	
			2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	
			2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pengendalian Penduduk yang tertangani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
			2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonforma	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	
			2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
			2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
			2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
			2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	
			2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana yang tertangani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	
			2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
			2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).	
			2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	
			2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	
			2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
			2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode 2. Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
			2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
			2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
			2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	
			2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
			2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
			2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	
			2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
			2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	
			2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	
			2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	
			2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	
			2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berkurangnya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaranhutan dan lahan	
			1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	
			1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
			2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berkurangnya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dana hibah banpol yang dibayarkan dan tersalurkan danan hibah pemilu	
			8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	
			8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas aktif	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terawasi	
			8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	
			2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	
			2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
				Kabupaten/Kota		
			8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
			8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
			4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah 2. Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Sekretariat Daerah
			4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah. 2. Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 2. Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik 3. Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	Badan Keuangan Daerah
			5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah. 2. Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Sekretariat Daerah
			4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	
			4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	
			4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	
			4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna Persentase	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Ranperda yang disetujui 2. Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	
			4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukan perda dan peraturan DPRD	
			4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	
			4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	
			4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
			4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Level Kapabilitas Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP 2. Meningkatnya Zona Integritas	Inspektorat
			6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1. Meningkatnya kinerja SKPD yang dilakukan Pendampingan. 2. Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi. 3. Terlaksananya Zona Integritas	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
			5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
			5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	
			5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		
			5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	
			5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		
			5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
			5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	
			5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
			5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	
			5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		
			5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	
			5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
			5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2. Level Kapabilitas Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP 3. Meningkatnya Zona Integritas	
			6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	4. Meningkatnya kinerja SKPD yang dilakukan Pendampingan. 5. Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi. 6. Terlaksananya Zona Integritas	
			6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan bdan Pelaporan PelayananTugas Perangkat Daerah	Seluruh OPD
			X.XX.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			X.XX.1.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu 2. Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Monitoring Pembangunan	
			5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
			6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAANPENGAWASAN	1. Persentase Tindak Lanjut Temuan 2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Inspektorat
			6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pedoman bagi Kepala SKPD, ASN, dan Aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terlaksananya Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan	Semua Kecamatan
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Penugasan Kepala daerah	
			7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya suasana aman dan tentram bagi masyarakat	
			1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan hasil reses dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh Bappeda dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Tabel 4.41
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Mesin boat 8PK Kelompok Nelayan Tulu Kabujainu	Dusun Mangka Ulu Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	14	unit	421.890.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
2	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Mesin boat 4 PK Kelompok Nelayan Riuriu Bujai	Dusun Palukluk Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	unit	234.300.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
3	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Mesin boat 8 PK Kelompok Nelayan Riuriu Ake	Dusun Surat Aban Jago Laggai Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	301.350.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
4	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Mesin potong rumput merek *sthil* Kelompok Tani Keret Baga	Dusun Saraleleu Beleraksok Desa Malakopa Kacamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	-	20	unit	90.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
5	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Mesin senso/alat potong kayu merek sthil Kelompok Tani Karonan Sinula	Dusun Kinumbuk Desa Bulasat Kecamatan Pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	21	unit	178.500.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
6	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bibit padi sebanyak 1 ton tani sawah desa malakopa kecamatan pagai Selatan dengan biaya 100.000.000,-	Malakopa Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	ton	25.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
7	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Mesin potong kayu merek sthil Kelompok Tani Toro Gerat	Dusun Purupugat Beleraksok desa Malakopa Kecamatan Pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20	unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
8	Nelsen Sakerebau, S.	Perbaikan rumah tidak	Pembangunan Rumah	Dusun Pasibbuat, Kaute,	DINAS	40	unit	500.000.000,00	Perbaikan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Th	layak huni	Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat yang berpendapatan Rendah Sebanyak 20 Unit	Bukku Monga dan Muara Taikako Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rumah Tidak Layak Huni
9	Nelsen Sakerebau, S. Th	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat yang Berpendapatan Rendah sebanyak 20 unit	Dusun Masabuk dan Dusun Sikakap Tengah Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40	unit	500.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
10	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pembukaan Lahan Pertanian dan Pengadaan Bibit Pinang	Dusun Seay Lama Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5000	Batang	125.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
11	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Bantuan Pengadaan Meteran Listrik bagi Masyarakat berpendapatan rendah sebanyak 20 unit	Dusun Bulasat, Bake, Asahan dan Kinumbuk Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	20	Unit Meteran	60.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
12	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan Kelompok Tani OMET	Dusun Mangaungau Desa Matobe Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	11	Ekor	40.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
13	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan Mesin Boat 8 PK untuk kelompok Nelayan SOROT POI sebanyak 10 unit	Dusun Bosua Girau Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	301.350.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
14	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Penagaan bantuan alat tangkap nelayan mesin boat 15 PK untuk kelompok Nelayan	Dusun Seay Baru Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	-	10	Unit	340.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			POLAGA INDAH sebanyak 10 unit						
15	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan mesin boat 8 PK untuk kelompok nelayan SIKEREI sebanyak 10 unit	Dusun Sikakap Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	301.350.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
16	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan mesin boat 8 PK untuk kelompok nelayan PADDARAI SIJAOK sebanyak 10 unit	Dusun Sikakap Barat Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	-	10	Unit	301.350.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
17	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	BANTUAN PENGADAAN MESIN BOAT 4 PK UNTUK KELOMPOK NELAYAN TUNANG SIMAGEREBAT DUSUN BATSAGAI DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN	DUSUN BATSAGAI DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	213.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
18	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	BATUAN MESIN PENGADAAN MESIN BOAT 4 PK UNTUK KELOMPOK NELAYAN PURIRINGAN DUSUN BUBUAKAT DESA SAUMANGANYAK KECAMATAN PAGAI UTARA	DUSUN PASAPUAT DESA SAUMANGANYAK KECAMATAN PAGAI UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	-	10	UNIT	213.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
19	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	PENGADAAN BANTUAN MESIN HEALER MINI UNTUK KELOMPOK TANI KARONANTA DUSUN BUBUGET DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI	DUSUN BUBUGET DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	UNIT	65.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			SELATAN						
20	Juni Arman, S. IP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin tempel 4pk Kelompok Nelayan Taiobaket Mongan Bosua 10 UNIT	Desa Bosua, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	213.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
21	Juni Arman, S. IP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan mesin tempel 15pk Kelompok Nelayan roroi baga matutptuman 10 unit	Desa Matuptuman, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	311.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
22	Juni Arman, S. IP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan ternak babi di Kecamatan sipora utara dan Kecamatan Sipora selatan 120 ekor	Kecematan Sipora utara dan Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	64	Ekor	240.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
23	Juni Arman, S. IP	Fasilitasi kemitraan kelembagaan/usaha, bantuan pendanaan/pembiayaan	Bantuan Usaha perbengkelan	Kecematan Sipora Selatan dan Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	paket	150.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
24	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian SHANSOW KECIL Merek STHILL untuk Kelompok Tani TIRIK BERE	Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	UNIT	85.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
25	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian SHANSOW KECIL Merek STHILL untuk Kelompok Tani BARAMBANG	Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	-	15	UNIT	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
26	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian	Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut	-	15	UNIT	-	Pendampingan Penggunaan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		pangan ternak, peralatan pertanian	SHANSOW KECIL Merek STHILL untuk Kelompok Tani SIMAKATUKA	Utara, Kab. Kepulauan Mentawai					Sarana Pendukung Pertanian
27	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan peralatan pertanian SHANSOW KECIL untuk kelompok TANI TRI MASIRPA	Dusun Pilionan Desa Satboyak Kec Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	16	UNIT	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
28	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4PK Kelompok Nelayan Lebak Koat 10 unit	Dusun MongaDesa Mara Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	234.300.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
29	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan peralatan pertanian SHANSOW KECIL Merek STHILL untuk kelompok TANI NGENA AKENEN	Dusun Malancan Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	UNIT	85.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
30	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan peralatan pertanian SHANSOW KECIL Merek STHILL untuk kelompok TANI OMBAGA	Dusun Malancan Desa Malancan Kec Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	16	UNIT	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
31	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4pk Kelompok Nelayan KERET BAGA10 Unit	Dusun Mongan Bosua Desa Bosua Kecematan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	234.300.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
32	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian SHANSOW KECIL Merek STHILL untuk kelompok TANI KEREK BAGA	Dusun Malancan Desa Malancan Kec. Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	16	UNIT	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
33	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	Pengadaan bantuan peralatan pertanian	Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan Kec Siberut	-	12	UNIT	-	Pendampingan Penggunaan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		pangan ternak, peralatan pertanian	SHANSOW KECIL Merek STHILL untuk kelompok TANI SIMALETCEI	Utara, Kab. Kepulauan Mentawai					Sarana Pendukung Pertanian
34	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4pk Kelompok Nelayan Simakerek 8 unit	Dusun Usut ngaik, Desa Matobe Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	8	Unit	187.944.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
35	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4 PK Kelompok Nelayan Rop Parop 2 unit	Desa Matobe Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	2	Unit	46.986.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
36	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Pembangunan Jalan Pertanian kelompok TANI SIBATCAUK ERUK	Dusun Mongan Poula Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	240.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
37	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4pk Kelompok Nelayan Batuet Koat 2 unit	Dusun Siabau Desa Sioban Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	2	Unit	46.986.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
38	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan Tambahan Penerangan Panel Tenaga Surya	Desa Makalo dan Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	-	100	Unit Meteran	300.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
39	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit Babi Kelompok Tani Moile Moile 35 ekor	Dusun Mongan Bosua Desa Bosua Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	22	Ekor	77.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
40	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit Babi Kelompok Ternak Siobak Laggai 30 Ekor	Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	18	Ekor	66.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Kabupaten/Kota Lain
41	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Mesin Ramba Kelompok Purimanuajat 15 unit	Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5	Unit	22.500.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
42	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan peralatan pertanian SHANSOW KECIL Merek STHILL untuk kelompok TANI PASIKELI	Dusun Terekan Hulu Desa Malancan Kec Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13	UNIT	110.500.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
43	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit Babi Kelompok Ternak Tauraunia Betina 16 ekor dan jantan 4 ekor	Desa Matobe Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12	Rupiah	44.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
44	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Mesin Pengupas Pinang Kelompok BERSAUDARA 1 unit	Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kecematan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	-	2	Unit	45.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
45	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit itik petelur Kelompok Ternak Maleppet 500 ekor	Dusun Bukit Subur Desa Bukit Pamewa Sipora utara, Kab. Kepulauan Mentawai	-	500	Ekor	50.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
46	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit Babi Kelompok Tani Simagirau 14 ekor	Dusun Berkat Desa Tuapejat Kecematan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8	Ekor	30.800.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
47	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan peralatan	Bantuan Motor pada	Desa Sioban Kecematabn	-	2400000	Rupiah	200.000.000,00	Pengembangan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		alat/mesin industri kecil	Kelompok UMKM KILIBET BAGA	Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai		00			Usaha Mikro
48	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	PENGADAAN BATUAN MESIN BOAT 4 PK UNTUK KELOMPOK NELAYAN KEYAMAN DUSUN PASIBUAT DESA MUARA TAIKAKO KECAMATAN SIKAKAP	DUSUN PASIBUAT DESA MUARA TAIKAKO KECAMATAN SIKAKAP, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	213.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
49	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Tengki semprot untuk kelompok TANI WANITA RONNAKEN	Dusun Terekan Hulu Desa Malancan Kec. Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13	UNIT	10.400.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
50	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan modal untuk Kelompok UMKM Desa Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	paket	400.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
51	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan transportasi pertanian dan peternakan berupa mesin pompong untuk alat transportasi menuju lokasi peternakan untuk kelompok Peternakan Kampung Babi	Dusun Polipsoman Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12	UNIT	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
52	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bahan, kandang, ternak dan pangan untuk kelompok Budidaya Ternak Babi ROIROI	Dusun Betaet Desa Betaet Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
53	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan peralatan pertanian Mesin Perontok Padi sebanyak 1 unit dan tangki semprot sebanyak 17 unit untuk penunjang percepatan proses produksi padi agar mendapat hasil yang berkualitas untuk kelompok Tani SIGURUK-GURUK	Dusun Ma.Sigep Desa Sigapokna Kecamatan Siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
54	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian berupa Gerobak Sorong 17 unit, Tengki semprot 17 unit dan Roundap 17 unit untuk Kelompok TANI SIBONJOIK	Dusun Ma Sigep Desa Sigapokna Kec, Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	32.850.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
55	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan transportasi pertanian berupa Mesin Pompong merek HONDA GX2000 GUNA untuk kelompok Tani SIGALA-GALAK yang digunakan untuk transportasi menuju lokasi pertanian dan juga digunakan untuk mengangkut hasil pertanian berupa pinang	Dusun Ma Sigep Desa Sigapokna Kec, Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12	UNIT	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
56	Alisandre Zalukhu	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin boat Kelompok Nelayan Tiboi Sege 2 unit 15pk, 18 unit 8 pk	Dusun Mapoupou Desa Makalo Kecematan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	20	Unit	790.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
57	Alisandre Zalukhu	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat Kelompok Riu riu ake 8pk	Dusun Pujaringan Desa Saumanganya Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	20	unit	602.700.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
58	Alisandre Zalukhu	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Kelompok Nelayan Facengau 4pk	Dusun Sikakap Desa Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	-	14	unit	298.200.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
59	Alisandre Zalukhu	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat Kelompok Nelayan Laut Biru 4pk	Dusun sibabai Desa Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	-	16	unit	340.800.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
60	Alisandre Zalukhu	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat Kelompok Nelayan Iba Laut 8pk	Dusun Silabau Barat Silabu Timur dan Silabu Selatan Desa Silabu Kecematan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	8	unit	241.080.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
61	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan peralatan pertanian SHANSOW KECIL Merek STHILL untuk kelompok TANI BINA DESA	Dusun Pilionan Desa Sigapokna Kec, Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	UNIT	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
62	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan Peralatan Memasak untuk kelompok UMKM KEREK NGANGA	Dusun Pokai Desa Ma. Sikabaluan Kec Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	PAKET	100.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
63	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan peralatan memasak untuk kelompok UMKM SIOBAKTA	Dusun Pokai Desa Ma. Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	-	1	PAKET	50.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
64	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan peralatan alat/mesin industri	Pengadaan bantuan Alat Musik Orgen	Dusun Muara Desa Muara Sikabaluan Kec SIberut	DINAS KOPERASI,	1	PAKET	150.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		kecil	Tunggal untuk Organisasi Orgen Tunggal RONA SONIA	Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
65	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Alat Musik untuk Gereja GKPM RESORT POKAI	Dusun Pokai Desa Ma. Sikabaluan Kec, Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	40.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
66	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan pembangunan rumah ibadah gedung Gereja IFGF Mongan Poula	Dusun Mongan Poula Desa Mongan Poula Kec, Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	100.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
67	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan pembangunan rumah ibadah Gereja SANTO PETRUS STASI TINITI	Dusun Tiniti Desa Sigapokna Kec. Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	25.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
68	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Pembangunan Gereja GKPM Resort Pulipsoman	Dusun Polipsoman Desa Sigapokna Kec. SIberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	100.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
69	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Renovasi Mesjid AL-MUJAHIDIN	Dusun Sikuran Desa Sigapokna Kec, Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	50.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Terkait Kesejahteraan Sosial
70	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan Pembangunan Pagar Lingkungan Gereja ST. YOHANNES DARI SALIP STASI POLIPSOMAN	Dusun Polipsoman Desa Sigapokna Kec, Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	100.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
71	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan Peralatan memasak untuk kelompok UMKM IBU-IBU USAHA MANDIRI	Dusun Muara Desa Muara Sikabaluan Kec,Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	PAKET	50.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
72	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan ternak babi dan pembuatan kandang untuk kelompok Ternak SAKALEAK BERSAUDARA	Dusun Pokai Desa Ma. Sikabaluan Kec, Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
73	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan ternak untuk kelompok Ternak ITIK SATULU	Dusun Betaet Desa Betaet Kec, Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	PAKET	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
74	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin pompong merek HONDA sebanyak 3 unit untuk kelompok Nelayan SIMATULU	Dusun Sikebbukat Desa Saliguma Kec. Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	3	Unit	30.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
75	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan	Pengadaan bantuan mesin pompong merek	Dusun Sikebbukat Desa Saliguma Kecamatan	DINAS PERIKANAN	3	Unit	30.000.000,00	Pengembangan Kapasitas

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		kecil	HONDA sebanyak 3 unit untuk kelompok Nelayan JANANG HITAM	Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai					Nelayan Kecil
76	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin pompong merek HONDA sebanyak 4 unit untuk kelompok Nelayan SIAGAI BALIU	Dusun Malibakbak Desa Saliguma Kec. Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	4	Unit	40.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
77	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK Merek YAMAHA sebanyak 4 unit untuk kelompok Nelayan HIU MACAN	Dusun Peigu Desa Muara Siberut Kec Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	4	Unit	132.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
78	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin pompong merek HONDA sebanyak 20 unit untuk kelompok Nelayan LAGGUK	Dusun Badaan Desa Taileleu Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	20	Unit	200.000.000,00	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
79	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK merek YAMAHA sebanyak 4 unit untuk kelompok Nelayan SIAGAI MUAGGEP	Dusun Baddan Desa Taileleu Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	4	Unit	132.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
80	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin YAMMAR TF 155 dan Dinamo sebanyak 1 unit untuk kelompok Perabot KARYA MANDIRI	Dusun Pusaregat Desa Sagulubbek Kec, Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	-	35500000	RUPIAH	35.500.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
81	Juni Arman, S. IP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan mesin Kelompok Nelayan ngenaet pukarajat 4pk 10 unit	Desa Tuapejat Kecematan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	-	10	Unit	213.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
82	Juni Arman, S. IP	Bantuan armada dan	Bantuan mesin	Dusun Takuman, sioban	DINAS	5	unit	106.500.000,00	Pengembangan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		alat tangkap nelayan kecil	Kelompok Nelayan pukatekat baga pk 5 unit	Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	PERIKANAN				Kapasitas Nelayan Kecil
83	Jakop Saguruk, SE	Perbaikan rumah tidak layak huni	rehap rumah tidak layak huni di Desa Cimpugan Kecamatan Siberut Tengah (Rp.600.000.000)	Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30	unit	750.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
84	Jakop Saguruk, SE	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan Alat Pertukangan Atas Nama Sugianto Sirirui (RP 160.000.000)	Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	paket	160.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
85	Jakop Saguruk, SE	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan Alat Tangkap atas Nama Purouk Desa Cimpungan (Rp.160.000.000)	Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	paket	160.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
86	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin kayu Oscar 30 cm MQ443 BENCH Ketam Meja Duduk sebanyak 1 unit untuk kelompok Perabot KARYA MANDIRI	Dusun Pusaregat Desa Sagulubbek Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23632424	RUPIAH	23.632.424,00	Pengembangan Usaha Mikro
87	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan Mesin kayu RYU RMM 13/ Mesin pahat duduk RYU RMM 13 sebanyak 2 unit	Dusun Pusaregat Desa Sagulubbek Kec Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN	1	paket	9.750.000,00	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					DAN PERDAGANGAN				
88	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan Mesin Circle/ circular saw/pemotong kayu 8 Makita M6/5800 M6 sebanyak 2 unit untuk kelompok Perabot KARYA MANDIRI	Dusun Pusaregat Desa Sagulubbek Kec, Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	paket	11.247.600,00	Pengembangan Usaha Mikro
89	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pelatihan tenaga kerja	Bantuan Perelatan kejuruan tata rias pengantin dan hantaran 1 paketserta Perlatan kejuruan sablon 1 paket di UPTD Balai Latihan Kerja	Dusun Batjoja Desa Maileppet Kecematan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	40	unit	300.000.000,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
90	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Bantuan BBM Rujukan Pasien Mandiri di Puskesmas Simatalu 10 Paket	Simatalu, Kecematan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	paket	-	Operasional Pelayanan Puskesmas
91	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan	Bantuan BBM Rujukan Pasien Mandiri di Puskesmas Betaet 10 paket	Betaet Kecematan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	paket	-	Operasional Pelayanan Puskesmas

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan							
92	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan Mesin Skap kayu 2 unit dan mesin bor tangan Makita HP 1630 2 unit untuk kelompok Perabot KARYA MANDIRI	Dusun Pusaregat Desa Sagulubbek Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	-	2	paket	12.500.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
93	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Rehab berat Polindes	Dusun Limu Desa Simatalu Kecematan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	Unit	200.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
94	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala	Pembangunan rumah dinas guru SDN 29 Simatalu	Desa Simatalu Kecematan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	kopel	350.000.000,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
95	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Bantuan Mobiler 3 unit SD N 27 Simatalu	Desa Simatalu Kecematan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	paket	105.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah
96	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan rumah dinas guru SDN 27 Simatalu	Desa Simatalu Kecematan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Kopel	350.000.000,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
97	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan mesin pengupas pinang Kelompom Tani Salibo 3 unit	Desa Simatalu Kecematan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3	Unit	75.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
98	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Mesin pengupas Pinan 2 unit	Desa Sikabaluan Kecematan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2	Unit	50.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
99	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin Router Profil Kayu Besar 3600H Makita sebanyak 1 unit untuk kelompok Perabot KARYA MANDIRI	Dusun Pusaregat Desa Sagulubbek Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	-	1	Unit	6.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
100	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin Gerinda Tangan 1 unit dan mesin amplas 1 unit untuk kelompok Perabot KARYA MANDIRI	Dusun Pusaregat Desa Sagulubbek Kec Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	Unit	2.750.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
101	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan Mesin CAISAW KECIL Sebanyak 10 unit untuk kelompok Tani CENGKEH SIMABUA	Dusun Pusaregat Desa Sagulubbek Kec Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Unit	30.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
102	Julius Tairarak, S. Pt	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan,	BANTUAN PENGADAAN MOBILER SEKOLAH DASAR NEGERI 05 PAIPEJAT HULU	DUSUN PAIPEJAT HULU DESA SIMATALU KECAMATAN SIBERUT BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	Paket	105.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
103	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan mesin cainsaw kecil sebanyak 10 unit untuk kelompok Tani SIMAROIPO	Dusun Pusegat Desa Sagulubbek Kec, siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Unit	30.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
104	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan mesin cansaw kecil sebanyak 10 unit untuk kelompok Tani TINOBUN LELEU	Dusun Buga Desa Sagulubbek Kec, siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Unit	30.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
105	Julius Tairarak, S. Pt	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak "ITIK/BEBEK" untuk kelompok ternak SIMARIURIU	Dusun Sakaladat Desa Simalegi , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200	Ekor	50.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
106	Fernando Sabajou, S. Pd	Perbaikan rumah tidak layak huni	Bantuan pembangunan rumah tidak layak huni	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	-	20	Unit	500.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
107	Julius Tairarak, S. Pt	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan usaha untuk kelompok menengah "PATADDEKAT" Dusun Sakaladdat Desa Simalegi	Dusun Sakaladdat Desa Simalegi, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Unit	50.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
108	Julius Tairarak, S. Pt	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	Pengadaan bantuan alat Sulingan nilam	Dusun Paipejat Hulu Desa Simatalu kecamatn	DINAS KETAHANAN	2	Unit	50.000.000,00	Pendampingan Penggunaan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		pangan ternak, peralatan pertanian	untuk kelompok tani "PONGAIRANGAN" Dusun Paipejat Hulu Desa Simatalu	siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	PANGAN DAN PERTANIAN				Sarana Pendukung Pertanian
109	Fernando Sabajou, S. Pd	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan Ternak SAPI untuk kelompok ternak "SIMATUTRU" Desa Muntei Kecamatan Sibrut Selatan	Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	-	20	Ekor	140.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
110	Fernando Sabajou, S. Pd	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Peningkatan jalan Pertanian Desa Muntei	Desa Muntei Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	-	1	Paket	150.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
111	Fernando Sabajou, S. Pd	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel atau mesin boat 15 PK untuk kelompok nelayan "LOK OINAN" Desa Muntei kecamatan siberut barat	Desa Muntei Kecamatan Siberut Barat , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	3	Unit	93.300.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
112	Fernando Sabajou, S. Pd	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 15 PK untuk kelompok nelayan "BULUK SURAk" Dusun Makoddiai desa pasakiat taileleu	Dusun Makoddiai Desa Pasakiat Taileleukecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	-	5	Unit	155.500.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
113	Fernando Sabajou, S. Pd	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	Pengadaan bantuan mesin pengolahan	Dusun muntei desa muntei kecamatan siberut	DINAS KETAHANAN	1	Paket	190.000.000,00	Pendampingan Penggunaan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		pangan ternak, peralatan pertanian	pinang ' SEUSEGAT FORESTRADE"	barat, Kab. Kepulauan Mentawai	PANGAN DAN PERTANIAN				Sarana Pendukung Pertanian
114	Stevanus Victorianus, S, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan alat transportasi UMKM berupa Motor VIAR Roda Tiga sebanyak 4 unit untuk kelompok UMKM TERPADU	Dusun Pusaregat Desa Sagulubbek Kec.Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4	Unit	150.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
115	Maru, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan Mesin Potong dan pembelah Kayu (sawmill) untuk Desa Malancan	Desa Malancan Kec. Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Paket	200.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
116	Maru, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Desa Malancan	Desa Malancan Kecamatan Siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20	Ekor	140.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
117	Maru, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin dompeng complete pengolahan sagu untuk Desa Sagulubbek	Desa Sagulubbek Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Paket	100.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
118	Maru, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan kendaraan bermotor 3 roda (VIAR) untuk UMKM Kecamatan Siberut Selatan	Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,	1	Unit	30.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
119	Maru, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan alat cetak Printing/spanduk untuk UMKM Desa Malancan Dusun Salappak Desa Muntei	Desa Malancan Kec. Siberut Utara dan Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Unit	150.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
120	Maru, SH	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan bantuan Mobiler Sekolah untuk 6 Lokal SD LAbuhan Bajau Desa Sigapokna dan SD Terekan Hulu Desa Malancan	Desa Sigapokna Kec Siberut Barat dan Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	Paket	200.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah
121	Maru, SH	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin dompeng dan pengolahan sagu complete di Salappak	Dusun Salappak , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Paket	100.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
122	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sistem	Pengadaan bantuan Polytank untuk masyarakat Desa	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Desa Bulasat dan Desa Makalo	-	40	UNIT	200.000.000,00	Perluasan Sistem Penyediaan Air

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		drainase lingkungan	Sikakap, desa Bulasat dan Desa Makalo	Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai					Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
123	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok Nelayan PUSARAAT	Dusun Bere Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	213.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
124	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin 4 PK sebanyak 14 unit untuk kelompok Nelayan SOPO SIMAERU	Dusun Bukku Monga Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	14	unit	298.200.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
125	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin 4 PK sebanyak 11 unit untuk kelompok Nelayan OBA SIMERU	Dusun Muara Taikako Barat Desa Taikako Kec. Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	Unit	234.300.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
126	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan mesin 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok Nelayan LAGGAI SIBURU	Dusun Taikako Barat Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	-	10	Unit	213.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
127	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin 4 PK sebanyak 10 Unit untuk kelompok Nelayan LAPRAT SIBAU	Dusun Pinatektek Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	319.500.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
128	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan ternak babi sebanyak 30 ekor untuk kelompok Ternak KARONANTA	Dusun Rakrakjoja Desa Taikako Kec. Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	18	Ekor	64.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
129	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak,	Pengadaan bantuan bibit ternak babi sebanyak 30 ekor	Dusun Rakrakjoja Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN	18	Ekor	64.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		peralatan pertanian	untuk kelompok Ternak GABA BARA	Mentawai	PERTANIAN				Daerah Kabupaten/Kota Lain
130	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan alat pertanian berupa mesin shansaw sebanyak 3 unit, mesin rumput sebanyak 5 unit dan Pembukaan persawahan baru untuk kelompok Tani KEREK BAGA MAI	Dusun Rakrakjoja Desa Taikako Kec. Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3	Unit	35.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
131	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan alat pertanian berupa hand tractor sebanyak 1 unit untuk kelompok Tani KEREK BAGA MAI	Dusun Rarakrakjoja Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	Unit	20.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
132	Yosep, A. Md	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	BANTUAN MESIN POMPONG KELOMPOK NELAYAN RIRINGEN	DESA KATUREI DUSUN TIOP KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	100.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
133	Yosep, A. Md	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	BANTUAN BIBIT SAPI KELOMPOK RIMATA 150 JUTA	DUSUN MASEPAKET DESA MADOBAG KECAMATAN SIBERUT SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	Paket	150.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
134	Yosep, A. Md	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	BANTUAN MESIN BOAT 15 PK KELOMPOK NELAYAN ROMPAROM	DESA MUNTEI KECAMATAN SIBERUT SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	-	10	Unit	311.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
135	Yosep, A. Md	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	BANTUAN MESIN BOAT 15 PK KELOMPOK NELAYAN SIPUMANYANG	DUSUN TOKTUK DESA MUARA SIBERUT KECAMATAN SIBERUT SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	4	Unit	124.400.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
136	Isar Taileleu, S. PAK	Pendataan Penyediaan	Bedah rumah Dusun	Dusun Bukku Monga	DINAS	20	Unit	500.000.000,00	Perbaikan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Bukku Monga Desa Taikako	Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rumah Tidak Layak Huni
137	Yosep, A. Md	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	BANTUAN PARUTAN /MESIN SAGU KELOMPOK SAGU SIMATORO 100 JUTA	DUSUN MANGORUT DESA MADOBAG KECAMATAN SIBERUT SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Paket	10.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
138	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pengadaan bantuan rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Sikakap sebanyak 15 unit	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15	Unit	375.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
139	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pengadaan bantuan rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Bulasat sebanyak 10 unit	Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	Unit	250.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
140	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pengadaan bantuan rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Saumanganya sebanyak 10 unit	Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	Unit	250.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
141	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pengadaan bantuan rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Taikako sebanyak 15 unit	Desa Taikako Kecamatan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15	Unit	375.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
142	Yosep, A. Md	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	BANTUAN TERNAK SAPI KELOMPOK	DUSUN ROKDOG DESA MADOBAG KECAMATAN	-	1	PAKET	140.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pangan ternak, peralatan pertanian	KERET BAGA SIBAU 300 JUTA	SIBERUT SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai					Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
143	Yosep, A. Md	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	BANTUAN INDUSTRI PARABOT KELOMPOK OGOK SIMALAINGE 100 JUTA	DUSUN SIROKDAK DESA MUARA SIBERUT KECAMATAN SIBERUT SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Paket	100.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
144	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan pembangunan Gereja GKPM Mabola Selatan	Dusun Mabola Selatan Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	-	1	Paket	75.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
145	Fernando Sabajou, S. Pd	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan industri pengelolaan sagu "USAHA SAGU LPJA MANDIRI"	Dusun Sirokrokdak desa muntei kecamatan siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Paket	100.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
146	Fernando Sabajou, S. Pd	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	bantuan kelompok usaha UMKM 'SIMAEBA" Dusun salappa	Dusun Salappa Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Paket	100.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
147	Syafridin	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai	Bantuan pembangunan tanggu abrasi pantai wisata mapadegat	dusun mapadegat desa tuapejat kecamatan sipora utara, Kab. Kepulauan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	1	paket	3.600.000.000,00	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Lainnya, Tanggul sungai, unit air baku, kanal banjir, normalisasi sungai, pembangunan jaringan irigasi Sistem Irigasi Primer dan Sekunder		Mentawai	PENATAAN RUANG				Pengaman Pantai Lainnya
148	Syafridin	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pengadaan bantuan rehap rumah tidak layak huni untuk masyarakat desa tuapejat	Desa tuapejat kecamatan sipora utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	Unit	250.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
149	MARENOBAJA SAMALOISA	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Bantuan pembangunan rehap pustu dusun Lakkau	Dusun lakkau desa bulasat kecamatan pagai selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	Unit	100.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
150	MARENOBAJA SAMALOISA	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah,	Bantuan pengadaan mobiler sekolah SD 41 Bulasat	Desa bulasat kecamatan pagai selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	lokal	105.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
151	MARENOBAJA SAMALOISA	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	bantuan pembangunan rehap pustu dusun tapak jaya	Dusun tapak jaya desa bulasat kecamatn pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	Unit	200.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
152	Yosep, A. Md	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	BANTUAN KANDANG TERNAK SAPI(KAWAT BERDURI) KELOMPOK KERET BAGA SIBAU 50 JUTA	DUSUN ROKDOG DESA MADOBAG KECAMATAN SIBERUT SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	70.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
153	Yosep, A. Md	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	BANTUAN TERNAK KELOMPOK TERNAK MADU GALO-GALO SILAKOINAN	DUSUN SALAPPAK DESA MUNTEI KECAMATAN SIBERUT TENGAH, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Ekor	70.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
154	Syafridin	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan penyediaan sarana prasaran perlengkapan Meubeliar	Desa tuapejat kecamatan sipora utara, Kab. Kepulauan Mentawai	-	1	PAKET	10.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
155	Alisandre Zalukhu	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Mushola nurul ikhlas	Sikakap Tengah Desa Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	-	1	Paket	50.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Sosial
156	MARENOBAJA SAMALOISA	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	pembagunan pamsimas, penyediaan air bersih untuk dusun maurau desa bulasat	Dusun Maurau Desa Bulasat kecamatan pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	-	1	Paket	500.000.000,00	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
157	Salimi, A. Md	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan 1 unit mobil pickup L300 Kelompok Tani Pinang Betara dan Pisang	Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
158	Salimi, A. Md	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Mesjid	Dusun Peipei Kecematan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	-	1	Paket	70.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
159	Hendri Dunand, S. Sos	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit Pisang Super untuk Desa Saureinu, Desa Sioban, Desa Mara dan Desa Goisoinan beserta upah, bibitnya dan dana pendamping sebnyak 10 kelompok	Desa Saureinu, Desa Sioban, Desa Mara dan Desa Goisoinan Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10000	batang	520.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
160	Hendri Dunand, S. Sos	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan 1 unit mobil DUMP TRUCK Merek FE 75 SHDX+ DUMP TRUCK untuk bumdes saureinu yang digunakan sebagai pengangkut hasil UMKM dan pertanian	Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	unit	-	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Mentawai-Padang						
161	Hendri Dunand, S. Sos	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan 1 unit mobil L300 untuk fasilitas pengangkutan Depot Air Isi Ulang dan penggunaan lainnya untuk Desa Saureinu	Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	unit	230.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
162	Hendri Dunand, S. Sos	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan Rehap Pesantren Desa Sioban	Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	50.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
163	Hendri Dunand, S. Sos	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan mesin shansaw merek STHILL untuk Kelompok Tani Desa Saureinu sebanyak 10 unit	Desa Saureinu Kec Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	unit	110.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
164	Hendri Dunand, S. Sos	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin perabot untuk Kelompok UMKM Desa Nemnem Leleu sebanyak 1 paket	Desa Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	paket	70.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
165	SAFRI HORISON SALELEUBAJA	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan mesin pembelah pinang	Desa Saumanganya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	paket	100.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
166	SAFRI HORISON SALELEUBAJA	Fasilitasi kemitraan kelembagaan/usaha,	Bantuan Kelompok UMKM	Dusun Masubuk Desa Sikakap, Kab. Kepulauan	-	1	paket	150.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		bantuan pendanaan/pembiayaan		Mentawai					
167	SAFRI HORISON SALELEUBAJA	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengdaan peralatan mesin potong pembelah kayu/sawmill	Desa Malakopa, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	paket	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
168	SAFRI HORISON SALELEUBAJA	Perbaikan rumah tidak layak huni	Rehabilitas rumah tidak layak huni beserta tanki	Desa Saumanganya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20	unit	500.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
169	SAFRI HORISON SALELEUBAJA	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan mesin pembela pinang	Dusun Parabatu, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	paket	100.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
170	SAFRI HORISON SALELEUBAJA	Perbaikan rumah tidak layak huni	Perbaikan rumah tidak layak huni	Dusun Jati Desa Tuapejat, Kab. Kepulauan Mentawai	-	20	unit	500.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
171	SAFRI HORISON SALELEUBAJA	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan mobil L300 Operasional Koperasi	Desa Malakopa, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	unit	300.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
172	MARENOBAJA SAMALOISA	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan pengadaan peralatan perabot untuk kelompok "BUJAI" Dusun laggigi	Dusun Bujai desa laggigi kecamatan pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Paket	100.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro
173	Fernando Sabajou, S.	Bantuan peralatan	Bantuan pengadaan	Dusun periok desa muntei	-	1	Paket	100.000.000,00	Pengembangan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pd	alat/mesin industri kecil	mesin pengelolaan sagu untuk kelompok SMT maju bersama dusun periok desa muntei	kecamatan siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai					Usaha Mikro
174	Fernando Sabajou, S. Pd	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin boat 15 PK untuk kelompok nelayan "PADDARAI SIMAERU" sebanyak 10 unit	Desa maileppet kecamatan siberut selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	-	10	Unit	311.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
175	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan ternak babi untuk kelompok ternak usaha bersama (kub) "TERNAK NGENAETTA SIKERE" dengan rincian 20 ekor betina dan 20 ekor jantan	Dusun pututukat desa saumanganya kecamatan pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	40	Ekor	280.000.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
176	Yosep, A. Md	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	BANTUAN MESIN JAHIT LISTRIK MEREK(ULTRASONIC KAESAR MODEL KS100)	DUSUN PURO II DESA MUNTEI KECAMATAN SIBERUT SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	paket	33.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro

Tabel 4.42
DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL/BELANJA HIBAH SANITASI INDIVIDUAL TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA		DUSUN
1	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1	TAKRAURU	POKAI
			2	DAMLI	POKAI
			3	PITERSON SIRITOITET	POKAI
			4	TIBERIUS SABEBEGEN	BOSE
			5	TOGAR REPARTAR	BOSE
			6	MAJERAN SAPOTUK	BOSE
			7	MARJUKI	BOSE
			8	R ALIAMBRAN SAPATUNDAI	NANGNANG
			9	PARDI	POKAI
			10	RUDI	POKAI
			11	SUARDIN GEA	POKAI
			12	SUKARNI SAKAIRA	POKAI
			13	LEMANUS	NANGNANG
			14	INAN OMAR	POKAI
			15	ARNOL SANGKER	POKAI
		BOJAKAN	1	BERNAD LEO	BOJAKAN
			2	JAPET SATOLAE	BOJAKAN
			3	PARLIANTO SATAIRARAK	BOJAKAN
			4	JOTAM	BOJAKAN
			5	LEVI PALAILAI	BOJAKAN
			6	DAMIANUS SAMANGILAILAI	BOJAKAN
			7	ERAUK	BOJAKAN

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA		DUSUN
			8	ANTONIUS	BOJAKAN
			9	JIMMI	LUBAGA
			10	YESIKA MANDUISA	LUBAGA
			11	MOYAN	LUBAGA
			12	BARABUK	LUBAGA
			13	T.KOINONG M	LUBAGA
			14	T.LEMBAI KEREI	LUBAGA
			15	A.LENI OGOK	LUBAGA
2	SIBERUT SELATAN	MAILEPPET	1	GLORI HUTABARAT	Teitei Sinabak
			2	DONI SEBASTIAN SAKELETUK	Teitei Sinabak
			3	HILARIUS	Siritengah
			4	LIBIUS SEPPUNGAN	Siritengah
			5	ROZER KANDER SATOLAIEBBEB	Siritengah
			6	ABSALOM	Siritengah
			7	LUIJINA	Siritengah
			8	MANISE SALELEUBAJAK	Batjoja
			9	PARMENAS	Pasakiat
			10	WINARTO GINTING	Batsimaonai Baga
		MUNTEI	1	MATEUS TATEBBURUK	TOKTUK
			2	FALENTINUS SAMEMEK	PURO II
			3	ILARIUS SAUBBAISAGU	PURO II
			4	ANTONIUS SAMEMEK	PEINING BUTTET
			5	KORNELIUS TURAN SAUMANUK	PARIOK

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA		DUSUN
			6	ADE DUNGDUNG SIRITOITET	MUNTEI
			7	SATRIANDI	MUNTEI
			8	PANGANTURAT KEREI	MUNTEI
			9	POINENGEK SAGARI	MUNTEI
			10	LIGAN SIRITOITET	MUNTEI
3	SIPORA UTARA	BUKIT PAMEWA	1	DERI SUSANTO	PAMEWA INDAH
			2	HERMAN SUSANTO	PAMEWA INDAH
			3	CANDRA	PAMEWA INDAH
			4	KAMSUDIN HUTAURUK	PAMEWA INDAH
			5	WIWIN KURNIATI	BUKIT SUBUR
			6	RAHMAT HIDAYAT	BUKIT SUBUR
			7	ROHIM	BUKIT SUBUR
			8	HENDRIZAL	BUKIT SUBUR
			9	DAYU SETIAWAN	BUKIT SUBUR
			10	PUPUT RIDHO SAPUTRA	BUKIT SUBUR
4	SIBERUT BARAT	SIMALEGI	1	MEDER	SAKALADAT
			2	WERDIMAN	SAKALADAT
			3	ARMINTO	BETAET SELATAN
			4	POLIN	BETAET UTARA
			5	KARLAN	SUTE'ULEU
			6	RINTO SAMI	SUTE'ULEU
			7	SARMEN	SUTE'ULEU
			8	RAHMAD H	SUTE'ULEU

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA		DUSUN
			9	EDISON	SAKALADAT
			10	SALMAN	SAKALADAT
		SIMATALU	1	JUNAIDI	PEIPAJET
			2	MARTINUS	PEIPAJET
			3	JUDAS PORAU	PEIPAJET
			4	XAVERIUS	PEIPAJET
			5	GUNAWAN	PEIPAJET
			6	LUKAS	PEIPAJET
			7	MARTIN SAPELEGE	PEIPAJET
			8	OBAK LEPAK	PEIPAJET
			9	PALESEU	PEIPAJET
			10	PEWAN	PEIPAJET
			11	TATAP MANAI	PEIPAJET
			12	AILOBEN	PEIPAJET
			13	ALFONSIUS	PEIPAJET
5	PAGAI SELATAN	MALAKOPAK/ BALEKRASOK	1	DASRIAL TAELELEU	PURUPUGAT
			2	PONOTOSANTOSO	PURUPUGAT
			3	ELIMAR SAOGO	PURUPUGAT
			4	YOHANER	PURUPUGAT
			5	MARSIUS	PURUPUGAT
			6	PORDUAN SALELEBAJA	PURUPUGAT
			7	RODUL SAOGO	SIMATAIRESE
			8	DONNY SALELEUBAJA	SIMATAIRESE

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA		DUSUN
			9	NAHASON SAOGO	SIMATAIRESE
			10	RUL CANDRA SAOGO	SIMATAIRESE
			11	WINDRA JAYA SAOGO	SIMATAIRESE
			12	REBI	SIMATAIRESE
			13	GERHAT SAOGO	PALUKLUK
			14	RESMAN SAPALAKKAI	PALUKLUK
			15	DELPISNO SAOGO	PALUKLUK
			16	RISTON SAMALOISA	PALUKLUK
			17	ELISABET SAMALOISA	PALUKLUK
			18	LEONARDI SAMALOISA	PALUKLUK
			19	SAPOR MULIA	PALUKLUK
			20	PARULIAN SAOGO	PALUKLUK

Tabel 4.43
DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2025

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
1	Kelompok Tani Silok Koan	Desa Sirilogui Kec. Siberut Utara	Hand Traktor
			Mesin Perontok Padi
			Benih Padi
			Tangki Semprot
			Pestisida Tanaman Padi
2	Kelompok Tani Silok Koan	Desa Sirilogui Kec. Siberut Utara	Bibit Padi
			Pupuk Perangsang Buah
			Insektisida
3	Kelompok Tani Simanene	Desa Sotboyak Kec.Suberut Utara	Benih Padi Gogo 1 kg
			Pupuk Urea 50 kg
			Pupuk Sp36 50 kg
			Pupuk KCI 50 kg
			Insektisida
			Herbisida
			Spayer manual elektrik
			Kultivator
4	Kelompok Tani Siobak Simeru	Dusun Sioban Kec.Sipora Selatan	Benih Jagung
			Pupuk Urea
			Pupuk SP-36
			Pupuk KCL
			Insektisida
			Fungisida

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
5	Kelompok Wanita Tani Angkak Baga	Dusun Barat Desa Mongan Poula Kec.Siberut Utara	Benih Jagung
			Pupuk Urea
			Pupuk SP-36
			Pupuk KCL
			Insektisida
			Fungisida
6	Kelompok Tani Reirujen	Dusun Mongan Poula Barat Desa Mongan Poula Kec.Siberut Utara	Handtaktor
7	Kelompok Wanita Tani	Desa Sotboyak Kec. Siberut Utara	Pupuk Sp36 50 kg
			Pupuk KCI 50 kg
			Pupuk NPK 50 kg
			Fungisida Antracol 500 gr
			Insek Fenite 150 OD 100 ml
			Herbisida 1 ltr
			Sprayer manual elektrik
			Wareng
			Gembor
8	Kelompok Tani Surak Simaeru	Desa Sotboyak Kec. Siberut Utara	Benih Jagung Varietas Pioneer P32 1 kg
			Pupuk Urea 50 kg
			Pupuk Sp36 50 kg
			Pupuk KCI 50 kg
			Pupuk NPK 50 kg
			Fungisida Antracol 500 gr
			Insek Fenite 150 OD 100 ml

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
			Herbisida 1 ltr
			Sprayer manual elektrik
			Wareng
			Gembor
9	Kelompok Tani Sikuku Enung	Desa Bojakan Siberut Utara	Benih Padi
			Pupuk Urea
			Pupuk Sp36
			Pupuk KCI 50
10	Kelompok Tani Silapela	Desa Bojakan Siberut Utara	Benih Cabai
			Pupuk Urea
			Pupuk NPK
			Pestisida
11	Kelompok Tani Tunas Muda	Dusun Barat Desa Mongan Poula Kec.Siberut Utara	Benih Cabe Panah Merah
			Kapur Dolomit
			Mulsa Plastik
			Pupuk Boron
			Pupuk NPK Grower
			Pupuk NPK 16-16-16
			Pupuk Buah (Fortan B)
			Pupuk Daun (Fortan D)
			Ambition 500 ml
			Basfoliar 500 ml
			Insek Prevathon 250 ml

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
			Insek Curacron 250 ml
			Insek Abacel 500 ml
			Insek Curater 2 kg
			Fungisida Antracol 1 kg
			Fungsional Folicur 250 gr
			Herbisida 1 ltr
			EM4 Pertanian
			Spayer Manual Elektronik
			Wareng
			Paranet
			Polybag Semai
12	Kelompok Tani Dusun Monga	Dusun Monga Selatan Desa Mara Kec. Sipora Selatan	Benih Jagung
			Pupuk Urea
			Pupuk Sp36
			Pupuk KCI
			Insektisida
			Fungisida
13	Kelompok Tani Tunas Muda	Dusun Barat Desa Mongan Poula Kec.Siberut Utara	Benih Jagung
			Pupuk Urea
			Pupuk Sp36
			Pupuk KCI
			Insektisida
			Fungisida

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
14	Kelompok Tani Arau Baga	Dusun Mara Barat Desa Mara Kec. Sipora Utara	Benih Jagung
			Pupuk Urea
			Pupuk Sp36
			Pupuk KCl
			Insektisida
			Fungisida
15	Kelompok Tani Sawah Musara	Desa Makalo Kec.Pagai Selatan	Mesin Heller/Penggiling Padi
			Pengadaan Bangunan (tempat huller)
16	Kelompok Tani Aysera	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan	Benih Jagung
			Pupuk Urea
			Pupuk KCl
			Pupk NPK
			Tangki Semprot
			Pestisida
			Mesin Pipil Jagung
			Cultivator
17	Kelompok Tani Panca Usaha	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan	Benih Cabe
			Pupuk Urea
			Pupuk KCl
			Pupuk TSP
			Tangki Semprot
			Pestisida
			Mulsa

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
			Caltivator
18	Kelompok Tani Tirik Pandan	Desa Sirilogoi Kec.Siberut Utara	Bibit Jagung
			Pupuk NPK
			Tangki Semprot
			Mesin Potong Rumput
			Insektisida
			Herbisida Selektif Jagung
19	Kelompok Ternak Jurubabak	Dusun Maseppaket Desa Madobag Kec.Siberut Selatan	Bibit Sapi Jantan
			Bibit Sapi Betina
			Kegiatan Pembuatan Kandang
20	Kelompok Wanita Tani Ronnakek	Desa Sotboyak Kec Siberut Utara	Benih cabe panah merah
			Kapur Dolomit
			mulsa plastik
			pupuk boron
			pupuk npk gerower
			pupuk npk 16-16-16
			pupuk ss
			pupuk buah (gandasil b
			pupuk daun grandasil d
			ambition 500ml
			basfoliar 500 ml
			insek prevathon 250 ml
			insek curacron 250 ml

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
			insek abacel 500 ml
			insek curater 2 kg
			fungisida mantracol 1 kg
			fungisida fulicur 250 gr
			herbisida 1 liter
			sprayer manual elektrik
			wareng
			paranet
			polybag semai
			gembor
			tali
21	Kelompok Tani Surak Simaeru	Desa Sotboyak Kec Siberut Utara	benih jagung varies pioneer p32 1 kg
			pupuk urea 50 kg
			pupuk sp36 50 kg
			pupuk kcl 50 kg
			pupuk npk 50 kg
			fungisida antracol 500 gr
			insek fenite 150 OD 100 ml
			insek fenite 150 OD 100 ml
			herbisida 1 ltr
			sprayer manual elektrik
			wareng
			gembor

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
22	Kelompok Ternak Jaya	Desa Tuapejat Kec Sipora Utara	sapi jantan dan betina
			kandang
			mesin pencacah pakan ternak
23	Kelompok Ternak Maileppet	Desa Bukit Pamewa Kec Sipora Utara	Itik Dewasa siap produk (indukan)
			penyediaan pakam
			Obat obatan
			waring jaring bebek
			mesin penggiling jagung
			mesin penggiling daging
			mesin tetas
24	Kelompok ternak rop akek	Desa Nemnemeleleu Kec Sipora Selatan	Ternak Babi Betina
			Ternak Babi Jantan
25	Kelompok Tani Jaya	Desa Saiobi SamukopKec Sib Tengah	bibit jagung pipil
			fungisida
			insektisida tikus
			pupuk urea
			pupuk npk
			tengki smprot
			mesin chaincaw
			cangkul
			parang
			kampak
			sekop

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
			sepatu boat
26	Kelompok Sagu Amalia Nopatewe	Dusun Matobat Desa Katurei Kec.Siberut Barat Daya	Mesin Diesel tes 50 inmar
			Parutan sagu
			Mesin pompa air
			Alat pengipas
			Saringan stanless
			Saringan tepung
			Stop kran
			Paralon 4 inci
			Bak pengaduk
			Bak tepung sagu
			Mesin semprot
			Mesin jahit karung
			Gerobak sorong
			Paralon 2 inci
			Keramik
			Mesin stempel 15 pk
27	Kelompok Tani Sapoiri	Desa Cimpungan Kec.Siberut Tengah	benih jagung varies pioneer p32 1 kg
			pupuk urea 50 kg
			pupuk sp36 50 kg
			pupuk kcl 50 kg
			pupuk npk 50 kg
			fungisida antracol 500 gr

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
			insek fenite 150 OD 100 ml
			herbisida 1 ltr
			sprayer manual elektrik
			gembor
			Mesin Kultivator
28	Kelompok Tani Betian	Desa Cimpungan Kec.Siberut Tengah	benih jagung varies pioneer p32 1 kg
			pupuk urea 50 kg
			pupuk sp36 50 kg
			pupuk kcl 50 kg
			pupuk npk 50 kg
			fungisida antracol 500 gr
			insek fenite 150 OD 100 ml
			herbisida 1 ltr
			sprayer manual elektrik
			gembor
29	Kelompok Tani Sapoiri	Desa Cimpungan Kec.Siberut Tengah	Benih cabe
			pupuk urea
			pupuk sp36
			pupuk kcl
			pupuk npk
			fungisida antracol
			insek fenite
			herbisida 1 ltr

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
			sprayer manual elektrik
30	Kelompok Tani Simariuriu	Desa Saibi Samukop Kec.Siberut Tengah	bibit jagung pipil
			fungisida
			insektisida tikus
			pupuk urea
			pupuk npk
			tengki smprot
			mesin chaincaw
			cangkul
			parang
			kampak
			sekop
			sepatu boat
31	Kelompok Tani Saraina	Desa Maileppet Kec.Siberut Selatan	Benih Jagung
			pupuk kcl
			pupuk urea
			pupuk npk
			tengki smprot
			Pestisida
			Mesin jagung pipil
			Cultivator
			Benih cabai
32	Kelompok Tani Sri Jadi	Desa Sido Makmur Kec.Sipora Utara	Benih Jagung

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
			pupuk urea
			pupuk npk
			Kapur Pertanian
			Insektisida
			Fungisida
33	Kelompok Ternak Gorat Baga	Dusun Atduru Desa Goiso oinan	Bibit Ternak Babi
34	Kelompok Ternak Tauraunia	Dusun Panepuat Desa Matobe Kec Sipora Selatan	Bibit Ternak Australia atau Nias
			Kandang
35	Kelompok Ternak Pusurakat	Dusun Mapaddegat Desa Tuapejat Kec Sipora Utara	Bibit babi
36	Kelompok Tani Sikobou	Desa Saureinu Kec Sipora Selatan	Mesin Rumput
37	Kelompok tani jaya baru	Dusun tapak jaya desa bulasat kec pagaiselatan	sensi/still
38	Kelompok Tani Surak sabeu	Dusun Ngaik Desa Beriulou Kec Sip Selatan	Gergaji mesin/ chainsaw
			mesin pemotong rumput
			parang dan alat tani lainnnya
39	Kelompok Tani Suka Maju	Desa Sido MaKMUR Kec Sip Utara	Mesin Handtractor
			mesin perontok padi
			bibit padi
			Pupuk Urea
			Pupuk NPK
			Herbisida
			Insektisida
40	Kelompok Tani Buah Simeruk	Dsun Bake Desa Blsat Kec Pagai Selatan	Mesin Senso Merek STHILL (mini)
			Mesin Rumput Merek STHILL

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
41	Kelompok Tani Bakup-Bakup dan Kelompok Baig	Desa Matobe Kec Sipora Selatan	Saluran irigasi
42	Kelompok Tani Usaha Bersama (KUB) Galai Mone Simeru	Desa Seay Desa Sikkap Kec Sikakap	Senso Mini
			Mesin Babat Rumput
43	kelompok simatoro simasoggunei	Desa Saibi Samukop Kec Sib Tengah	sapi
44	Kelompok Ternak Sapi Sitaimasusu	Dusun Maseppaket,Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan	indukan sapi
			obat-obatan
			pembuatan kandang
			peralatan penunjang
45	Kelompok Tani Babi Situarep	Dusun Maseppaket,Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan	indukan sapi
			pembuatan kandang
			peralatan penunjang
46	Kelompok Ternak Sapi Bali Keret Baga Sibau	Dusun Rogdok Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan	Pembuatan kandang
			pembelian sapi babi
			obat-obatan saoi
			pembabatan lahan
			pelatan penunjang
			paku
			cangkul
			sekop
			gerobak
			sabit/celurit
			tali
			ember/wadah

No	Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Jenis Barang
			kawat berduri/pagar
47	Kelompok Tani Ron Tubu		Mesin Cultivator
48	Kelompokk Tani Bagok Sibegglu	Dusun Bulasat Desa Bulasat Kec.Pagai Selatan	alat pertanian
			bibit pisang
			mesin sinsaw kecil (prol)
49	Gereja GKPM Mentawai	Dusun Sibaibai Desa Sikakap Kec sikakap	Permohonan bantuan dana sidang MPLS 2025

Tabel 4.44
DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH ORGANISASI DAN LEMBAGA KEAGAMAAN TAHUN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT
1	GKPM Jemaat Mandiri Saumanganyak	Dusun Saumanganyak Tengah Desa Saumanganyak. Kec Pagai Utara
2	Gpdi Nafiri	Dusun Sinabak, Desa Sidomakmur, Kec. Sipora Utara
3	GKPM Pusat GKPM Nemnemleleu	Dusun Nemnemleleu, Desa Sikakap, Kec. Sikakap
4	Gereja Katolik St. Teresa	Dusun Puran, Desa Ma Sikabaluan, Kec. Siberut Utara
5	Mushollah Al Mujahidin	Dusun Karya Bakti, Desa Sipora Jaya, Kec. Sipora Utara
6	GKPM Jemaat Bulasat	Dusun Bulasat, Desa Bulasat, Kec. Pagai Selatan
7	GKPM Mandiri Paddarai Sioban	Dusun Sioban, Desa Sioban, Kec. Sipora Selatan
8	Gkpm Paskalis Pinatektek	Dusun Pinatektek, Desa Sikakap, Kec. Sikakap
9	Gereja Katolik St. Pius x Purorougat	Dusun Purorougat, Desa Malakopa, Kec. Pagai Selatan
10	Dewan Pastoral Poraki (DPP)	Dusun Sioban, Desa Sioban, Kec. Sipora Selatan
11	Gereja Katolik St. Petrus	Dusun Tuapejat, Desa Tuapejat, Kec. Sipora Utara
12	GKPM Jemaat August Lett	Dusun Talopulei, Desa Makalo, Kec. Pagai Selatan
13	GKPM Jemaat Korit Buah	Dusun Korit Buah, Desa Sinaka, Kec. Pagai Selatan
14	GKPM Jemaat Bake	Dusun Bake Desa Bulasat, Kec. Pagai Selatan
15	GKPM Jemaat Seay	Dusun Seay Lama, Desa Sikakap, Kec. Sikakap
16	GKLI Anugrah Tuapejat	Dusun Turonia, Desa Tuapejat, Kec Sipora Utara
17	GKPM Jemaat Bulasat	Dusun Silaoinan, Dusun Bulasat, Kec. Sipora Selatan
18	GKPM Jemaat Mandiri Manganjo	Dusun Manganjo, Desa Saumanganyak, Kec. Pagai Utara
19	GKPM Jemaat Mandiri Silibetat	Dusun Aban Baga, Desa Sinaka, Kec. Pagai Selatan
20	GKLI Emmaus	Dusun Nemnemleleu, Desa Nemnemleleu, Kec. Sipora Selatan
21	BAZNAZ Kap. Kep. Mentawai	Dusun Tunas Baru, Desa Sipora Jaya, Kec. Sipora Utara
22	GKPM Muntei Sigoisok	Dusun Muntei Sigoiso,Desa Malakopa, Kec. Pagai Selatan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT
23	GKPM Taraet	Dusun Taraet, Desa Betumonga, Kec. Sipora Utara
24	GKPM Kanaan	Dusun Beriulou, Desa Beriulou, Kec. Sipora Selatan
25	GKPM Jemaat Estomihi	Dusun Masokut, Desa Beriulou, Kec. Sipora Selatan
26	GKPM Jemaat Patmos	Dusun Paguguk, Desa Bosua, Kec. Sipora Selatan
27	GBI Jemaat Goisooinan	Dusun Goisooinan, Desa Goisooinan, Kec. Sipora Utara
28	GKPM Jemaat Surat Aban Pananggalet	Dusun Goisooinan, Desa Goisooinan, Kec. Sipora Utara
29	Gereja Suara Kebenaran Injil	Dusun Kaliou, Desa Goisooinan, Kec. Sipora Utara
30	Mesjid Ummul Mukminin	Dusun Mara, Desa Mara, Kec. Sipora Selatan
31	Gereja BNKP Tuapejat	Dusun Karoniet, Desa Tuapejat, Kec. Sipora Utara
32	GKPM Jemaat Mandiri Padarai Sioban	Desa Sioban, Kec. Sipora Selatan
33	GBI Jemaat Kasih Karunia	Dusun Muntei, Desa Muntei, Kec. Siberut Selatan
34	Gereja GKPM Mentawai	Dusun Sibaibai Desa Sikakap Kec sikakap

Tabel 4.45
DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH ORGANISASI DAN LEMBAGA KEAGAMAAN TAHUN 2025

NO	NAMA KELOMPOK PENERIMA HIBAH	ALAMAT KELOMPOK
	Bidang Perikanan Tangkap	
1	Kelompok Nelayan Tanjung Sikabai	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan
2	Kelompok Nelayan Sipatatak Iba	Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara
3	Kelompok Nelayan Pamuterat	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
4	Bidang Perikanan Budidaya	
5	KUB Laut Biru	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
6	KUB Sak Sak	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
7	KUB Bulu Takep	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
8	KUB Galai Simaeruk	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
9	KUB Silibetat	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
10	Kelompok Itcopei Kai	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
11	Kelompok Pembudidaya Siberut Jaya Mandiri	Kecamatan Siberut Barat Daya
12	Kelompok Pembudidaya Taileleu	Kecamatan Siberut Barat Daya
13	Kelompok Pembudidaya Peipei	Kecamatan Siberut Barat Daya
14	Kelompok Pembudidaya Obboi Koat	Desa Sikakap,Kecamatan Sikakap
15	Kelompok Pembudidaya Sikakap 1	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
16	Kelompok Pembudidaya Sikakap 2	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
17	Kelompok Pembudidaya Sikakap 3	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
18	Kelompok Pembudidaya Pei-Pei Jaya	Kecamatan Siberut Barat Daya
19	Kelompok Pembudidaya Pegu Indah	Kecamatan Siberut Barat Daya
20	Kelompok Pembudidaya Abadi	Kecamatan Siberut Barat Daya

NO	NAMA KELOMPOK PENERIMA HIBAH	ALAMAT KELOMPOK
21	Kelompok Pembudidaya Sejati	Kecamatan Siberut Barat Daya
22	Kelompok Budidaya Simatoro	Kecamatan Siberut Selatan
23	Kelompok Budidaya Pasorot Buluk	Kecamatan Siberut Selatan
24	Kelompok Budidaya Maju Tak Gentar	Kecamatan Siberut Selatan
25	Kelompok Budidaya Simaeruk	Kecamatan Siberut Barat Daya
26	Kelompok Budidaya Rop Ake	Kecamatan Siberut Barat Daya
27	Kelompok Pembudidaya Tonembaga	Kecamatan Siberut Selatan
28	Kelompok Pembudidaya Ombaga	Kecamatan Siberut Barat Daya
29	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
30	Kelompok Pengolahan Usaha Bunda	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
31	Kelompok Pengolahan UP2K aleita	Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025

Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 terdiri dari program prioritas yang menunjang pencapaian tujuan pembangunan. Rincian program prioritas, dihubungkan dengan prioritas nasional tahun 2025 sebagaimana tabel 5.1 berikut.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**199.708.671.692,00**							**202.311.123.535,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**198.777.640.692,00**							**201.711.123.535,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**198.777.640.692,00**							**201.711.123.535,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**132.200.124.856,00**						**100 Persen**	**135.026.895.491,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Telaksananya Administrai Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	130.817.584.856,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 Persen	133.354.884.491,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1800 Orang/bulan	130.590.904.856,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		131.673.424.491,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	226.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.681.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 persen			100 persen	301.679.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 persen	310.511.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	301.679.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		310.511.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen			100 persen	449.151.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 persen	560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	260.229.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	39.725.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	129.697.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 bulan			12 bulan	84.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	84.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen			100 Persen	547.710.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 Persen	711.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	104.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		105.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	97.930.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		105.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	32.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	312.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APK SMP*** ***APK SMP*** ***APK PAUD*** ***Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetisi minimum*** ***Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum*** ***APM SPM SMP/ MTS/PAKET B*** ***APM SMP/MTs/Paket B*** ***APM SD /MI/ Paket A***	**100 persen** **100 persen** **>50 Persen** **>50 persen** **64.50 persen** **64,50 Persen** **88 persen** **100 persen** **100 Persen** **28 persen**			**100 persen** **100 Persen** **25 persen** **>50 persen** **>50 Persen** **62.50 persen** **62,50 Persen** **85 persen**	**66.438.060.836,00**						**100 persen** **100 persen** **>50 Persen** **>50 persen** **64.50 persen** **64,50 Persen** **88 persen** **100 persen** **100 Persen** **28 persen**	**66.684.028.044,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase SD Terakreditasi B*	100 persen			75 persen	32.177.055.910,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 persen	42.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2.443.671.588,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	1.983.473.522,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	1.429.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	1.688.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	844.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	175.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				220 Orang	4.454.852.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	1.258.620.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				100 Orang	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				3 Ruang	1.688.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	99.960.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	1.772.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				8 Satuan Pendidikan	107.428.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	1.955.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	11.673.820.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		20.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	352.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase SMP Terakreditasi B*	100 Persen			75 persen	29.973.252.176,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 Persen	20.631.673.424,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	999.997.680,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	1.607.097.680,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	1.299.413.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	1.013.298.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	5.074.727.136,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	3.280.176.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	1.522.466.320,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	290.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		131.673.424,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	425.683.960,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6000 Peserta Didik	7.423.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		8.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	150.002.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				150 Orang	3.374.918.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				250 Orang	877.674.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				35 Satuan Pendidikan	205.094.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	112.460.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	131.616.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				35 Satuan Pendidikan	183.957.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase TK Terakreditasi B*	75 Persen			35 persen	3.393.593.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75 Persen	3.052.154.620,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				58 Orang	130.751.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	214.195.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		214.195.120,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				116 Satuan Pendidikan	110.688.150,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				107 Satuan Pendidikan	1.437.959.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.437.959.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta didik	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				5 Paket	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase PKBM Terakreditasi B*	100 persen			35 persen	894.159.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 persen	200.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				200 Orang	69.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	149.990.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				13 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				13 Satuan Pendidikan	475.168.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar***	**3 persen**			**3 persen**	**66.154.000,00**						**3 persen**	**100.000,00**	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Budaya Mentawai untuk jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal*	25 Persen			1 buah	66.154.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25 Persen	100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	66.154.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan*** ***Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi*** ***Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1***	**95 persen** **25 persen** **100 persen**			**100 persen** **22 persen** **94 persen**	**73.301.000,00**						**95 persen** **25 persen** **100 persen**	**100.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan*	500 Dokumen			500 Dokumen	73.301.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500 Dokumen	100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	73.301.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**931.031.000,00**							**600.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**931.031.000,00**							**600.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)***	**64 Persen**			**64 Persen**	**455.903.000,00**						**64 Persen**	**300.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Sertifikasi Tenaga Permuseuman*	3 Objek			3 Objek	228.703.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Objek	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	228.703.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	2 Objek			2 Objek	227.200.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Objek	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	227.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Jumlah sanggar yang dibina***	**4 sanggar**			**4 sanggar**	**475.128.000,00**						**4 sanggar**	**300.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*	10 Orang			10 Orang	475.128.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10 Orang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				45 Orang	475.128.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						**89.880.076.996,00**							**67.834.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**89.880.076.996,00**							**67.834.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**89.880.076.996,00**							**67.834.361.165,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**72.703.223.435,00**						**100 Persen**	**59.804.361.165,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Sub Kegiatan			2 Sub Kegiatan	49.999.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Perencana Dinas Kesehatan dan Perencana Puskesmas Urusan Bidang Kesehatan	2 Sub Kegiatan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	24.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Perencana Dinas Kesehatan dan Perencana Puskesmas Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Perencana Dinas Kesehatan dan Perencana Puskesmas Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2 Sub Kegiatan			2 Sub Kegiatan	72.164.826.735,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pendukung Urusan Kesehatan	2 Sub Kegiatan	59.654.361.165,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				389 Orang/bulan	69.224.946.735,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pendukung Urusan Kesehatan		59.654.361.165,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen Dokumen	2.939.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Sub Kegiatan			1 SUB KEGIATAN	20.741.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	1 Sub Kegiatan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen Dokumen	20.741.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 Sub Kegiatan			7 Sub Kegiatan	270.685.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan	7 Sub Kegiatan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	16.505.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	11.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	49.279.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	65.020.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	20.010.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	108.871.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Sub Kegiatan			-	92.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	1 Sub Kegiatan	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	92.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 Sub Kegiatan			2 Sub Kegiatan	104.570.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan	2 Sub Kegiatan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	84.570.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**			**22 /1000 KH** **250 100 ribu/KH** **<5 persen** **85 persen** **90 /100.0 00 Pendudu**	**15.992.558.961,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**8.030.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan			10 Sub Kegiatan	9.862.557.778,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	900.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	2.708.343.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2000 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	4.215.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				20 Paket	1.999.999.978,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				8312 Keluarga	49.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				15 Paket	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	6.030.001.183,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	8.030.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	173.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	173.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	133.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	133.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	133.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	133.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	133.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	133.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	133.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	133.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	133.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	133.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	47.318.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	225.590.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	27.192.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	40.788.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	33.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	33.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	33.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	3.826.080.283,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	31.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	42.162.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Meningkatnya persentase Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*	2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan			2 Sub Kegiatan	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Pengelolah Media Informasi/Publikasi bidang Kesehatan	2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Pengelolah Media Informasi/Publikasi bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Jumlah Puskesmas Terakreditasi*** ***Persentase Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP/SIPAS***	**90 Persen** **90 Persen** **15 Puskesmas** **15 Puskesmas** **15 Puskesmas** **90 Persen** **15 Puskesmas** **90 Persen**			**12 Puskesmas** **90 Persen**	**834.294.600,00**						**90 Persen** **90 Persen** **15 Puskesmas** **15 Puskesmas** **15 Puskesmas** **90 Persen** **15 Puskesmas** **90 Persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota*	2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan			2 Sub Kegiatan	30.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan	2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan			1 Sub Kegiatan	804.294.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan	1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				128 Orang	804.294.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Rata-rata lama pasien dirawat***	**5 Hari**			**5 Hari**	**100.000.000,00**						**5 Hari**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan			1 Sub Kegiatan	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Rumah Industri dan Rumah Tangga	1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Rumah Industri dan Rumah Tangga		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	-			1 Sub Kegiatan	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Rumah Makan, Pengelola depot Air Minum	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				2 Jenis Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Rumah Makan, Pengelola depot Air Minum		0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Jumlah desa dengan PHBS***	**25 Desa**			**25 Desa**	**250.000.000,00**						**25 Desa**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	100 Persen			100 Persen	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya persentase Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	100 Persen			100 Persen	150.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**28.562.036.822,00**							**35.862.251.698,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28.562.036.822,00**							**35.862.251.698,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**28.562.036.822,00**							**35.862.251.698,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**23.803.129.458,00**						**100 Persen**	**27.428.808.337,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah* *Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah meningkatnya kesejahteraan ASN*	2 Sub Kegiatan			100 Persen 2 SubKegiatan 100 %	18.603.351.658,00			-	-	-	2 Sub Kegiatan	21.274.238.377,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/bulan	11.485.700.658,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.018.912.377,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	7.117.651.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.255.326.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran*	7 Sub Kegiatan			3 SubKegiatan 100 %	512.760.800,00			-	-	-	7 Sub Kegiatan	611.588.160,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.552.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.062.400,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	348.706.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		397.162.560,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	141.502.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		187.363.200,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah*	1 Sub Kegiatan			2 SubKegiatan 100 %	3.575.072.000,00			-	-	-	1 Sub Kegiatan	4.227.451.800,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	434.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		521.400.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	3.140.272.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.706.051.800,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2 Sub Kegiatan			100 Persen	1.111.945.000,00			-	-	-	2 Sub Kegiatan	1.315.530.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	345.465.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		360.850.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	766.480.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		954.680.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar*** ***Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk*** ***Akreditasi Rumah Sakit*** ***Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**			**100 %** **90/100000 Penduduk** **B** **Madya**	**4.758.907.364,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**8.433.443.361,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar* *Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai Standar*	10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan			17 Layanan 6 SubKegiatan	4.027.239.364,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan	7.649.133.361,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	1.344.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		1.745.818.171,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		3.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				220 Unit	261.360.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		281.360.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	2.221.879.364,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.421.955.190,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan* *Persentase Persentase Penyediaan kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			100 Persen 84 %	731.668.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	784.310.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	731.668.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		784.310.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PUSKESMAS MAPADDEGAT						**1.822.200.111,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.822.200.111,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.822.200.111,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**			**22 /1000 KH** **250 100 ribu/KH** **<5 Persen** **80 Persen** **85 Persen** **90 Persen**	**1.822.200.111,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	1.822.200.111,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS MAPADDEGAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.822.200.111,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	PUSKESMAS MAPADDEGAT
		PUSKESMAS SIOBAN						**1.950.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.950.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.950.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk***	**85 persen 85 persen B <5 persen 230 100 ribu/KH 85 persen 90 Persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen <5 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 85 persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 21/1000 KH B 85 persen 90 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 95/100.000 Penduduk 90 persen**			**22 /1000 KH 250 100 ribu/KH <5 Persen 80 Persen 85 Persen 90 /100.0 00 Penduduk**	**1.950.000.000,00**						**85 persen 85 persen B <5 persen 230 100 ribu/KH 85 persen 90 Persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen <5 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 85 persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 21/1000 KH B 85 persen 90 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 95/100.000 Penduduk 90 persen**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	1.950.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS SIOBAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1.950.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 2. Pemban gunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	PUSKESMAS SIOBAN
		PUSKESMAS BOSUA						**1.000.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.000.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI***	**85 persen 85 persen B <5 persen 230 100 ribu/KH 85 persen 90 Persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen <5 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 85 persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 21/1000 KH B 85 persen 90 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 95/100.000 Penduduk 90 persen**			**250 100 ribu/KH 80 Persen 85 persen**	**1.000.000.000,00**						**85 persen 85 persen B <5 persen 230 100 ribu/KH 85 persen 90 Persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen <5 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 85 persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 21/1000 KH B 85 persen 90 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 95/100.000 Penduduk 90 persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	1.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS BOSUA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	PUSKESMAS BOSUA
		PUSKESMAS MUARA SIBERUT						**1.846.828.900,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.846.828.900,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.846.828.900,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**			**22 /1000 KH** **250 /100Ribu** **80 Persen** **85 Persen** **90 Persen**	**1.846.828.900,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	1.846.828.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS MUARA SIBERUT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.846.828.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	PUSKESMAS MUARA SIBERUT
		PUSKESMAS PEIPEI						**1.480.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.480.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.480.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**			**22/ 1000 KH** **250 /100Ribu KH** **90 100.0 00 Penduduk** **90 Persen**	**1.480.000.000,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	1.480.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS PEIPEI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.480.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	PUSKESMAS PEIPEI
		PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP						**1.300.001.380,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.300.001.380,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.300.001.380,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**				**<5 Persen** **80 Persen** **80 %** **(Persen)** **85 Persen** **90 /100.0 00 Penduduk** **90 Persen**	**1.300.001.380,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	1.300.001.380,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.300.001.380,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP
		PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN						**1.499.999.750,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.499.999.750,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.499.999.750,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**			**22 /1000 KH** **250 100 ribu/KH** **90 Persen**	**1.499.999.750,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	1.499.999.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.499.999.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN
		PUSKESMAS BETAET						**999.671.422,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**999.671.422,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**999.671.422,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**			**22 /1000 KH** **250 100 ribu/KH** **<5 Persen** **80 Persen** **85 Persen** **90 /100.0 00 Penduduk**	**999.671.422,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	999.671.422,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS BETAET
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	999.671.422,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		0,00	PUSKESMAS BETAET
		PUSKESMAS SIKAKAP						**83.260.200,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**83.260.200,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**83.260.200,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen 85 persen B <5 persen 230 100 ribu/KH 85 persen 90 Persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen <5 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 85 persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 21/1000 KH B 85 persen 90 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 95/100.000 Penduduk 90 persen**			**22 /1000 KH 250 100 ribu/KH <5 Persen 80 Persen 85 Persen 90 /100.0 00 Penduduk 90 Persen**	**83.260.200,00**						**85 persen 85 persen B <5 persen 230 100 ribu/KH 85 persen 90 Persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen <5 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 85 persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 21/1000 KH B 85 persen 90 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 95/100.000 Penduduk 90 persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	83.260.200,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS SIKAKAP
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	83.260.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		0,00	PUSKESMAS SIKAKAP
		PUSKESMAS MALAKOPA						**1.100.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.100.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**			**22 /1000 KH** **250 100 ribu/KH** **<5 Persen** **80 Persen** **85 Persen** **90 100.0 00 Penduduk** **90 Persen**	**1.100.000.000,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	1.100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS MALAKOPA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	PUSKESMAS MALAKOPA
		PUSKESMAS BULASAT						**999.999.700,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**999.999.700,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**999.999.700,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**				**22 /1000 KH** **250 100 ribu/KH** **<5 Persen** **80 Persen** **85 Persen** **90 Persen**	**999.999.700,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	999.999.700,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS BULASAT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	999.999.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		0,00	PUSKESMAS BULASAT
		PUSKESMAS SAREREIKET						**899.999.400,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**899.999.400,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**899.999.400,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**			**22 /1000 KH** **250 Persen** **80 Persen** **85 Persen** **90 100.0 00 Penduduk** **90 Persen**	**899.999.400,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	899.999.400,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS SAREREIKET
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	899.999.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 2. Pemban gunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		0,00	PUSKESMAS SAREREIKET
		PUSKESMAS SIMATALU						**900.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**900.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**900.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen 85 persen B <5 persen 230 100 ribu/KH 85 persen 90 Persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen <5 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 85 persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 21/1000 KH B 85 persen 90 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 95/100.000 Penduduk 90 persen**			**22 /1000 KH 250 100 ribu/KH <5 Persen 80 Persen 90 /100.0 00 Pend uduk 90 Persen**	**900.000.000,00**						**85 persen 85 persen B <5 persen 230 100 ribu/KH 85 persen 90 Persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen <5 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 85 persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 21/1000 KH B 85 persen 90 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 95/100.000 Penduduk 90 persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	900.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS SIMATALU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	900.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		0,00	PUSKESMAS SIMATALU
		PUSKESMAS SIGAPOKNA						**999.999.840,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**999.999.840,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**999.999.840,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**			**22 /1000 KH** **250 100 ribu/KH** **<5 Persen** **80 Persen** **85 Persen** **90 /100.0 00 Penduduk** **90 Persen**	**999.999.840,00**						**85 persen** **85 persen** **B** **<5 persen** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **90 Persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **<5 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **85 persen** **<5 persen** **95/100.000 Penduduk** **21/1000 KH** **B** **85 persen** **90 persen** **95/100.000 Penduduk** **85 persen** **B** **21/1000 KH** **230 100 ribu/KH** **95/100.000 Penduduk** **90 persen**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	999.999.840,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS SIGAPOKNA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	999.999.840,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		0,00	PUSKESMAS SIGAPOKNA
		PUSKESMAS SAUMANGANYA						**1.000.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.000.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)*** ***Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)*** ***Prevalensi Gizi Kurang pada Balita*** ***Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan*** ***Cakupan Desa UCI*** ***Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*** ***Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah***	**85 persen 85 persen B <5 persen 230 100 ribu/KH 85 persen 90 Persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen <5 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 85 persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 21/1000 KH B 85 persen 90 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 95/100.000 Penduduk 90 persen**			**22 Persen 250 Persen <5 Persen 80 Persen 85 Persen 90 /100.0 00 Pend uduk 90 Persen**	**1.000.000.000,00**						**85 persen 85 persen B <5 persen 230 100 ribu/KH 85 persen 90 Persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen <5 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 85 persen <5 persen 95/100.000 Penduduk 21/1000 KH B 85 persen 90 persen 95/100.000 Penduduk 85 persen B 21/1000 KH 230 100 ribu/KH 95/100.000 Penduduk 90 persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			28 Sub Kegiatan	1.000.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	0,00	PUSKESMAS SAUMANGANYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		0,00	PUSKESMAS SAUMANGANYA
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**102.101.713.809,00**							**110.985.447.265,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**102.101.713.809,00**							**110.985.447.265,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**102.101.713.809,00**							**110.985.447.265,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**7.317.851.838,00**						**100 Persen**	**10.666.197.265,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya tahapan penyusunan perencanaan dan Evaluasi*	100 Persen			100 Persen	211.274.800,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 Persen	210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	72.899.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	138.375.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	5.703.482.638,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara	100 Persen	9.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	5.703.482.638,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara		9.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengadministrasian Aset Kewenangan SKPD*	2 Laporan			100 Persen	101.847.940,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Laporan	41.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	101.847.940,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		41.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD*	100 Persen			100 Persen	666.317.460,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 Persen	657.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.477.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.536.560,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		52.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	39.092.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		41.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	109.983.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.050.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	298.403.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		284.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	24.775.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan*	-			100 perse	131.400.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	136.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	92.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		97.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	39.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		39.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya keandalan BMD*	-			100 Persen	503.529.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	521.397.265,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	209.362.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		178.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	58.190.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		56.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	235.977.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		287.397.265,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Cakupan Jaringan Irigasi Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi***	**30 HA 8 Persen**			**28 HA 7,80 Persen**	**20.576.090.634,00**						**30 HA 8 Persen**	**21.978.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya cakupan layanan unit air baku* *Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir, abrasi, erosi, dan ekresi yang terlindungi*	2 Persen			3 Persen 1,8 Km	18.276.090.634,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kab. Kep. Mentawai	2 Persen	19.478.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1.700.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kab. Kep. Mentawai		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0,8 KM	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kab. Kep. Mentawai		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku														
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				2 Unit	12.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Kab. Kep. Mentawai		13.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				2 KM	3.400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kab. Kep. Mentawai		3.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				3 Dokumen	176.090.634,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kab. Kep. Mentawai		178.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi* *Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten*	2 Persen			3 Persen 57,53 Persen	2.300.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	2 Persen	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3,5 KM	1.300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak***	**65 persen**			**65 persen**	**12.515.332.732,00**						**65 persen**	**12.500.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM*	3 Persen			3 Persen	12.515.332.732,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	3 Persen	12.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100 Orang	293.804.932,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	4.259.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				20 Liter/Detik	12.169.876.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	47.392.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan***	**52 persen**			**52 persen**	**7.520.593.000,00**						**52 persen**	**7.500.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya kawasan permukiman dengan fasilitas persampahan*	3 Persen			1 Persen	7.520.593.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	3 Persen	7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				3 Ton/hari	7.500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				0 Dokumen	20.593.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah***	**33 persen**			**33 persen**	**3.394.495.000,00**						**33 persen**	**4.361.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah tangga yang memiliki tangki septik*	2 Persen			20 Persen	3.394.495.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	2 Persen	4.361.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				557 Rumah Tangga	3.355.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		4.361.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	39.495.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase Berkurangnya titik genangan air***	**73 persen**			**73 persen**	**1.014.439.000,00**						**73 persen**	**1.000.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kawasan perkotaan yang dilengkapi drainase lingkungan*	18 Persen			12,5 Persen	1.014.439.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	18 Persen	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				200 M	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	14.439.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Rasio Kepatuhan IMB***	**82 Persen**			**82 Persen**	**200.382.100,00**						**82 Persen**	**0,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB/PBG*	3 Persen			4 Persen	200.382.100,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	3 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	156.478.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	43.904.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Jumlah Kawasan Stategis Yang Ditata bangunan dan Lingkungan***	**1 Kawasan**			**1 Kawasan**	**764.000.000,00**						**1 Kawasan**	**1.000.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya Tersediana acuan kawasan penataan bangunan dan lingkungannya Tersediannya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)*	1 Persen			1 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen	764.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Persen	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	764.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase Jalan Mantap***	**12 Persen**			**12 Persen**	**45.884.169.957,00**						**12 Persen**	**50.030.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten*	2 Persen			2 Persen	45.884.169.957,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	2 Persen	50.030.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				3 Dokumen	1.608.042.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				19,42 KM	1.434.549.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				14.95 KM	17.074.698.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				3.47 KM	18.695.598.427,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	2.226.727.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	3.062.353.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1130,2 KM	839.555.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pemban gunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		830.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				7,30 KM	942.646.780,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pemban gunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis memiliki sertifikat kompetensi***	**8 Persen**			**8 Persen**	**65.918.000,00**						**8 Persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Sistem Inormasi Jasa Konstruksi*	12,5 Persen			1 Dokumen	65.918.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	12,5 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				0 Dokumen	65.918.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Ketaatan Terhadap RTRW***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.848.441.548,00**						**100 Persen**	**1.950.250.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen RTRW dan RTRR Kabupaten yang ditetapkan dan disosialisasikan Meningkatnya Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang*	10 Persen			2 Dokumen 100 persen	245.641.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	10 Persen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	101.088.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	144.553.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah* *Meningkatnya koordinasi dan singkronisasi perencanaan tata ruang daerah*	10 Persen			2 Dokumen 100 persen	1.788.415.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	10 Persen	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1.788.415.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah*	100 Persen			2 Dokumen	69.026.548,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Persen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	69.026.548,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Meningkatnya koordinasi dan singkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah*	100 Persen			4 Dokumen 100 persen	745.359.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Persen	200.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	204.952.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	540.407.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT						**589.906.900,00**							**648.897.611,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**589.906.900,00**							**648.897.611,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**589.906.900,00**							**648.897.611,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*** ***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 per 100 Persen**	**589.906.900,00**						**100 Persen**	**648.897.611,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya keandalan BMD*	-			100 Persen	589.906.900,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT	-	648.897.611,00	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	589.906.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT		648.897.611,00	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT
		UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH						**2.504.838.100,00**							**3.500.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.504.838.100,00**							**3.500.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**2.504.838.100,00**							**3.500.000.000,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak***	**65 persen**			**65 persen**	**2.504.838.100,00**						**65 persen**	**3.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM*	3 Persen			3 Persen	2.504.838.100,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	3 Persen	3.500.000.000,00	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 Unit	2.504.838.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		3.500.000.000,00	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**16.466.102.882,00**							**19.510.550.040,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.466.102.882,00**							**19.510.550.040,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**16.466.102.882,00**							**19.510.550.040,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**3.378.869.482,00**						**100 Persen**	**4.076.431.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*	100 persen			100 persen	2.189.855.582,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 persen	2.841.240.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			21 Orang/bulan	2.098.615.582,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25 Orang/bulan	2.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen			12 Dokumen	91.240.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14 Dokumen	91.240.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	100 persen			100 persen	249.015.800,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 persen	329.599.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	28.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	62.106.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		106.599.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	29.792.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 Paket	35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen			20 Dokumen	18.555.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	100.112.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	100 persen			100 persen	97.156.100,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 persen	95.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	86.476.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 persen			100 persen	637.112.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 persen	560.592.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	93.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	544.112.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		560.592.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah*	100 persen			100 persen	205.730.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 persen	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	56.762.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	35.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	13.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.068.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***persentase kawasan permukiman yang tertata Persentase lingkungan pemukiman kumuh***	**17 persen**			**15 persen 40 persen**	**4.304.644.800,00**						**17 persen**	**4.673.155.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	100 persen			100 persen	49.999.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat kepulauan mentawai	100 persen	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen			2 Dokumen	49.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat kepulauan mentawai	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupten/kota Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana*	100 persen			100 persen 100 persen	145.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	100 persen	165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	290 Orang			250 Orang	145.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Sagulubbeg Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	280 Orang	165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota*	100 persen			100 persen	4.026.061.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	masyarakat desa sirilogui dan dusun labuan bajau	100 persen	4.287.241.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah			30 Unit Rumah	978.227.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	masyarakat desa sirilogui dan dusun labuan bajau	20 Unit Rumah	1.053.872.640,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	70 Unit Rumah			50 Unit Rumah	3.047.833.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sotboyak Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	INSENTIF FISKAL	-	-	masyarakat desa sirilogui dan dusun labuan bajau	70 Unit Rumah	3.233.368.560,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana*	100 persen			100 persen 100 persen	83.584.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 persen	160.914.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen			2 Dokumen	83.584.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Dokumen	160.914.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase lingkungan pemukiman kumuh***	**52 persen**			**52 persen**	**5.356.785.400,00**						**52 persen**	**6.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	100 persen			-	5.356.785.400,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat Kab.Kepulauan Mentawai	100 persen	6.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	65 Unit Rumah			210 Unit Rumah	5.027.151.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat Kab.Kepulauan Mentawai	70 Unit Rumah	6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen			1 Dokumen	177.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat Kab.Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	151.934.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kab.Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman Cakupan Kawasan Permukiman yang terakses listrik***	**65 persen**			**63 persen 95.35 Persen**	**3.425.803.200,00**						**65 persen**	**4.110.963.840,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Meningkatnya permukiman yang didukung oleh PSU Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU Perumahan*	100 persen			100 persen 100 persen	3.425.803.200,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat kepulauan mentawai	100 persen	4.110.963.840,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi			3 Lokasi	3.425.803.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat kepulauan mentawai	16 Lokasi	4.110.963.840,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						**8.220.361.660,00**							**9.444.731.144,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.220.361.660,00**							**9.444.731.144,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**8.220.361.660,00**							**9.444.731.144,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**6.070.104.460,00**						**100 Persen**	**7.307.880.344,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah*	100 Persen			100 persen	2.994.463.060,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100 Persen	3.654.532.294,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.949.013.060,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		3.608.982.294,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	45.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		45.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan*	100 persen			100 persen	237.473.400,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100 persen	348.358.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50.619.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		162.358.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	18.910.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		17.999.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	149.944.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	2.478.168.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100 Persen	2.844.590.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.427.768.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		2.794.590.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemeliharaan Kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah*	100 Persen			100 Persen	360.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100 Persen	460.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		40.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	19.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Penegakan PERDA***	**89 Persen**			**89 Persen**	**1.442.521.200,00**						**89 Persen**	**1.489.703.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota*	90 Persen			80 Persen	1.248.917.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan Pelajar	90 Persen	1.296.099.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	326.408.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan Pelajar		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				1 laporan	358.490.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Masyarakat dan Pelajar		358.490.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	237.609.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Masyarakat dan Pelajar		237.609.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				2 Unit	326.408.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat dan Pelajar		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PPNS*	30 Persen			3 orang	193.604.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	ASN Satpol PP	30 Persen	193.604.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	193.604.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	ASN Satpol PP		193.604.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase kejadian kebakaran yang tertangani***	**100 persen**			**100 persen**	**707.736.000,00**						**100 persen**	**647.147.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pencegahan/Penanganan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Kondisi Baik*	100 Persen			90 Persen	707.736.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100 Persen	647.147.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	216.147.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		216.147.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		182.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				15 Orang	241.589.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		249.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**5.846.126.758,00**							**6.716.272.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.771.138.058,00**							**6.641.272.477,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5.771.138.058,00**							**6.641.272.477,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah***	**80 Persen**			**80 Persen**	**4.428.883.658,00**						**80 Persen**	**4.671.272.477,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya perencanaan, pengganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100 Persen			6 Dokumen	45.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Persen	58.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			6 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	6 Dokumen	28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN*	100 Persen			20 Orang	2.292.281.758,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	100 Persen	2.989.152.477,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan			20 Orang/bulan	2.222.201.758,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	28 Orang/bulan	2.914.152.477,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen			6 Dokumen	70.080.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	2 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	100 Persen			50 Jenis	235.781.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	100 Persen	254.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket			1 Paket	7.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	5 Paket	9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket			1 Paket	67.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	10 Paket	70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket			5 Paket	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	7 Paket	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			12 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	12 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan			12 Laporan	129.883.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	15 Laporan	140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	80 Persen			1 Jenis	549.900.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	80 Persen	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit			4 Unit	49.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	3 Unit	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen			2 Jenis	1.123.120.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	100 Persen	1.125.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			2 Laporan	73.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	3 Laporan	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	250 Laporan			12 Laporan	1.050.120.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	63 Laporan	1.050.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	80 Persen			3 Jenis	182.800.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	80 Persen	195.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			6 Unit	162.990.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	16 Unit	170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit			5 Unit	19.810.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	4 Unit	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase Bencana Tertangani***	**100 Persen**			**100 Persen**	**1.342.254.400,00**						**100 Persen**	**1.970.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota*	80 Persen			2 Jenis	199.995.750,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	80 Persen	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100 Orang	199.995.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	80 Persen			6 Jenis	554.974.900,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	80 Persen	940.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0 Unit			6 Unit	55.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	0 Unit	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				100 Orang	79.992.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	51.321.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	169.990.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		190.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	198.671.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban*	100 Persen			6 Jenis	537.285.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	100 Persen	700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0 Dokumen			6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	0 Dokumen	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	2000 Orang			1000 Orang	219.996.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	500 Orang	290.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang			1000 Orang	217.289.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	1000 Orang	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana*	100 Persen			2 Jenis	49.998.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	100 Persen	80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	300 Dokumen			5 Kegiatan	49.998.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	50 Dokumen	80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**74.988.700,00**							**75.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**74.988.700,00**							**75.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah***	**80 Persen**			**80 Persen**	**74.988.700,00**						**80 Persen**	**75.000.000,00**	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	80 Persen			3 Jenis	74.988.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	80 Persen	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit			2 Unit	74.988.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	2 Unit	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**5.646.056.414,00**							**6.057.917.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.071.056.714,00**							**5.476.562.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**5.071.056.714,00**							**5.476.562.029,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah***	**100 persen**			**100 persen**	**4.077.680.314,00**						**100 persen**	**4.472.258.089,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	2/1 dokumen/laporan			2/1 dokumen/laporan	13.303.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A	2/1 dokumen/laporan	13.449.434,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	13.303.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		13.449.434,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase gaji dan honor ASN yang terbayar*	100 persen			100 persen	3.133.244.564,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A	100 persen	3.517.433.545,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.054.104.564,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		3.437.423.005,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	79.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		80.010.540,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor*	100 persen			100 persen	252.905.900,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A	100 persen	211.355.768,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		8.593.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	26.598.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		26.891.286,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	48.416.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		48.949.385,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.199.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		14.355.593,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	155.191.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		112.566.004,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah yang diadakan*	100 Persen			100 Persen	12.935.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A	100 Persen	13.077.791,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	12.935.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		13.077.791,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar*	100 persen			100 persen	470.460.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A dan Pegawai Honorer	100 persen	519.967.410,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	14.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A dan Pegawai Honorer		58.587.450,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	456.360.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A dan Pegawai Honorer		461.379.960,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah layak pakai*	100 persen			100 persen	194.831.350,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Barang Milik Daerah DinsisP3A	100 persen	196.974.141,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	71.250.050,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Barang Milik Daerah DinsisP3A		72.033.851,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	21.120.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Barang Milik Daerah DinsisP3A		21.353.230,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	20.460.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Barang Milik Daerah DinsisP3A		20.685.060,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	82.000.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Barang Milik Daerah DinsisP3A		82.902.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase penurunan PMKS***	**28 Persen**			**28 Persen**	**250.000.000,00**						**28 Persen**	**252.750.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang dilatih*	100 Persen			100 Persen	250.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Wanita rawan sosial ekonomi, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna	100 Persen	252.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Wanita rawan sosial ekonomi, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna		50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Wanita rawan sosial ekonomi, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna		101.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Wanita rawan sosial ekonomi, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna		101.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran***	**100 Persen**			**100 Persen**	**375.000.000,00**						**100 Persen**	**379.125.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan*	100 Persen			100 Persen	375.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 Persen	379.125.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		101.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		101.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	125.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		126.375.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial***	**100 Persen**			**100 Persen**	**168.376.400,00**						**100 Persen**	**170.228.940,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data fakir miskin yang valid* *Persentase PMKS menerima jaminan*	100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	168.376.400,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 Persen 100 Persen	170.228.940,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				200 Keluarga	81.623.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		82.521.055,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Keluarga	86.753.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		87.707.885,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran***	**100 Persen**			**100 Persen**	**200.000.000,00**						**100 Persen**	**202.200.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase korban bencana mendapatkan bantuan*	100 Persen			100 Persen	150.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat korban bencana	100 Persen	151.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat korban bencana		50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat korban bencana		50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				140 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat korban bencana		50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah masyarakat korban bencana yang diberdayakan*	100 Persen			20 orang	50.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Tagana	100 Persen	50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Tagana		50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**574.999.700,00**							**581.355.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**574.999.700,00**							**581.355.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran*** ***Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya***	**25 OPD** **75 Persen**			**20 OPD** **75 Persen**	**219.999.800,00**						**25 OPD** **75 Persen**	**222.420.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah OPD yang Mengikuti pelembagaan PUG*	23 OPD			22 OPD	124.819.800,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD di Kabupaten kepulauan mentawai	23 OPD	126.193.020,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	46.981.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD di Kabupaten kepulauan mentawai		47.497.791,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				20 Orang	77.838.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD di Kabupaten kepulauan mentawai		78.695.229,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan*	1 Lembaga			1 lembaga	95.180.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD di Kabupaten kepulauan mentawai	1 Lembaga	96.226.980,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	95.180.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD di Kabupaten kepulauan mentawai		96.226.980,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**79.999.900,00**						**100 Persen**	**80.880.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen/perangkat daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota*	1 Dokumen			1 Dokumen	79.999.900,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD, Muspika, Pemerintahan Desa/Dusun, Lembaga Masyarakat, Unsur Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Rentan Kekerasan Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	80.880.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	79.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD, Muspika, Pemerintahan Desa/Dusun, Lembaga Masyarakat, Unsur Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Rentan Kekerasan Kabupaten Kepulauan Mentawai		80.880.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Jumlah pencanangan kecamatan layak anak***	**5 Kecamatan**			**5 Kecamatan**	**140.000.000,00**						**5 Kecamatan**	**141.540.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA*	7 Organisasi			4 lembaga	140.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, Non pemerintah, Media, dunia usaha, Masyarakat dan Anak	7 Organisasi	141.540.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				3 Organisasi	95.189.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, Non pemerintah, Media, dunia usaha, Masyarakat dan Anak		96.236.079,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	44.811.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, Non pemerintah, Media, dunia usaha, Masyarakat dan Anak		45.303.921,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**135.000.000,00**						**100 Persen**	**136.515.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak*	18 OPD			18 OPD	94.198.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD, Muspika, Pemerintahan Desa/Dusun, Lembaga Masyarakat, Unsur Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Rentan Kekerasan	18 OPD	95.264.178,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				30 Orang	40.082.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD, Muspika, Pemerintahan Desa/Dusun, Lembaga Masyarakat, Unsur Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Rentan Kekerasan		40.552.902,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	54.116.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD, Muspika, Pemerintahan Desa/Dusun, Lembaga Masyarakat, Unsur Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Rentan Kekerasan		54.711.276,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan tingkat daerah*	2 Lembaga			2 Lembaga	40.802.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	UPTD, P2TP2A Kabupaten/Kecamatan, PATBM, Lembaga Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Lembaga	41.250.822,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				60 Orang	40.802.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	UPTD, P2TP2A Kabupaten/Kecamatan, PATBM, Lembaga Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai		41.250.822,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PPA						**200.000.000,00**							**202.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**200.000.000,00**							**202.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**200.000.000,00**							**202.200.000,00**	
1.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**50.000.000,00**						**100 Persen**	**50.550.000,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi*	1 Layanan			1 Layanan	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Perempuan korban kekerasan	1 Layanan	50.550.000,00	UPTD PPA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Perempuan korban kekerasan		50.550.000,00	UPTD PPA
2.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**150.000.000,00**						**100 Persen**	**151.650.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi*	1 Layanan			1 Layanan	150.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Anak korban kekerasan	1 Layanan	151.650.000,00	UPTD PPA
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				7 Layanan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Anak korban kekerasan		151.650.000,00	UPTD PPA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						**17.554.206.590,00**							**18.107.840.354,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.429.994.800,00**							**1.230.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**1.429.994.800,00**							**1.230.000.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Skor Indek Ketahanan Pangan***	**54 persen**			**54 persen**	**1.429.994.800,00**						**54 persen**	**1.230.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Alat untuk melihat keseimbangan antara ketersediaan pangan dan penggunaan pangan Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat Terbinanya kelompok tani Daerah Penanganan Stunting*	1 dokumen			1 dokumen 58 persen 13 Kelompok	1.199.997.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	kelompok	1 dokumen	1.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				10 laporan Laporan	999.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	kelompok		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				3 Keluarga	199.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	kelompok		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Cadangan Pangan Tersedinya cadangan beras*	48 ton			2 paket 8602 Kg	229.997.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	OPD	8 ton	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	69.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	OPD		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	159.998.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	OPD		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**16.104.211.790,00**							**16.857.840.354,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**16.104.211.790,00**							**16.857.840.354,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**9.309.617.090,00**						**100 Persen**	**10.038.237.445,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya gaji dan Tunjangan PNS untuk satu tahun* *Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan satu tahun*	-			76 Orang 4 Orang	7.205.061.090,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD	-	7.958.693.445,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	7.141.581.090,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		7.895.213.445,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	63.480.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD		63.480.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terbayarnya Pengeluaran tetang Administrasiumum Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	131.706.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD	-	131.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.995.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	31.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		31.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		16.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	69.911.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (gaji pegawai kontrak)* *Terbayarnya tagihan Air* *Terbayarnya tagihan listrik*	-			12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.903.850.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD	-	1.878.744.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	92.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.811.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		1.788.744.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	-			3 Jenis	69.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD	-	69.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Meningkatnya Perekonomian masyarakat***	**-**			**60 Persen**	**3.853.349.100,00**						**-**	**3.853.362.409,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Terpenuhinya Sara dan Prasarana Pertanian*	-			3 Jenis	1.823.360.200,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani	-	1.823.362.409,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	1.823.360.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani		1.823.362.409,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*terbelinya obat obat ternak*	-			10 jenis	49.989.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Ternak	-	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				12 Laporan	49.989.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Ternak		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Bertambahnya populasi ternak tersedianya bibit ternak*	-			166 Ekor 1100 ekor	1.979.999.900,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Ternak	-	1.980.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1100 Ekor	1.979.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Ternak		1.980.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Meningkatnya Perekonomian masyarakat***	**60 Persen**			**60 Persen**	**2.535.981.400,00**						**60 Persen**	**2.406.240.500,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*terbangunya 2 unit jalan uasaha tani dan 3 uni jaringan irigasi* *Terbangunya Jalan Usaha Tani* *Terbangunya Jaringan Irigasi*	-			5 unit 206 meter 534,3 meter	2.535.981.400,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Tani	-	2.406.240.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	606.231.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL, INSENTIF FISKAL	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Tani		606.240.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				3 Unit	1.929.749.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Tani		1.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Meningkatnya Perekonomian masyarakat***	**60 Persen**			**60 Persen**	**59.999.600,00**						**60 Persen**	**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Teratasinya serangan hama penyakit tanaman kelapa*	-			3 Ha	59.999.600,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Tani	-	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				3 Ha	59.999.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Tani		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Meningkatnya Pengetahuan Penyuluh***	**40 Persen**			**40 Persen**	**345.264.600,00**						**40 Persen**	**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*terlatihnya tenaga penyuluh pertanian PNS*	-			16 orang	345.264.600,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD	-	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				85 Orang	345.264.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	X	**NON URUSAN**						**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**20.000.000,00**						**100 Persen**	**20.000.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah dalam Proses Perencanan dan Penganggaran*	-			100 persen	20.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD	-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						**5.719.625.993,00**							**6.834.307.675,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.719.625.993,00**							**6.834.307.675,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**5.719.625.993,00**							**6.834.307.675,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**4.213.062.054,00**						**100 Persen**	**5.152.187.203,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terwujudnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*	1 Dokumen			1 Dokumen	4.357.800,00			-	-	-	1 Dokumen	4.793.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.211.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.432.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.145.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.360.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen			100 Persen	2.392.719.878,00			-	-	-	100 Persen	3.187.540.039,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.275.479.878,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.058.576.039,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	117.240.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		128.964.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terwujudnya kegiatan administrasi umum daerah*	100 Persen			100 Persen	390.680.168,00			-	-	-	100 Persen	429.748.185,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6.610.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.271.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	174.440.168,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		191.884.185,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.560.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	194.030.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		213.433.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen			100 Persen	934.577.500,00			-	-	-	100 Persen	1.028.035.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	48.141.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		52.955.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	886.436.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		975.079.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah*	100 Persen			100 Persen	490.726.708,00			-	-	-	100 Persen	502.070.479,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	86.962.758,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.659.034,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	393.653.950,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		395.290.445,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.110.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.121.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang***	**100 persen**			**100 persen**	**200.000.000,00**						**100 persen**	**220.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan*	2 dokumen			1 dokumen	200.000.000,00			-	-	-	0 dokumen	220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani***	**100 persen**			**100 persen**	**317.862.000,00**						**100 persen**	**349.648.200,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air dan Udara*	-			1 Dokumen	317.862.000,00			-	-	-	-	349.648.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	76.862.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.548.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	41.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tindak lanjuti***	**100 persen**			**100 persen**	**199.999.879,00**						**100 persen**	**219.999.867,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota*	1 Laporan			1 Laporan	199.999.879,00			-	-	-	1 Laporan	219.999.867,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				16 Badan Usaha	199.999.879,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		219.999.867,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	***Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan***	**5 MHA**			**5 MHA**	**161.341.960,00**						**5 MHA**	**177.476.156,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Terwujudnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*	6 MHA			6 MHA	94.305.000,00			-	-	-	6 MHA	103.735.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	94.305.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.735.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Terwujudnya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*	6 MHA			5 MHA	67.036.960,00			-	-	-	5 MHA	73.740.656,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	67.036.960,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.740.656,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
6.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***persentase sampah yang dikelola***	**-**			**9 persen**	**627.360.100,00**						**-**	**714.996.249,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*	-			18 Unit	545.360.500,00			-	-	-	-	604.996.370,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				3 Kelompok	95.364.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				18 Unit	149.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		164.999.780,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				2 Dokumen	199.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				9,843 Ton	99.996.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.996.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	*Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta*	-			9 Persen	81.999.600,00			-	-	-	-	109.999.879,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	81.999.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.999.879,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**5.244.898.721,00**							**5.884.816.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.244.898.721,00**							**5.884.816.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.244.898.721,00**							**5.884.816.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**4.117.070.381,00**						**100 Persen**	**5.048.816.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/pedoman perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran*	85 persen			85 persen	54.873.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil	85 persen	56.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	54.873.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil		56.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*meningkatnya kesejahteraan ASN*	100 persen			100 persen	2.450.263.381,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil	100 persen	3.291.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2.359.753.381,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil		3.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	90.510.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil		91.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*	100 persen			100 persen	377.336.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil	100 persen	494.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.426.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil		13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	126.802.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	75.277.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil		76.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil		14.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	148.430.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil		261.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan opd meningkatnya kesadaran perangkat daerah pentingnya administrasi BMD*	70 persen			65 persen 100 persen	153.303.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil	70 persen	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	65.118.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pegawai disdukcapil		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	88.185.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai disdukcapil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*	100 persen			100 persen	987.816.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	dinasdukcapil	100 persen	989.416.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	68.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	dinasdukcapil		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	919.416.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	dinasdukcapil		919.416.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen			-	93.477.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	dinasdukcapil	100 persen	68.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	81.427.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	dinasdukcapil		68.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	12.050.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	dinasdukcapil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***jumlah laporan hasil peningkatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk*** ***Persentase data kependudukan yang valid dan update***	**90 Persen**			**4 laporan 75 Persen**	**489.999.800,00**						**85 Persen**	**550.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*hasil peningkatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk*	-			4 laporan	240.939.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat/Penduduk	-	350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	240.939.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat/Penduduk		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*tersedianya dokumen pendaftaran penduduk*	-			7000 keping	249.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat/Penduduk	-	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2 Dokumen	249.060.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat/Penduduk		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk***	**99.30 Persen**			**7 laporan 85 Persen 99.30 Persen**	**299.999.600,00**						**99.30 Persen**	**181.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pencatatan sipil terpenuhinya dokumen Pencatatan Sipil (Akta lahir, akta kawin,akta cerai,akta kematian)*	-			7 laporan 90 persen	294.095.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat/Penduduk	-	175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	294.095.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat/Penduduk		175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	5.903.900,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	5.903.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Meningkatnya pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	**-**			**100 Persen**	**304.687.500,00**						**-**	**75.000.000,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terkelolanya informasi adminitrasi kependudukan*	-			100 Persen	130.576.500,00			-	-	Masyarakat/Penduduk	-	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				6 Dokumen	51.524.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat/Penduduk		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				6 Laporan	79.052.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat/Penduduk		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Tersedianya layanan adminduk yang memadai di Dinas dan Semua Kecamatan*	-			100 Persen	174.111.000,00			-	-	Kecamatan	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10 Laporan	174.111.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kecamatan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***jumlah ketersediaan dokumen kependudukan Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama***	**70 Persen**			**100 buku 60 Persen**	**33.141.440,00**						**70 Persen**	**30.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*jumlah dokumen kependudukan meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya dokumen kependudukan Tersedianya data profile kependudukan*	2 dokumen			100 buku 2 dokumen 100 persen	33.141.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	skpd	2 dokumen	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	33.141.440,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	skpd		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**8.502.593.050,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.423.186.650,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**5.888.745.650,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**4.721.395.050,00**						**100 Persen**	**0,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	41.245.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	41.245.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*	-			100 Persen	2.990.171.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN DPMDP2KB	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2.924.531.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	65.640.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perkantoran*	-			100 Persen	175.760.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pegawai DPMDP2KB	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	34.867.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pegawai DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	55.601.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pegawai DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pegawai DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75.302.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pegawai DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	1.485.720.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas DPMDP2KB	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.485.720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang berkondisi baik*	-			100 Persen	28.498.250,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Dinas DPMDP2KB	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	13.298.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Dinas DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	8.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	6.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa dengan Realisasi Anggaran diatas 90%***	**92 Persen**			**92 Persen**	**558.418.600,00**						**92 Persen**	**0,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	43 Desa 1 Dokumen			100 Persen	558.418.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Desa	43 Desa 1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				43 Dokumen	95.296.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				43 Dokumen	128.968.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				129 Orang	95.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				12 Dokumen	109.154.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				27 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				43 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				43 Desa	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang Aktif***	**105 Lembaga Kemasyarakat**			**105 Lembaga Kemasyarakat**	**608.932.000,00**						**105 Lembaga Kemasyarakat**	**0,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang aktif*	-			105 Lembaga Kemasyarakat	608.932.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	40.837.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				43 Dokumen	418.095.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**2.534.441.000,00**							**0,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Laju Pertumbuhan Penduduk***	**1.3 Persen**			**1.3 Persen**	**163.800.000,00**						**1.3 Persen**	**0,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	1,5 %			100 Persen	163.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat	1,5 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				43 Laporan	43.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen Dokumen	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Rasio Akseptor KB***	**64 Persen**			**64 Persen**	**1.743.041.000,00**						**64 Persen**	**0,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	1 Dokumen			70 Persen	1.085.995.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	139.996.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	496.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	199.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	1 Laporan			100 Persen	129.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat	1 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				43 Orang	129.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*	10 Faskes			100 Persen	252.804.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat	10 Faskes	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				10 Laporan	13.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				50 Orang	223.508.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	15.796.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	1 Dokumen			100 Persen	275.242.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				10 Dokumen	3.746.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Kampung	271.496.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera***	**4 Persen**			**4 Persen**	**627.600.000,00**						**4 Persen**	**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			100 Persen	300.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				30 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkanya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			100 Persen	327.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 laporan	156.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				50 laporan	171.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X	**NON URUSAN**						**79.406.400,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**79.406.400,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**79.406.400,00**						**100 Persen**	**0,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perkantoran*	-			100 Persen	35.006.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	26.006.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	44.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**21.786.773.704,00**							**28.337.400.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.786.773.704,00**							**28.337.400.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**21.786.773.704,00**							**28.337.400.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota***	**-**			**100 persen**	**8.113.892.404,00**						**-**	**8.552.000.000,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan*	-			57 orang	5.010.152.154,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN	-	5.093.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	4.910.157.154,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN		5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	99.995.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN		93.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*tersedianya komponen instalasi listrik, bahan logistik, barang cetakan , bahan bacaan dan perundang-undangan dan rapat koordinasi dan konsultasi*	-			5 Paket	496.001.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan wartawan	-	404.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan wartawan		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.090.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan wartawan		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	81.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan wartawan		81.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	19.995.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan wartawan		21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	249.916.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan wartawan		112.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah aset yang dibebaskan*	-			1 hektar	9.740.500,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pemerintah	-	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pemerintah		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terlaksananya penunjang urusan pemerintahan*	-			184 Orang	2.480.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan non ASN	-	2.635.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan non ASN		135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan non ASN		2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			1 Paket	117.998.750,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN perhubungan	-	70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	117.998.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN perhubungan		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***	**-**			**90 Persen**	**1.165.618.800,00**						**-**	**3.283.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Sebagai Pedoman penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ*	-			3 dokumen 100 Persen 4 Lokasi	832.560.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	832.560.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pelaku Usaha		21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Terciptanya keselamatan Terciptanya Keselamatan Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	-			100 unit 100 unit 85 persen 90 persen	294.056.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat	-	3.046.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				40 Unit	9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Unit	9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				250 Unit	264.835.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		2.625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Tersedianya terminal penumpang tipe C*	-			85 persen	4.658.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat, pelaku usaha transportasi darat dan pemerintahan	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	4.658.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat, pelaku usaha transportasi darat dan pemerintahan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah lokasi parkir yang di fasilitasi*	-			4 Dokumen	9.740.500,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah kendaraan wajib KIR*	-			50 Unit	19.481.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemilik dan pengusaha kendaraan wajib KIR	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemilik dan pengusaha kendaraan wajib KIR		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemilik dan pengusaha kendaraan wajib KIR		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*	-			6 unit	5.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Badan Usaha Desa	-	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Unit	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Badan Usaha Desa		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*persentase dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan*	-			25 persen	32.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen Dokumen	20.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek*	-			1 Dokumen	10.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha transportasi	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	10.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot*	-			1 Dokumen	80.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pelaku Usaha transportasi	-	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen Dokumen	30.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pelaku Usaha transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen Dokumen	50.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pelaku Usaha transportasi		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Terselenggaranya Pengelolaan Pelayaran***	**-**			**6 Dokumen**	**12.507.262.500,00**						**-**	**16.502.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayaran*	-			6 Dokumen	12.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya doking kapal antar pulau* *Tersedianya BBM kapal antar pulau* *Tersedianya Subsidi kapal antar pulau, dan Padang - Mentawai*	-			5 kapal 63 Ton 2 kapal	12.500.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat, pemerinta dan Pelaku Usaha	-	16.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				11 Laporan	12.500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat, pemerinta dan Pelaku Usaha		16.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	*jumlah dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal*	-			1 Dokumen	100.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pemerintah	-	1.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen Dokumen	100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pemerintah		1.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*jumlah dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang difasilitasi*	-			1 Dokumen	150.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha transportasi	-	500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha transportasi		500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*jumlah dokumen Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang difasilitasi*	-			1 Dokumen	7.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha transportasi	-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	6.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha transportasi		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				1 unit Unit	200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**8.403.959.414,00**							**9.938.180.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.133.279.414,00**							**9.542.500.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**8.083.279.614,00**							**8.792.500.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**3.706.003.544,00**						**100 Persen**	**4.312.500.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran*	100 Persen			100 Persen	30.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Persen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			6 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	6 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*	100 Persen			100 Persen	2.256.659.566,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Persen	2.673.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan			19 Orang/bulan	2.184.559.566,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	22 Orang/bulan	2.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	72.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Dokumen	73.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	100 Persen			100 Persen	309.975.200,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Persen	433.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			5 Paket	99.997.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	4 Paket	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	4 Paket	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			1 Dokumen	9.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	2 Dokumen	13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	149.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah Pentingnya Adminsitrasi BMD*	100 persen			100 persen	99.998.428,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	100 persen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			4 Unit	99.998.428,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	3 Unit	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	723.072.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Persen	770.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			4 Laporan	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	3 Laporan	120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			5 Laporan	603.072.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Laporan	650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	286.298.350,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Persen	286.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit			1 Unit	86.308.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	3 Unit	86.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			5 Unit	49.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	6 Unit	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Unit	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah***	**10 Persen**			**10 Persen**	**1.347.282.470,00**						**10 Persen**	**1.350.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	12 persen			12 persen	1.347.282.470,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	12 persen	1.350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Dokumen Permohonan	277.283.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		280.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	149.999.860,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				65 Persentase	169.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 dokumen Media	349.999.910,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	399.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi*** ***Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo***	**100 persen** **30 Persen**			**25 persen** **88 persen**	**3.029.993.600,00**						**100 persen** **30 Persen**	**3.130.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya nilai indeks SPBE*	2,1 indeks			2,1 indeks	3.029.993.600,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	2,1 indeks	3.130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	239.999.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				1 Aplikasi	9.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				31 Perangkat Daerah	2.779.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		2.790.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**49.999.800,00**							**750.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah***	**90 Persen**			**90 Persen**	**49.999.800,00**						**90 Persen**	**750.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penggunaan Data Statistik Sektoral Untuk Pengambilan Kebijakan*	100 persen			90 persen persen	49.999.800,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	100 persen	750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				12 Orang	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				20 Persentase	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				12 orang Persentase	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				6 Dokumen	9.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	**NON URUSAN**						**270.680.000,00**							**395.680.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**270.680.000,00**							**395.680.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**270.680.000,00**						**100 Persen**	**395.680.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	100 Persen			100 Persen	20.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Persen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Paket	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah Pentingnya Adminsitrasi BMD*	100 persen			100 persen	250.680.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 persen	365.680.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	250.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	4 Unit	365.680.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**6.258.543.118,00**							**7.180.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.825.241.118,00**							**6.620.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**5.825.241.118,00**							**6.620.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**3.223.464.118,00**						**100 Persen**	**3.770.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional SKPD*	100 Persen			100 Persen	2.572.049.218,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DINAS KOPERINDAG	100 Persen	3.035.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 orang Orang/bulan	2.473.409.218,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DINAS KOPERINDAG		3.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 orang Dokumen	98.640.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DINAS KOPERINDAG		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	75 persen			100 Persen	241.056.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	DINAS KOPERINDAG	70 persen	305.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 jenis Paket	71.124.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	DINAS KOPERINDAG		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan Dokumen	19.995.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	DINAS KOPERINDAG		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 kali Laporan	149.937.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	DINAS KOPERINDAG		175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelayanan Umum Kantor SKPD*	100 Persen			100 Persen	305.088.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	NON ASN SKPD KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100 Persen	370.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 orang Laporan	305.088.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	NON ASN SKPD KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		370.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen			100 Persen	105.270.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	SKPD KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100 Persen	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	105.270.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	SKPD KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi Aktif***	**56 persen**			**56 persen**	**100.000.000,00**						**56 persen**	**150.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi Aktif* *Persentase Koperasi Yang Sehat*	58 Persen			56 Persen 55 Persen	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	MASYARAKAT	58 Persen	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 unit koperasi Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	MASYARAKAT		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase koperasi yang sehat*** ***Persentase koperasi sehat*** ***Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan***	**10 persen**			**10 Persen** **10 Persen** **88 Persen**	**181.774.000,00**						**10 persen**	**200.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengurus/pengawas/anggota yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian* *Persentase Koperasi Sehat*	10 Persen 10 Persen			88 Persen 10 Persen	181.774.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pengurus koperasi	10 Persen 10 Persen	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				35 orang Orang	181.774.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pengurus koperasi		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)***	**8 Persen**			**8 Persen**	**2.320.003.000,00**						**8 Persen**	**2.500.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Meningkatnya Usaha Mikro*	6 Persen			35 Persen	2.320.003.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pemasaran produk UMKM	5 Persen	2.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				50 Unit Usaha	2.320.003.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pemasaran produk UMKM		2.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**355.000.000,00**							**480.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**280.000.000,00**							**400.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***meningkatnya sarana distribusi perdagangan***	**-**			**60 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah pasar yang di Fasilitasi*	-			3 Unit	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pedagang kios	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pedagang kios		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas bahan pokok variasi harga antar waktu per komuditas bahan pokok***	**40 Persen**			**35 Persen** **65 Persen**	**180.000.000,00**						**40 Persen**	**250.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*jumlah laporan pemantauan harga dan dan stok barang kebutuahan pokok*	40 Persen			1 Laporan	180.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pemantauan harga dan stok barang kebutuahan pokok	40 Persen	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pemantauan harga dan stok barang kebutuahan pokok		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pemantauan harga dan stok barang kebutuahan pokok		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**75.000.000,00**							**80.000.000,00**	
1.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI*** ***Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI***	**85 Persen**			**75 Persen** **80 Persen**	**75.000.000,00**						**85 Persen**	**80.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha*	85 Persen			50 Dokumen	75.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pelaku usaha	85 Persen	80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				20 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pelaku usaha		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X	**NON URUSAN**						**78.302.000,00**							**80.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**78.302.000,00**							**80.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**78.302.000,00**						**100 Persen**	**80.000.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	75 persen			100 Persen	28.302.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	70 persen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	28.302.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelayanan Umum Kantor SKPD*	100 Persen			100 Persen	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	100 Persen	55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**5.081.670.856,00**							**6.074.573.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.081.670.856,00**							**6.074.573.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**361.459.600,00**							**850.000.000,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja***	**90 persen**			**90 persen**	**5.460.000,00**						**90 persen**	**250.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	1 Dokumen			1 Dokumen	5.460.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Tenaga Kerja	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen			1 Dokumen	5.460.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Tenaga Kerja	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja***	**24 persen**			**24 persen**	**199.999.900,00**						**24 persen**	**250.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan*	70 persen			68 persen	199.999.900,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pencari Kerja	70 persen	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang			16 Orang	199.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pencari Kerja	48 Orang	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan***	**1.80 persen**			**1.80 persen**	**81.000.000,00**						**1.80 persen**	**200.000.000,00**	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya*	20 persen			10 Orang	81.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Tenaga Kerja	20 persen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				10 Orang	81.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Tenaga Kerja		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)***	**45 persen**			**45 persen**	**74.999.700,00**						**45 persen**	**150.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*	40 persen			12 Laporan	74.999.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Tenaga Kerja	40 persen	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	74.999.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Tenaga Kerja		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.720.211.256,00**							**5.224.573.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**3.978.288.456,00**						**100 Persen**	**4.327.616.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran*	100 persen			100 persen	30.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur	100 persen	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan*	100 persen			100 persen	2.679.081.756,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur	100 persen	2.970.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 ASN Orang/bulan	2.591.771.756,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		2.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	87.310.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*	100 persen			100 persen	403.266.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur	100 persen	411.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.846.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	172.460.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	199.959.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD Terlaksanaya Administrasi Umum*	100 persen			100 persen 100 persen	297.198.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur	100 persen	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	250.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 unit Unit	38.518.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*	100 persen			100 persen	494.016.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur	100 persen	486.616.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	113.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		106.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	380.616.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		380.616.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD*	100 persen			100 persen	74.726.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur	100 persen	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	54.996.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	19.730.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)***	**90 persen**			**90 persen**	**199.999.800,00**						**90 persen**	**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah dalam pmberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal*	1 Dokumen			2 Dokumen	199.999.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	199.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu***	**95 Persen**			**95 Persen**	**149.966.000,00**						**95 Persen**	**200.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha dan masyarakat*	6 kecamatan			3 kecamatan	149.966.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha	6 kecamatan	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	149.966.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase realisasi investasi***	**3 persen**			**3 persen**	**391.957.000,00**						**3 persen**	**396.957.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah realisasi investasi kab/kota*	20 Pelaku Usaha			85 persen	391.957.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	396.957.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				5 Kegiatan Usaha.	90.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha		95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				155 Pelaku Usaha	213.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				9 Kegiatan Usaha	88.657.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha		101.957.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						**3.826.917.100,00**							**4.113.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.826.917.100,00**							**4.113.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.564.292.100,00**							**3.808.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**3.334.794.100,00**						**100 Persen**	**3.588.000.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran*	90 Persen			90 Persen	22.999.800,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	90 Persen	25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	22.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	3 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatkan kesejahteraan ASN*	100 Persen			100 Persen	2.636.746.600,00			-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 Persen	2.960.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan			21 Orang/bulan	2.582.746.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21 Orang/bulan	2.900.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	90 Persen			90 Persen	210.307.200,00			-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90 Persen	224.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket			20 Paket	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20 Paket	13.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	46.340.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Paket	47.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket			13 Paket	17.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13 Paket	18.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Dokumen	16.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			36 Laporan	119.967.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	36 Laporan	130.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*	90 Persen			90 Persen	401.732.000,00			-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90 Persen	313.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	11.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Laporan	13.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan			12 Laporan	389.832.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11 Laporan	300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja pelaksanaan Tupoksi PD*	90 Persen			90 Persen	63.008.500,00			-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90 Persen	66.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			13 Unit	52.988.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10 Unit	55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			30 Unit	10.020.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15 Unit	11.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat***	**30 Persen**			**30 Persen**	**229.498.000,00**						**30 Persen**	**220.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perpustakaan Sesuai SNP*	27 Persen			25 Persen	70.000.000,00			-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Sekolah, Masyarakat, OPD	27 Persen	90.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan			15 Perpustakaan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Sekolah, Masyarakat, OPD	0 Perpustakaan	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Orang	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Sekolah, Masyarakat, OPD		30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat*	30 Persen			27 Persen	159.498.000,00			-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD, Sekolah, Masyarakat	30 Persen	130.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	55.130.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD, Sekolah, Masyarakat		70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 unit Perpustakaan	54.368.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Sekolah, Masyarakat		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				20 Lokus	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD, Sekolah, Masyarakat		60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**262.625.000,00**							**305.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku***	**45 Persen**			**45 Persen**	**157.576.000,00**						**45 Persen**	**185.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar Pesentase daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar*	25 Persen			23 Persen 25 Persen	99.999.000,00			-	1. Pemban gunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD	25 Persen	120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	13 Berkas			12 Berkas	49.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD	13 Berkas	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan			10 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD	0 Laporan	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten* *Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten*	25 persen			22 persen 22 Persen	57.577.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD	25 persen	65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	54 Laporan			54 Laporan	57.577.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD	54 Laporan	65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat***	**20 Persen**			**20 Persen**	**105.049.000,00**						**20 Persen**	**120.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip sesuai NSPK*	25 Persen			20 Persen	105.049.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD	25 Persen	120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				2 Berkas	55.060.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD		60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				2 Arsip	49.989.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD		60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PERIKANAN						**12.666.266.386,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**12.666.266.386,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**12.666.266.386,00**							**0,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**5.485.436.786,00**						**100 Persen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	59 Persen			4 Dokumen 4 Laporan	130.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	59 Persen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	3 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	4 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN*	56 Persen			12 Dokumen 14 Bulan	3.365.686.386,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	56 Persen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan			34 Orang/bulan	3.265.816.386,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	44 Orang/bulan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			2 Dokumen	99.870.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	12 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan bacaan yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* *Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	60 Persen			1 Jenis 94 Laporan 7 Paket 2 Paket 2 Paket 49 Unit	285.408.400,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	60 Persen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			2 Paket	25.945.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	9 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket			49 Paket	49.595.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	14 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket			7 Paket	74.993.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	38 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			2 Paket	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	5 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	2 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan			94 Laporan	99.875.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	40 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia*	50 Persen			3 Laporan 12 Laporan	1.133.392.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kantor Dinas Perikanan dan Pegawai Kontrak	50 Persen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			3 Laporan	330.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kantor Dinas Perikanan dan Pegawai Kontrak	2 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	802.992.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kantor Dinas Perikanan dan Pegawai Kontrak		0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitas* *Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara* *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharan/Direhabilitasi* *Jumlah Terbayarnya Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannya*	60 Persen			1 unit 1 unit 50 unit 8 unit	570.950.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Asset Dinas Perikanan	60 Persen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	52.440.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Asset Dinas Perikanan	1 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit			5 Unit	335.010.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Asset Dinas Perikanan	14 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			4 Unit	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Asset Dinas Perikanan	3 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	33.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Asset Dinas Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil***	**13000 ton**			**13000 ton**	**1.350.000.000,00**						**13000 ton**	**0,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil*	70 Kelompok			150 Orang	1.100.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan Kecil	70 Kelompok	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	500 Orang			150 Orang	1.100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan Kecil	500 Orang	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan*	70 Persen			2 Layanan	250.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Pabrik Es dan Pedagang Ikan Kecil	70 Persen	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan			2 Layanan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Pabrik Es dan Pedagang Ikan Kecil	2 Layanan	0,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya***	**500 Ton**			**500 Ton**	**3.999.690.540,00**						**500 Ton**	**0,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*	50 Kelompok			22 Kelompok	3.999.690.540,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Lobster dan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut	50 Kelompok	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	16 Kelompok			22 Kelompok	3.999.690.540,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Katurei Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Lobster dan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut	16 Kelompok	0,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif*** ***Persentase kelopok/usaha Mikro dan Kecil Pengolahan Perikanan yang produktif***	**25 Persen**			**110 Ton** **22 Persen**	**1.831.139.060,00**						**25 Persen**	**0,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko* *Meningkatnya kelompok pembudidaya ikan yang memiliki izin usaha* *Meningkatnya ketersediaan ikan untuk komsumsi dan usaha pengolahan*	3 Kelompok			1 Dokumen 3 Kelompok 55 Kg/Perkapita/Tahun	50.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan Tangkap, Pembudidaya dan Pengolahan Ikan	3 Kelompok	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan Tangkap, Pembudidaya dan Pengolahan Ikan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Anak Sekolah yang di Beri Makananan Olahan Serba Ikan* *Jumlah Kelompok Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil yang difasilitasi*	93 Ton			640 Orang 4 Kelompok	1.781.139.060,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil dan Anak Sekolah	93 Ton	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	125 Ton			110 Ton	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil dan Anak Sekolah	125 Ton	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	0 Pelaku Usaha			40 Pelaku Usaha	1.681.139.060,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil dan Anak Sekolah	0 Pelaku Usaha	0,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA						**12.085.241.303,00**							**8.892.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.244.999.964,00**							**840.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**1.244.999.964,00**							**840.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah pelaporan keuangan laporan monitoring tim terpadu***	**100 Persen**			**100 Persen 12 bulan undefined undefined**	**500.000.000,00**						**100 Persen**	**0,00**	
	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*laporan monitorong tim terpadu*	-			1 tahun	500.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	wisatawan	-	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	wisatawan		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Jumlah organisasi pemuda yang aktif***	**-**			**14 organisasi**	**149.999.964,00**						**-**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah unit usaha kreatif pemuda mandiri*	-			3 Unit	149.999.964,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	kelompok pemuda	-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				25 Orang	149.999.964,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	kelompok pemuda		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Jumlah Prestasi Olahraga***	**-**			**10 Cabang olahraga**	**595.000.000,00**						**-**	**640.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jumlah Atlit berprestasi Jenjang Pendidikan Menengah* *Terbayarnya hibah dana mengikuti PORDA/PORPROV/kEJURNAS* *Terbayarnya hibah operasional KONI Kabupaten* *Terbuatnya perencanaan penataan lapangan sepak bola didesa muntei dan maileppet*	-			undefined undefined 1 kali 1 Paket 0 Paket	150.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	jenjang pendidikan menengah	-	120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	jenjang pendidikan menengah		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya kompetisi sepak bola all star di tuapejat Terselenggaranya kompetisi sepak bola (Bupati Cup), Terselenggaranya kompetisi surfing internasional di kabupaten kepulauan mentawai Terselenggaranya kompetisi surfing tingat kabupaten*	-			1 kali 1 kali 0 Kali 1 Kali	295.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	pemuda	-	370.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	195.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	pemuda		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	pemuda		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				3 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.840.241.339,00**							**8.052.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**10.840.241.339,00**							**8.052.000.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah undefined***	**100 Persen**			**100 Persen undefined undefined**	**6.927.677.249,00**						**100 Persen**	**6.552.000.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*kelengkapan dan kesesuaian anggaran*	-			12 bulan	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.880.286.249,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	pegawai	-	5.642.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6000000 Orang/bulan	4.652.086.249,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	pegawai		4.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.228.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	pegawai		1.142.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 persen	605.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	710.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*efesiensi operasional peningkatan inovasi*	-			undefined undefined 6 dokumen	103.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	instansi terkait	-	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	103.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	instansi terkait		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*meningkatnya kelancaran operasional opd*	-			100 persen	289.391.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	unit kerja terkait, petugas pemeliharaan	-	0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	79.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	unit kerja terkait, petugas pemeliharaan		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	unit kerja terkait, petugas pemeliharaan		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	170.016.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	unit kerja terkait, petugas pemeliharaan		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***meningkatnya pelayanan kepariwisataan dikawasan strategi pariwisata***	**3 kawasan**			**3 kawasan**	**2.417.900.000,00**						**3 kawasan**	**840.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Meingkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pariwisata*	50 Persen			3 kawasan	250.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	masyarakat sekitar destinasi pariwisata	50 Persen	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Lokasi	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	masyarakat sekitar destinasi pariwisata		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata*	5 persen			3 kawasan	2.167.900.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	wisatawan	5 persen	590.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	299.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	wisatawan		220.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	1.568.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	wisatawan		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	wisatawan		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	wisatawan		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Domestik***	**-**			**10000 orang 15000 orang**	**952.541.090,00**						**-**	**350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terfaslitasinya Jumlah kunjunan-kunjungan kepariwisataan* *Tersediannya profil statistic dan data kepariwisataan* *Tersedianya data dan informasi pariwisata ditingkat prov,dan luar negeri* *Tersedianya operasional bagi pos pengawas wisata bahari dan TIC* *Terselenggaranya festifal pesona mentawai*	-			1 Paket 1 Dokumen 1 Paket 1 Paket 1 Paket	952.541.090,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	masyarakat dan pelaku wisata	-	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	masyarakat dan pelaku wisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	masyarakat dan pelaku wisata		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	642.541.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	masyarakat dan pelaku wisata		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	205.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	masyarakat dan pelaku wisata		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan di Bidang Musik***	**30 Orang**			**30 Orang**	**542.123.000,00**						**30 Orang**	**310.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Meningkatnya jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif*	20 kali			30 Orang/Persen,	392.123.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	Masyarakat	20 kali	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	Masyarakat		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	242.123.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Meningkatnya Kapasitas SDM di Bidang Seni Pertunjukan*	-			20 Orang	150.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	Sanggar Seni	-	210.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				30 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	Sanggar Seni		210.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SEKRETARIAT DAERAH						**38.752.272.134,00**							**40.913.646.747,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.444.286.534,00**							**37.326.401.287,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35.444.286.534,00**							**37.326.401.287,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**-**			**100 Persen**	**24.078.311.309,00**						**-**	**23.944.376.087,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			10 Dokumen	10.700.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	10.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		10.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah*	-			14 Bulan	10.313.823.675,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	10.284.730.293,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99 Orang/bulan	10.187.823.675,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		10.158.730.293,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	126.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	40.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya aneka Alat Tulis Kantor*	-			12 Bulan	1.028.507.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	1.028.557.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	108.470.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		108.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	300.085.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		300.087.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	619.952.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia*	-			8 Jenis	482.858.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD	-	482.752.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	64.153.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		64.246.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	418.704.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		418.506.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan*	-			12 Bulan	8.708.689.400,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	8.753.689.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	399.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		399.999.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	6.193.150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		6.193.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	179.980.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		179.980.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.910.559.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		1.960.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH*	-			2 Otang	1.535.408.494,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	1.535.465.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	613.838.494,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		613.838.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	921.570.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		921.627.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Terselenggaranya Kebutuhan Harian Rumah Tangga Pimpinan Daerah*	-			12 Bulan	503.845.500,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	503.886.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	348.845.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		348.845.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Tahun Paket	155.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD		155.040.800,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen penataan organisasi* *Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*	-			1 Dokumen 1 Dokumen	740.793.840,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	740.794.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				36 Dokumen	250.242.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		250.243.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	139.102.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		139.102.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				36 Dokumen	171.848.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		171.849.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	62.340.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		62.340.530,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	117.259.740,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		117.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah fasilitasi keprotokolan yang terfasilitasi*	-			24 Kali	713.685.400,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	563.799.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	350.729.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		200.729.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	208.564.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		208.568.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	154.392.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		154.502.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah*** ***Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah*** ***Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi*** ***Persentase Tata Kelola Administrasi Pemerintahan***	**-**			**100 Persen 2 Persen 89 Persen undefined undefined**	**9.732.158.400,00**						**-**	**11.871.780.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* *Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi* *Persentase Produk Hukum yang Terevaluasi atau Terfasilitasi*	-			undefined Dokumen 95 Persen 85 Persen	538.471.600,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	538.471.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	172.266.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		172.266.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	115.665.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		115.665.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	250.539.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		250.539.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah* *Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi* *Tersedianya Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*	-			100 Persen 95 Persen undefined undefined	6.040.439.800,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT	-	8.180.061.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	1.498.370.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT		1.498.370.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2.072.146.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT		3.383.954.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	2.469.923.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT		3.297.736.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi*	-			95 Persen	1.070.247.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT	-	1.070.247.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				15 Dokumen	220.333.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT		220.333.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	694.873.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT		694.873.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	155.040.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT		155.040.800,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi*	-			100 Persen 95 Persen	2.083.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	2.083.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	2.083.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		2.083.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti***	**-**			**90 Persen**	**1.633.816.825,00**						**-**	**1.510.245.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik* *Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik* *Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik* *Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Utamanya Listrik* *Tersedianya Jumlah Dokumen Kebijakan Perekonomian*	-			30 Persen 30 Persen 30 Persen 30 Persen undefined undefined	117.530.600,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	117.565.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	54.856.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		54.875.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				8 Laporan	62.674.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		62.690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen*	-			80 Persen	474.385.800,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	474.386.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	110.566.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		110.566.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	120.499.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		120.499.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	243.320.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		243.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen dan Paket Layanan Pengadaan Barang dan Jasa*	-			undefined undefined	899.943.225,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	-	776.333.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	285.055.225,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		285.055.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	371.642.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		350.642.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				80 Orang	243.246.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		140.636.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah dokumen koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan* *Jumlah Dokumen Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian ,Kehutanan,Kelautan dan Perikanan* *Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik* *Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik*	-			30 Persen 30 Persen 30 Persen 30 Persen	141.957.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT	-	141.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	141.957.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT		141.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**3.307.985.600,00**							**3.587.245.460,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**3.307.985.600,00**							**3.587.245.460,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**-**			**100 Persen**	**3.307.985.600,00**						**-**	**3.587.245.460,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya aneka Alat Tulis Kantor*	-			12 Bulan	320.331.600,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	320.331.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	320.331.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		320.331.600,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia*	-			8 Jenis	320.748.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				11 Unit	320.748.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Internet ,Listri,Air Bersih dan Telepon Seluler (Pimpinan Daerah)*	-			12 Bulan	2.555.906.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	2.555.913.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	498.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		498.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	2.057.456.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		2.057.463.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH*	-			2 Otang	111.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	111.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				28 Paket	111.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		111.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**33.368.743.221,00**							**37.195.401.686,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**32.487.043.221,00**							**35.595.401.686,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**32.487.043.221,00**							**35.595.401.686,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah***	**-**			**12 bulan**	**14.723.844.021,00**						**-**	**15.073.901.686,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan Administrasi perangkat Daerah*	-			12 bln	3.331.906.871,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	3.451.219.486,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3.179.626.871,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3.286.219.486,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	152.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat daerah*	-			10 paket	627.480.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	695.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.580.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	343.621.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		365.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	112.885.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	151.394.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Sarana pendukung Pelaksanaan tugas*	-			1 paket	77.180.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	77.180.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya komunikasi dan penerangan kantor*	-			12 bulan	104.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	145.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	104.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		145.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharanya barang milik daerah*	-			59 unit	518.254.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	425.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	219.534.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	89.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	58.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Terlaksananya layanan administrasi keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	-			12 bulan	9.615.514.350,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	9.801.682.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	9.326.212.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		9.526.682.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	289.302.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terlaksananya layanan administrasi DPRD*	-			12 bulan	449.108.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	391.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				4 Laporan	23.668.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		16.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	425.440.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Rata-rata waktu Fasilitasi rapat-rapat fraksi, baleg dan paripurna***	**-**			**13 dok**	**17.763.199.200,00**						**-**	**20.521.500.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD*	-			14 dok	2.599.680.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	2.780.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	271.828.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	2.058.786.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	269.066.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Terlaksananya Pembahasan Kebijakan anggaran*	-			5 dok	1.126.373.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	anggota DPRD	-	1.210.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	24.835.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	anggota DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	24.351.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	anggota DPRD		25.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	328.154.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	anggota DPRD		355.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	328.154.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	anggota DPRD		355.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	420.876.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	anggota DPRD		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Terlaksanaya urusan pemerintahan Bidang pemerintahan dan Hukum*	-			20 lap	3.400.301.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	4.325.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	656.152.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	620.452.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	674.312.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	628.150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	568.408.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	252.827.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Meningkatanya disiplin dan kapasitas sumber daya DPRD*	-			20 orang	2.558.119.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	3.161.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	1.950.060.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	180.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		185.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				4 Orang	240.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	38.059.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		280.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Terserapnya aspirasi Masyarakat*	-			3 lap	5.027.195.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	5.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan	2.099.895.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2.927.300.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD*	-			6 dok	3.051.529.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	3.695.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				5 Dokumen	3.020.062.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3.650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				3 Laporan	31.467.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X	**NON URUSAN**						**881.700.000,00**							**1.600.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**881.700.000,00**							**1.600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah***	**-**			**12 bulan**	**881.700.000,00**						**-**	**1.600.000.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat daerah*	-			10 paket	229.860.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	109.860.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya komunikasi dan penerangan kantor*	-			12 bulan	651.840.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	651.840.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**8.659.190.614,00**							**9.973.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.659.190.614,00**							**9.973.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**7.620.272.214,00**							**8.863.000.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**5.273.534.414,00**						**100 Persen**	**6.123.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatkan kesejahteraan ASN*	2 Layanan			100 persen	3.779.332.414,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	2 Layanan	4.275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	3.649.612.414,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		4.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	129.720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*	100 Persen			100 Persen	364.259.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 Persen	503.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	78.434.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.825.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	637.972.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 Persen	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	298.550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	339.422.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	491.970.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 Persen	645.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	129.460.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	3.015.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	34.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	194.490.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	130.555.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu*** ***Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen***	**100 Persen**			**100 Persen** **88 Persen**	**1.346.481.100,00**						**100 Persen**	**1.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran*	5 Dokumen			80 Persen	796.274.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	5 Dokumen	950.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	92.042.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	404.796.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				1 Dokumen	299.435.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Acuan Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data*	4 Dokumen			80 Persen	318.867.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	4 Dokumen	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				92 Orang	318.867.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Menjadi Pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya*	2 Dokumen			80 Persen	231.339.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Dokumen	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	231.339.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	**88 Persen**			**88 Persen**	**1.000.256.700,00**						**88 Persen**	**1.090.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD*	100 Persen			100 Persen	400.286.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 Persen	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	200.000.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	200.286.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD*	100 Persen			100 Persen	299.999.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 Persen	420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	49.999.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	99.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	49.999.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD*	100 Persen			100 Persen	299.971.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 Persen	270.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	149.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	149.971.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.038.918.400,00**							**1.110.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan***	**80 Persen**			**80 Persen**	**1.038.918.400,00**						**80 Persen**	**1.110.000.000,00**	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase kesesuaian kajian inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan*	3 Dokumen			3 Dokumen	472.773.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Masyarakat	3 Dokumen	510.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	217.536.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	255.237.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Masyarakat		260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai dengan kebutuhan Perencanaan*	2 Dokumen			2 Dokumen	566.144.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Masyarakat	2 Dokumen	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	349.817.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Masyarakat		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	216.327.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAERAH						**208.918.209.115,00**							**341.728.404.049,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**135.874.947.479,00**							**284.543.619.689,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**135.874.947.479,00**							**284.543.619.689,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 %**			**100 %**	**4.489.273.700,00**						**100 %**	**5.713.800.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*	-			100 %	61.918.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN	-	78.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	61.918.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN		78.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*	2 Dokumen			100 %	666.880.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	2 Dokumen	730.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	666.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		730.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*	1 Laporan			100 %	160.301.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	1 Laporan	310.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	160.301.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		310.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*	7 Layanan			7 Layanan	895.637.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	7 Layanan	1.385.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.443.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	168.987.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	180.766.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		280.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	85.547.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	17.580.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	322.314.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		420.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*	2 Layanan			100 %	438.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	2 Layanan	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	438.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*	1 Layanan			100 %	2.039.652.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	1 Layanan	2.350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.416.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		1.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	623.552.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*	3 Layanan			3 Layanan	226.885.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	3 Layanan	360.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	129.285.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	97.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik***	**100 persen**			**100 persen**	**127.687.547.979,00**						**100 persen**	**270.729.207.729,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Pedoman Pelaksanaan APBD Persentase Tahapan Penyusunan Rencana Penganggaran Tepat Waktu*	100 %			100 persen	2.264.061.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 %	4.623.346.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	45.815.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	50.899.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		101.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	746.682.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		1.491.682.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	806.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		1.656.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	59.679.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		119.679.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				72 Orang	554.985.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		1.154.985.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah Syarat Penyaluran DAU, DAK dan DID*	50 %			40 % 5 Dokumen	957.884.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	50 %	2.625.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				8 Dokumen	308.514.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				4 Dokumen	183.909.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		405.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				5 Dokumen	116.956.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		460.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				5 Laporan	223.012.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		560.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				5 Dokumen	125.491.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Baik*	100 %			100 %	1.252.179.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 %	2.575.251.929,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				36 Dokumen	67.330.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		141.393.252,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	65.330.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		137.193.210,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	287.966.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		590.331.489,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	424.832.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		870.905.805,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	33.012.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		69.325.620,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				75 Orang	373.708.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		766.102.553,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Menjadi pedoman dalam kebutuhan penganggaran pengelolaan keuangan daerah*	100 %			100 %	123.213.423.179,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat	100 %	260.905.609.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	12.661.768.336,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Masyarakat		2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	110.551.654.843,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Masyarakat		258.905.609.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Persentase Jumlah OPD yang Tertib dalam Pengelolaan Aset Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.345.396.100,00**						**100 %**	**3.720.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Barang dan Jasa yang Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara Baik dan Benar*	85 %			100 %	1.345.396.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	85 %	3.720.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	200.140.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		285.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				5 Laporan	65.147.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		195.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	764.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		2.295.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	142.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		426.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	137.008.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		411.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	36.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		108.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase PAD terhadap total pendapatan Persentase PAD terhadap total pendapata***	**6 %**			**6 %**	**2.352.729.700,00**						**6 %**	**4.380.611.960,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Terlaksananya Sosialisasi, Itensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	10 %			9.50 % 6 Dokumen	2.352.729.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Wajib Pajak	10 %	4.380.611.960,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	249.252.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Wajib Pajak		528.323.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	333.522.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Wajib Pajak		715.608.580,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	234.984.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Wajib Pajak		497.258.880,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	309.503.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Wajib Pajak		618.122.850,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	207.896.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Wajib Pajak		420.155.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	158.308.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Wajib Pajak		319.565.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	345.663.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Wajib Pajak		611.043.330,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	513.598.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Wajib Pajak		670.534.120,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**73.043.261.636,00**							**57.184.784.360,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**73.043.261.636,00**							**57.184.784.360,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 %**			**100 %**	**73.043.261.636,00**						**100 %**	**57.184.784.360,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*	2 Dokumen			100 %	73.043.261.636,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Dokumen	57.184.784.360,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	73.043.261.636,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		57.184.784.360,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**8.577.830.984,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.577.830.984,00**							**0,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**6.527.831.184,00**							**0,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**-**			**100 Persen**	**4.656.865.484,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah*	-			100 Persen	3.158.232.934,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.868.199.334,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	90.033.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	49.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana*	-			100 Persen	6.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanan tugas dan fungsi perangkat daerah*	-			100 Persen	535.971.750,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	29.999.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	206.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	186.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	16.680.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	16.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah*	-			100 persen	599.971.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	349.971.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			2 Unit	340.009.200,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	30.009.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Indek Profesional ASN***	**-**			**240 Indek**	**1.870.965.700,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terlaksananya Penerimaan ASN, Penetapan NIP CPNS dan NIP PPPK dan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Sesuai Kebutuhan* *Terlaksananya Penerimaan ASN, Penetapan NIP CPNS dan NIP PPPK dan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Sesuai Kebutuhan*	-			1807 asn 7 PPPk	420.966.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terselenggaranya Penerimaan ASN sesuai Kebutuhan	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terselenggaranya Penerimaan ASN sesuai Kebutuhan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	120.919.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terselenggaranya Penerimaan ASN sesuai Kebutuhan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	100.046.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terselenggaranya Penerimaan ASN sesuai Kebutuhan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terwujudnya SK Jabatan Struktural, Fungsional dan Penilaian Kinerja ASN*	-			80 Persen	899.999.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	699.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN Persentase Penempatan Jabatan yang diduduki berdasarkan kopetensi*	-			70 Persen 20 ASN	450.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terwujudnyan ASn yang mempunyi Kompetensi	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				4 Orang	450.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terwujudnyan ASn yang mempunyi Kompetensi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Meningkatnya Disiplin ASN Persentase Penempatan Jabatan yang diduduki berdasarkan kopetensi*	-			70 Persen 2 Dokumen	99.999.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terwujudnya ASN yang Disiplin dan Memiliki Kompentensi	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	99.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terwujudnya ASN yang Disiplin dan Memiliki Kompentensi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**2.049.999.800,00**							**0,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Nilai Merit Sistem***	**-**			**13 Persen**	**2.049.999.800,00**						**-**	**0,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompentensi*	-			10 Persen	999.999.800,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN yang belum memiliki Kompetensi Teknis	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				23 Orang	999.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN yang belum memiliki Kompetensi Teknis		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan Kopetensi Manajerial dan Fungsional*	-			35 Persen	1.050.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				158 Orang	1.050.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**8.916.253.182,00**							**10.093.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.916.253.182,00**							**10.093.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**8.916.253.182,00**							**10.093.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**6.693.892.682,00**						**100 Persen**	**7.645.500.000,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kesejahteraan ASN dilingkungan Inspektorat Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen 100 Persen	4.569.098.686,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 Persen	5.160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan			37 Orang/bulan	4.437.818.686,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	38 Orang/bulan	5.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen			12 Dokumen	131.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	25 Dokumen	160.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar* *Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 persen			100 persen 100 Persen 100 Persen	200.610.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 persen	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang			10 Orang	200.610.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	25 Orang	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran* *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen			100 persen 100 Persen	927.727.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 persen	1.030.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	15 Paket	15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	13.906.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Paket	15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	119.646.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	3 Paket	130.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	14.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1 Paket	20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			1 Dokumen	20.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Dokumen	25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	749.925.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	12 Laporan	825.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah*	100 persen			100 persen 100 Persen	49.664.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 persen	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			8 Unit	49.664.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	3 Unit	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancanya operasional perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 persen			100 persen 100 Persen	823.072.496,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 persen	918.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			36 Laporan	94.980.996,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	36 Laporan	104.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan			12 Laporan	728.091.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	11 Laporan	814.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja perangkat daerah sesuai dengan Tupoksi Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 persen			100 persen 100 Persen	123.720.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 persen	132.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit			1 Unit	14.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	15 Unit	11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit			6 Unit	29.980.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	15 Unit	33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit			3 Unit	29.920.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	8 Unit	33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	49.820.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1 Unit	55.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Meningkatnya Kepuasan Stakeholder*** ***Persentase tindak lanjut temuan*** ***Kapabilitas APIP***	**90 Persen level 3 level**			**100 Persen 88 Persen level 3 level**	**1.917.371.100,00**						**90 Persen level 3 level**	**2.112.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*MENINGKATNYA KEPATUHAN PENYELENGGARA PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Terlaksananya Pengawasan Internal*	90 Persen			88 Persen 100 Persen	1.767.386.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	90 Persen	1.947.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24 Laporan			12 Laporan	238.308.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	24 Laporan	264.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan			12 Laporan	129.837.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	16 Laporan	143.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108 Laporan			108 Laporan	220.002.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	108 Laporan	242.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan			37 Laporan	49.823.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	37 Laporan	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan			37 Laporan	649.449.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	20 Laporan	715.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan			2 Kesepakatan	329.981.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Kesepakatan	363.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen			2 Dokumen	149.985.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Dokumen	165.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Meningkatnya Kepuasan Stakeholder MENINGKATNYA KEPUASAN STAKEHOLDER Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu*	100 Persen			100 Persen 100 Persen 100 Persen	149.984.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 Persen	165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan			12 Laporan	149.984.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	12 Laporan	165.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP***	**88 %**			**88 %**	**304.989.400,00**						**88 %**	**335.500.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Meningkatnya kepatuhan dan implentasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi*	85 PERSEN			100 Persen	94.994.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	85 PERSEN	104.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi			2 Rekomendasi	94.994.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Rekomendasi	104.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Meningkatnya kinerja OPD yang telah dilakukan pendampingan*	100 Persen 85 PERSEN			100 Persen	209.994.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 Persen 85 PERSEN	231.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah			4 perangkat daerah	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	6 perangkat daerah	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26 perangkat daerah			10 perangkat daerah	49.994.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	26 perangkat daerah	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan			5 Kegiatan	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	5 Kegiatan	66.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 perangkat daerah			2 perangkat daerah	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	5 perangkat daerah	55.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIBERUT UTARA						**3.067.006.552,00**							**3.416.659.422,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.067.006.552,00**							**3.416.659.422,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.067.006.552,00**							**3.416.659.422,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.807.977.352,00**						**100 Persen**	**3.126.725.982,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen			6 Laporan	40.509.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	100 Persen	44.559.900,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			6 Laporan	40.509.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	6 Laporan	44.559.900,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya Kinerja dan Kesejahteraan ASN*	100 Persen			25 Orang / Bulan 100 Persen	2.327.419.052,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai ASN	100 Persen	2.599.911.522,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			25 Orang/bulan	2.197.296.052,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai ASN	25 Orang/bulan	2.456.776.222,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	130.123.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai ASN	12 Dokumen	143.135.300,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	174.884.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 Persen	190.573.060,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			9 Paket	2.412.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	9 Paket	2.653.750,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	63.486.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Paket	68.034.710,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	2.552.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Paket	2.808.300,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	106.433.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	117.076.300,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya Operasional Perkantoran Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen			100 Persen 2 Layanan	194.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 Persen	213.400.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	14.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	15.400.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	180.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	198.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen			100 Persen	71.165.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100 Persen	78.281.500,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	50.535.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	55.588.500,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			3 Unit	5.170.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Unit	5.687.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			6 Unit	15.460.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	6 Unit	17.006.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan***	**B Indek**			**B Indek**	**32.895.000,00**						**B Indek**	**36.184.500,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Meningkatnya Pelayanan E-KTP*	B Indek			B Indek	32.895.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	B Indek	36.184.500,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan			1 Laporan	32.895.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	1 Laporan	36.184.500,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan***	**68 Persen**			**68 Persen**	**67.966.200,00**						**68 Persen**	**74.763.040,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	70 Persen 70 Persen			10 Lembaga Kemasyarakat	67.966.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	70 Persen 70 Persen	74.763.040,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan			10 Lembaga Kemasyarakatan	39.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	44.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	27.966.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	12 Laporan	30.763.040,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/diselesaikan***	**-**			**100 Persen**	**127.114.000,00**						**-**	**139.826.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			100 Orang	127.114.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	-	139.826.500,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		110.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	27.114.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		29.826.500,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu***	**90 Persen**			**90 Persen**	**31.054.000,00**						**90 Persen**	**39.159.400,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	100 Persen			1 Dokumen	31.054.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	100 Persen	39.159.400,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen			1 Dokumen	31.054.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	1 Dokumen	39.159.400,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
		KECAMATAN SIBERUT TENGAH						**2.281.011.904,00**							**2.458.967.260,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.281.011.904,00**							**2.458.967.260,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.281.011.904,00**							**2.458.967.260,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**-**			**100 Persen**	**1.972.013.654,00**						**-**	**2.081.983.904,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Desa*	-			0 persen	69.990.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah	-	80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	69.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah		80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang menerima Layanan Jumlah Pelayanan adminsitrasi yang dilaksanakan Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	-			25 Orang 0 layanan 100 Persen	1.411.670.654,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Masyarakat	-	1.634.583.904,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.252.359.654,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Masyarakat		1.464.583.904,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	159.311.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Masyarakat		170.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan yang diberikan Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Umum Persentase peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah*	-			5 Layanan 0 persen 100 Persen	233.613.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan ASN	-	111.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.963.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan ASN		10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	69.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan ASN		80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan ASN		11.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	143.751.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan ASN		10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Penyelenggaraan layanan Umum*	-			14 Orang	246.400.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan ASN	-	246.400.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan ASN		7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	239.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan ASN		239.400.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Barang daerah yang dipelihara Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Umum Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	-			4 Unit 0 persen 100 Persen	10.340.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	-	10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	10.340.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan***	**-**			**B Indek B INDEKS**	**63.990.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan /Dilaksanakan(Rekam E-KTP) Persentase Kegiatan yang telah dilaksanakan Oleh Pemerintah Kepada camat*	-			300 Jiwa 0 persen	63.990.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah	-	70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	63.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daera***	**-**			**68 persen 80 Persen**	**94.433.000,00**						**-**	**115.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Menininghatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*	-			B INDEKS 0 persen	94.433.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah	-	115.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 desa Lembaga Kemasyarakatan	44.768.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	49.665.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		65.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan***	**-**			**100 Persen**	**59.950.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kwalitas Masyarakat akan Nilai nilai Luhur Jiwa Kebangsaan*	-			100 Persen	59.950.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang Orang	59.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan Persentase laporan keuangan desa tepat waktu***	**-**			**100 Persen 59 Persen**	**90.625.250,00**						**-**	**121.983.356,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa Yang Diberi Pembinaan dan Pengawasan*	-			3 Desa	90.625.250,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	3 Desa di wilayah Kecamatan Siberut Tengah	-	121.983.356,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	90.625.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	3 Desa di wilayah Kecamatan Siberut Tengah		121.983.356,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
		KECAMATAN SIBERUT BARAT						**2.155.904.538,00**							**2.670.816.530,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.155.904.538,00**							**2.670.816.530,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.155.904.538,00**							**2.670.816.530,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**1.898.723.538,00**						**100 Persen**	**2.333.163.530,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 persen			12 Dokumen	65.460.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	100 persen	85.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			9 Laporan	65.460.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	85.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang dihasikan*	98 persen			14 Dokumen	1.315.658.838,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	98 persen	1.674.475.530,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan			10 Orang/bulan	1.002.363.838,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Orang/bulan	1.389.475.530,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			48 Dokumen Dokumen	313.295.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Dokumen	285.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Yang dilaksanakan*	100 persen			4 Dokumen	234.485.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	100 persen	219.344.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5.844.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	1 Paket	6.844.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			5 Paket	45.006.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	4 Paket	60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			3 Paket	2.302.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	1 Paket	2.500.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan Laporan			12 Laporan	181.333.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan*	95 persen			5 Unit	39.604.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	95 persen	91.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			4 Unit	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	0 Unit	36.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit			1 Unit	17.404.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	4 Unit	55.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	95 persen			2 Kegiatan	238.344.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	95 persen	248.344.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan Laporan	238.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	248.344.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	85 persen			8 Unit	5.170.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	85 persen	15.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit			5 Unit	5.170.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	6 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**73.230.000,00**						**100 Persen**	**70.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah dokumen Kependudukan*	100 persen			500 Orang	73.230.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	100 persen	70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan			7 Laporan	73.230.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**43.266.000,00**						**100 Persen**	**67.462.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	100 persen			15 Lembaga	43.266.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	100 persen	67.462.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan			15 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	22.460.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	25 Lembaga Kemasyarakatan	32.462.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			1 Laporan Laporan	20.806.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	3 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 Persen**	**25.685.000,00**						**100 Persen**	**105.191.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Konflik Trantibmas yang diselesaikan*	100 persen 100 persen 100 Indeks 100 persen			6 Dokumen	25.685.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	100 persen 100 persen 100 Indeks 100 persen	105.191.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang			100 Orang	3.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	100 Orang	74.960.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen			12 Dokumen Dokumen	22.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	6 Dokumen	30.231.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Terkelolanya Keuangan Pemerintahan Desa yang Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**115.000.000,00**						**100 Persen**	**95.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Peggunaan Aset Desa*	95 persen			30 Dokumen	115.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	95 persen	95.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 Dokumen Dokumen			12 Dokumen Dokumen	115.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	30 Dokumen	95.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
		KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA						**2.184.886.844,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.184.886.844,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.184.886.844,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Pesersentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah***	**-**			**12 Orang**	**1.899.683.844,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 Orang	59.995.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen Laporan	59.995.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan*	-			12 Orang	1.265.672.194,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.115.672.194,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Penyediaan Logistik Kantor, Jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan,Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan*	-			4 Laporan	171.295.650,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	52.477.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.923.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	99.994.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran*	-			2 Laporan	74.527.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	33.092.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	41.435.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa tenaga administrasi, kebersihan kantor, jasa keamanan, operator kapal*	-			4 Dokumen	233.272.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	226.272.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*	-			2 Paket	94.922.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	29.992.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	39.955.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24.975.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Meningkatnya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan***	**-**			**100 Orang**	**42.482.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlaksananya Urusan pemerintahahn yang dilimpahkan*	-			100 Orang	42.482.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	42.482.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***tersedianya layanan pemberdayaan Desa***	**-**			**3 Dokumen**	**69.418.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*tersedianya layanan pemberdayaan Desa*	-			3 Dokumen	69.418.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	34.996.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	34.422.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***tersedianya layanan urusan pemerintahan umum***	**-**			**150 Orang**	**113.305.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*tersedianya layanan urusan pemerintahan umum*	-			150 Orang	113.305.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	88.305.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu***	**-**			**3 Laporan**	**59.998.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*tersedianya layanan fasilitasi dan koordinasi desa*	-			3 Laporan	59.998.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya	-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	59.998.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
		KECAMATAN SIBERUT SELATAN						**3.118.777.762,00**							**3.380.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.118.777.762,00**							**3.380.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.118.777.762,00**							**3.380.400.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.705.544.962,00**						**100 Persen**	**2.907.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan			1 Laporan	47.751.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	2 Laporan	51.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	47.751.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		51.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya Kesejahteraan ASN*	100 Persen			17 Orang/Bulan 100 Persen	1.826.308.432,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	100 Persen	2.000.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.670.394.432,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		1.850.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	155.914.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	100 Persen			1 Laporan 12 Kali/laporan 6 Paket 2 Paket 1 Paket	277.607.250,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	100 Persen	282.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.486.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		11.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	67.532.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		67.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		31.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	162.449.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		163.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	2 Unit			10 unit/tahun	162.862.250,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	0 Unit	165.600.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	35.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		35.600.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	12.103.650,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	115.158.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		120.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Operasinal Perkantoran*	100 Persen			100 Persen	225.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	100 Persen	229.800.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	26.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		30.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	199.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		199.800.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lancarnya Kinerja Administrasi Perkantoran*	100 Persen			5 unit/tahun 100 Persen	165.215.530,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	100 Persen	179.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	80.654.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		81.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9.210.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		16.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	44.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		46.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.651.530,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		36.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan***	**B Indek**			**B Indek**	**72.776.600,00**						**B Indek**	**77.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan*	B Indeks BB Indeks			B Indeks	32.908.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	B Indeks BB Indeks	36.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	32.908.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	1 Dokumen	36.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan*	BB Indeks B Indeks			B Indeks	39.868.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	BB Indeks B Indeks	41.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan			1 Laporan	39.868.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	1 Laporan	41.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan***	**100 persen**			**100 persen**	**120.259.200,00**						**100 persen**	**112.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan*	80 Persen 90 Persen 100 Persen			100 Persen	120.259.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	80 Persen 90 Persen 100 Persen	112.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan			10 Lembaga Kemasyarakatan	29.996.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	41.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			4 Laporan	90.263.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	1 Laporan	71.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**117.102.000,00**						**100 Persen**	**162.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan*	100 Persen			100 Persen	117.102.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	100 Persen	162.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang			50 Orang	87.690.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	50 Orang	131.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	29.412.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	1 Dokumen	31.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu***	**92 Persen**			**88 Persen 90 Persen**	**103.095.000,00**						**92 Persen**	**122.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu*	95 Persen			100 Persen	103.095.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	95 Persen	122.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen			5 Dokumen	67.279.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan	1 Dokumen	81.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	35.816.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		41.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SIPORA UTARA						**2.558.341.082,00**							**3.204.226.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.494.399.282,00**							**3.124.226.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.494.399.282,00**							**3.124.226.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.255.373.082,00**						**100 Persen**	**2.736.776.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan*	100 Persen			100 Persen	1.414.901.182,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN OPD Kecamatan Sipora Utara	100 Persen	1.712.564.300,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.388.261.182,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN OPD Kecamatan Sipora Utara		1.673.564.300,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	26.640.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN OPD Kecamatan Sipora Utara		39.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya Administrasi Umum Daerah*	100 Persen			100 Persen	201.038.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kecamatan Sipora Utara	100 Persen	252.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	21.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kecamatan Sipora Utara		25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	16.888.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kecamatan Sipora Utara		50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	76.472.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kecamatan Sipora Utara		80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	11.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kecamatan Sipora Utara		12.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	74.978.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kecamatan Sipora Utara		85.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen			75 Persen	166.067.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kantor Camat Sipora Utara	100 Persen	177.067.700,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	40.367.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kantor Camat Sipora Utara		40.367.700,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	125.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kantor Camat Sipora Utara		136.700.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan penunjang pemerintahan daerah*	100 Persen			100 Persen	361.216.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Camat dan Pegawai Kontrak Kantor Camat Sipora Utara	100 Persen	374.144.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Camat dan Pegawai Kontrak Kantor Camat Sipora Utara		25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	336.216.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Camat dan Pegawai Kontrak Kantor Camat Sipora Utara		349.144.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen			80 Persen	112.150.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kantor Camat Sipora Utara	100 Persen	220.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.790.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kantor Camat Sipora Utara		68.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	23.010.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kantor Camat Sipora Utara		27.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10.350.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kantor Camat Sipora Utara		25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	28.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kantor Camat Sipora Utara		100.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara***	**B Indek**			**B Indek**	**59.082.200,00**						**B Indek**	**110.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat*	2 Urusan 2 Urusan			2 Urusan	59.082.200,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara	2 Urusan 2 Urusan	110.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				85 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara		60.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				150 Laporan	29.082.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara		50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan***	**62 Persen**			**62 Persen**	**50.249.000,00**						**62 Persen**	**62.450.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	95 Persen			65 Persen	50.249.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara	95 Persen	62.450.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	21.249.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara		30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	29.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara		32.450.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Konflik di wilayah Kecamatan yang ditangani / diselesaikan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**68.145.000,00**						**100 Persen**	**130.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	95 Persen			100 Persen	68.145.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara	95 Persen	130.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				36 Orang	40.145.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara		100.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara		30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu***	**100 % Persen**			**100 % Persen**	**61.550.000,00**						**100 % Persen**	**85.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang terfasilitasi, mendapat rekomendasi dan terawasi*	95 Persen			100 % Persen	61.550.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Desa	95 Persen	85.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	61.550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Desa		85.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	X	**NON URUSAN**						**63.941.800,00**							**80.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**63.941.800,00**							**80.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusun perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**63.941.800,00**						**100 Persen**	**80.000.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	80 Persen 95 Persen			80 Persen	63.941.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	75 Persen 95 Persen	80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	63.941.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
		KECAMATAN SIPORA SELATAN						**3.036.780.284,00**							**3.286.465.605,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.036.780.284,00**							**3.286.465.605,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.036.780.284,00**							**3.286.465.605,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**-**			**100 Persen**	**2.851.185.484,00**						**-**	**3.094.690.805,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			1 Laporan	29.950.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksannya Monitoring dan Evalusai di Tk.Kecamatan	-	29.950.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	29.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksannya Monitoring dan Evalusai di Tk.Kecamatan		29.950.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			24 Orang	2.109.314.484,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.356.095.622,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.040.074.484,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.296.095.622,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23 Dokumen	69.240.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		60.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pekerjaan yang dilaksanakan*	-			5 Paket	119.097.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	122.818.883,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.800.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		999.900,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	60.584.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60.018.983,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	36.794.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Lektop yang tersedia* *Jumlah Pengadaan Lektop yang tersedia*	-			1 unit 4 unit	34.600.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pengadaan Lektop	-	28.338.300,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	34.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pengadaan Lektop		28.338.300,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik*	-			3 Rekening	348.088.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	347.488.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Rekening Laporan	20.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		19.600.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Orang Laporan	327.888.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		327.888.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Gedung bangunan Kantor*	-			2 Paket	210.136.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pemeliharaan Bagunan Gedung Kantor	-	210.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				4 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pemeliharaan Bagunan Gedung Kantor		10.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.136.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pemeliharaan Bagunan Gedung Kantor		200.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Jumlah Pelaksanaan Urusan Pelayanan Publik Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan***	**-**			**100 Persen 75 Laporan 80 Laporan 85 Persen B Indek B Indek**	**45.000.000,00**						**-**	**45.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Efektifitas yang dilaksankan di Tingkat Kecamatan dan Desa*	-			1 Laporan	20.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaam Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Desa	-	20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaam Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Desa		20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan*	-			1 Laporan	25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		5.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan***	**-**			**100 Persen**	**33.819.800,00**						**-**	**39.999.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Perencanaan Pembangunan Pembangunan di Tk Kecamatan*	-			200 Orang	13.819.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Perencanaan Pembangunan	-	19.999.800,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				200 Lembaga Kemasyarakatan	13.819.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Perencanaan Pembangunan		19.999.800,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga yang Bermoral Pancasila*	-			1 Laporan	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penumbuhan Karakter Keluarga yang Bermoralkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 45	-	20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				50 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penumbuhan Karakter Keluarga yang Bermoralkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 45		20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan***	**-**			**100 Persen**	**56.775.000,00**						**-**	**56.775.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Tk Kecamatan* *Jumlah Peserta HUT-RI Tahun 1945* *Jumlah yang Hadir dalam Perayaan HUT-RI 1945*	-			1 Laporan 400 Orang 400 Orang	56.775.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Peningkatan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika	-	56.775.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	46.775.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Peningkatan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika		46.775.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Peningkatan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika		10.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan pengawasan Keuangan dan Aset Desa***	**-**			**100 Persen**	**50.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Pengawasan dan pembinaan Keuangan dan Aset Desa*	-			7 Dessa	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terwujudnya Laporan dan Rekomendasi Pengawasan Keuangan Aset Desa yang tersusun	-	50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terwujudnya Laporan dan Rekomendasi Pengawasan Keuangan Aset Desa yang tersusun		50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
		KECAMATAN PAGAI UTARA						**2.459.634.274,00**							**6.713.558.406,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.445.634.274,00**							**6.702.558.406,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.445.634.274,00**							**6.702.558.406,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.106.298.474,00**						**100 Persen**	**6.190.908.406,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Persentasi Jumlah Kesejahteraan Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	90 Persen			100 Persen 85 Persen	1.417.290.474,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan	90 Persen	1.797.959.406,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan			13 Orang Orang/bulan	1.221.834.474,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan	15 Orang/bulan	1.626.620.106,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			15 Dokumen	195.456.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan	12 Dokumen	171.339.300,00	KECAMATAN PAGAI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	80 persen			75 persen	336.856.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan	80 persen	528.893.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	60.495.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		233.200.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	63.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		64.560.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	12.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		11.133.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	201.261.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		220.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Peningkatan Palayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	95 persen			95 persen	1.152.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan	95 persen	3.500.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.152.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		3.500.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Palayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	80 persen			70 persen	351.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan	80 persen	364.056.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.240.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		13.200.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	338.760.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		350.856.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan*** ***Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan***	**95 Persen**			**95 persen 95 Persen**	**120.500.800,00**						**95 Persen**	**166.400.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan*	-			95 Persen	58.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	-	110.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	58.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		110.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan di kelurahan*	-			12 Lembaga Kemasyarakat	62.100.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	-	56.400.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	62.100.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		56.400.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan***	**-**			**100 % 100 Persen**	**59.544.000,00**						**-**	**181.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Keatuan Republik Indonesia Republik Persentase Konflik Di Wilayah Kecamatan Yang Ditangani/ Diselesaikan*	-			150 Orang 100 Persen	59.544.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	-	181.500.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	54.430.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		148.500.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.114.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		33.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu***	**-**			**90 Persen**	**159.291.000,00**						**-**	**163.750.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang difasiltasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu*	-			3 Dokumen 90 Persen	159.291.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Kelurahan	-	163.750.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	73.884.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Kelurahan		73.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	85.407.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Kelurahan		90.750.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	X	**NON URUSAN**						**14.000.000,00**							**11.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**14.000.000,00**							**11.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**14.000.000,00**						**100 Persen**	**11.000.000,00**	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara sebagai penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	90 persen			90 persen	14.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan	90 persen	11.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	14.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		11.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
		KECAMATAN PAGAI SELATAN						**2.677.368.302,00**							**3.073.521.094,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.677.368.302,00**							**3.073.521.094,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.677.368.302,00**							**3.073.521.094,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.271.372.302,00**						**100 Persen**	**2.622.865.534,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evalusi KInerja Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	99.984.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 Persen	110.982.240,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48 Laporan	99.984.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110.982.240,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	1.434.806.302,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 Persen	1.694.277.274,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.274.806.302,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1.516.677.274,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		177.600.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	321.410.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 Persen	356.787.300,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1.665.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	52.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		58.608.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	49.980.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		18.858.900,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	200.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		222.155.400,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	1.090.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 Persen	1.209.900,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.090.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1.209.900,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	319.032.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 Persen	354.125.520,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		5.328.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	314.232.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		348.797.520,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	100 Persen			100 Persen	95.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 Persen	105.483.300,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		16.650.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	5.030.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		5.583.300,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.020.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		83.250.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan***	**B Indeks**			**B Indeks**	**60.000.000,00**						**B Indeks**	**66.600.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan*	B Indeks			B Indeks	60.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	B Indeks	66.600.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		66.600.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**50.000.000,00**						**100 Persen**	**55.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan*	70 Persen			100 Persen	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	70 Persen	55.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		27.750.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		27.750.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang ditangani/ diselesaikan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**145.996.000,00**						**100 Persen**	**162.055.560,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang ditangani/ diselesaikan*	100 Persen			100 Persen	145.996.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100 Persen	162.055.560,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	95.996.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		106.555.560,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**150.000.000,00**						**100 Persen**	**166.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu*	4 Desa			100 Persen	150.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	4 Desa	166.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		166.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
		KECAMATAN SIKAKAP						**3.127.606.070,00**							**3.534.207.340,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.127.606.070,00**							**3.534.207.340,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.127.606.070,00**							**3.534.207.340,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah***	**-**			**100 persen**	**2.917.035.770,00**						**-**	**3.326.342.340,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Laporan	14.500.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap	-	15.950.000,00	KECAMATAN SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	14.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		15.950.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			28 Orang/bulan	2.477.309.770,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap	-	2.910.916.090,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.280.222.770,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		2.702.928.090,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen Dokumen	197.087.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		207.988.000,00	KECAMATAN SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	-			7 Paket	209.614.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap	-	187.204.250,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket Paket	7.565.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		9.500.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		20.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		50.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	133.329.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		107.704.250,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	-			1 Laporan	205.272.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap	-	202.272.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	33.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		30.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 orang/bulan Laporan	172.272.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		172.272.000,00	KECAMATAN SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kecamatan Sikakap*	-			100 persen	10.340.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap	-	10.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	10.340.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		10.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sikakap*** ***Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah***	**-**			**B Indek** **B Indeks**	**18.480.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* *Persentase terpenuhi dokumen kependudukan masyarakat*	-			1 Laporan 1 Sub Kegiatan 55 persen	18.480.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap	-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	18.480.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		0,00	KECAMATAN SIKAKAP
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*** ***Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan***	**-**			**100 persen** **68 persen**	**50.416.800,00**						**-**	**53.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Layanan Koordinasi Pemberdayaan Desa* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* *Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan* *Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Penberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan*	-			1 Sub Kegiatan 3 Lembaga Kemasyarakat 65 persen 50 persen	50.416.800,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap	-	53.500.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	39.988.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		40.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.428.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		13.500.000,00	KECAMATAN SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*** ***Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan***	**-**			**100 persen** **100 Persen**	**106.773.500,00**						**-**	**109.365.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			1 Layanan 250 Orang	106.773.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap	-	109.365.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	95.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		95.749.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	11.023.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		13.616.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*** ***Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu***	**-**			**100 persen** **90 Persen**	**34.900.000,00**						**-**	**45.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* *Persentasi Jumlah dan Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kecamatan*	-			3 desa 75 persen	34.900.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap	-	45.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Desa Dokumen	34.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		45.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
		KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**2.382.070.374,00**							**4.601.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**2.346.840.374,00**							**4.561.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**2.346.840.374,00**							**4.561.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Parsentase Kebutuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**1.560.629.974,00**						**100 Persen**	**1.991.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kesejahteraan ASN*	20 Persen			100 Persen	990.948.854,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	20 Persen	1.255.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	943.068.854,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		1.200.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	47.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		55.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya sumber daya ASN*	-			70 Persen	3.050.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	-	60.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	3.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		60.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*	100 Persen			100 Pessen	253.260.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asn	100 Persen	300.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3.725.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asn		8.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	77.056.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asn		90.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	12.564.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asn		15.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	9.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asn		12.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	149.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asn		175.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD*	90 Persen			100 Persen	105.226.520,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	90 Persen	150.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	4.331.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN		30.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	100.894.920,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		120.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah*	95 Persen			100 Persen	208.144.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	95 Persen	226.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		26.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	183.144.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		200.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Parsentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	**-**			**100 Persen**	**200.004.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Meningkatnya pemahaman idiologi Pancasila dan karakter Kebangsaan*	-			100 Persen	200.004.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pelajar	-	1.000.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				54 Orang	200.004.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pelajar		1.000.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**	**-**			**-**	**341.138.000,00**						**-**	**750.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Meningkatnya partisipasi masyarakat berdemokrasi*	12 DOKUMEN			85 Parsen	341.138.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Partai Politik	12 DOKUMEN	750.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				9 Dokumen	341.138.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Partai Politik		750.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase ormas aktif***	**85 Persen**			**85 Persen**	**30.068.800,00**						**85 Persen**	**75.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Meningkatnya pengawasan ormas aktif di kabupaten kepulauan mentawai*	90 Persen			85 Persen	30.068.800,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Ormas	90 Persen	75.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	30.068.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Ormas		75.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Parsentase meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, Budaya***	**85 Persen**			**85 Persen**	**99.999.600,00**						**85 Persen**	**320.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Meningkatnya Pemantapan Pelaksaan Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya*	90 Persen			85 Persen	99.999.600,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat	90 Persen	320.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	29.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat		100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	29.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat		100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				20 Orang	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat		120.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Parsentase meningkatnya Kebijakan teknis kewaspadaan Nasional***	**100 Parsen**			**100 Parsen**	**115.000.000,00**						**100 Parsen**	**425.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Meningkatnya Pelaksanaan teknis kewaspadaan nasional*	100 Persen			100 Persen	115.000.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	masyarakat dan tokoh masyarakat	100 Persen	425.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	masyarakat dan tokoh masyarakat		100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	masyarakat dan tokoh masyarakat		100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	masyarakat dan tokoh masyarakat		75.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	masyarakat dan tokoh masyarakat		150.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	X	**NON URUSAN**						**35.230.000,00**							**40.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**35.230.000,00**							**40.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Parsentase Kebutuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah***	**100 Parsen**			**100 Parsen**	**35.230.000,00**						**100 Parsen**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja Pelaksanaan Tupoksi OPD*	95 Persen			100 Parsen	35.230.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	95 Persen	40.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		27.500.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	10.230.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		12.500.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	J U M L A H							**920.980.436.207,00**							**1.034.679.143.132,00**	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RKPD tahun 2025 mengacu pada capaian dan target RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, hal ini dimaksudkan agar penetapan target kinerja RKPD tahun 2025 konsisten dengan target RPD. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian pada Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama

NO	IKU	Target Kinerja	
		2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	62,48	66,15
2	Rata Lama sekolah	7,45 tahun	8,32 tahun
3	Harapan Lama Sekolah	13,18 tahun	13,28 tahun
4	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,58	0,6
5	Angka Harapan Hidup	65,34 tahun	71,28 tahun
6	Prevalensi Stunting	17,00%	31,9%
7	Persentase Penduduk Miskin	14,44%	14,31%
8	Indeks Kinerja Infrastruktur	12%	15%

NO	IKU	Target Kinerja	
		2024	2025
9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	17%	20%
10	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	72%	75%
11	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	75%	78%
12	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	100%
13	Cakupan Layanan Transportasi	83%	85%
14	Cakupan layanan telekomunikasi	88%	90%
15	Rasio Elektrifikasi	86%	88%
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>80	>80
17	Persentase Rumah Layak Huni	43%	45%
18	Jumlah Desa STBM	3 desa	4 desa
19	Indeks Resiko Bencana	190	197,2
20	Pertumbuhan ekonomi	4,27%	4,37%
21	Indek Gini	0,316	0,260
22	Pendapatan Perkapita	Rp.61,82 jt	Rp.67,02 jt
23	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	15%
24	Nilai Investasi	30 miliar rupiah	50 miliar rupiah
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70%	2,65%
26	Tingkat Inflasi	3,50%	3,50%
27	Indek RB	B	B
28	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	35	45
29	Indek Kepuasan masyarakat	82	84
30	Indeks Profesional ASN	82	83
31	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
32	Indeks SPBE	2,2	2,4
33	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
34	Opini BPK	WTP	WTP
35	WBK/WBBM	3 OPD	4 OPD
36	Nilai SAKIP	B	BB
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,55	51,6
38	Jumlah MHA yang dilestarikan	7 MHA	8 MHA
39	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,5	11,8

NO	IKU	Target Kinerja	
		2024	2025
40	Tingkat Kriminalitas	3,5 persen	3,2 persen
41	Tingkat Kabupaten layak Anak	500 (pratama)	550 (pratama)
42	Indek Pembangunan Gender	89,95	90,02

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pada akhir penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan ekonomi	BPS	2,89%	4,27%	4,37%
2	Indek Gini	BPS	0,321	0,316	0,260
3	Pendapatan Perkapita	BPS	Rp.54,80 jt	Rp.61,82 jt	Rp.67,02 jt
4	Persentase Penduduk Miskin	BPS	14,84%	14,44%	14,31%
5	Indeks Pembangunan Manusia	BPS	61,35	62,48	66,15
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS	2,79%	2,70%	1,32%
7	Rata Lama sekolah	BPS	7,20 tahun	7,45 tahun	8,32 tahun
8	Angka Harapan Hidup	BPS	64,73 tahun	65,34 tahun	71,28 tahun
9	Prevalensi Stunting	SGGI	27,3%	17,00%	31,9%
10	Indeks Pembangunan Gender	BPS	89,81	89,95	90,02
ASPEK PELAYANAN UMUM					
I.	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.	**Urusan Pendidikan**				

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19,05%	25%	28%
	b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	100%	100%
	c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	100%	100%
	d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	100%	100%
2.	**Urusan Kesehatan**				
	a. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	70/ 100.000 Penduduk	85/ 100.000 penduduk	90/ 100.000 penduduk
	b. Persentase RS rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	0	1 RSUD	1 RSUD
	c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan	60%	75%	80%
	d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalilnan	Dinas Kesehatan	60%	75%	80%
	e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	60%	75%	80%
	f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinas Kesehatan	60%	75%	80%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	70%	80%	83%
	h. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	75%	82%	85%
	i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	70%	78%	80%
	j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	73%	82%	85%
	k. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	76%	82%	85%
	l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	75%	85%	87%
	m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan	76%	82%	85%
	n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dinas Kesehatan	80%	85%	87%
3.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,20%	5,20%	5,50%
	b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4%	5%	5,20%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20ha	25ha	28ha
	d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40%	47%	49%
	e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26%	31%	33%
	f. Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68%	78%	82%
	g. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7%	11%	12%
	h. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2%	5%	8%
	i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NA	88%	90%
4.	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8%	13%	15%
	b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	NA	2%	3%
	c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5%	12%	15%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tangga Layak Huni)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6500 unit	4500 unit	4000 unit
	e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 kawasan permukiman	1 kawasan permukiman	1 kawasan permukiman
5.	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
	a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%
	b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80%	88%	89%
	c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	60	68%	70%
	d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%
	e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%
	f. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20 menit	15 menit	15 menit
6.	**Urusan Sosial**				
	a. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
	b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan stelah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Perlindungan Anak			
II	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	**Urusan Ketenagakerjaan**				
	a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70%	85%	90%
	b. Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2%	5%	8%
	c. Tingkat produktivitas tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16%	22%	24%
	d. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35%	42%	45%
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
	a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	20%	42%	56%
	b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
		Perlindungan Anak			
3	**Urusan Pangan**				
	a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37,67	52	54
4.	**Urusan Lingkungan Hidup**				
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	>80	>80	>80
	b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5%	7%	9%
	c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	75%	85%	88%
5	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
	a. Perekaman KTP elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95%	99,25%	99,30%
	b. Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70%	78%	80%
	c. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32%	50%	60%
6	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	a. Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35%	26%	23%
	b. Persentase peningkatan status desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11%	12%	14%
7	**Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Bencana**				
	a. TFR (Angka Kelahiran Total)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,25	3,86	3,70
	b. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62%	68%	70%
8	**Urusan Perhubungan**				
	a. Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	75%	82%	85%
9.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				
	a. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	64%	80%	88%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,20%	20%	25%
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,20%	7%	10%
10	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
	a. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	44%	55%	56%
	b. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	1,20%	2%	2%
11	**Urusan Penanaman Modal**				
	a. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,20%	2,10%	2,50%
12	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**				
	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8%	15%	20%
	b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	45%	55%	60%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	c. Peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	NA	5%	8%
13	**Urusan Statistik**				
	a. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	70%	78%	80%
	b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	70%	78%	80%
14	**Urusan Kebudayaan**				
	a. Terlestarikannya cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55%	63%	64%
15	**Perpustakaan**				
	a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	15%	25%	30%
	b. Indeks pembangunan literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	11	11,5	11,8
16	**Urusan Kearsipan**				
	a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10%	35%	45%
	b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai	Dinas Kearsipan dan	NA	15%	20%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Perpustakaan			
17	**Urusan Kelautan Dan Perikanan**				
	a. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Dinas Perikanan	8.694 ton	9.500 ton	10.000 ton
18	**Urusan Pariwisata**				
	a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	10%	13%	15%
	b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang kekabupaten/kota	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	12%	18%	20%
	c. Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0,76%	1%	1,20%
	d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	14%	16%	18%
III	**URUSAN PILIHAN**				
1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				
	Jumlah total produksi perikanan				
	a. Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	8.695 ton	9.500 ton	10.000 ton

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	b. Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	215,14 ton	260 ton	300 ton
2	**Urusan Pariwisata**				
	a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	10%	5%	6%
	b. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	10%	6,5%	7%
	c. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2,57%	2,60%	2,61%
	d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	9,58%	10,98%	11,24%
3	**Urusan Pertanian**				
	a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3,5 ton	4,2 ton	4,5 ton
	b. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100%	100%	100%
4	**Urusan Perdagangan**				
	a. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	15%	30%	35%
	b. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan	63%	75%	80%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	oleh instansi terkait	Perdagangan			
5	**Urusan Perindustrian**				
	a. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	100%	100%	100%
	b. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	NA	1 dokumen	1 dokumen
IV	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
1	**Urusan Kepegawaian**				
	a. Nilai Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	NA	220	240
	b. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,20%	12%	13%
2	**Urusan Manajemen Keuangan**				
	a.Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	Badan Keuangan Daerah	100%	100%	100%
	b. Persentase PAD terhadap total pendapatan	Badan Keuangan Daerah	5,24	8,70%	9,50%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	c.Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	Badan Keuangan Daerah	80%	95%	98%
	d.Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	Badan Keuangan Daerah	72%	81%	83%
3	**URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**				
	a. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	8%	30%	40%
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Tingkat Kriminalitas	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	6 persen	3,5 persen	3,2 persen
2	Rasio Ketergantungan (%)	BPS	62,78	62,35%	62,25%
3	Pengeluaran Perkapita	BPS	6.321 rb rupiah/orang/ tahun	6.536 rb rupiah/orang/ tahun	6.6634 rb rupiah/orang/ tahun

BAB VII

PENUTUP

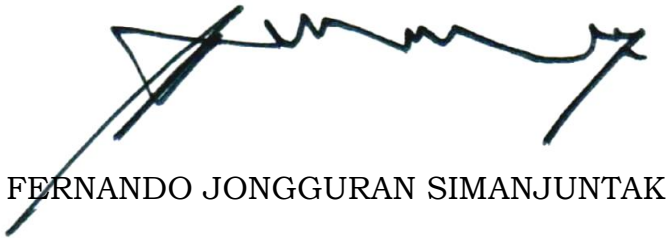
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran tahun 2025, disusun dengan memedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural yang inklusif dan berkelanjutan menjadi fokus pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Tahun 2045. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menitikberatkan pembangunan pada sektor komoditas unggulan dengan pembangunan sumber daya ekonomi, peningkatan produktivitas masyarakat terutama pada hilirisasi komoditas pertanian. Kolaborasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga pemerintah lainnya bersama-

sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia usaha perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2025